

DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009 - 2029



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Dokumen KLHS ini merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 adalah kajian yang bersifat wajib untuk memastikan bahwa Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS ini dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Dokumen KLHS ini memuat karakteristik dan profil wilayah Provinsi Lampung, identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, kajian pengaruh substansi kebijakan dan rencana penataan ruang dalam Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 terhadap lingkungan hidup, rekomendasi perbaikan kebijakan penataan ruang Provinsi Lampung, dan pengintegrasian pelaksanaan KLHS ke dalam revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, serta meningkatkan kualitas penyusunan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Analisis dalam KLHS untuk Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 ini dikendalai oleh berbagai keterbatasan sumberdaya, antara lain ketersediaan data, waktu, dan pembiayaan, sehingga ruang lingkup analisisnya difokuskan kepada aspek-aspek dan substansi prioritas. Harapannya, analisis dapat dilanjutkan seiring dengan makin tersedianya data dan informasi, perubahan situasi, dan perubahan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya dokumen KLHS adalah *living document* yang bersifat dinamis.



Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua sektor terkait, Tim Penyusun KLHS untuk Revisi RTRW Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung serta seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Dokumen KLHS ini. Disadari sepenuhnya bahwa laporan KLHS ini masih mengandung banyak kelemahan. Masukan dari para pihak sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil KLHS ini, terutama dalam hal mengakomodir karakteristik spesifik Provinsi Lampung untuk mencapai Visi Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun maupun pertanyaan dapat disampaikan melalui email: praswil.bappedaprov@gmail.com.

Akhir kata, semoga Dokumen KLHS ini dapat memberi manfaat khususnya sebagai acuan perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam penataan ruang di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat	1-2
1.3 Ruang Lingkup	1-4
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah	1-4
1.3.2 Ruang Lingkup Substansi.....	1-4
1.4 Dasar Hukum.....	1-4
1.5 Metodologi Pelaksanaan Penyusunan Dokumen KLHS.....	1-5
1.6 Sistematika Penulisan	1-9
BAB 2 PROFIL WILAYAH PROVINSI LAMPUNG	2-1
2.1 Profil Wilayah Provinsi Lampung	2-1
2.1.1 Kondisi Fisik Dasar Topografi, Geohidrologi, Jenis Tanah dan Klimatologi.....	2-1
2.1.2 Kondisi Kawasan Lindung	2-13
2.1.3 Kondisi Keanekaragaman Hayati	2-14
2.1.4 Kondisi Kebencanaan Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, Longsor, Gerakan Tanah, Kebakaran Hutan dan Lahan.....	2-15
2.1.5 Kondisi Penurunan Mutu dan Kelimpahan Sumberdaya Alam	2-16
2.1.6 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk	2-17
2.2 Profil Ekoregion Dan Jasa Ekosistem Provinsi Lampung	2-19
2.2.1 Profil Ekoregion Provinsi Lampung	2-19
2.2.2 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Lampung	2-22
2.3 Kebijakan, Rencana, Dan Program	2-34
2.3.1 Kebijakan Rencana Program Nasional.....	2-34
2.3.2 Kebijakan Rencana Program Provinsi.....	2-38
BAB 3 ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS DAN PRIORITAS	3-1
3.1 Isu Pembangunan Berkelanjutan	3-1
3.2 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	3-12
3.3 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	3-17
BAB 4 KAJIAN PENGARUH KRP TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP	4-1
4.1 Analisis Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung.....	4-1
4.1.1 Analisis Pengembangan Pembangkit Listrik terhadap Daya Dukung Lahan	4-2
4.1.2 Analisis Pembangunan Jalan Tol terhadap Daya Dukung Lahan	4-3
4.1.3 Analisis Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama terhadap Daya Dukung Lahan.....	4-5
4.1.4 Analisis Rencana Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) terhadap Daya Dukung Lahan	4-6
4.1.5 Analisis Pengembangan Waduk terhadap Daya Dukung Lahan	4-7
4.1.6 Analisis Daerah Irigasi terhadap Daya Dukung Lahan.....	4-8
4.1.7 Analisis Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian terhadap Daya Dukung Lahan.....	4-9
4.1.8 Analisis Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata terhadap Daya Dukung Lahan	4-10
4.1.9 Analisis Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung terhadap Daya Dukung Lahan.....	4-12

4.1.10	Analisis Rencana Pengembangan Bandara terhadap Daya Dukung Lahan.....	4-13
4.1.11	Analisis Pengoptimalan Bumi Agribisnis terhadap Daya Dukung Lahan.....	4-14
4.1.12	Analisis Pengembangan Kawasan Industri terhadap Daya Dukung Lahan.....	4-14
4.1.13	Analisis Rencana Pengembangan Double Track Rejosari – Perbatasan Sumatera Selatan dan Shortcut Rejosari – Tarahan terhadap Daya Dukung Lahan.....	4-15
4.2	Analisis Jasa Ekosistem Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-16
4.2.1	Analisis Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-16
4.2.2	Analisis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap KRP Provinsi Lampung.....	4-19
4.2.3	Analisis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-21
4.2.4	Analisis Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversitas Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-25
4.2.5	Analisis Jasa Ekosistem Pengatur, Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam Terhadap KRP Provinsi Lampung.....	4-27
4.3	Analisis Resiko Bencana pada KRP Provinsi Lampung.....	4-30
4.4	Pengaruh KRP Terhadap Perubahan Iklim.....	4-41
4.4.1	Struktur Ruang	4-41
4.4.2	Pola Ruang	4-43
4.4.3	Kawasan Strategis.....	4-43
4.5	Pengaruh KRP Terhadap Keanekaragaman Hayati	4-44
4.5.1	Struktur Ruang	4-44
4.5.2	Pola Ruang	4-45
4.5.3	Kawasan Strategis.....	4-45
4.6	Pengaruh KRP Terhadap Rawan Bencana.....	4-46
4.6.1	Struktur Ruang	4-46
4.6.2	Pola Ruang	4-46
4.6.3	Kawasan Strategis.....	4-47
4.7	Pengaruh KRP Terhadap Kualitas Sumberdaya Alam.....	4-47
4.7.1	Struktur Ruang	4-47
4.7.2	Pola Ruang	4-48
4.7.3	Kawasan Strategis.....	4-49
4.8	Pengaruh KRP Terhadap Alih Fungsi Lahan.....	4-49
4.8.1	Struktur Ruang	4-49
4.8.2	Pola Ruang	4-50
4.8.3	Kawasan Strategis.....	4-51
4.9	Pengaruh KRP Terhadap Kemungkinan Terjadi Kemiskinan Penduduk	4-52
4.9.1	Struktur Ruang	4-52
4.9.2	Pola Ruang	4-52
4.9.3	Kawasan Strategis.....	4-53
4.10	Pengaruh KRP terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	4-53
4.10.1	Struktur Ruang	4-53
4.10.2	Pola Ruang.....	4-54
4.10.3	Kawasan Strategis	4-55
4.11	Rekapitulasi Analisis Pengaruh KRP	4-55
4.12	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Lampung	4-66
4.13	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Provinsi Lampung.....	4-68
4.14	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Provinsi Lampung.....	4-69
BAB 5 REKOMENDASI		5-1
5.1	Alternatif Tindakan Penanganan	5-1
BAB 6 INTEGRASI KLHS KE DALAM DOKUMEN RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 - 2029.....		6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	2-2
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung	2-9
Tabel 2.3	Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung	2-9
Tabel 2.4	Jenis Tanah Provinsi Lampung	2-12
Tabel 2.5	Curah Hujan Rata-Rata Tahunan di Provinsi Lampung	2-12
Tabel 2.6	Luas Kawasan Lindung Provinsi Lampung	2-13
Tabel 2.7	Kriteria Kategori Risiko Bencana	2-15
Tabel 2.8	Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	2-15
Tabel 2.9	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung 2011-2015	2-17
Tabel 2.10	Kepadatan dan Distribusi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015	2-18
Tabel 2.11	Luas Ekoregion Provinsi Lampung	2-19
Tabel 2.12	Jenis Jasa Ekosistem	2-21
Tabel 2.13	Jasa Ekosistem Provinsi Lampung	2-22
Tabel 2.14	Sistem Perkotaan Nasional	2-34
Tabel 2.15	Sistem Perkotaan Nasional	2-35
Tabel 2.16	Jenis Bandara di Provinsi Lampung	2-41
Tabel 2.17	Sistem Pusat Kegiatan Provinsi Lampung	2-43
Tabel 2.18	Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Lampung	2-43
Tabel 2.19	Kawasan Konservasi di Provinsi Lampung	2-45
Tabel 2.20	Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Lampung	2-46
Tabel 2.21	Rekapitulasi Program/Kegiatan Pengembangan Cetak Sawah (APBN) di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016	2-47
Tabel 2.22	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Lampung	2-47
Tabel 2.23	Luas Kebutuhan Lahan Ladang Penggembalaan Provinsi Lampung	2-48
Tabel 3.1	Isu Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung	3-3
Tabel 3.2	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	3-14
Tabel 3.3	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	3-19
Tabel 4.1	Hasil Overlay Waduk terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	4-7
Tabel 4.2	Hasil Overlay Daerah Irigasi Terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	4-9
Tabel 4.3	Luas Lahan Pertanian terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung (Ha)	4-10
Tabel 4.4	Hasil Overlay Peruntukan Pariwisata Terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	4-11
Tabel 4.5	Rekapitulasi Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-18
Tabel 4.6	Rekapitulasi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-20
Tabel 4.7	Rekapitulasi Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-23
Tabel 4.8	Rekapitulasi Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversitas Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-26
Tabel 4.9	Rekapitulasi Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana Ala Terhadap KRP Provinsi Lampung	4-29
Tabel 4.10	Rekapitulasi Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi pada KRP Provinsi Lampung	4-30
Tabel 4.11	Rekapitulasi Resiko Cuaca Ekstrim pada KRP Provinsi Lampung	4-31
Tabel 4.12	Rekapitulasi Resiko Tsunami pada KRP Provinsi Lampung	4-32
Tabel 4.13	Rekapitulasi Resiko Tanah Longsor pada KRP Provinsi Lampung	4-33
Tabel 4.14	Rekapitulasi Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan pada KRP Provinsi Lampung	4-35
Tabel 4.15	Rekapitulasi Resiko Kekeringan pada KRP Provinsi Lampung	4-36
Tabel 4.16	Rekapitulasi Resiko Gempa Bumi pada KRP Provinsi Lampung	4-37
Tabel 4.17	Rekapitulasi Resiko Banjir Bandang pada KRP Provinsi Lampung	4-39

Tabel 4.18	Rekapitulasi Rentan Banjir pada KRP Provinsi Lampung	4-40
Tabel 4.19	Analisis Pengaruh Pengembangan Pembangkit Listrik	4-56
Tabel 4.20	Analisis Pengaruh Pembangunan Jalan Tol	4-57
Tabel 4.21	Analisis Pengaruh Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Internasional	4-58
Tabel 4.22	Analisis Pengaruh Rencana Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)	4-59
Tabel 4.23	Analisis Pengaruh Pembangunan Waduk	4-60
Tabel 4.24	Analisis Pengaruh Pengelolaan Daerah Irigasi	4-60
Tabel 4.25	Analisis Pengaruh Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian	4-62
Tabel 4.26	Analisis Pengaruh Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	4-62
Tabel 4.27	Analisis Pengaruh Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung.	4-63
Tabel 4.28	Analisis Pengaruh Dukungan Bumi Agribisnis.....	4-63
Tabel 4.29	Analisis Pengaruh Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata.....	4-64
Tabel 4.30	Analisis Pengaruh Pengembangan Bandar Udara	4-65
Tabel 4.31	Analisis Pengaruh Rencana Pengembangan Double Track dan Shortcut	4-65
Tabel 4.32	Kebutuhan Air Bersih Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2037.....	4-67
Tabel 4.33	Rekapitulasi Program/Kegiatan Pengembangan Cetak Sawah (APBN) diProvinsi Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016	4-68
Tabel 4.34	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Lampung	4-69
Tabel 4.35	Jumlah Penduduk Per Kabupaten Tahun 2015-2037 (Jiwa) dan Luas Peruntukkan Permukiman (Ha).....	4-70
Tabel 4.36	Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2015-2037 (Ha).....	4-70
Tabel 4.37	Rasio Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2017-2037	4-71
Tabel 5.1	Rumusan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program Provinsi Lampung.....	5-2
Tabel 6.1	Integrasi Hasil KLHS ke Dalam Kebijakan/Rencana dan/atau Program RTRW Provinsi Lampung 2009 -2029	6-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi Lampung	2-3
Gambar 2.2	Peta Topografi Provinsi Lampung.....	2-6
Gambar 2.3	Peta Geologi Provinsi Lampung	2-8
Gambar 2.4	Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung	2-10
Gambar 2.5	Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung	2-11
Gambar 2.6	Peta Kawasan Lindung Provinsi Lampung	2-14
Gambar 2.7	Peta Ekoregion Provinsi Lampung	2-20
Gambar 2.8	Jasa Penyedia Pangan Provinsi Lampung	2-23
Gambar 2.9	Jasa Penyedia Air Bersih.....	2-24
Gambar 2.10	Jasa Penyedia Bahan Bakar	2-24
Gambar 2.11	Jasa Penyedia Serat	2-25
Gambar 2.12	Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik	2-25
Gambar 2.13	Jasa Pengaturan Iklim	2-26
Gambar 2.14	Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	2-26
Gambar 2.15	Jasa Pengaturan Pemurnian Air	2-27
Gambar 2.16	Jasa Pengaturan Kualitas Udara.....	2-27
Gambar 2.17	Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit.....	2-28
Gambar 2.18	Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	2-28
Gambar 2.19	Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah	2-29
Gambar 2.20	Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami.....	2-29
Gambar 2.21	Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	2-30
Gambar 2.22	Jasa Budaya Rekreasi dan Ekowisata.....	2-30
Gambar 2.23	Jasa Budaya Estetika	2-31
Gambar 2.24	Jasa Penunjang Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah	2-31
Gambar 2.25	Jasa Penunjang Siklus Hara	2-32
Gambar 2.26	Jasa Penunjang Produksi Primer	2-32
Gambar 2.27	Jasa Penunjang Biodiversitas.....	2-33
Gambar 4.1	Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung.....	4-2
Gambar 4.2	Peta Pengembangan Pembangkit Listrik terhadap Daya Dukung Lahan	4-3
Gambar 4.3	Peta Pembangunan Jalan Tol (Ruas Terbanggi Besar – Pematang) terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	4-4
Gambar 4.4	Peta Pembangunan Jalan Tol (Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar) terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	4-5
Gambar 4.5	Peta Pelabuhan Utama terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung.....	4-6
Gambar 4.6	Peta Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	4-7
Gambar 4.7	Peta Pengembangan Waduk terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	4-8
Gambar 4.8	Peta Daerah Irigasi Terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung.....	4-9
Gambar 4.9	Peta Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi	4-10
Gambar 4.10	Peta Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pariwisata terhadap Daya Dukung Lahan Proovinsi Lampung	4-11
Gambar 4.11	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung.....	4-12
Gambar 4.12	Peta Rencana Pengembangan Bandar Udara terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung.....	4-13
Gambar 4.13	Peta Rencana Pengembangan Double Track Rejosari – Perbatasan Sumatera Selatan dan Shortcut Rejosari – Tarahan Terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	4-15

Gambar 4.14	Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 1	4-17
Gambar 4.15	Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 2	4-17
Gambar 4.16	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 1	4-19
Gambar 4.17	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 2.....	4-20
Gambar 4.18	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 1	4-22
Gambar 4.19	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 2	4-23
Gambar 4.20	Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversitas Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 1 .	4-25
Gambar 4.21	Jasa Ekosistem Penyedia Biodiveritas Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 2 ..	4-26
Gambar 4.22	Jasa Ekosistem Pengatur, Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian I	4-28
Gambar 4.23	Jasa Ekosistem Pengatur, Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 2.....	4-28
Gambar 4.24	Peta Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Lampung	4-31
Gambar 4.25	Peta Resiko Cuaca Ekstrim Provinsi Lampung	4-32
Gambar 4.26	Peta Resiko Tsunami Provinsi Lampung.....	4-33
Gambar 4.27	Peta Resiko Tanah Longsor Provinsi Lampung.....	4-35
Gambar 4.28	Peta Resiko Kebakara Hutan dan Lahan Provinsi Lampung	4-36
Gambar 4.29	Peta Resiko Kekeringan Provinsi Lampung	4-37
Gambar 4.30	Peta Resiko Gempa Bumi Provinsi Lampung.....	4-38
Gambar 4.31	Peta Resiko Banjir Bandang Provinsi Lampung	4-39
Gambar 4.32	Peta Kerentanan Banjir Provinsi Lampung	4-41
Gambar 4.33	Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2015	4-72
Gambar 4.34	Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2017	4-72
Gambar 4.35	Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022	4-73
Gambar 4.36	Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2027	4-73
Gambar 4.37	Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2032	4-74
Gambar 4.38	Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2037	4-74
Gambar 6.1	Peran KLHS dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	6-2
Gambar 6.2	Pendekatan Pelaksanaan KLHS	6-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat isu-isu lingkungan yang terus-menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di samping itu, KLHS wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

KLHS adalah proses untuk menelaah suatu dampak Kebijakan, Rencana atau Program terhadap lingkungan. KLHS juga dapat menelaah kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan Kebijakan, Rencana atau Program. Kesemuanya ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana atau program dimana output KLHS adalah suatu dokumen telaah (*assessment document*) yang disertai dengan suatu saran untuk kebijakan, rencana atau program tergantung pada kedudukan dan sasaran penyelenggaraan KLHS. Kedudukan ini perlu ditegaskan karena kebijakan, rencana atau program mempunyai aneka kedudukan dalam berbagai tingkat. Misalnya di tingkat Provinsi, ada Kebijakan dan Rencana pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah oleh Gubernur. Kedudukan inilah yang menentukan bagaimana proses penyelenggaraan KLHS, siapa yang harus dilibatkan dan dimana serta bagaimana bentuk keterlibatannya tersebut.

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan

dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan.

Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas RTRW maka KLHS menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. KLHS dapat menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Bappeda Provinsi Lampung akan melaksanakan “Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RTRW Provinsi Lampung” memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RTRW Provinsi Lampung.

1.2 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat

Tujuan utama penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan terhadap lingkungan hidup dan kemudian mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Lampung. Proses dan hasil pelaksanaan KLHS akan memberi kontribusi perbaikan materi Rencana Tata Ruang melalui:

- a. Penelaahan dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan dan rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- b. Pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung.

Untuk mencapai tujuan yang di atas, maka sasaran dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RTRW Provinsi Lampung adalah :

- a. Kajian Kebijakan pengembangan wilayah dan Evaluasi/Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
- b. Relevansi data dan informasi yang dianalisis dengan karakter draft kebijakan, rencana dan program (KRP) yang ditelaah. Untuk KLHS yang berdimensi spasial (KLHS untuk RTRW) dibutuhkan data dan analisis yang lebih cermat untuk wilayah-wilayah

- yang telah mengalami kerusakan sumber daya alam yang tinggi (misal kawasan lindung, habitat satwa liar).
- c. Analisis konsekuensi atau pengaruh lingkungan yang akan timbul. Bagian ini bisa dikatakan merupakan jantung analisis dari KLHS.
 - d. Identifikasi upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang akan timbul. Ada dua hal penting yang harus masuk dalam telaahan KLHS. Pertama, upaya mencegah dampak negatif dan meningkatkan dampak positif harus menjadi bagian yang integral dari KRP. Prinsip kehati-hatian harus menjadi panduan bagi formulasi KRP bila KRP dimaksud berpotensi membangkitkan resiko lingkungan yang tinggi. Kedua, hierarki pengelolaan lingkungan (pencegahan, pengurangan, dan pengendalian limbah) sejauh mungkin diaplikasikan secara penuh untuk mengatasi dampak yang bersifat negatif.
 - e. Inventarisasi isu lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengembangan wilayah Provinsi Lampung.
 - f. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah Provinsi Lampung dalam pengembangan konteks regional.
 - g. Rekomendasi kebijakan penggunaan sumber daya dan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Lampung.

Adapun manfaat yang didapat dari penyusunan Dokumen KLHS ini adalah :

- a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan;
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia;
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi;
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan;
- e. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi;
- f. Melindungi aset-aset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan; dan
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ini, dilakukan di Provinsi Lampung serta mengakomodir seluruh wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang akan digunakan sebagai *review/evaluasi* RTRW Provinsi Lampung.

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi

Materi yang akan dibahas pada penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rapermen Lingkungan Hidup Kehutanan Tentang Pedoman Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dimana dijabarkan pada rincian lingkup kegiatan sebagai berikut.

Tahapan Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup:

- a. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan
- b. Isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis
- c. Identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada Lingkungan Hidup
- d. Analisis pengaruh hasil isu pembangunan berkelanjutan prioritas dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)
- e. Rumusan alternatif
- f. Penyusunan rekomendasi

1.4 Dasar Hukum

Landasan hukum atau peraturan dalam kegiatan penyusunan dokumen KLHS Provinsi Lampung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2003-2029.

7. Rapermen Lingkungan Hidup Kehutanan Tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8. *Draft* Peraturan Menteri ATR Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah

1.5 Metodologi Pelaksanaan Penyusunan Dokumen KLHS

Pada subbab ini akan dibahas terkait dengan metodologi kajian yang dilakukan berupa upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam acuan kebijakan pembangunan tata ruang di Provinsi Lampung.

A. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara untuk menentukan isu yang paling strategis. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Sebelum melakukan penghimpunan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, dilakukan suatu pengumpulan awal isu-isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan isu-isu di Provinsi Lampung berasal dari dokumen-dokumen terdahulu yang sudah ada sebagai data awal. Identifikasi dan perumusan isu ditujukan untuk menemukan akar masalah dan tipologi isu-isu yang diangkat.

B. Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Paling Strategis

Isu-isu yang menjadi fokus pada dokumen sebelumnya dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah mengumpulkan isu-isu terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu identifikasi dan perumusan isu untuk mendapatkan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis terkait dengan lingkungan hidup. Identifikasi yang dilakukan terhadap isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Karakteristik wilayah

Pertimbangan unsur karakteristik wilayah yaitu dengan mempertimbangan peta RBI, Pola Ruang dan Penggunaan Lahan. Langkah yang dilakukan dalam upaya pengkajian yaitu dengan mengkaji isu terhadap pertimbangan tersebut. Pertama yaitu mempertimbangkan isu terhadap peta RBI untuk melihat cakupan wilayah isu termasuk kedalam lokasi dan jenis topografi. Kemudian selanjutnya mengkaji isu terkait dengan menganalisis pola ruang pada cakupan wilayah isu dan selanjutnya yaitu mengkaji terkait dengan jenis penggunaan lahan pada cakupan wilayah isu.

b. Tingkat pentingnya potensi dampak

Potensi dampak adalah unsur pertimbangan kedua yang dibutuhkan sebagai parameter dalam menilai isu pembangunan berkelanjutan sebagai upaya penapisan isu menjadi isu pembangunan berkelanjutan paling strategis. Langkah yang dilakukan untuk melakukan

penilaian terhadap isu pembangunan berkelanjutan yaitu dengan cara menentukan prediksi terhadap peluang atau potensi dampak yang dapat ditimbulkan berdasarkan jangkauan dampak yang dihasilkan dan frekuensi dampak yang ditimbulkan.

- c. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
Unsur pertimbangan yang ketiga yaitu menganalisis dengan menggunakan keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan. Langkah yang dilakukan yaitu dengan cara mengkaji antara isu pembangunan berkelanjutan yang saling terkait berdasarkan pada sebab dan akibat.
- d. Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
Unsur pertimbangan yang keempat adalah dengan melakukan pengkajian isu pembangunan berkelanjutan terhadap Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang tercantum dalam dokumen yang akan dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mengkaji isu dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan kesamaan lokasi atau potensi pengaruhnya.
- e. Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Unsur pertimbangan yang kelima yaitu dengan meninjau keterkaitan dengan muatan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang dilakukan untuk melakukan pengkajian yaitu dengan cara menilai isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan ketersediaan rencana pengelolannya.
- f. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya
Unsur terakhir yang keenam yaitu dengan mempertimbangkan hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana dan/atau Program pada hirarki di atasnya. Tetapi dikarenakan tidak ada KLHS pada setingkat RTRWN, hal ini kami lakukan dengan melakukan pengkajian pada muatan dalam RTRWN.

Setelah keseluruhan unsur pertimbangan ditelaah dan dilakukan pengkajian dibutuhkan penilaian secara keseluruhan untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas. Metode yang dilakukan untuk melakukan penilaian yaitu dengan menentukan skor pada masing-masing hasil analisis yang dilakukan. Nilai yang melebihi skor tertinggi dapat diindikasikan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis.

C. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Selanjutnya hasil kajian isu pembangunan berkelanjutan terpilih sebagai isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas dikaji kembali. Unsur pertimbangan yang digunakan untuk melakukan pengkajian untuk menilai isu pembangunan berkelanjutan prioritas yaitu dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- b. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
- d. Intenstas dan cakupan wilayah bencana alam

- e. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam
- f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin
- i. Risiko terhadap kesehatan
- j. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu.

Metode penilaian yang dilakukan yaitu dengan cara menentukan pembobotan tingkat prioritas isu. Skor tertinggi mengindikasikan isu pembangunan tersebut terpilih menjadi isu paling prioritas.

D. Identifikasi materi muatan KRP yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh pada Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 pada pasal 10 bahwa identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang akan disusun, atau menelaah seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berlaku yang akan dievaluasi. Materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Analisis materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilaksanakan dengan menentukan lingkup, metode, teknik, dan kedalaman analisis berdasarkan sebagai berikut :

- a. Jenis dan tema Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
- b. Tingkat kemajuan penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
- c. Relevansi dan kedetilan informasi yang dibutuhkan
- d. Input informasi KLHS dan kajian Lingkungan hidup lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu
- e. Ketersediaan data

Analisis Kebijakan, Rencana dan/atau Program dilakukan dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

- a. Perubahan iklim
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan hayati;
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran dan lahan
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau

- g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap parameter dengan cara menilai dampak. Berbeda dengan penilaian isu pembangunan berkelanjutan yaitu menggunakan pembobotan, penilaian Kebijakan, Rencana dan/atau Program dilakukan dengan cara menilai berdasarkan dampak positif atau negatif terhadap parameter.

E. Analisis Pengaruh Hasil Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dengan Materi Muatan KRP

Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan pengkajian dengan membandingkan antara materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program dengan isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas. Selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan tingkat pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas.

F. Rumusan Alternatif

Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berupa sebagai berikut :

- a. Perubahan tujuan dan target
- b. Perubahan strategi pencapaian target
- c. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan.
- d. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan.
- e. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan
- f. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
- g. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

G. Penyusunan Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memuat hal sebagai berikut :

- a. Materi perbaikan Kebijakan, Rencana , dan/atau Program; dan/atau
- b. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Secara umum bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi, dasar hukum sebagai pedoman dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, metodologi pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan sistematika penyajian.

BAB II Profil Wilayah Dan Kebijakan Rencana Program Provinsi Lampung

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah Provinsi Lampung meliputi profil wilayah Provinsi Lampung, profil ekoregion Provinsi Lampung, serta Kebijakan, Rencana, dan Program Provinsi Lampung.

BAB III Isu Pembangunan Berkelanjutan, Isu Strategis Dan Isu Prioritas Provinsi Lampung

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian isu-isu pembangunan berkelanjutan Provinsi Lampung terkait lingkungan hidup, isu strategis dan isu prioritas berdasarkan hasil analisis pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan.

BAB IV Kajian Pengaruh KRP Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Pada bab ini menguraikan analisis yang dilakukan meliputi analisis daya dukung lahan, analisis jasa ekosistem, analisis pengaruh KRP, serta proyeksi daya tampung lahan Provinsi Lampung.

BAB V Rekomendasi

Pada bab ini menjabarkan rumusan alternatif dan rekomendasi usulan yang dapat mempengaruhi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian dan/atau alternatif baru untuk Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029.

BAB VI Integrasi KLHS Ke Dalam Dokumen RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

Pada bab ini menjelaskan pengintegrasian pelaksanaan KLHS ke dalam revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, serta meningkatkan kualitas penyusunan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB 2

PROFIL WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

2.1 Profil Wilayah Provinsi Lampung

2.1.1 Kondisi Fisik Dasar Topografi, Geohidrologi, Jenis Tanah dan Klimatologi

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 33.628,03 Km² (Badan Informasi Geospasial, 2016), sementara itu luas Provinsi Lampung termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas adalah sebesar 51.991 Km². Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda;
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa; dan
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Pada tahun 2009 telah disusun Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 yang disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010, secara administratif Provinsi Lampung dibagi ke dalam 14 (sebelas) Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

1. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota Menggala;
2. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukota Liwa;
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukota Gunung Sugi;
4. Kabupaten Lampung Timur berIbukota Sukadana;
5. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu;
6. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung;
7. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukota Kalianda;
8. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukota Kotabumi;
9. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedung Tataan;
10. Kota Bandar Lampung;
11. Kota Metro;

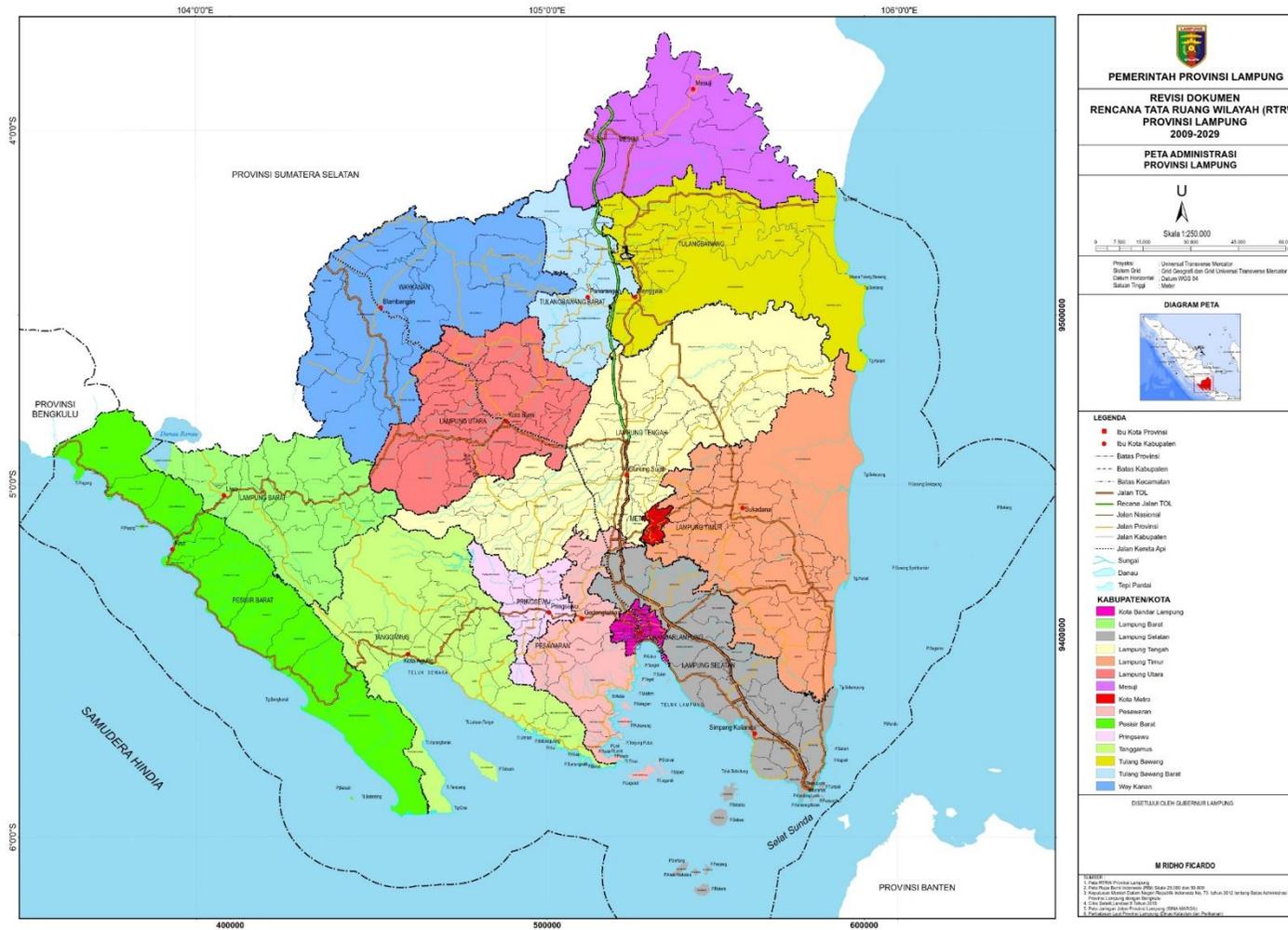
12. Kabupaten Pringsewu dengan Ibukota Pringsewu;
13. Kabupaten Mesuji dengan Ibukota Mesuji; dan
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Ibukota Panaragan.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui yang secara administratif meliputi 11 kecamatan dan 116 desa (di Pesisir Barat, desa biasa disebut Pekon) dan 2 kelurahan, sehingga saat ini secara administratif Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten dan 2 kota. Semua batas wilayah antar kabupaten/kota telah definitif disepakati bersama, kecuali untuk batas wilayah administrasi antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang (belum ada kesepakatan yang definitif), karena itu perlu adanya tindak lanjut untuk menetapkan batas administrasi kedua kabupaten tersebut. Peta Administrasi Provinsi Lampung disajikan dalam Gambar 2.1, dan luas wilayah administrasi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Luas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

No.	KAB/ KOTA	Luas (Ha)
1	Kabupaten Tulangbawang	313.074,28
2	Kabupaten Lampung Tengah	454.400,21
3	Kabupaten Tulangbawang Barat	124.759,03
4	Kabupaten Lampung Timur	386.527,17
5	Kabupaten Lampung Utara	252.954,22
6	Kota Metro	7.315,38
7	Kabupaten Pesawaran	127.911,40
8	Kabupaten Pringsewu	61.447,57
9	Kota Bandar Lampung	18.325,68
10	Kabupaten Lampung Selatan	221.952,68
11	Kabupaten Tanggamus	290.270,82
12	Kabupaten Lampung Barat	212.603,25
13	Kabupaten Pesisir Barat	304.613,37
14	Kabupaten Waykanan	366.070,58
15	Kabupaten Mesuji	220.577,13
Provinsi Lampung		3.362.802,75

Sumber: Luas wilayah diukur di atas Peta Rupa Bumi Indonesia (BIG) skala 1:25.000, tahun 2016



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Lampung

Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung

A. Kondisi Topografi

Secara topografi, Wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) satuan morfologi, yaitu:

1. Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8% hingga 15%, dan ketinggian antara 300 meter sampai 500 meter dpl. Kawasan ini meliputi Wilayah Gedong Tataan, Kedaton, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta Adirejo dan Bangunrejo di Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pesisir pantai sebelah Timur Provinsi Lampung. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 25 hingga 75 mdpl dengan kemiringan 0% hingga 3%;
3. Rawa pasang surut di sepanjang pesisir pantai Timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 mdpl;
4. Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Tulang Bawang, DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Semangka, dan DAS Way Jepara.

B. Kondisi Geohidrologi

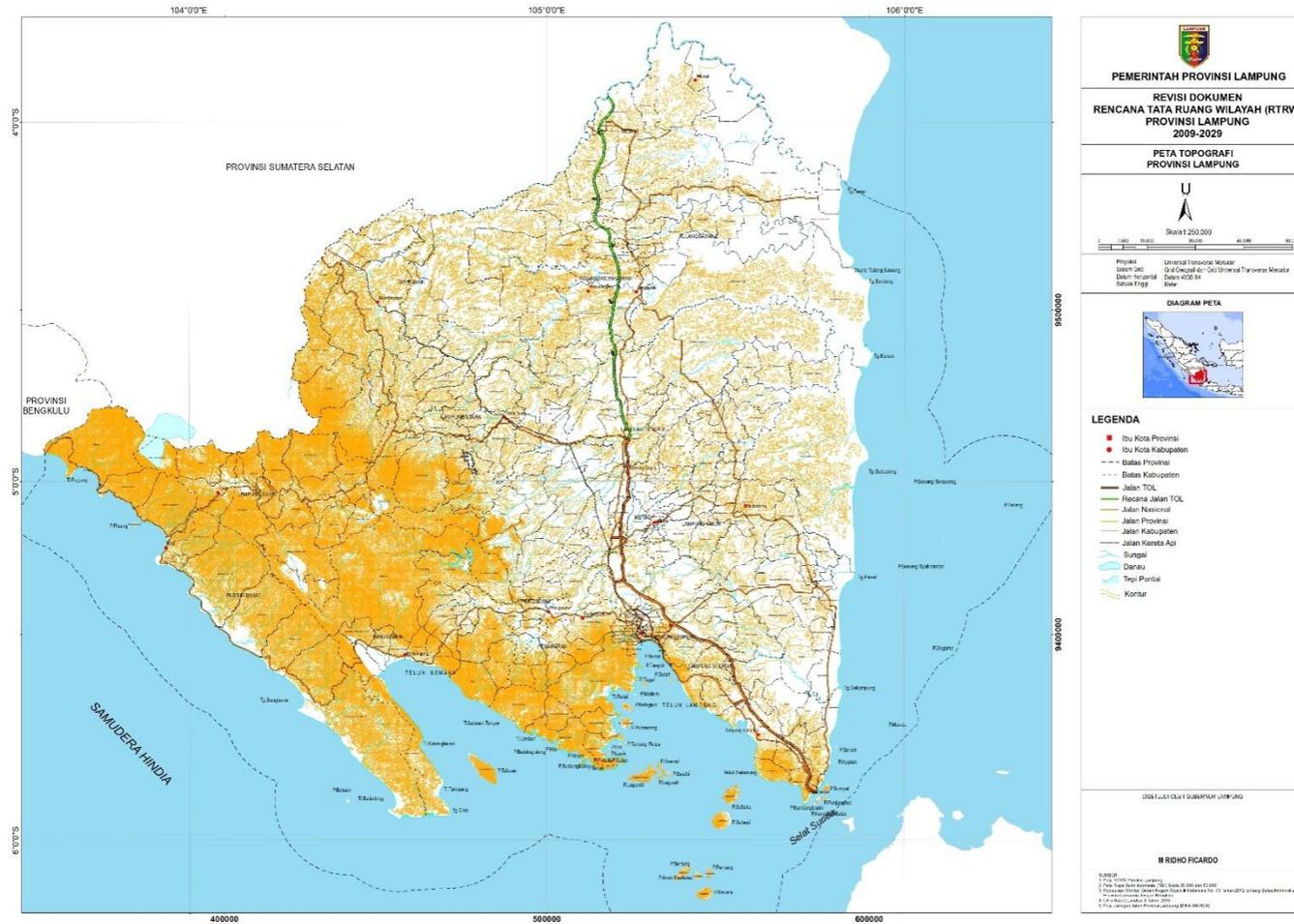
1. Kondisi Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari *sekis*, *genes*, *filit*, *kuarsit*, dan *pualam* yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks *Gunungkasih (Ptgm)*. Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra-Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama *Formasi Menanga (Km)*. Hasil temuan fosil pada batu gamping menunjukkan umur bagian tersebut tersingkap di jalur Bukit Barisan dan bersentuhan secara tektonik, diterobos oleh batuan *granitoid/batuan terobosan mesozoik*, diterobos oleh batuan *granitoid/batuan terobosan Mesozoik akhir* yang berumur 88 juta tahun yang lalu (kapur akhir, Katili, 1973). Batuan *malihan* terdapat pula secara setempat dan terbatas di sekitar batuan terobosan.

Breksi dan *konglomerat* aneka bahan yang mengandung rombakan *Formasi Menanga* dan *Kompleks Gunungkasih* dipetakan sebagai *Formasi Sabu (Tpos)* dan *Formasi Campang (Tpoc)*. Umur kedua formasi ini belum diketahui, berdasarkan posisi *stratigrafi* diperkirakan berumur *Paleosen-Oligosen Awal*. *Litologi formasi campang* ini terdiri dari perselingan batu *lempung*, *serpih*, *kalkarenit*, *tuf* dan *breksi* dengan ketebalan ± 1.000 sd 1.500 meter. Diendapkan di lingkungan *turbidit* di laut, di tepi pantai sampai daerah kegiatan gunung api. Terlipat kuat dengan sumbu barat laut-tenggara, kemiringan berkisar 25° – 70° . Ditafsirkan diendapkan bersamaan waktu dengan formasi tarahan dan termasuk Satuan Gunung Berapi *Efusiva*.

Batuan gunung api berkomposisi *andesitik (lava, breksi, tufa)* yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai *Formasi Tarahan (Tpot)*, diperkirakan setara dengan *Formasi Kikim* yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan *Paleosen Tengah-Oligosen Awal*. *Litologi tuf* dan *breksi* dikuasai oleh sisipan *tufit*, diendapkan di lingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan *formasi kikim*. Kondisi ini ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap. Keberadaannya

sering disebut sebagai bukti penunjaman (*subduction*) di sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. *Formasi Sabu, Formasi Campang* dan *Formasi Tarahan* tersingkap di Jalur Bukit Barisan, *Batuan Granit–Granodiorit* yang menerobos *Batuan Granitoid Kapur Akhir* menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (*Eosen – Oligosen*).



Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Lampung

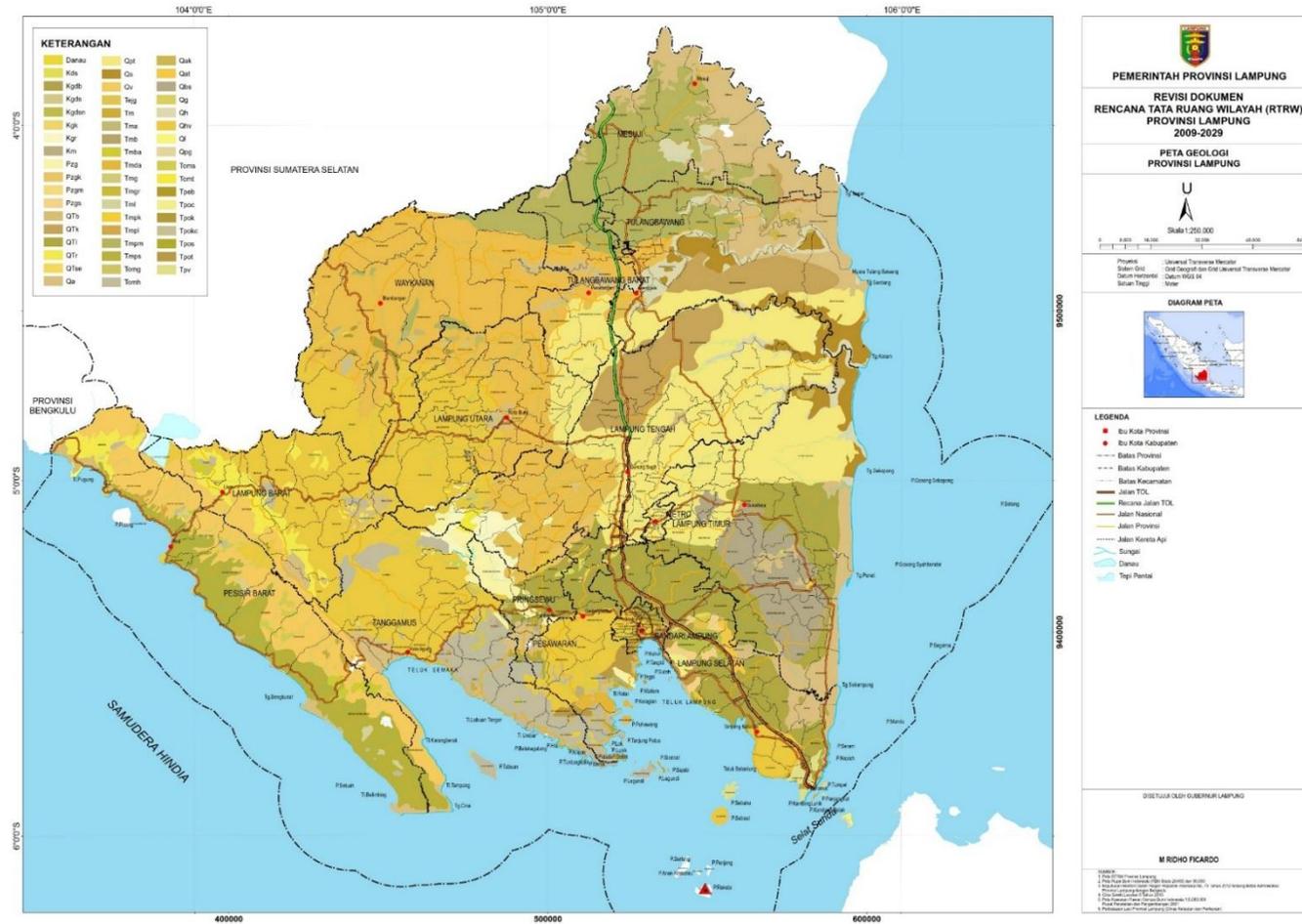
Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman Oligosen Akhir-Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan *Formasi Baturaja (Tmb)* terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang gampingan.

Tektonik yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), kegiatan gunung api di jalur Bukit Barisan yang dicerminkan oleh *Formasi Bal(Tmba)* terdiri dari breksi gunung api bersusunan dasit, tufa dasitan dan sisipan batupasir dan sedimentasi vulkanik klastik laut dangkal di jalur Bengkulu yang dicerminkan oleh *Formasi Lemau (Tml)* terdiri dari Batu pasir tufaan gampingan, batu lempung gampingan dengan sisipan tipis atau bintal batu gamping, mengandung foraminifera dan moluska. Aktivitas gunung api di jalur Bukit Barisan menerus pada Miosen Akhir–Pliosen yang membentuk *Formasi Lakitan (Tmpl)* terdiri dari breksi gunung api bersusunan andesitik/basaltik, epalitik sedikit dasitan, tufa dan batu pasir tufaan dan menindih secara tak selaras *Formasi Bal*, sedang di jalur Bengkulu terbentuk *Formasi Simpangaur (Tmps)* terdiri dari batu pasir tufaan, tufa, batu lempung tufaan, batu gamping, konglomerat aneka batuan, mengandung moluska dan cangkang karang, yang menindih secara selaras *Formasi Lemau*.

Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi–Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batu pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu terkesikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa pasiran, batu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh *formasi Kasai, Ranau, Lampung* selama Pliosen Akhir–Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi–Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi Wilayah Provinsi Lampung, disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada Gambar 2.3 di bawah ini.

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Lampung

Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung

2. Kondisi Hidrologi

Provinsi Lampung memiliki 3 (tiga) Wilayah Sungai (WS) meliputi WS Mesuji – Tulang Bawang, WS Seputih – Sekampung dan WS Semangka. Sumber daya air tawar di Provinsi Lampung tersebar di 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS). Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara dan sebagian Tanggamus. DAS di Provinsi Lampung beserta luasnya dapat di lihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung

No	DAS	Luas (Km ²)
1	DAS Jepara	2.232
2	DAS Mesuji	3.365
3	DAS Sekampung	5.187
4	DAS Semangka	6.521
5	DAS Seputih	6.776
6	DAS Tulang Bawang	9.346

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) 2015

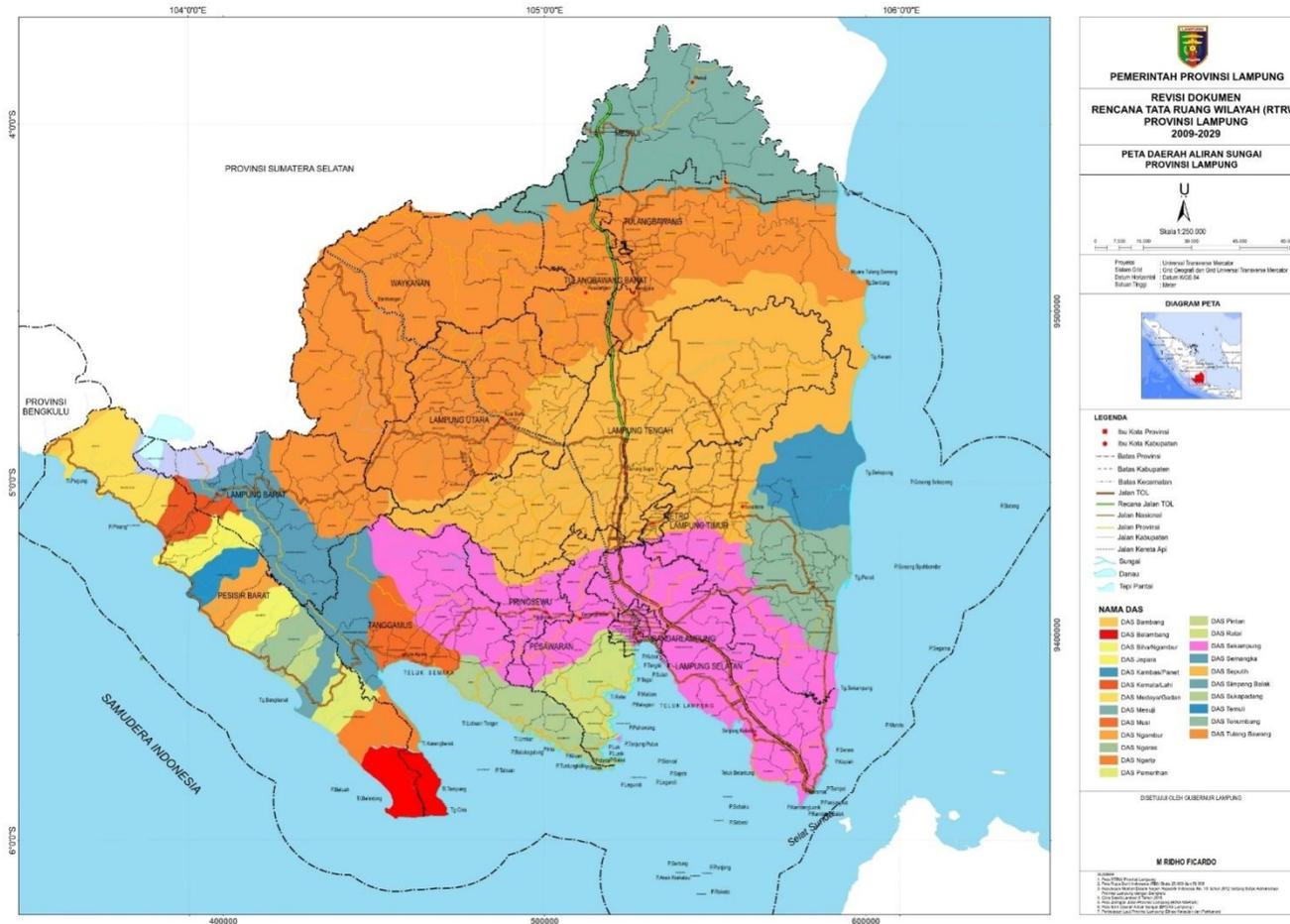
Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing – masing CAT di Provinsi Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini:

Tabel 2.3
Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

NO	NAMA CAT	Luas Cat (Ha)	Lokasi Cat
1	CAT Bandar Lampung	44.381,32	Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung selatan, Tanggamus
2	CAT Talang Padang	60.964,60	Pringsewu, tanggamus
3	CAT Kalianda	23.543,92	Lampung Selatan
4	CAT Batu Raja	43.019,06	Way Kanan
5	CAT Metro-Kotabumi	2.040.169,77	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat Way kanan
6	CAT Kota Agung	279.955,88	Lampung Barat, pesisir barat, Pesawaran, Pringsewu, tanggamus, Lampung Barat
7	CAT Ranau	78.893,68	Lampung Barat, pesisir barat

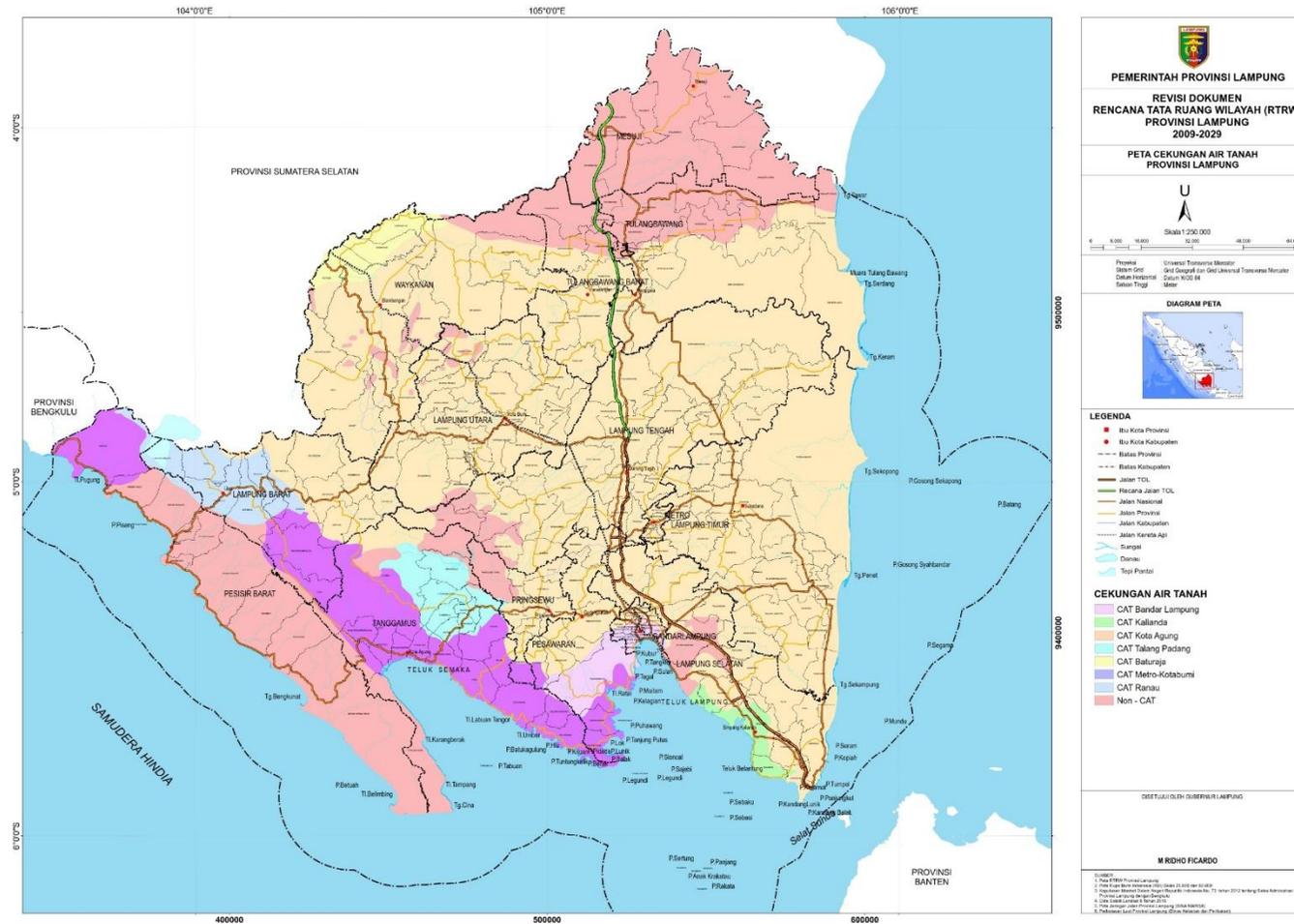
Sumber: Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, diukur di atas Peta RBI, 2016

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung



Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung

C. Jenis Tanah

Jenis tanah di Provinsi Lampung terdiri dari 6 jenis tanah yaitu *Aluvial*, *Andosol*, *Gambut*, *Granit*, *Kuarsit* dan *Laterit*. Dengan jenis tanah yang dominan yaitu *Aluvial* sekitar 182.380,42 Ha dan jenis tanah paling kecil adalah *Gambut* dengan luas sekitar 9.167,22 Ha, lihat Tabel 3.2.

Tabel 2.4
Jenis Tanah Provinsi Lampung

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial	190.667,86
2	Andosol	11.148,36
3	Gambut	9.167,22
4	Granit	182.380,42
5	Kuarsit	30.817,11
6	Laterit	91.619,95

Sumber : Badan Informasi Geospasial (BIG)

D. Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm, sebagaimana diperlihatkan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini.

Tabel 2.5
Curah Hujan Rata-Rata Tahunan di Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Curah Hujan Rata – Rata Tahunan (Mm)				
			<1.500	2.000-2.500	2.500 – 3.000	3.000-3.500	>3.500
1	Bandar Lampung		-	809,92	1.023,00	-	-
2	Lampung Barat		-	151,90	151.900,00	9.383,00	7.811,00
3	Lampung Selatan		-	13.979,00	7.517,80	-	-
4	Lampung Tengah	6.629,00		21.711,00	17.095,00	-	-
5	Lampung Timur		-	15.378,00	23.271,80	-	-
6	Lampung Utara	0,76		10.179,00	13.196,00	1.919,00	-
7	Mesuji		-	19.560,00	2.362,40	-	-
8	Metro		-	0,03	731,50	-	-
9	Pesawaran		-	6.996,37	5.545,42	-	-
10	Pesisir Barat		-	14,80	11.160,00	18.510,01	309,70

No	Luas Wilayah (Ha) Kab/Kota	Curah Hujan Rata – Rata Per Tahun (Mm)				
		<1.500	2.000- 2.500	2.500 – 3.000	3.000- 3.500	>3.500
11	Pringsewu	1.696,00	1.202,09	3.251,98	-	-
12	Tanggamus	2.917,00	7.331,79	18.390,00	38.558,00	-
13	Tulangbawang	-	20.820,00	10.461,10	-	-
14	Tulangbawang Barat	-	-	1.281,00	11.190,00	-
15	Waykanan	-	15.226,00	17.684,49	3.637,49	-

Sumber: BMKG Provinsi Lampung, 2016

2.1.2 Kondisi Kawasan Lindung

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sangat penting diperhatikan adalah mempertahankan keberlanjutan lingkungan sejalan dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan-pembangunan. Pembangunan dan keberlanjutan lingkungan selalu menjadi dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi suatu wilayah membutuhkan pembangunan untuk menggerakkan perekonomian dan memajukan wilayah namun di satu sisi lingkungan harus dipertahankan secara berkelanjutan. Dalam proses pembangunan program-program sebagai upaya pengembangan wilayah melalui penataan ruang yang terencana harus dapat terkontrol keberlangsungannya. Paling utama adalah proses pembangunan tidak mengganggu keberlanjutan alam salah satunya adalah kawasan lindung di Provinsi Lampung, Kawasan lindung merupakan kawasan yang sangat terbatas bahkan tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut sebelum melakukan analisa kajian lebih lanjut, diperhatikan terlebih dahulu tumpangannya antara KRP dan pola ruang (kawasan lindung). Luasan dari sebaran kawasan lindung di Provinsi Lampung sebagai berikut.

Tabel 2.6

Luas Kawasan Lindung Provinsi Lampung

Kawasan Lindung		
Kawasan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Provinsi Lampung (%)
Cagar Alam	2.882,88	0,09
Cagar Alam Laut	29.020,90	0,86
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)	121.278,32	3,61
Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	136.611,54	4,07
Hutan Lindung	319.651,18	9,52
Hutan Produksi	170.032,54	5,07
Hutan Produksi Terbatas	28.922,36	0,86
Suaka Alam/Pelestarian Alam	1.373,55	0,04
Suaka Margasatwa	4.155,82	0,12
Taman Hutan Rakyat	21.699,32	0,65
Taman Nasional	380.248,74	11,43
Total	1.219.256,93	36,32

2.1.4 Kondisi Kebencanaan Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, Longsor, Gerakan Tanah, Kebakaran Hutan dan Lahan

Beberapa wilayah di Provinsi Lampung termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam, yaitu bencana alam banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami, kebakaran hutan, dan gunung api. Kawasan-kawasan rawan bencana di Provinsi Lampung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan;
2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur;
3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung;
4. Bencana banjir tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kawasan rawan bencana Gunung Api Anak Krakatau;
6. Kawasan rawan bencana alam geologi (potensi gerakan tanah) tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu sesar Semangko.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2013) risiko bencana di Provinsi Lampung termasuk kategori risiko sedang dan tinggi (lihat tabel dan gambar berikut di bawah ini).

Tabel 2.7
Kriteria Kategori Risiko Bencana

Skor Total	Kelas	Kategori Risiko Bencana
<130	1	Rendah
131 – 143	2	Sedang
>143	3	Tinggi

Sumber: BNPB 2013

Tabel 2.8
Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
1	Lampung Barat	214	Tinggi
2	Tanggamus	201	Tinggi
3	Lampung Selatan	187	Tinggi
4	Lampung Timur	183	Tinggi
5	Lampung Tengah	131	Sedang
6	Lampung Utara	131	Sedang
7	Way Kanan	131	Sedang
8	Tulang Bawang	144	Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
9	Pesawaran	182	Tinggi
10	Pringsewu	182	Tinggi
11	Mesuji	120	Sedang
12	Tulang Bawang Barat	120	Sedang
13	Pesisir Barat	-	-
14	Kota Bandarlampung	182	Tinggi
15	Kota Metro	114	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2.1.5 Kondisi Penurunan Mutu dan Kelimpahan Sumberdaya Alam

Provinsi Lampung dengan luas daratan lebih kurang 3,5 juta ha memiliki berbagai tipologi ekosistem yang beranekaragam, seperti kawasan hutan, laut dan pesisir, pulau-pulau kecil, rawa banjiran, sungai, dan lain-lain. Di Provinsi Lampung juga terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, baik cagar alam, taman nasional, dan taman hutan rakyat; demikian pula telah ditetapkannya beberapa kawasan sebagai hutan lindung. Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Lampung memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora, fauna, maupun jenis-jenis hidupan lainnya.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi berdasarkan PP No.7/1999 pada tahun 2012 masing-masing berjumlah 58 untuk tumbuhan dan 74 untuk satwa liar (Tabel SD-9). Satwa liar yang dilindungi terdiri dari berbagai jenis satwa yang termasuk dalam kelas mamalia, aves (burung), reptilia, pisces (ikan), insekta (serangga), dan anthozoa.

Menurut Wiryawan dkk (2002), di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terdapat berbagai jenis vegetasi hutan hujan tropika basah yang membentang di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan. Di dataran tinggi dan dataran rendah TNBBS ini umumnya vegetasi didominasi oleh tumbuhan marga *Lauraceae*, *Dillentaceae*, *Dipterocarpaceae*, *Myrtaceae* dan *Fagaceae*. Di hutan pantai terdapat bunga bangkai (*Amorphophalus sp*) sebagai bunga bangkai tertinggi di dunia dan bunga raflesia (*Rafflesia arnoldi*) yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Di wilayah TNBBS bagian barat yang berbatasan dengan pemukiman penduduk terdapat zona penyangga berupa hutan damar (*Shorea javanica*) yang menghasilkan resin. Resin damar ini memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya dan merupakan produk khas Kabupaten Lampung Barat.

Berbeda dengan TN BBS, Taman Nasional Way Kambas memiliki berbagai tipe vegetasi rendah seperti hutan pantai, mangrove, hutan gambut dan rawa pasang surut, rawa air asin, serta hutan dataran rendah. Pada hutan pantai berpasir banyak ditumbuhi oleh cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), waru (*Hibiscus tiliaceus*), ketapang (*Terminalia catappa*) dan pandan duri (*Pandanus spinosus*). Vegetasi hutan mangrove yang terdapat di muara sungai didominasi oleh api-api (*Avicennia sp*), buta-buta (*Bruguira sp*), dan semakin ke hulu dijumpai formasi nipah (*Nypa sp*), nibung (*Oncosperma tigilaria*), palem merah (*Cyrtostachys lakka*), gelam (*Malaleuca spp*), dan rengas (*Gluta renghas*). Pada areal yang lebih tinggi dan relatif tidak berupa rawa terdapat jenis pohon perwakilan dari tipe vegetasi hutan hujan dataran

rendah, seperti minyak (*Dipterocarpus retutus*), merawan (*Hopea sp*), meranti (*Shorea sp*), jabon (*Anthocephalus chinensis*), puspa (*Schima wallichii*) dan sempur (*Dillenia excelsa*) yang membentuk hutan sekunder (Wiryawan dkk, 2002).

Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung tersebar di berbagai habitat yang merupakan wilayah TN Way Kambas, TNBBS, hutan lindung di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Tanggamus, hutan pantai, hutan rawa serta di perairan laut. Menurut Wiryawan dkk (2002) jenis-jenis fauna yang terdapat di kawasan konservasi di Provinsi Lampung meliputi berbagai mamalia, aves, reptilia, amfibi dan reptilia seperti yang tertera pada tabel di bawah. Jenis-jenis mamalia yang dilindungi antara lain adalah anjing hutan, badak Sumatera, beruang madu, harimau Sumatera, kucing emas, macan dahan, berang-berang, kerbau liar, kambing hutan, tapir, rusa sambar, kijang, kancil, napu, gajah, dan lain-lain. Sayangnya tidak ada data jumlah masing-masing spesies mamalia tersebut sehingga tidak diketahui secara pasti status populasinya hingga saat ini di Provinsi Lampung.

2.1.6 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Penduduk adalah aspek utama perencanaan. Perencanaan dibuat untuk penduduk karena penduduk yang akan merasakan akibat dari perencanaan tersebut. Oleh karena itu, dalam lingkup perencanaan, penduduk tidak mungkin dapat terpisahkan dari sistem perencanaan tata ruang. Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2015 (BPS, 2016) mencapai 8.117.268 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu sebesar 1.239.096 jiwa. Jumlah penduduk per kabupaten selanjutnya dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut di bawah ini.

Tabel 2.9
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	Tahun					LPP (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Lampung Barat	280.320	283.091	287.588	290.388	293.105	0,94
2	Tanggamus	542.439	548.728	560.322	567.172	573.904	1,19
3	Lampung Selatan	922.397	932.552	950.844	961.897	972.579	1,11
4	Lampung Timur	961.971	968.004	988.277	998.720	1.008.797	1,01
5	Lampung Tengah	1.183.427	1.192.958	1.214.720	1.227.185	1.239.096	0,97
6	Lampung Utara	590.620	594.562	598.924	602.727	606.092	0,56
7	Way Kanan	410.532	415.078	423.195	428.097	432.914	1,13
8	Tulang Bawang	402.226	410.725	417.782	423.710	429.515	1,37
9	Pesawaran	403.178	407.475	416.372	421.497	426.389	1,16
10	Pringsewu	369.336	370.157	379.190	383.101	386.891	0,99
11	Mesuji	189.442	191.221	192.759	194.282	195.682	0,72
12	Tulang Bawang Barat	253.429	255.833	259.674	262.316	264.712	0,91
13	Pesisir Barat	143.266	144.682	146.929	148.412	149.890	0,99
14	Bandar Lampung	891.374	902.885	942.039	960.695	979.287	1,94
15	Metro	147.050	149.361	153.517	155.992	158.415	1,55

No	Kabupaten/Kota	Tahun					LPP (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
Total		7.691.007	7.767.312	7.932.132	8.026.191	8.117.268	1,13

Sumber: BPS – Provinsi Lampung dalam Angka, 2016.

Tabel 2.10
Kepadatan dan Distribusi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Penduduk		Jumlah	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	Laki - Laki	Perempuan			
Kabupaten					
Lampung Barat	155.804	137.301	293.105	3,61	138,72
Tanggamus	299.214	274.690	573.904	7,07	210,25
Lampung Selatan	499.385	473.194	972.579	11,98	1.799,37
Lampung Timur	516.079	492.718	1.008.797	12,43	207,70
Lampung Tengah	630.962	608.134	1.239.096	15,26	381,27
Lampung Utara	308.083	298.009	606.092	7,47	322,42
Way Kanan	223.116	209.798	432.914	5,33	120,57
Tulang Bawang	222.380	207.135	429.515	5,29	119,90
Pesawaran	219.587	206.802	426.389	5,25	242,18
Piringsweu	198.304	188.587	386.891	4,77	725,64
Mesuji	102.417	93.265	195.682	2,41	138,61
Tulang Bawang Barat	135.811	128.901	264.712	3,26	209,16
Pesisir Barat	78.693	71.197	149.890	1,85	52,88
KOTA					
Bandar Lampung	493.411	485.876	979.287	12,07	3.942,91
Metro	79.191	79.224	158.415	1,95	2.619,03
Lampung	4.162.437	3.954.831	8.117.268	100	275,80

Sumber: BPS – Provinsi Lampung dalam Angka, 2016

Pada tahun 2015 kepadatan penduduk di Provinsi Lampung adalah sebesar 275,80 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 3.942 jiwa/Km² (karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang memiliki kelengkapan sarana prasarana dan aksesibilitas wilayah), sedangkan kepadatan penduduk terendah (2015) terdapat di Kabupaten Pesisir Barat yaitu hanya sebesar 52,88 jiwa/Km². Penduduk Provinsi Lampung sebagian besar terkonsentrasi di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebanyak 15,26% sedangkan konsentrasi penduduk paling kecil terdapat di Kabupaten Pesisir Barat.

2.2 Profil Ekoregion Dan Jasa Ekosistem Provinsi Lampung

2.2.1 Profil Ekoregion Provinsi Lampung

Berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2009, ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 7 ayat 2, menetapkan bahwa terdapat 8 (delapan) pertimbangan untuk penetapan batas ekoregion yaitu dengan mempertimbangkan kesamaan: bentang lahan (*landscape*); daerah aliran sungai; iklim; flora fauna; sosial budaya; ekonomi; kelembagaan; dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Berdasarkan analisis dan kesepakatan para ahli, 8 faktor/parameter tersebut telah ditentukan bahwa parameter yang digunakan sebagai deliniator untuk penetapan ekoregion Provinsi Lampung berupa parameter yang sifatnya statis, dalam hal ini adalah parameter bentang alam yaitu morfologi (bentuk muka bumi) dan morfogenesis (asal usul pembentukan bumi). Sedangkan parameter lainnya terutama yang sifatnya dinamis (penggunaan lahan) digunakan sebagai atribut untuk mendeskripsikan karakter ekoregion tersebut.

Dalam skala nasional, wilayah Provinsi Lampung termasuk dalam ekoregion Pulau Sumatera. Pembagian ekoregion secara lebih rinci untuk wilayah Provinsi Lampung ini antara lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai: 1). Unit analisis dalam penetapan DD dan DT lingkungan; 2). Dasar dalam memberikan arah untuk penetapan RPPLH; 3). Acuan dalam memperkuat kerjasama; dan 4). Pengendalian pelestarian jasa ekosistem lingkungan.

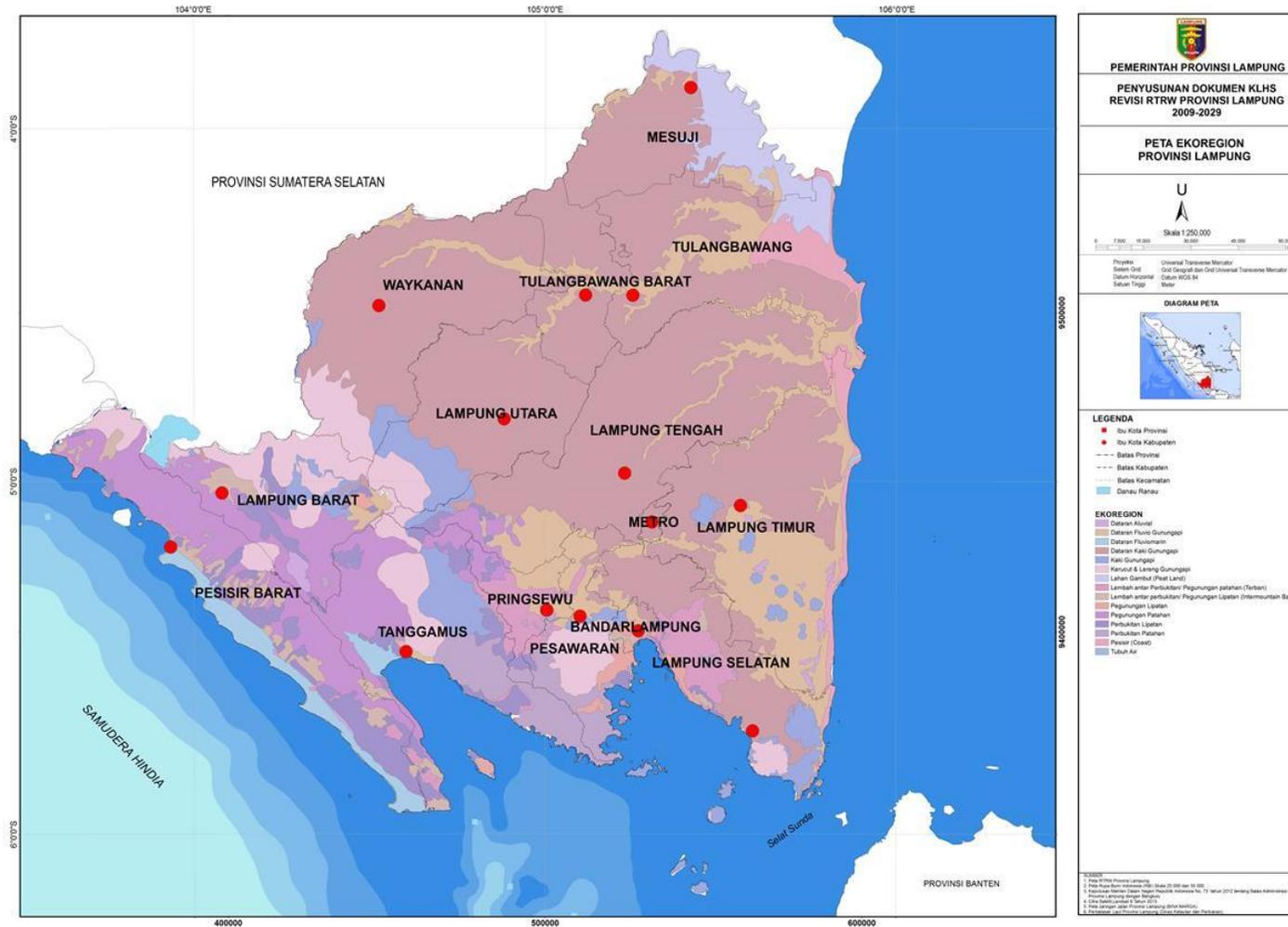
Pembagian deliniasi ekoregion Provinsi Lampung diklasifikasikan berdasarkan karakteristik geomorfologinya, sehingga menghasilkan 14 (empat belas) kelas ekoregion yang kemudian ditampilkan dalam bentuk peta. Peta tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5. Klasifikasi ekoregion Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 4.2. Ekoregion Provinsi Lampung yang dihasilkan merupakan ekoregion pulau (darat) dan memiliki lingkup wilayah administratif sebanyak 2 kota dan 13 kabupaten. Peta ekoregion provinsi yang dihasilkan memiliki skala 1 : 250.000.

Tabel 2.11
Luas Ekoregion Provinsi Lampung

EKOREGION	Luas (Ha)
Perbukitan Patahan	101.714,90
Tubuh Air	126,71
Dataran Fluvio Gunungapi	424.056,36
Dataran Aluvial	13.609,57
Dataran Fluviomarin	60.249,07
Lahan Gambut (<i>Peat Land</i>)	97.270,57
Pesisir (<i>Coast</i>)	73.335,26
Dataran Kaki Gunungapi	1.570.966,24
Lembah antar Perbukitan/ Pegunungan patahan (<i>Terban</i>)	90.581,59
Kaki Gunungapi	156.453,91
Pegunungan Lipatan	22.906,78
Pegunungan Patahan	297.987,80
Kerucut & Lereng Gunungapi	236.432,46
Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (<i>Intermountain Basin</i>)	61.761,76
Perbukitan Lipatan	136939,28

Sumber : DDTLH Provinsi Lampung, 2017

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 2.7 Peta Ekoregion Provinsi Lampung

2.2.2 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Lampung

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12
Jenis Jasa Ekosistem

No.	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Definisi Operasional
A. Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1.	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2.	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3.	Serat (fiber) gas rumah kaca dan karbon	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4.	Bahan bakar (fuel)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
B. Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
1.	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2.	Pengaturan tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3.	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4.	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5.	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6.	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7.	Pengaturan penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8.	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
C. Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)		
1.	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah, peninggalan leluhur
2.	Tempat tinggal dan ruang hidup (sense of place)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar "kampung halaman" yang punya nilai sentimental
3.	Rekreasi dan ecotourism	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4.	Ikatan budaya, adat, pola hidup	Keterikatan komunitas dan hubungan sosial, pelestarian keragaman budaya (misalnya komunitas

		nelayan, komunitas adat, masyarakat pedalaman, dll.)
5.	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
6.	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
D.	Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)	
1.	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2.	Siklus hara (nutrient)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3.	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Jasa ekosistem Provinsi Lampung terdiri dari 20 Jasa ekosistem yang terdiri dari 5 Jasa Ekosistem Penyedia (Pangan, Air Bersih, Serat, Bahan Bakar dan Sumber Daya Genetik), 8 Jasa Pengaturan (Iklim, Tata Aliran Air dan Banjir, Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam, Pemurnian Air, Pengolahan dan Penguraian Limbah, Pemeliharaan Kualitas Udara, Pengaturan Penyerbukan Alami, dan Pengendalian Hama dan Penyakit), 3 Jasa Ekosistem Budaya (Tempat Tinggal dan Ruang Hidup, Rekreasi dan Ekowisata, serta Estetika atau Keindahan Alam), dan 4 Jasa Ekosistem Penunjang (Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, Siklus Hara, Produksi Primer dan Biodiversitas). Berikut luasan mengenai jasa ekosistem dan peta jasa ekosistem di Provinsi Lampung.

Tabel 2.13
Jasa Ekosistem Provinsi Lampung

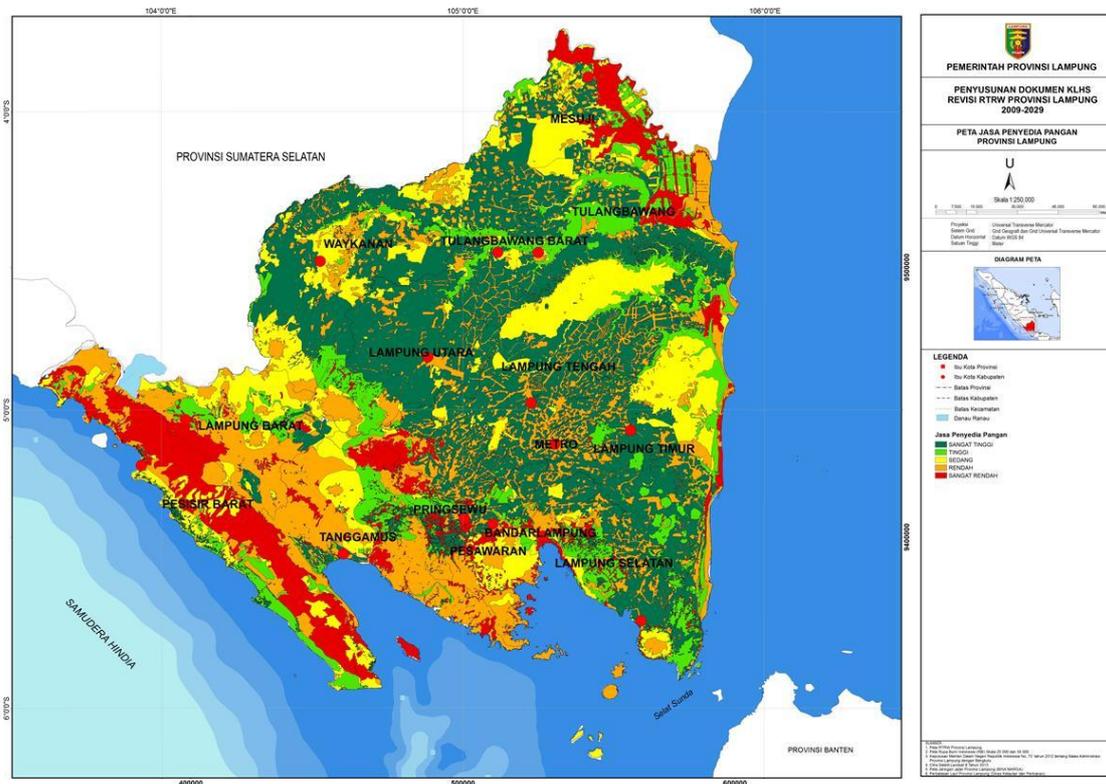
Jasa Ekosistem	Luas (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi
Jasa Penyedia					
Air Bersih	738.396,01	556.323,16	1.205.194,02	163.392,63	708.308,47
Pangan	372.212,11	791.483,75	401.383,92	632.978,01	1.173.556,50
Serat	595.210,30	688.216,48	479.129,89	1.143.217,93	465.839,69
Bahan Bakar	352.580,44	276.073,68	824.292,41	1.430.404,57	488.263,19
Sumber Daya Genetik	372.694,48	767.564,26	1.731.492,60	245.468,63	254.394,31
Jasa Pengaturan					
Iklim	506.942,41	1.258.818,52	894.748,93	549.916,09	161.188,35
Tata Aliran Air dan Banjir	43.842,72	477.615,02	1.630.830,62	890.684,71	328.641,22
Pemurnian Air	159.328,87	770.165,50	1.671.209,02	530.982,55	239.928,35
Pengaturan Kualitas Udara	460.760,92	2.054.155,40	382.174,59	260.523,28	214.000,11
Pengendalian Hama dan Penyakit	459.265,87	589.376,12	1.814.516,59	467.615,44	40.840,28
Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	352.594,91	595.175,01	461.431,62	1.887.273,63	75.139,13
Pengolahan dan Penguraian Limbah	263.430,21	896.488,66	417.164,11	1.343.650,62	450.880,70
Penyerbukan Alami	409.303,57	590.563,84	656.401,37	1.711.482,00	3.863,51
Jasa Budaya					

DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

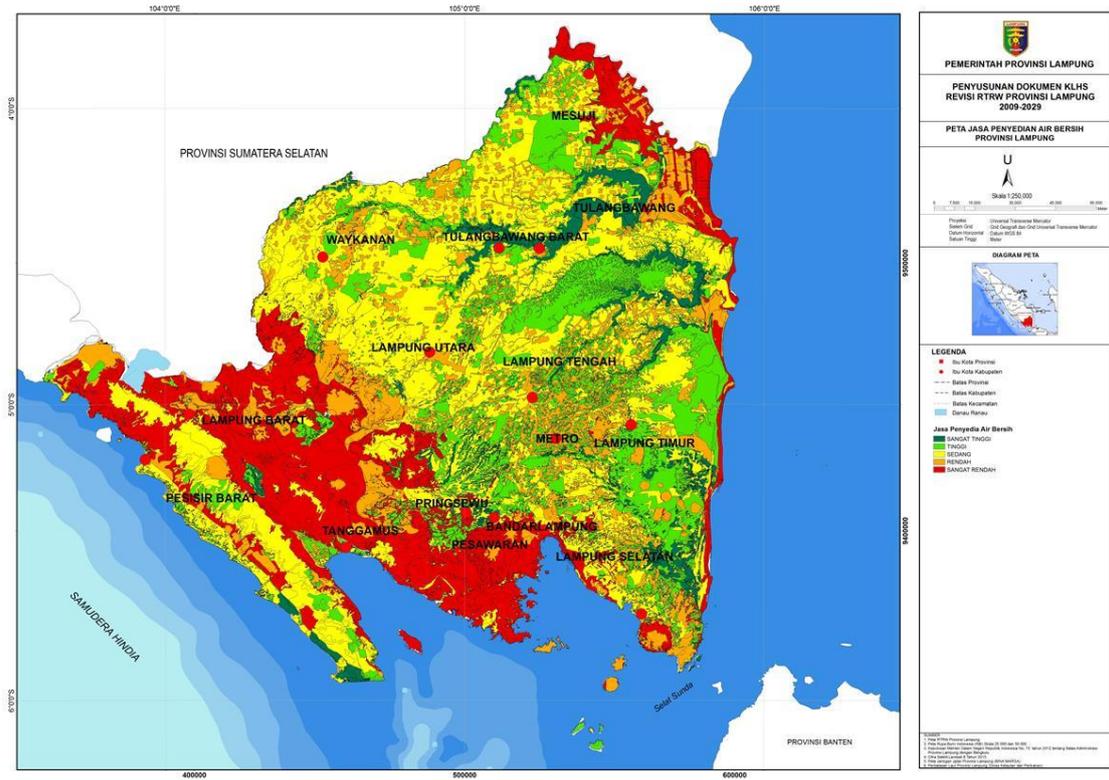
Jasa Ekosistem	Luas (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi
Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	282.085,54	227.173,08	663.770,62	886.170,64	1.312.414,42
Rekreasi dan Ekowisata	1.668.699,92	718.903,85	159.959,18	571.553,20	252.498,15
Estetika	1.507.873,87	908.688,79	149.803,09	524.514,65	280.733,89
Jasa Penunjang					
Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	81.230,40	800.688,71	473.679,31	516.325,00	1.499.690,88
Siklus Hara	247.346,37	761.149,06	619.355,47	1.712.282,92	31.480,48
Produksi Primer	425.256,60	694.576,15	1.349.455,90	869.352,79	32.972,86
Biodiversitas	435.518,52	515.690,46	1.906.833,11	367.714,72	145.857,49

Sumber : DDDLH Pulau Sumatera

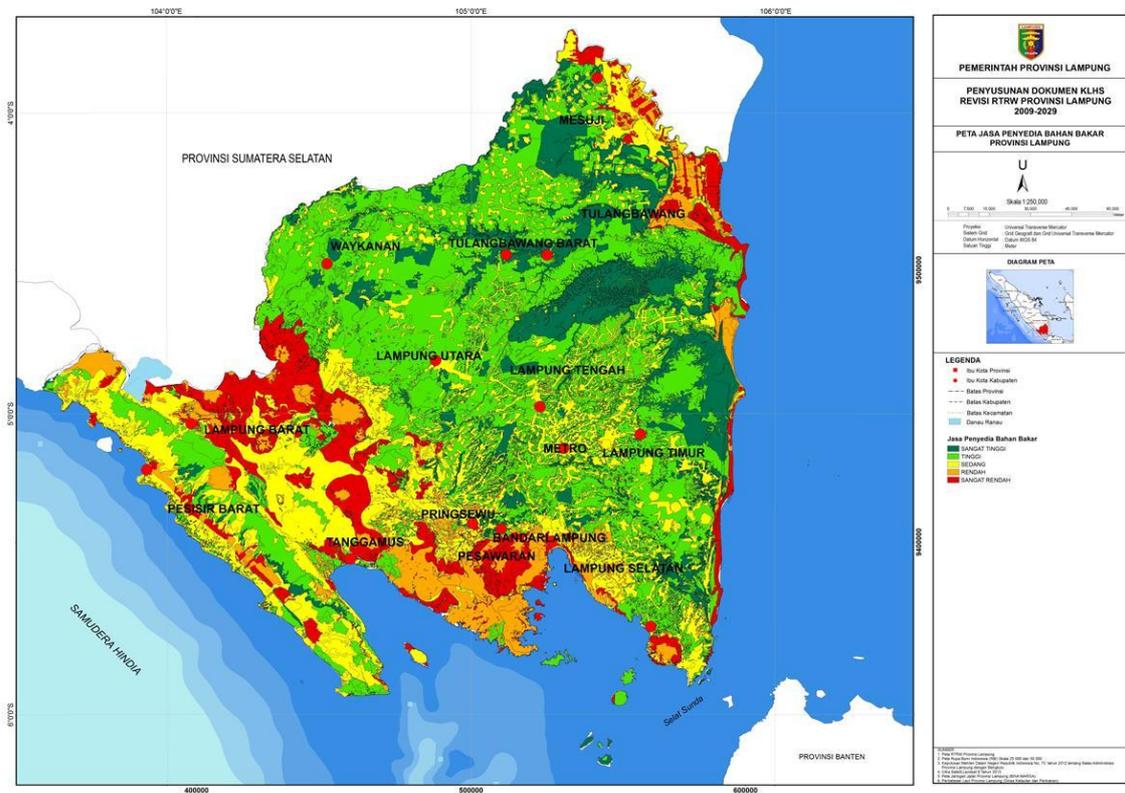


Gambar 2.8 Jasa Penyedia Pangan Provinsi Lampung

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

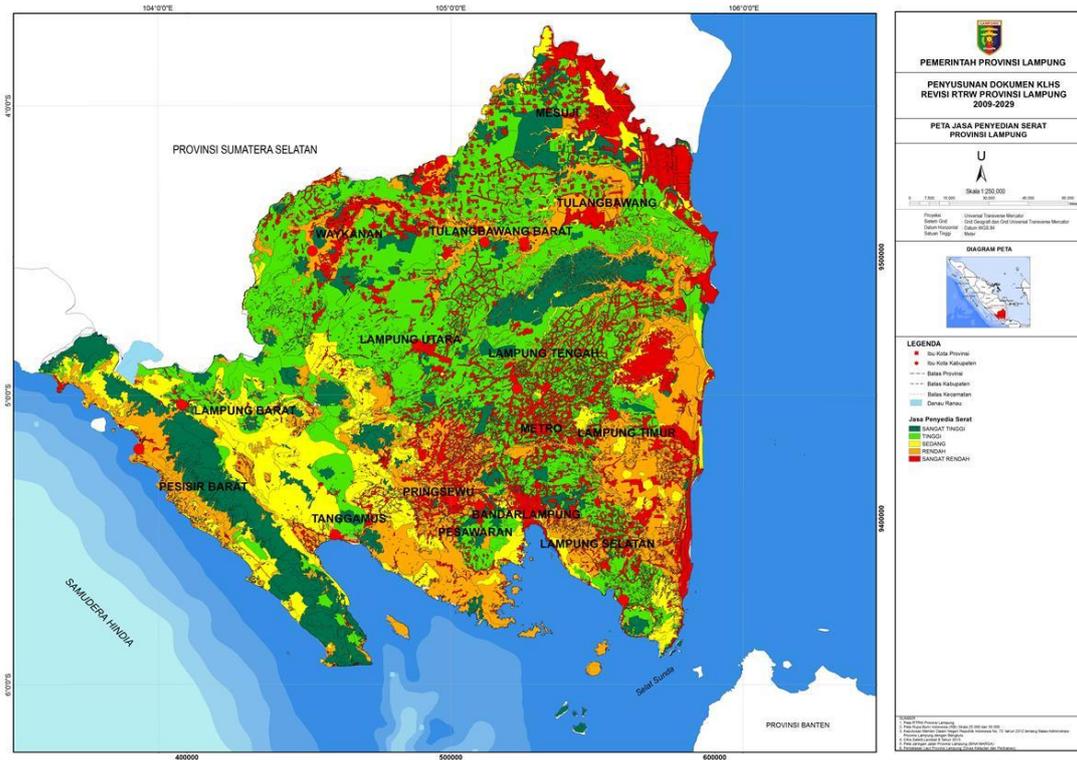


Gambar 2.9 Jasa Penyedia Air Bersih

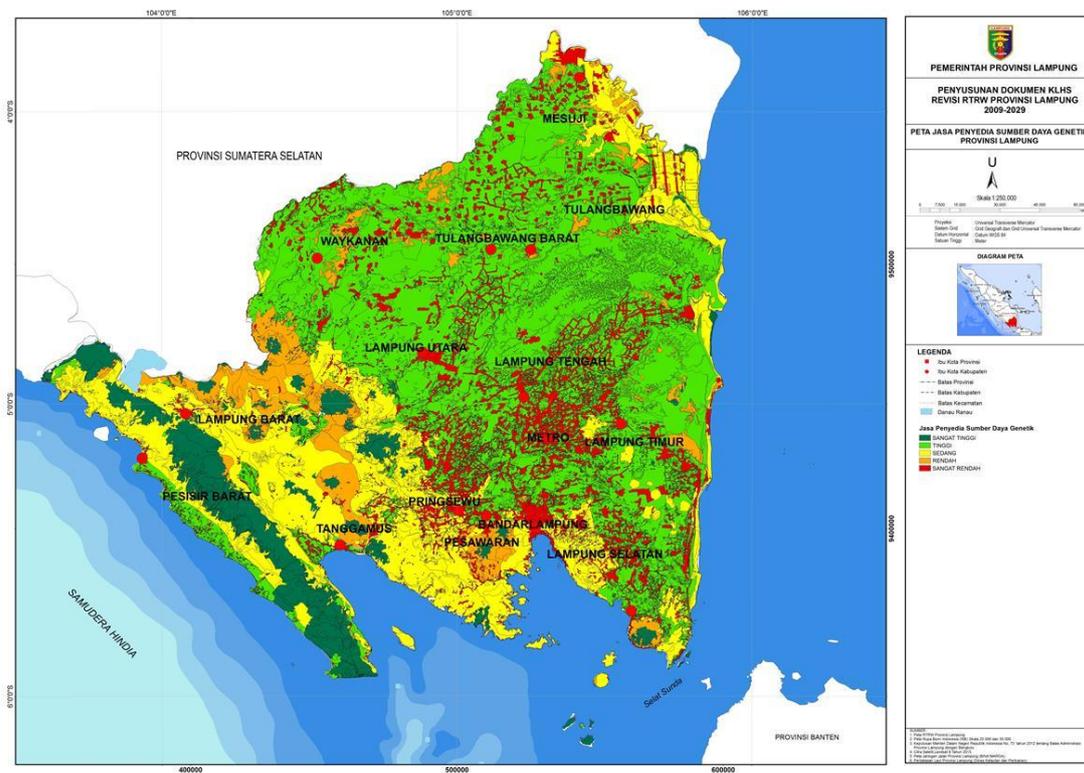


Gambar 2.10 Jasa Penyedia Bahan Bakar

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

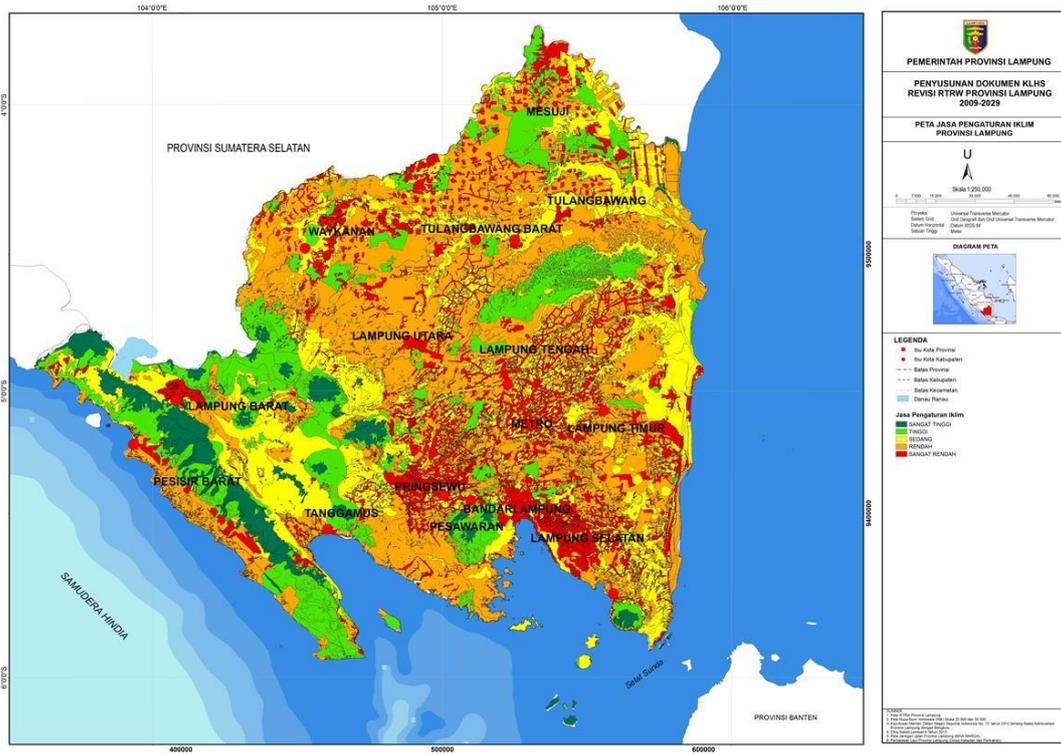


Gambar 2.11 Jasa Penyedia Serat

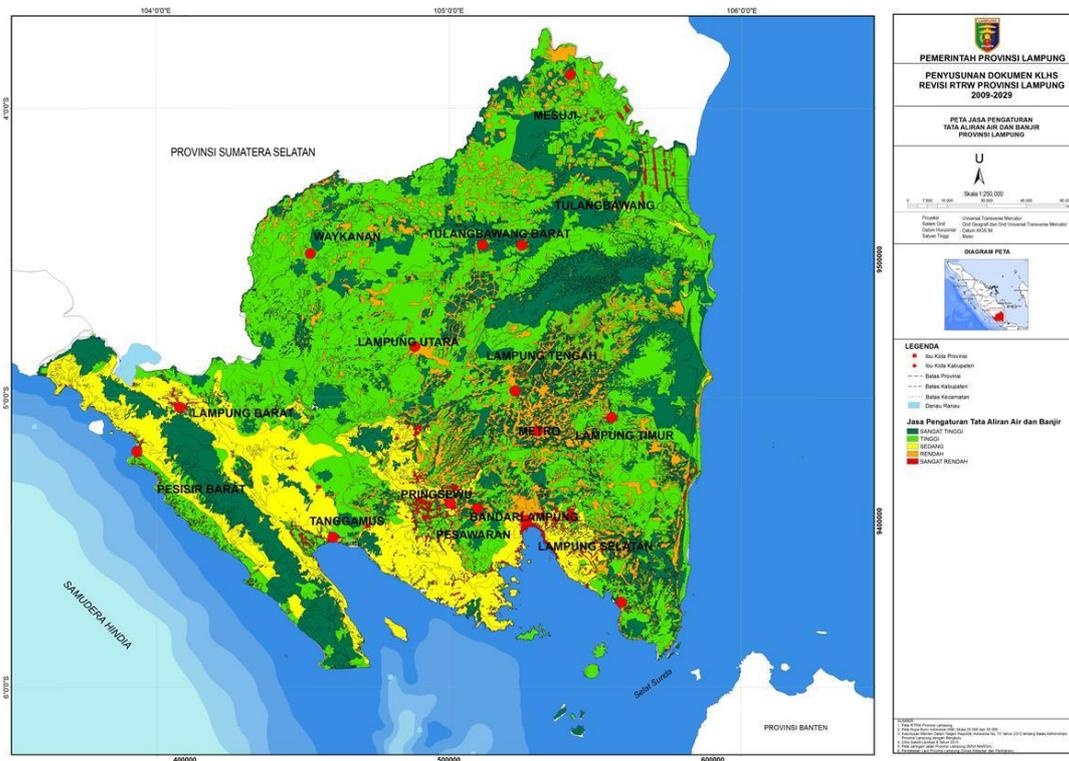


Gambar 2.12 Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

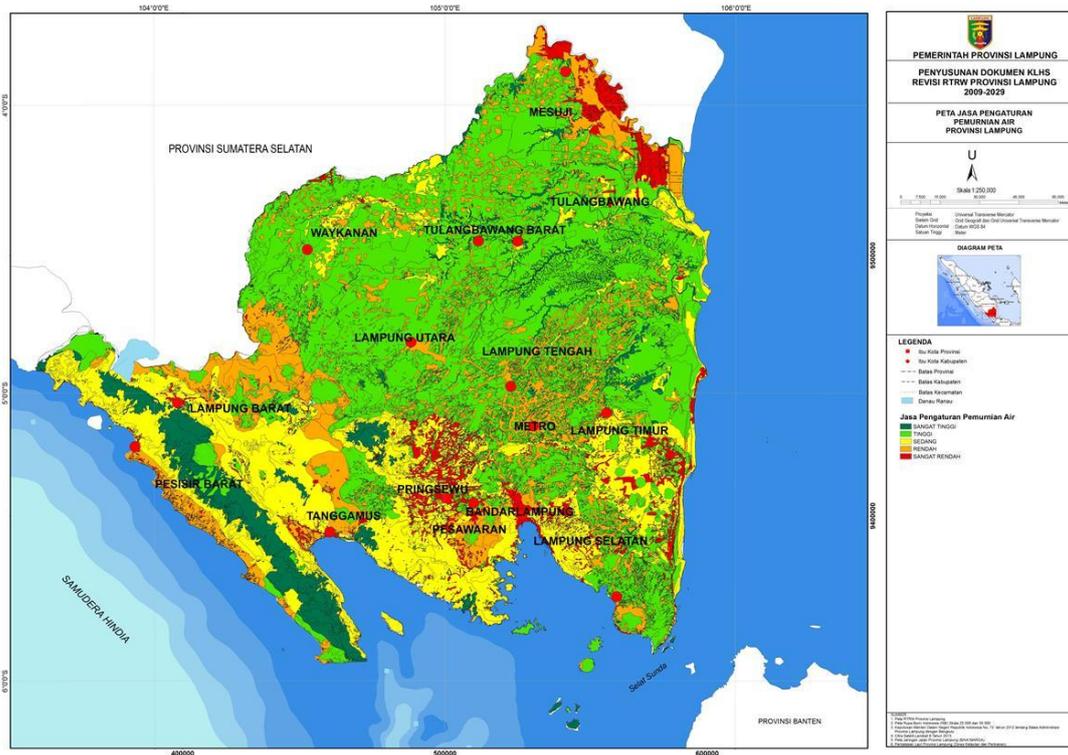


Gambar 2.13 Jasa Pengaturan Iklim

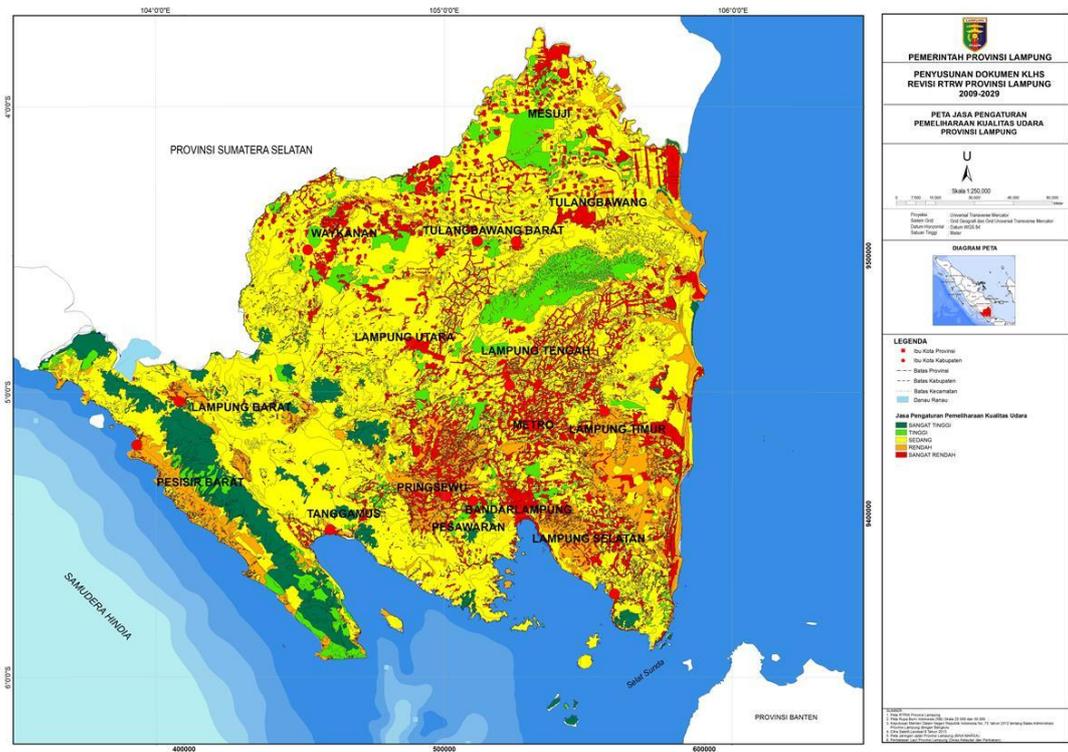


Gambar 2.14 Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

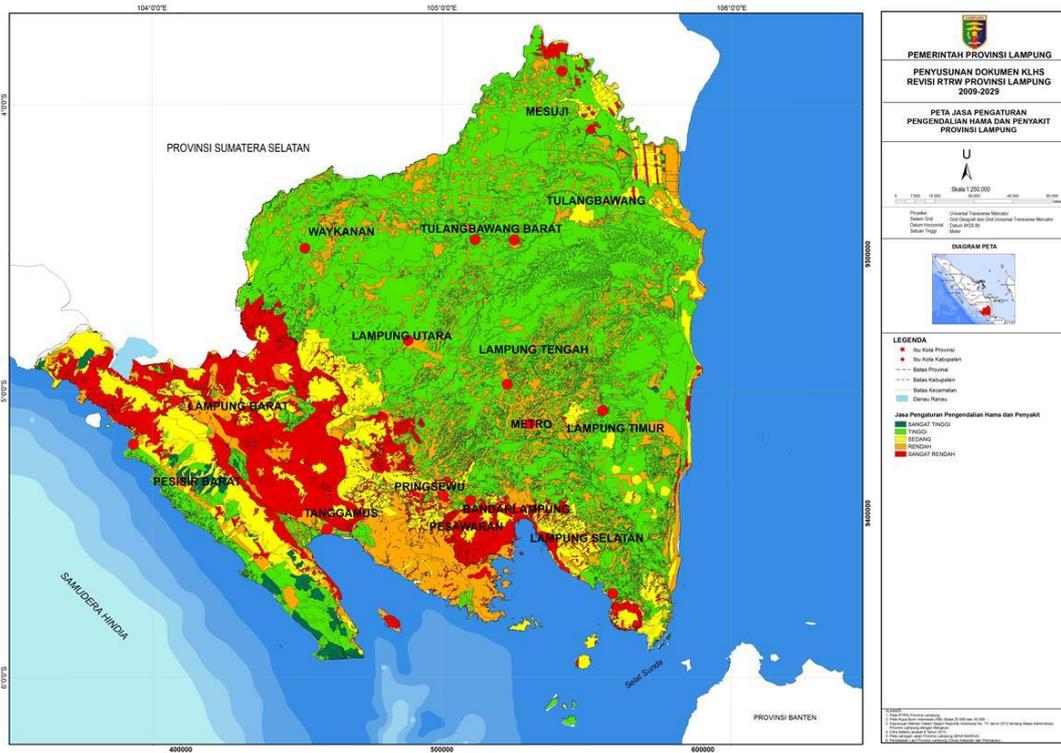


Gambar 2.15 Jasa Pengaturan Pemurnian Air

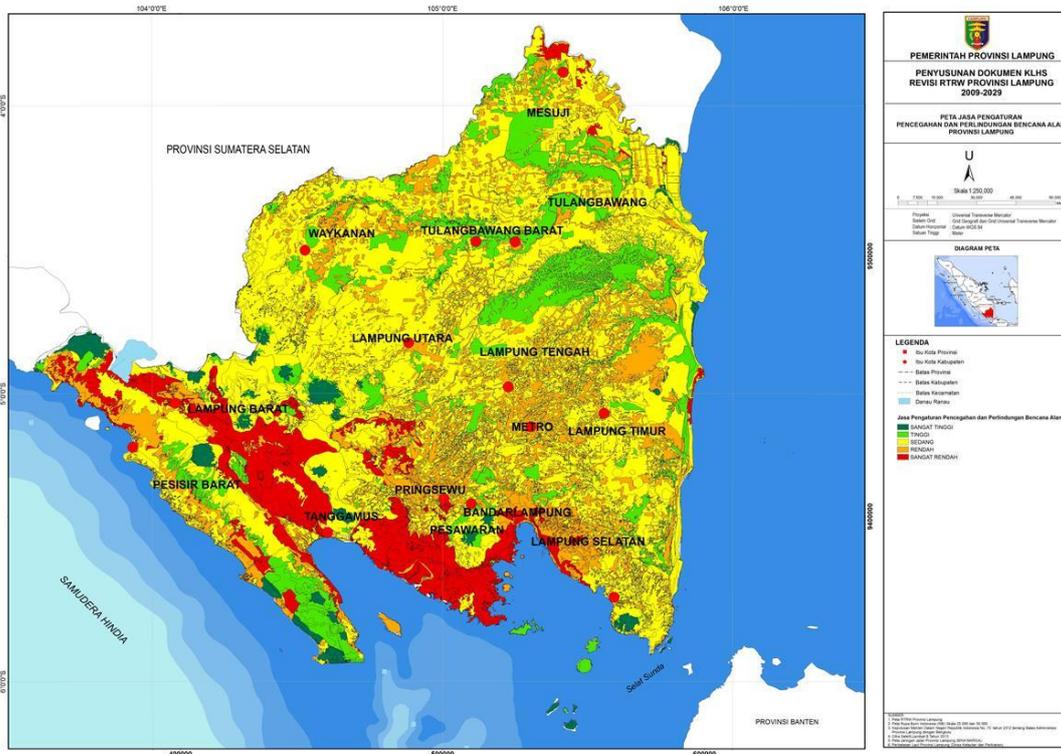


Gambar 2.16 Jasa Pengaturan Kualitas Udara

DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

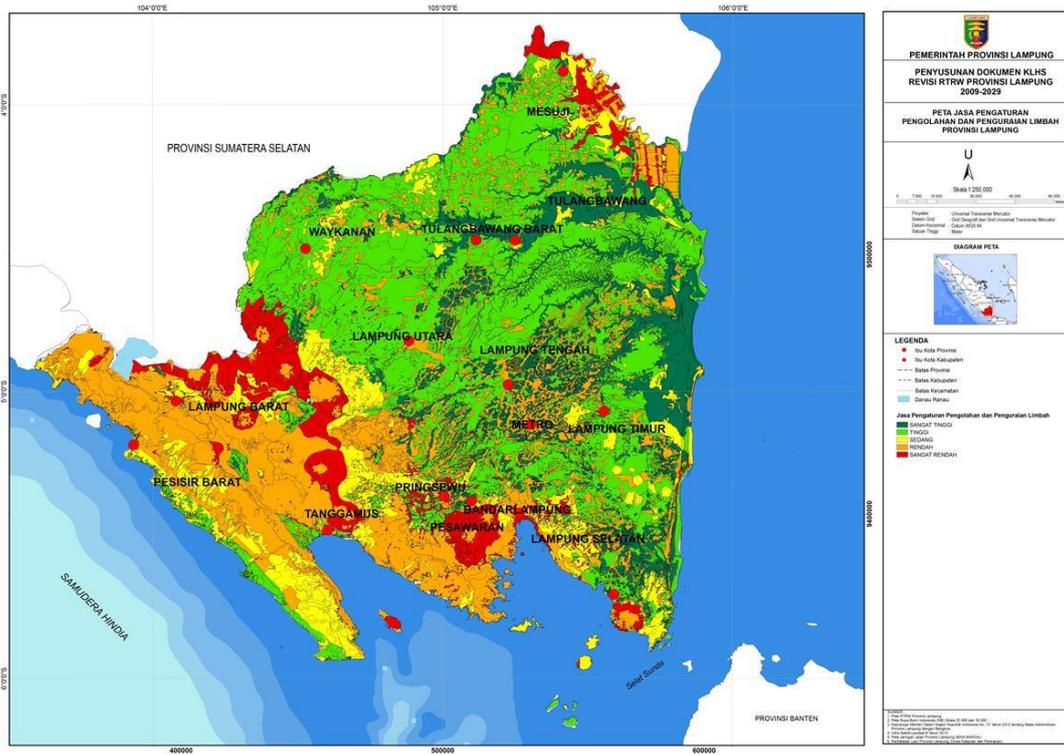


Gambar 2.17 Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

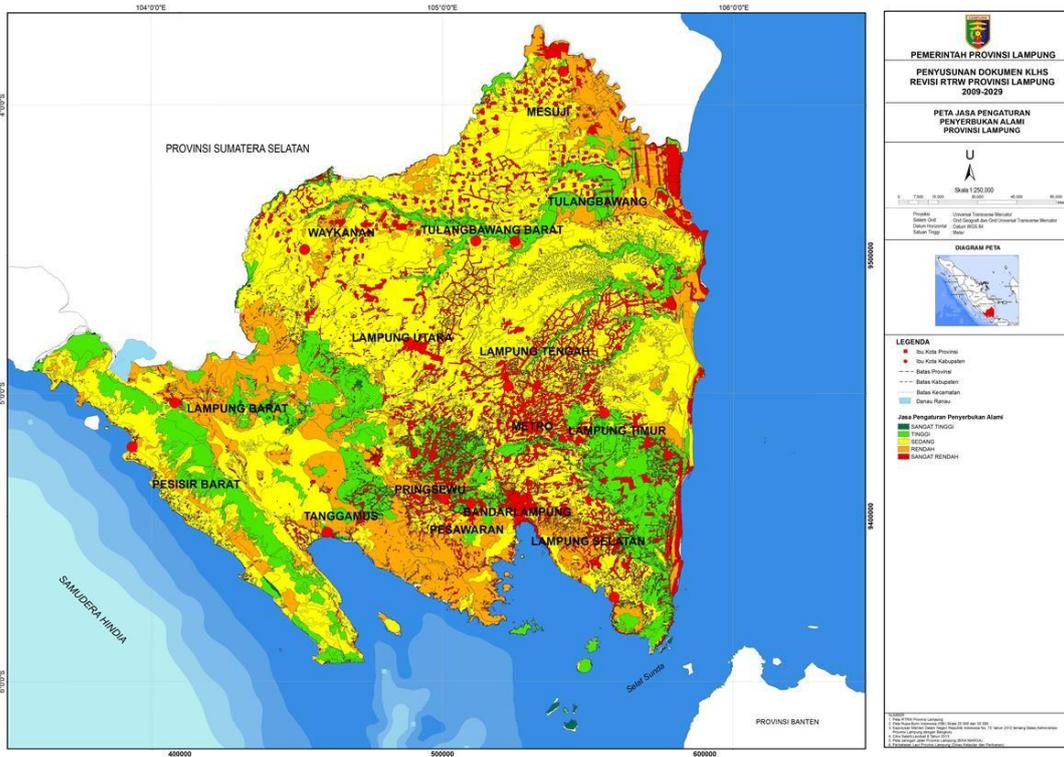


Gambar 2.18 Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

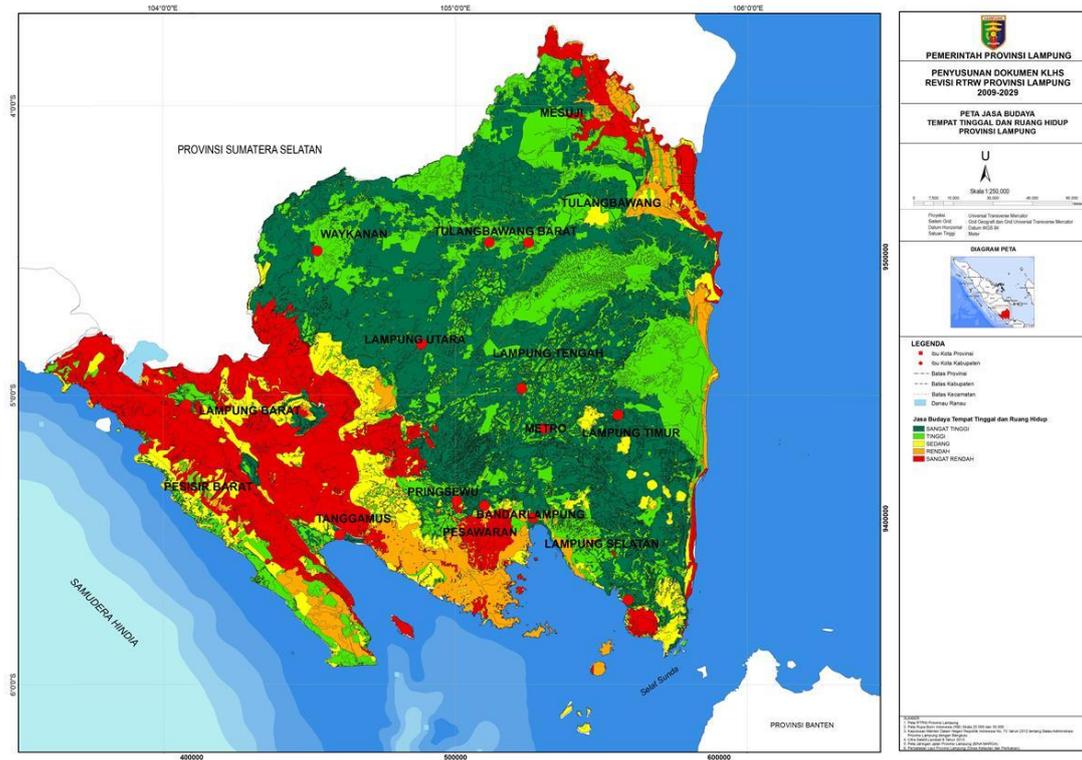


Gambar 2.19 Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah

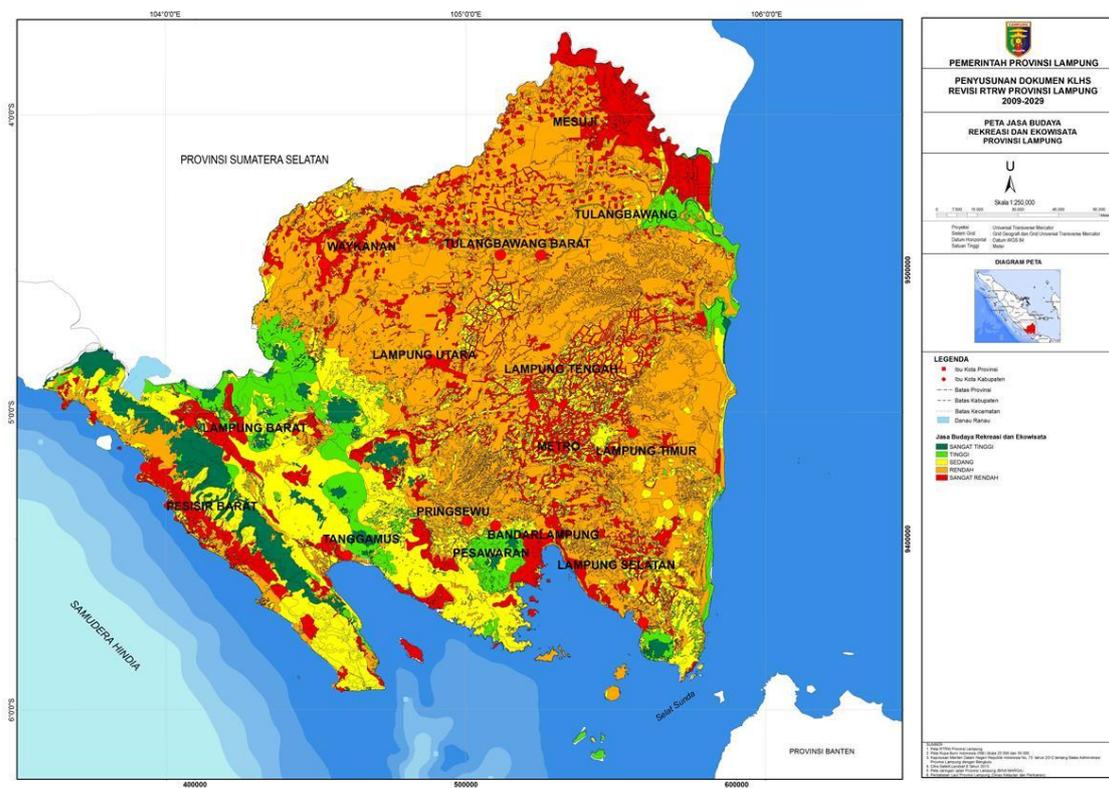


Gambar 2.20 Jasa Pengantaran Penyerbukan Alami

DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

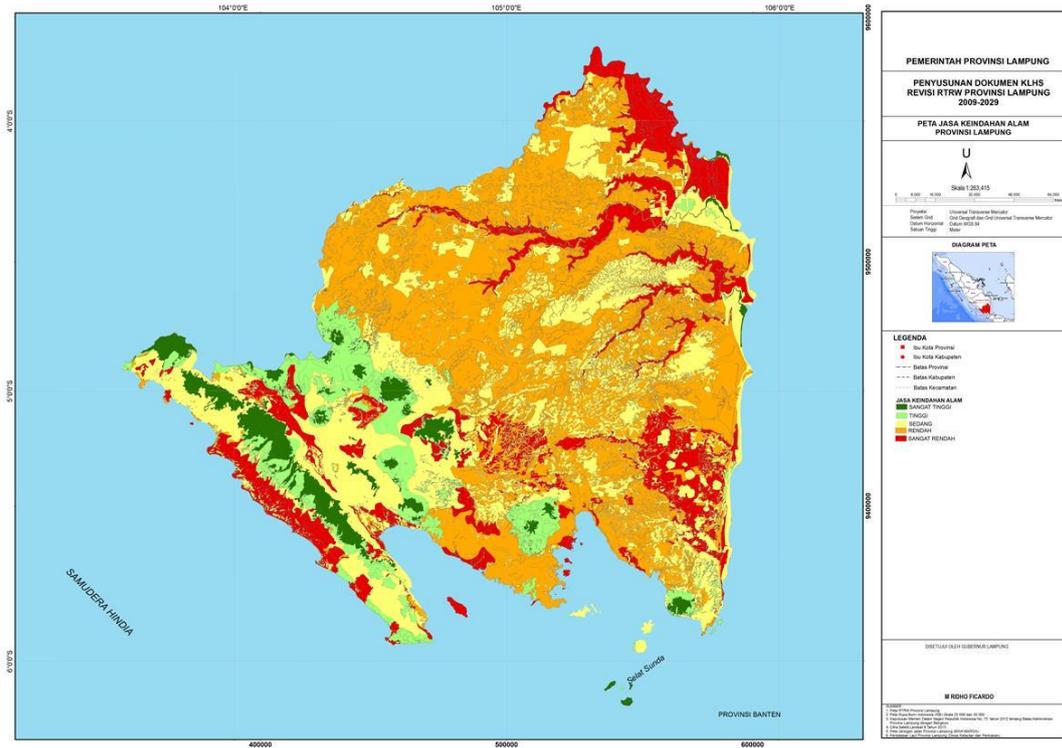


Gambar 2.21 Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

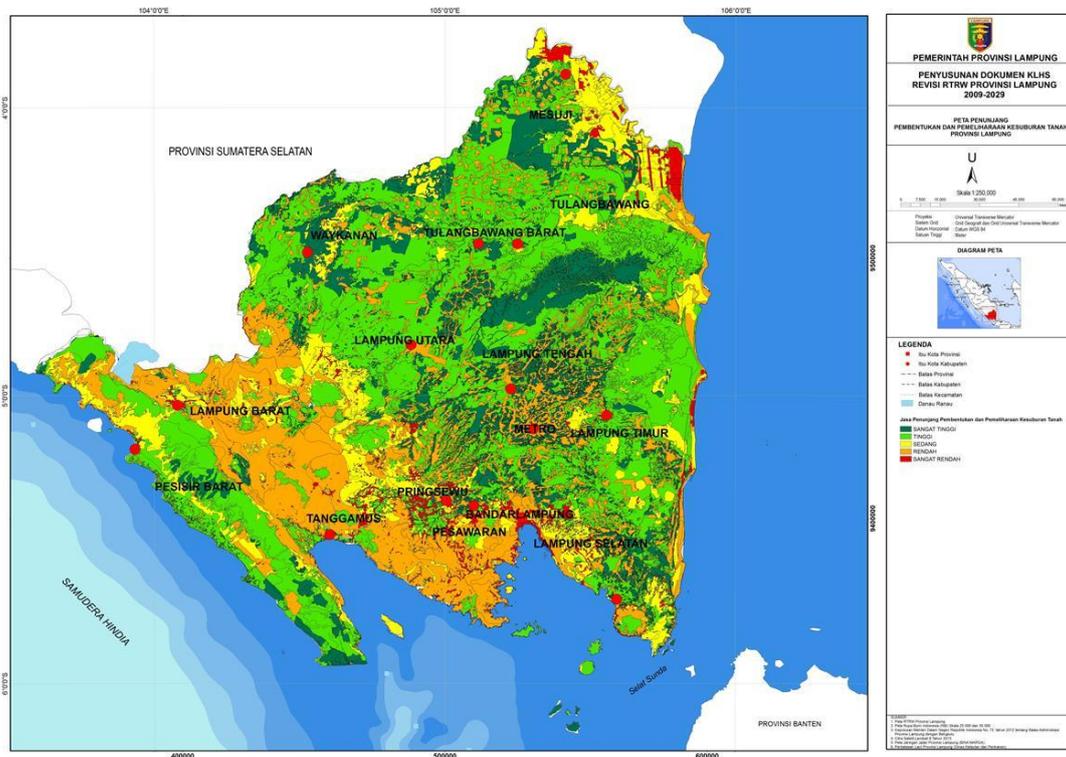


Gambar 2.22 Jasa Budaya Rekreasi dan Ekowisata

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

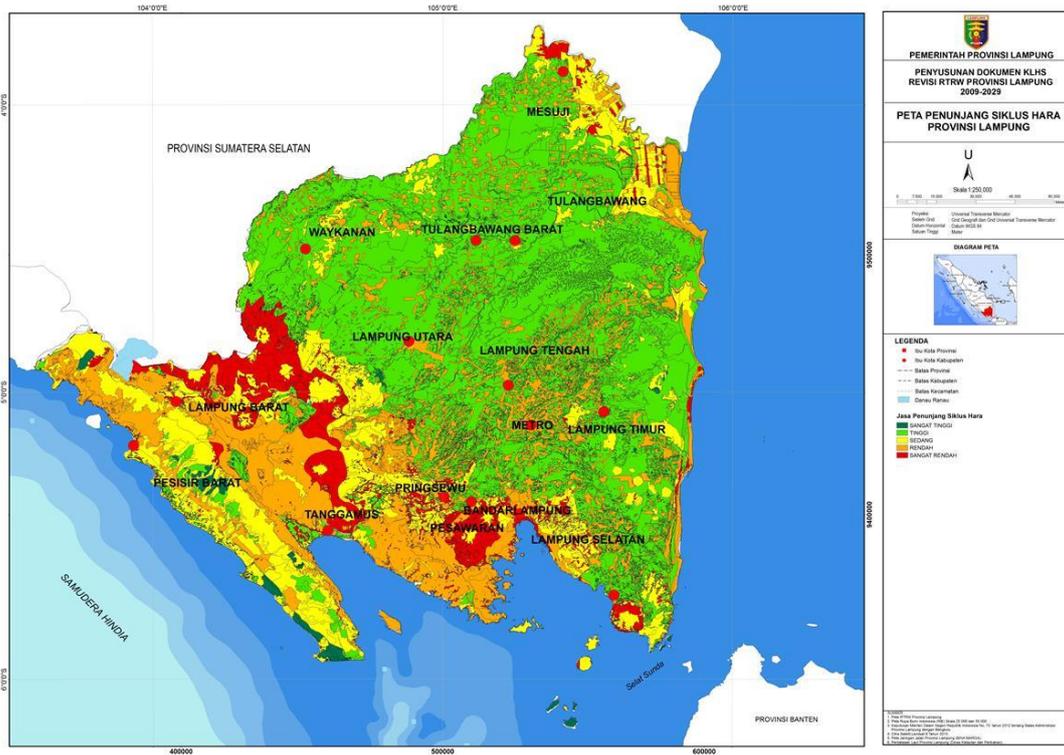


Gambar 2.23 Jasa Budaya Estetika

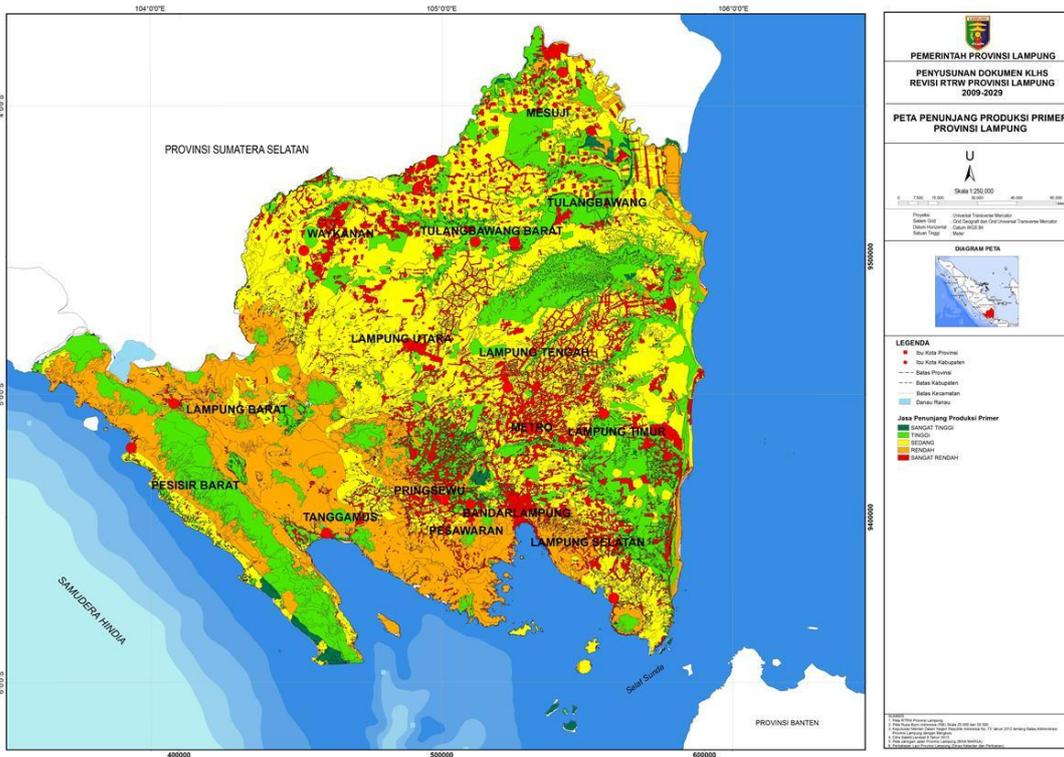


Gambar 2.24 Jasa Penunjang Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah

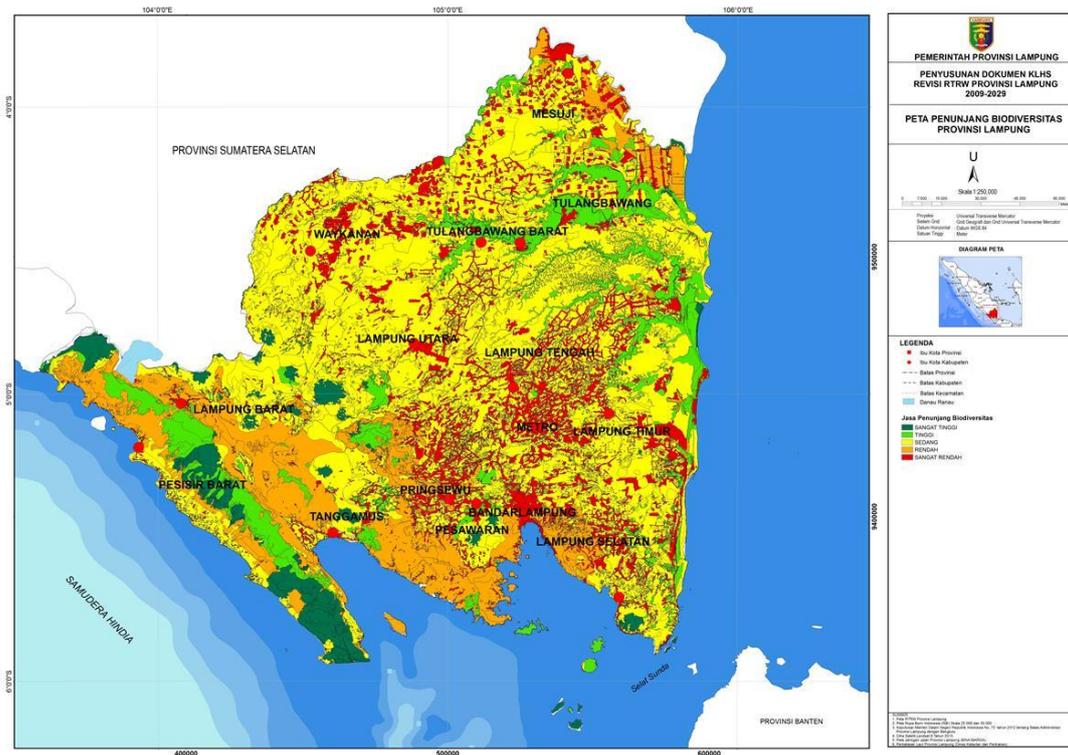
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 2.25 Jasa Penunjang Siklus Hara



Gambar 2.26 Jasa Penunjang Produksi Primer



Gambar 2.27 Jasa Penunjang Biodiversitas

2.3 Kebijakan, Rencana, Dan Program

2.3.1 Kebijakan Rencana Program Nasional

A. Provinsi Lampung dalam PP NO 13 Tahun 2017 tentang RTRWN tentang Perubahan atas PP NO 28 TAHUN 2008 tentang RTRW Nasional

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Rencana infrastruktur di Provinsi Lampung yang terdiri dari Jalan Bebas Hambatan, Wilayah Sungai serta kawasan andalan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penataan Ruang Nasional

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
- h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
- i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

b. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi:

- a. sistem perkotaan nasional;
- b. Sistem jaringan transportasi nasional;
- c. sistem jaringan energi nasional;
- d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. sistem jaringan sumber daya air.

Adapun system perkotaan yang tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14
Sistem Perkotaan Nasional

Provinsi	PKN	PKW
Lampung	Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Metro • Kalianda • Liwa • Menggala • Kotabumi • Kota Agung

Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Adapun rencana Jalan Bebas Hambatan baik antar kota maupun dalam kota yang terdapat di Provinsi Lampung adalah ruas jalan Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Bakauheni-Terbanggi Besar.

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Adapun tatanan kepelabuhan di Provinsi Lampung terdiri dari Pelabuhan Utama Panjang, Pelabuhan Pengumpul Teluk Betung, Pelabuhan Pengumpul Kota Agung, Pelabuhan Angkutan dan Penyeberangan (Tabun, Madang, Pulau, Canti dan Teluk Betung).

Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan. Adapun rencana pengembangan Bandar Udara di Provinsi Lampung adalah Bandara Raden Inten II yang merupakan tipe Bandar Udara Pengumpul Sekunder.

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Cekungan air tanah meliputi cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi. Adapun system jaringan sumber daya air di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

Tabel 2.15
Sistem Perkotaan Nasional

No	Wilayah Sungai	Provinsi	Keterangan
1	Musi-Sugihan- Banyuasin- Lemau	Sumsel- Jambi- Bengkulu- Lampung	Lintas Provinsi
2	Seputih-Sekampung	Lampung	Strategis Nasional

c. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Adapun rencana pengembangan kawasan strategi nasioanal di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

- Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
- Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas
- Kawasan Selat Sunda

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019

Pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya mansia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing menjadi bagian dari visi dan misi Presiden RI 2014-2019 khususnya misi keempat: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; misi kelima: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan misi keenam: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Selain itu, komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, yaitu: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; prioritas ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; prioritas kelima: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; prioritas keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; prioritas ketujuh: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; serta prioritas kesembilan: Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

- Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
- Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
- Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
- Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

2.3.2 Kebijakan Rencana Program Provinsi

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi diperlukan guna mendukung mobilitas penduduk dan barang. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dapat menunjang pengembangan wilayah, antara lain dapat menghubungkan antarpusat kegiatan serta wilayah pedalam yang masih terisolasi. Pada saat ini transportasi utama di Provinsi Lampung adalah transportasi air (sungai) dan udara. Dalam pembangunan transportasi, pemerintah mempunyai peranan sebagai pembina, sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transport-asi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pemba-ngunan sarana dan prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas daerah-daerah yang kurang berkembang.

1. Sistem Jaringan Transportasi

a. Sistem Jaringan Transportasi Darat

1) Sistem Jaringan Jalan

Fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder di bedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk sistem jaringan jalan primer, fungsi jalan dibedakan atas:

- a) **Jaringan Jalan Tol** adalah jalan bebas hambatan yang menghubungkan antar satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jaringan jalan Tol di Provinsi Lampung (PP No. 26 TAHUN 2008) : Bakauheni – Terbanggi Besar;
- b) **Jaringan jalan arteri primer** (jalan Nasional) merupakan jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- Lintas Timur mulai dari Bakauheni - Simpang Kalianda - Simpang Pugung - Simpang Tanjung Karang - Tegineneng - Gunung Sugih - Terbanggi Besar - Bujung Tenuk - Simpang Pematang - Pematang Panggang - batas Provinsi Sumatera Selatan;
 - Lintas Tengah mulai dari Terbanggi Besar - Kotabumi - Bukit Kemuning - Simpang Empat - Batas Provinsi Sumatera Selatan. Jalan kolektor primer, yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- c) **Jaringan jalan Kolektor Primer** (JK-1, Jalan Nasional) jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari
- **Lintas Pantai Timur** mulai dari Bakauheni – Way Sekampung Bunut - Ketapang – Way Jepara - Labuhan Maringgai -Sukadana - Seputih Banyak - Bujung Tenuk;
 - **Lintas Barat** (JK-1, Jalan Nasional) mulai dari Bandar Lampung - Gedongtataan - Rantau Tijing - Kota Agung - Wonosobo – Sangga - Bengkuntan – Biha – Krui - Simpang Gunung Kemala - Pugung Tampak - batas Provinsi Bengkulu;
 - **Penghubung lintas** (JK-1, Jalan Nasional) merupakan jalan penghubung mulai dari Bukit Kemuning – Padang Tambak - Liwa - Simpang Gunung Kemala dan Penghubung Jalan Lintas Tengah dengan Jalan Lintas Timur yaitu ruas jalan Tegineneng – Metro – Sukadana.
- d) **Jaringan jalan Lokal Primer** (JK-2, Jalan Provinsi) merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lingkungan, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan pusat Kegiatan Lingkungan, antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan. Jalan ini akan memperkuat interaksi internal untuk mendukung pola perkembangan ruang yang bersifat horisontal membentuk suatu sistem jaringan jalan. Jalan lokal primer ini merupakan jalan yang berstatus jalan provinsi. Beberapa jalan lokal primer yang memiliki fungsi sebagai jalan feeder (pengumpan) yang menghubungkan jalan poros (lintas Sumatera) dengan jalan lintas pantai timur dan barat. Beberapa jalan tersebut adalah:
- Kota Dalam - Sidomulyo - Jabung - Simpang Kemuning;
 - Penghubung lintas mulai dari Bandar Lampung - Tanjung Bintang - Pugung Raharjo - Sribawono - Lintas Pantai Timur;
 - Penghubung lintas mulai dari Tegineneng - Metro – Sukadana;
 - Pringsewu - Sukoharjo - Kalirejo - Padang Ratu - Aji Kagungan - Lintas Tengah Sumatera.
 - Metro – Sp.Tanjung Kari - Pugung Raharjo – Jabung

- Bandar Lampung – Jati Agung – Metro Kibang - Metro.

2) Jaringan Trayek Angkutan Umum dan Terminal

Jaringan pelayanan transportasi jalan di wilayah Provinsi Lampung saat ini melayani keperluan perpindahan orang dan atau barang di sebagian besar wilayah. Perpindahan orang dilayani oleh angkutan penumpang dengan berbagai macam sarana, sedangkan perpindahan barang dilayani oleh angkutan barang. Kondisi saat ini, sarana angkutan penumpang umum di Provinsi Lampung dibedakan atas 5 kelompok:

- Trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), menjadikan Lampung sebagai tempat asal – tujuan dan sebagai lintasan dari kota-kota di Jawa dan Sumatera.
- Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), menghubungkan kota-kota atau pusat kegiatan yang terdapat di Provinsi Lampung.
- Trayek perkotaan dan pedesaan, berupa angkutan perkotaan maupun angkutan pedesaan yang bergerak dalam satu kabupaten/kota saja.
- Angkutan sewa dan taksi merupakan angkutan alternatif yang tidak dalam trayek dengan pelayanan sampai ke alamat.
- Angkutan pariwisata, merupakan angkutan khusus untuk melayani para wisatawan.

Kondisi jaringan pelayanan angkutan penumpang AKDP telah menjangkau hampir seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung terdapat 50 jaringan trayek AKDP yang dilayani oleh 282 Perusahaan Otobus (PO), terdiri dari Bus AC dan Non AC. Sedangkan untuk angkutan penumpang AKAP, terdapat 79 trayek yang dilayani oleh 94 PO (termasuk DAMRI), terbagi atas 21 Trayek yang dilayani oleh 25 PO berdomisili di luar Provinsi Lampung dan 53 trayek yang dilayani 69 PO berdomisili di Provinsi Lampung. Jaringan pelayanan angkutan perkotaan dan pedesaan di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung terdiri dari 118 trayek.

Pada saat ini Provinsi Lampung telah memiliki 2 (dua) terminal type A, yaitu terminal Rajabasa yang merupakan gerbang utama perjalanan penumpang dengan menggunakan moda jalan raya dan Terminal Betan Subing di Lampung Tengah. Terminal Rajabasa merupakan terminal yang memiliki hierarki tertinggi (type A) di Provinsi Lampung hal ini dapat terlihat dari kinerja Rajabasa sebagai terminal utama yang dapat diperhitungkan, dari kemampuan melayani jumlah penumpang dan angkutan yang datang dan pergi di terminal ini, sedangkan Terminal Betan Subing di Lampung Tengah walaupun memiliki fasilitas yang lengkap namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh calon penumpang.

3) Sistem Transportasi Perkeretaapian

Jaringan pelayanan perkeretaapian di Provinsi Lampung saat ini baru terdiri jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota, sedangkan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan belum ada. Jaringan pelayanan perkeretaapian yang ada yaitu antar kota antar provinsi (menghubungkan stasiun Tanjung Karang di Kota Bandar Lampung - Provinsi

Lampung dengan stasiun Kertapati di Kota Palembang - Provinsi Sumatera Selatan); dan antar kota dalam provinsi (menghubungkan stasiun Tanjung Karang di Kota Bandar Lampung dengan stasiun Kotabumi di Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan).

4) Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, Pelabuhan Bakauheni adalah pelabuhan penyeberangan regional yang berfungsi untuk melayani kegiatan dan alih muat pengumpan dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) ke Pelabuhan Merak (Banten). Pelabuhan Bakauheni saat ini merupakan pelabuhan penyeberangan utama di Provinsi Lampung yang memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pintu gerbang yang menghubungkan jalur darat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya. Namun demikian Pelabuhan Bakauheni juga merupakan titik lemah arus barang dan penumpang karena sering mendapat gangguan atau tundaan akibat cuaca dan keadaan arus penumpang yang sangat padat pada waktu-waktu tertentu.

Prasarana penyeberangan yang tersedia berupa dermaga sebanyak 4 unit yang dilengkapi dengan *movable bridge* (MB). Untuk melayani jasa angkutan penyeberangan lintas Bakauheni-Merak terdapat 33 unit kapal jenis Ro-Ro dan kapal cepat yang beroperasi sebanyak 2 unit (tahun 2008). Pada keadaan normal sarana tersebut dapat menyeberangkan rata-rata 58 trip kapal Ro-Ro dan 2-3 trip kapal cepat (Perhubungan Dalam Angka, 2008).

Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

Way Mesuji

Way Mesuji termasuk anak sungai utama Way Tulang Bawang. Panjang Way Mesuji adalah 40 km dengan daerah aliran sungai seluas 202 km². Di Way Mesuji terdapat dermaga yang sudah cukup lama dan merupakan aset pemerintah yaitu Dermaga Wiralaga dan Dermaga Sungai Sindang. Kondisi Dermaga Wiralaga kini sudah rusak, karena terbuat dari konstruksi kayu. Di kawasan dermaga terdapat Kantor Pelabuhan yang menempati luas sekitar 1 hektar. Dermaga Wiralaga tidak digunakan oleh masyarakat seiring dengan semakin terbukanya akses kawasan permukiman oleh jalan darat, sehingga pengguna dermaga adalah perahu lokal.

Way Tulang Bawang

Way Tulang Bawang memiliki panjang 132 km dengan luas areal daerah ilir 884 km². Way Tulang Bawang ini sudah sejak lama menjadi salah satu alur sungai yang banyak dilalui oleh kapal. Namun seiring dengan semakin efektifnya pergerakan perpindahan manusia dan barang jika menggunakan moda lain, maka akhirnya transportasi sungai Way Tulang Bawang tidak lagi mengalami perkembangan yang berarti. Ada tujuh dermaga yang ada di Way Tulang Bawang yaitu: Menggala, Gedong Aji, Bina Indonesia, Gunung Tapa, Rawajitu, Teladas dan Kuala Teladas.

Danau Ranau

Danau Ranau berada di Lampung Barat dan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan. Danau Ranau merupakan salah satu lokasi objek wisata nasional. Di Danau Ranau terdapat fasilitas dermaga kecil, yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Di Danau Ranau belum terlihat kegiatan transportasi yang mendorong pemerintah untuk menyediakan dermaga yang lebih representatif.

b. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 53 tahun 2002 tentang tatanan Kepelabuhan Nasional Provinsi Lampung memiliki beberapa pelabuhan antaralain, Pelabuhan Panjang yang merupakan satu-satunya pelabuhan Internasional di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung juga mempunyai lima pelabuhan regional antaralain: Pelabuhan Teluk Betung, Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Mesuji, Pelabuhan Menggala dan Pelabuhan Kota Agung yang memiliki peran dan fungsi sebagai pelabuhan nasional. Kelima pelabuhan tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) di masing-masing pelabuhan. Untuk pelabuhan lokal Provinsi Lampung memiliki enam pelabuhan yang tersebar diwilayah Provinsi Lampung, antaralain: Pelabuhan Cantik Kalianda, Pelabuhan Legundi, Pelabuhan Sebesi, Pelabuhan Way Seputih, Pelabuhan Kuala Penat, dan Pelabuhan Way Penat. Selain dari beberapa pelabuhan tersebut, Provinsi Lampung juga memiliki pelabuhan penyebrangan yang memiliki urat nadi perekonomian Nasional yaitu pelabuhan Bakauheni yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry.

c. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Bandara Raden Inten II dan Bandara Pekon Serai merupakan bandara umum yang melayani penerbangan komersial di Provinsi Lampung. Bandara Raden Inten II terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak kurang lebih 28 km dari Kota Bandar Lampung, sedangkan Bandara Pekon Serai terletak di wilayah Kabupaten Pesisir Bara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Jenis Bandara di Provinsi Lampung

No	Bandara	Kabupaten/ Kota	Lebar Panjang Landasan	Maskapai	Jenis Pesawat	Luas Bandara	Jenis Bandara
1.	Bandara Radin Inten II	Lampung Selatan	45 m x 2.500m	Garuda Indonesia	737-800	≥260 H.	Sipil / Umum
				Sriwijaya Air	737-300-800		
				Lion Air	737-800		
				Aviastar	737-800		
				Expres Air	737-200-300-500		
2.	Bandara Pekon Serai	Pesisir Barat,	23 m x 974 m	Susi Air		≥50 H.	Sipil / Umum
3.	PT. Gula Putih Mataram	Lampung Tengah.	-	-	-	-	Khusus

No	Bandara	Kabupaten/ Kota	Lebar Panjang Landasan	Maskapai	Jenis Pesawat	Luas Bandara	Jenis Bandara
4.	PT. Indo Lampung Perkasa	Lampung Tengah	-	-	-	-	Khusus
5.	PT. Nusantara Tropical Fruit	Lampung Timur,	-	-	-	-	Khusus
6.	TNI AD Gatot Subroto	Way Kanan,	-	-	-	-	Khusus
7.	TNI AU Astra Ksetra	Lampung Tengah	-	-	-	-	Khusus
8.	Bandara Tambling	Pesisir Barat	-	-	-	-	Khusus

Sumber: Tatravil, 2015 dan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

2. Sarana dan Prasarana Energi dan Listrik

Provinsi Lampung berpotensi untuk menghasilkan energi melalui sumberdaya panas bumi, energi air, dan hasil produksi pertanian/perkebunannya. Provinsi Lampung yang dilewati oleh deretan aktivitas vulkanik berpotensi menghasilkan panas bumi yang dapat diubah menjadi listrik dengan PLTP, sumber daya panas bumi yang terdata oleh Dinas Pertambangan dan Energi Lampung adalah sebesar 2,4 GW. Selain itu relief muka bumi yang berbukit-bukit di Provinsi Lampung menghasilkan energi potensial/kinetik dalam bentuk pergerakan air yang dapat dimanfaatkan dengan pembangkitan listrik tenaga air.

Produksi energi listrik di Provinsi Lampung berasal dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumsel dan Lampung, Lampung masih mendapat supply dari Sumatera Selatan karena untuk Lampung sendiri masih kekurangan kapasitas pembangkit untuk melayani pelanggan yang ada. Berikut data pembangkit listrik di Provinsi Lampung.

Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan di Provinsi Lampung direncanakan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang akan ditempuh adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan di Provinsi Lampung terdiri dari pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan.

3. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

Sarana dan prasarana telekomunikasi yang dimaksud adalah Sistem Jaringan Telekomunikasi Terrestrial dan stasiun bumi, yang meliputi:

- 1) Sistem Jaringan Mikro Digital
- 2) Sistem Jaringan Serat Optik
- 3) Sistem Jaringan Mikro Analog

Sarana telekomunikasi pada umumnya berada pada kewenangan perusahaan telekomunikasi seperti PT. TELKOM. Karenanya, dalam perencanaan ini rekomendasi hanya dia-rahkan pada prediksi kebutuhan atau permintaan jaringan. Sementara itu untuk pengembangan jaringan telekomunikasi satelit, akan mengikuti arahan dari strategi pengembangan jaringan telekomunikasi satelit nasional.

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Provinsi Lampung direncanakan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Lampung yang terdiri atas jaringan terestrial dan stasiun bumi akan dikembangkan secara menerus untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

4. Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

Di Provinsi Lampung terdapat 3 (tiga) wilayah sungai skala provinsi, yaitu Way Mesuji – Way Tulang Bawang, Way Seputih – Way Sekampung, Way Semangka dan wilayah sungai yang melayani kawasan strategis provinsi. Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air di Provinsi Lampung direncanakan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

5. Rencana Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Provinsi Lampung secara hierarkis terdiri atas 4 (empat) ordinas pusat pelayanan, yaitu:

Tabel 2.17
Sistem Pusat Kegiatan Provinsi Lampung

Sistem Pusat Kegiatan	Lokasi
PKN	Bandar Lampung
PKW	Metro, Kotabumi, Kalianda, Liwa, Menggala, Kota Agung
PKWp	Sukadana, Blambangan Umpu, Gedong Tataan, Bakauheni, Kawasan TERBAGUS, Mesuji dan Panaragan
PKL	Tanjung Bintang, Sidomulyo, Natar – Jatiagung, Seputih Banyak, Kalirejo, Way Jepara, Labuhan Maringgai, Fajar Bulan, Krui, Bukit Kemuning, Wiralaga, Wonosobo, Unit II

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

6. Rencana Peruntukan Kawasan Lindung

Kawasan fungsi lindung Provinsi Lampung, meliputi:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, yaitu tersebar di Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir

Barat, Pringsewu, Tanggamus dan Way Kanan. Kawasan resapan air terdapat di sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan daerah di bawahnya hingga tahun 2037 adalah 687,37 km².

Tabel 2.18
Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Lampung

No	Nama Kawasan	Register	Lokasi Kawasan	Luas (Ha)
1	HL Saka	41	Way Kanan	1.162,67
2	HL Way Buatan	6	Lampung Selatan	950,40
3	HL Gunung Balak	38	Lampung Timur	22.292,50
4	HL Pematang Neba	28	Tanggamus	13.419,85
5	HL Serkung Peji	26	Tanggamus	673,90
6	HL Palakiah	48 B	Lampung Barat	1.800,71
7	HL Serarukuh	17 B	Lampung Barat	1.596,10
8	HL Gunung Rajabasa	3	Lampung Selatan	5.200,50
9	HL Gunung Seminung	9 B	Lampung Barat	1.050,91
10	HL Rawa Selapan Muara Sekampung	15	Lampung Timur dan Lampung Selatan	414,83
11	HL Bukit Punggur	24	Way Kanan	20.831,00
12	HL Gunung Tanggamus	30	Tanggamus	15.060,00
13	HL Pematang Arah	31	Tanggamus	1.505,00
14	HL Bukit Rindingan	32	Tanggamus	6.960,00
15	HL Tangkit Tebak	34	Lampung Utara	28.000,00
16	HL Krui Utara	43 B	Lampung Barat	14.030,00
17	HL Way Tenong Kenali	44 B	Lampung Barat	13.040,00
18	HL Bukit Rigis	45 B	Lampung Barat	8.345,00
19	HL Way Waya	22	Lampung Tengah dan Pringsewu	9.895,00
20	HL Kota Agung Utara	39	Tanggamus dan Lampung Tengah	102.110,00
21	HL Pematang Kubuato	20	Pesawaran	7.954,70
22	HL Pematang Tanggung	25	Tanggamus	3.380,00
23	HL Pematang Sulah	27	Tanggamus	8.862,36
24	HL Perintian Batu	21	Pringsewu dan Pesawaran	7.412,00
25	HL Pantai Timur Muara Sekampung		Lampung Timur	1.488,36
26	HL Pantai Timur Way Pisang		Lampung Selatan	505,80
27	HL Batu Serampok	17	Lampung Selatan dan Bandar Lampung	7.330,00
28	HL Pesisir Kelompok 9 (Eks. PT. Bina Lestari)		Pesisir Barat	9.360,50
29	HL Bengkunt		Pesisir Barat	331,60
30	HL Rumbia	8	Lampung Tengah/ Lampung Timur	5.666,72
	Jumlah			320.630,41

Sumber: Badan Pengelolaan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, 2016

2. Kawasan perlindungan setempat, di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way

Bumi Agung. Berdasarkan hasil analisis, luas total kawasan perlindungan setempat adalah 44.506,45 Ha.

3. Kawasan konservasi, yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Adapun yang termasuk dalam kawasan konservasi adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam Rawa Kandis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan. Selain itu juga ada kawasan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan di Teluk Kiluan dan Pulau Pahawang.

Tabel 2.19
Kawasan Konservasi di Provinsi Lampung

No	Nama Kawasan	Lokasi Kawasan	Luas (Ha)
Taman Nasional			
1	TN. Bukit Barisan Selatan	Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat	248.861,48
2	TN. Way Kambas	Lampung Timur	125.621,30
Cagar Alam			
1	CAL TN. Bukit Barisan Selatan	Tanggamus dan Pesisir Barat	17.281,00
2	CAL. Krakatau dan Gugus Pulau Anak	Lampung Selatan	13.735,10
Taman Hutan Raya			
1	TAHURA Wan Abdul Rachman	Tulang Bawang Barat	22.245,50
Kawasan Hutan Pelestarian Alam			
1	Rawa Kandis	Tulang Bawang Barat	1.373,67
Jumlah			429.118,05

Sumber: Badan Pengelolaan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, 2016

4. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan.
 5. Kawasan perlindungan lainnya meliputi cagar budaya, berdasarkan UU NO 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan yang bersifat kebendaan berupa Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Adapun yang termasuk cagar budaya di Provinsi Lampung meliputi Situs Masa Pra Sejarah, Makam Islam dan Situs masa Hindu dan Budha di Kabupaten Lampung Barat, Situs Masa Islam di Kabupaten Pesisir Barat, Prasasti Batu Tulis Kerajaan Sriwijaya dan Makam Radin Intan II di Kabupaten Lampung Selatan, Situs Masa Pra Sejarah di Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur.
- Pengelolaan kawasan lindung akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain:
- a. Memantapkan ekosistem mangrove dan rawa di Pantai Timur dan Selatan Lampung.

- b. Mengendalikan penambahan luas hutan dan alih fungsi hutan yang berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung hutan yang bersangkutan. Untuk itu kawasan hutan berfungsi lindung yang belum mengalami perambahan akan dipertahankan dan kawasan lindung yang telah dirambah akan dikembalikan fungsinya dan ditetapkan kembali statusnya sebagai hutan berfungsi lindung, terutama untuk kawasan-kawasan:
- Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
 - Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.
 - Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.
 - Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
 - Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
 - Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
 - Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.

Dalam penetapan status, kriteria yang dipergunakan adalah sejauh mungkin mempertahankan fungsi lindung dari kawasan hutan yang bersangkutan.

- c. Mengendalikan pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan rawan bencana terutama di patahan/sesar Semangka. Pada RTRW lebih rinci, dilakukan deliniasi kawasan berstatus rawan bencana alam menurut zoning yang lazim berlaku, terutama dikaitkan dengan *disaster management*. Pada RTRW kabupaten dan Kota, serta RTRW kecamatan dilakukan deliniasi kawasan perlindungan setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Pengelolaan kawasan lindung di pulau-pulau kecil dan pesisir dilakukan melalui kegiatan konservasi seperti kegiatan penelitian, ekowisata, kegiatan perikanan tradisional dengan membagi zonasi pemanfaatan ruang lindung
- e. Meningkatkan kemampuan daerah aliran sungai untuk melangsungkan daur hidrologinya agar kinerja jaringan irigasi dapat ditingkatkan

7. Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya

a. Rencana Peruntukan Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi Terbatas terletak di Kab. Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kab. Way Kanan, Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Timur, Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Pesawaran dan Kab. Lampung Selatan.

Tabel 2.20
Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Lampung

No	Nama Kawasan	Register	Lokasi Kawasan	Luas (Ha)
	Hutan Produksi Terbatas			
1	Kelompok HPT Pesisir		Pesisir Barat	33.358,00
	Jumlah			33.358,00
	Hutan Produksi Tetap			

No	Nama Kawasan	Register	Lokasi Kawasan	Luas (Ha)
1	HP Way Hanakau	46	Way Kanan dan Lampung Utara	20.195,00
2	HP Way Pisang	1	Lampung Selatan	8.395,00
3	HP Pematang Taman	2	Lampung Selatan	1.272,00
4	HP Sungai Buaya	45	Mesuji	43.100,00
5	HP Tangkit Titi Bungur	18	Pesawaran	1.389,76
6	HP Way Terusan	47	Lampung Tengah	13.749,30
7	HP Sungai Muara Dua	44	Way Kanan dan Tulang Bawang Barat	32.643,50
8	HP Way Ketibung II	5	Lampung Selatan	1.922,90
9	HP Way Ketibung II	35	Lampung Selatan	3.800,00
10	HP Way Kibang	37	Lampung Timur	6.538,00
11	HP Gedong Wani	40	Lampung Timur dan Lampung Selatan	32.200,00
12	HP Rebang Register	42	Way Kanan	13.151,50
13	HP Giham Tahmi		Way Kanan	12.655,95
	Jumlah			191.012,91

Sumber: Badan Pengelolaan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, 2016

b. Rencana Peruntukan Kawasan Pertanian

Luas total dari kawasan peruntukan pertanian hingga tahun 2037 adalah 473.509,68 Ha. Lokasi pertanian lahan basah di Provinsi Lampung saat ini cukup tersebar diseluruh wilayah. Akan tetapi secara spesifik arahan untuk pertanian lahan basah dengan produksi komoditasnya tanaman padi diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung, kecuali Kota Bandar Lampung. Luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditas unggulan ubi kayu dan jagung, diupayakan untuk dipertahankan, terutama untuk mengembangkan pertanian kerakyatan. Pengembangan pertanian lahan kering selanjutnya diarahkan diseluruh kabupaten pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan yang cukup sesuai, kecuali pada Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus. Provinsi Lampung juga mengalokasikan program/kegiatan cetak sawah pada tahun 2014-2016, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan kebutuhan lahan padang penggembalaan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Tabel 2.21

Rekapitulasi Program/Kegiatan Pengembangan Cetak Sawah (APBN) di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016

Kabupaten	Tahun			Total
	2014	2015	2016	
Mesuji	0	2.000	5.800	7.800
Tulang Bawang	150	0	4.750	4.900
Tulang Bawang Barat	0	0	1.000	1.000
Lampung Tengah	0	0	445	445
Total	150	2.000	11.995	14.145

Sumber: Dokumen Pengembangan Cetak Sawah Tahun 2014-2016

Tabel 2.22
Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kabupaten Lampung Selatan	36.052
2	Kabupaten Pesawaran	8.452
3	Kabupaten Tanggamus	20.643
4	Kabupaten Pringsewu	8.145
5	Kabupaten Lampung Tengah	71.791
6	Kota Metro	1.215
7	Kabupaten Lampung Timur	50.553
8	Kabupaten Mesuji	27.700
9	Kabupaten Tulang Bawang	31.800
10	Kabupaten Tulang Bawang Barat	9.935
11	Kabupaten Lampung Utara	18.870
12	Kabupaten Way Kanan	18.784
13	Kabupaten Lampung Barat	23.895

Sumber: Perda No 17 Tahun 2013

Total luas lahan di atas diperuntukan bagi pertanian, termasuk kebutuhan peternakan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan instruksi Nomor 3/Ins/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyediaan Tanah/Lahan bagi Peternakan. Terbitnya instruksi tersebut dalam rangka meningkatkan produksi peternakan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Instruksi ini mengamanatkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia untuk mencari tanah/lahan paling sedikit 10 Ha (sepuluh hektar) yang dapat dijadikan areal padang rumput yang dapat digunakan oleh Peternak Sapi, Kerbau, atau Kambing bagi daerah tersebut. Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang dengan komoditas unggulan yaitu sapi potong dan kambing saburai. Adapun kebutuhan luas lahan ladang penggembalaan untuk seluruh wilayah di Provinsi Lampung adalah sebesar 42.372,73 Ha sesuai dengan tabel di bawah.

Tabel 2.23
Luas Kebutuhan Lahan Ladang Penggembalaan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kabupaten Lampung Selatan	14.152,55
2	Kabupaten Pesawaran	2.744,63
3	Kabupaten Tanggamus	1.106,70
4	Kabupaten Pringsewu	1.673,22
5	Kabupaten Lampung Tengah	6.956,24
6	Kota Metro	913,14
7	Kabupaten Lampung Timur	6.187,31
8	Kabupaten Mesuji	572,23
9	Kabupaten Tulang Bawang	823,43
10	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1.106,08
11	Kabupaten Lampung Utara	1.857,20
12	Kabupaten Way Kanan	2.317,60
13	Kabupaten Lampung Barat	1.470,08
14	Kota Bandar Lampung	131,24
15	Kabupaten Pesisir Barat	361,11
Total Luas Lahan		42.372,73

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2016

c. Rencana Peruntukan Kawasan Perikanan

Potensi perikanan di Lampung sangat besar dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Untuk sumberdaya perikanan laut potensinya sangat besar yang terbagi dalam tiga wilayah, yaitu sepanjang pesisir pantai timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan sepanjang pesisir pantai barat. Untuk perikanan tangkap sebaran ikan didominasi oleh berbagai jenis ikan ekonomis penting seperti tuna mata esar, setuhuk, setuhuk loreng, tuna sirip biru dan albakora yang meliputi daerah pesisir pantai Barat, Teluk Lampung di Pesawaran, Teluk Semangka di Kabupaten Tulang Bawang dan Pesisir Pantai Timur Sumatera lainnya. Untuk perikanan budidaya air payau dikembangkan di pesisir pantai Timur dilaksanakan dengan sangat memperhatikan kelestarian hutan mangroove, agar dapat menjaga ekosistem pesisir dan kelautan. Untuk budidaya kolam dapat dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Luas kawasan potensi perikanan ini adalah 128.846,16 Ha di daratan yang terdiri dari 73.024 Ha perikanan budidaya air payau, 55.823,16 Ha perikanan budidaya air tawar, dan potensi laut 382.689 Ha.

Pelabuhan perikanan dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang (Kuala Teladas), Kabupaten Lampung Barat (Kuala Krui dan Bengkunt), Kota Bandar Lampung (Lempasing), Kabupaten Tanggamus (Kota Agung) dan Kabupaten Lampung Timur (Labuan Maringgai). Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

Selain itu berdasarkan KEPMEN NO 01/ KEP-DPJ/2014 tentang Penetapan 13 Lokasi Sentra Produksi Sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan tahun 2014, adapun sentra produksi perikanan budidaya di Provinsi Lampung tersebar di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.25/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan ditetapkan Kawasan Minapolitan Provinsi Lampung yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Ketapang), Kabupaten Lampung Timur (Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti), Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduk Pidada, dan Kecamatan Gedong Tatan), Lampung Tengah (Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Kalirejo, dan Kampung Cabang) dan Kabupaten Tulang Bawang (Kabupaten Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas).

d. Rencana Peruntukan Kawasan Perkebunan

Luas kawasan peruntukan perkebunan hingga tahun 2037 adalah 9.645,35 km². Beberapa tanaman yang perkebunan yang bersifat kerakyatan yaitu perkebunan kopi, lada, tebu, kakao dan kelapa dalam. Untuk beberapa komoditas tersebut diarahkan pada lahan yang cukup sesuai yaitu di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus. Sedangkan untuk perkebunan skala besar diarahkan untuk tanaman tebu terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (Kec. Menggala), Kabupaten Lampung Tengah (Kec. Bekri), Kabupaten Lampung

Utara, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perkebunan tanaman karet terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (Kec. Sidomulyo dan Kec. Tanjung Bintang), Kabupaten Tanggamus (Kec. Pugung), Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah. Perkebunan tanaman kelapa sawit terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang. Pada dasarnya arahan pola ruang untuk kawasan perkebunan untuk masing – masing komoditas perlu disesuaikan dengan hasil analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan masing – masing komoditas perkebunan (kopi, lada, tebu, kakao, kelapa dalam, karet, dan kelapa sawit). Rencana pengembangan kawasan perkebunan di atas merupakan salah satu perwujudan ketahanan pangan nasional.

e. Rencana Peruntukan Kawasan Pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi:

- Kabupaten Tanggamus (cadangan) meliputi ziolit (437.670.000 m³), emas (415.677 ton), batu bara (867.000 ton), geothermal (400 Kw), bentonit (88.700.000 m³) dan granit (62.500.000 m³, dan andesit di Kecamatan Kelumbayaan.
- Kabupaten Lampung Barat (cadangan) meliputi andesit (1.000.000 m³), emas (16.783 Ha), geothermal (430 Kw), trass (2.750.000 m³) diatomea (170.000 m³) dan perlit (10.500.000 m³).
- Kabupaten Lampung Utara (cadangan), yaitu andesit (97.400.000 m³).
- Kabupaten Way Kanan (cadangan) meliputi batubara (131.250.000), emas (829.680 ton), marmer (615.800.000 m³), kaolin (2.929.000 m³) dan batu mulia (40.000 m³).
- Kabupaten Mesuji (cadangan), yaitu batubara (360.000 km²).
- Kabupaten Tulang Bawang Barat (cadangan) yaitu pasir kuarsa (3.600.000 m³) dan migas (dalam penelitian).
- Kabupaten Lampung Tengah (cadangan) meliputi andesit (443.260.000 m³), emas (102.875 ton), batubara 2.358.855 ton), biji besi (68.457 ton), fedspar (389.350.000 m³) dan granit (980.600.000 m³).
- Kabupaten Lampung Timur (cadangan) meliputi andesit (3.449.511 m³), pasir kuarsa (32.575.000 m³) dan minyak bumi (dalam penelitian).
- Kabupaten Lampung Selatan (cadangan) meliputi andesit (87.340.000 m³), zeolit (8.000 m³), batu bara (5.000 ton), biji besi (1.902.000 ton), pasir besi (5.071 m³), emas (10.732,5 ton), mangan (243.000 ton), granit (287.000.000 m³).
- Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Gunung Rajabasa terdapat cadangan batubara dan panas bumi dengan deposit dalam tahap penelitian.

f. Rencana Peruntukan Kawasan Industri

Kawasan industri yang akan dipertahankan pengembangannya sebagai kawasan industri adalah 194,4 km². Kawasan Industri yang telah beroperasi di Provinsi Lampung terdapat di wilayah Tanjung Bintang Lampung Selatan seluas 350 Ha. Selain itu pola yang akan dikembangkan secara keseluruhan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem. Adapun sebaran kawasan peruntukan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, meliputi:

1. Kawasan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus
2. Kawasan Industri Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan
3. Kawasan Industri Mesuji, Kabupaten Mesuji
4. Kawasan Industri Lampung Tengah
5. Kawasan Industri Way Kanan
6. Kawasan Industri Tulang Bawang Barat
7. Kawasan Industri Lampung (KAIL II), Kabupaten Lampung Selatan
8. Kawasan Industri Tulang Bawang
9. Kawasan Industri Katibung, Kabupaten Lampung Selatan

g. Rencana Peruntukan Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata Pantai Barat Lampung; meliputi Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat
2. Pengembangan Kawasan TNWK Lampung Safari Way Kambas *Park and Conservation Center*.
3. Pengembangan kawasan wisata terintegrasi Teluk Lampung; meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran dan Tanggamus.

h. Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman

Luas kawasan permukiman yang direncanakan adalah 466.886,27 Ha. Kawasan tersebut juga memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kawasan permukiman perkotaan akandiarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.
- Kawasan permukiman perdesaan akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Rencana pengembangan permukiman perkotaan pada umumnya di arahkan di kawasan permukiman kepadatan tinggi sementara itu untuk permukiman perdesaan di arahkan di permukiman berkepadatan rendah dan sedang.

i. Rencana Peruntukan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Lampung memiliki beberapa kawasan peruntukan pertahanan dan kemanan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Pusat pendidikan dan latihan tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
2. Pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Teluk Ratai
3. Pusat Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia Pangeran M Bunyamin (Astra Ksetra)
4. Pusat Pendidikan dan Latihan Kepolisian
5. Pangkalan udara Tentara Nasional Angkatan Darat
6. Wilayah Pertahanan Statis Kawasan Brigif 3 WAR dan Puslatpur WAR TNI- AL, Kawasan Ksatrian Kimal Lampung, Kawasan Ksatrian Satuan Markas, Korem 043/Gatam, Kawasan Ksatrian Hurun, Kawasan Ksatrian Pantai Clara, Kawasan Ksatrian Rumah Dinas AL, Kawasan Ksatrian Wilayah Pertahanan Statis (Ksatrian dan daerah latihan) Lanal Lampung dan Lanud. Selain itu terdapat wilayah pertahanan statis diluar kasatrian dan daerah latihan yang meliputi (a) daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; (b) penyimpanan barang – barang dan berbahaya lainnya; (c) daerah dikposalta ruangan amunisi; (d) daerah kepentingan pertahanan udara dan (e) objek vital nasional yang bersifat nasional.

8. Rencana Kawasan Strategis

a. Kawasan Strategis Nasional

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu:

1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi

Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungny Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di samping itu pada kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama pada kawasan Krakatau yang merupakan *world heritage*.

2. Kawasan Perbatasan Negara di pesisir barat Provinsi Lampung yang berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
3. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13

- Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)– Suaka Margasatwa Gunung Mas;
4. Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), adapun yang merupakan KSPN di Provinsi Lampung adalah KSPN Gunung Anak Krakatau, KSPN Way Kambas dan KSPN Danau Ranau.
 5. Kebun Raya Liwa (KRL) kerjasama pengelolaan kementerian PUPR dengan LIPI. Luas Kebun Raya Liwa 86,68 Ha dan termasuk dalam 12 Kebun Raya Daerah yang diprioritaskan pembangunannya 2015-2019. Pada saat ini sudah dilakukan pembangunan plaza penerima, Gerbang Utama, Loket dan Pusat Informasi KRL, pembangunan taman tematik, pembibitan, penanaman tanaman koleksi, eksplorasi, dan pendampingan, pembangunan jalan setapak, gazebo/sheter, toilet umum, serta pemeliharaan tanaman koleksi. Saat ini KRL masih berbentuk UPTD dibawah dinas Kehutanan dan kedepan akan tetap UPTD dan berada dibawah Balitbangnovda Kabupaten Lampung Barat.
 6. Kawasan Andalan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dimana terdapat beberapa kawasan andalan yang berada di Provinsi Lampung yaitu kawasan andalan Bandar Lampung – Metro (sektor unggulan: perkebunan, pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan panas bumi), Kawasan Mesuji dan Sekitarnya (sektor unggulan:pertanian, perkebunan dan industri), Kawasan Kotabumi dan sekitarnya (sektor unggulan : pertanian, perkebunan dan perikanan), Kawasan Liwa – Krui (sektor unggulan : pertanian, perkebunan, perikanan laut, pariwisata, pertambangan dan panas bumi), dan Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya (sektor unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata)

b. Kawasan Strategis Provinsi

Aspek Ekonomi

Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup:

1. **Kawasan Metropolitan Bandar Lampung**, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari kawasan metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu:
 - a. **Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang** di Kota Bandar Lampung.
 - b. **Kawasan Bakauheni** memiliki nilai sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa.

- c. **Kawasan Pemerintahan**, Kawasan pusat perkantoran pemerintah Provinsi Lampung yang akan dipindahkan ke Jatiagung (Kabupaten Lampung Selatan) untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota.
 - d. **Kawasan Aeropolitan Natar**, Kecamatan Natar adalah salah satu daerah penyangga satelit dari Kota Bandar Lampung, akan dikembangkan menjadi kawasan *aeropolitan*.
 - e. **Kawasan Teluk Lampung**, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi. Kawasan Teluk Lampung memiliki potensi alam yang beragam, mulai dari wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR.
 - f. **Kawasan Pusat Pertahanan, akan dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin. Kecamatan padang cermin memiliki** Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai di Kecamatan Padang Cermin; dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padang Cermin
 - g. **Kawasan Pendidikan LARAIN**, yang akan dikembangkan sebagai kawasan pendidikan perguruan tinggi di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan.
2. **Kota Terpadu Mandiri (KTM)** yang ada di Kabupaten Mesuji,
 3. **Kawasan Ekonomi Khusus**, yang akan dikembangkan adalah kawasan ekonomi khusus pariwisata Teluk Nipah yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu juga akan dikembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Pantai Barat Lampung meliputi Pesisir Barat, TNBBS, Danau Ranau dan wisata agro kopi di Kabupaten Lampung Barat.
 4. **Kawasan Peruntukan Industri**, yang akan dikembangkan mencakup Kawasan Industri Lampung di Kec. Tanjung Bintang dan Kawasan Industri Way Pisang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan serta Kawasan industri Maritim di Kabupaten Tanggamus.

Aspek Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Aspek Lingkungan Hidup, ini mencakup:

1. **Kawasan penyelamatan ekosistem bagian selatan**, yaitu Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Way Kambas yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.
2. **Kebun Raya Liwa** di Kabupaten Lampung Barat, sebagai Kebun Raya prioritas Provinsi Lampung yang merupakan kerjasama pengelolaan antara Kementerian PUPR dengan LIPI dan Provinsi Lampung.
3. **Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman** meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin. Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli. Pada kawasan ini akan dikembangkan pusat penelitian *obser-vatorium* yang merupakan kerjasama IAO LESSECS (ITERA Astronomical Obser-vatory and Space Science).

4. **Kawasan Pulau Segama dan Pulau Batang**, terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
5. **Kawasan Cagar Alam & Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau**, merupakan kawasan suaka alam berbentuk cagar alam dan cagar laut. Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau terletak di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Selat Sunda.

Aspek Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan Strategis untuk kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi ini mencakup:

1. **Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu** di Kawasan Pusat Olahraga di Saburai, PKOR Way Halim dan GOR ITERA.
2. **Lampung Teknopolitan Area**, yang akan di kembangkan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan kawasan industri berbasis pertanian yang akan dikembangkan dengan luas sekitar 1000 Ha.

Aspek Sosial Budaya

Kawasan strategis aspek sosial budaya Provinsi Lampung terdapat di Kawasan Pekon Kenali Kabupaten Lampung Barat. Pekon Kenali merupakan salah satu perkampungan tua di lereng Gunung Pesagi yang diyakini sebagian besar masyarakat Lampung sebagai cikal-bakal (asal-usulnya) nenek moyang mereka. Bangunan tradisionalnya berupa rumah panggung dengan atap ijuk, dinding kayu, dan tiang-tiang yang terbuat dari balok kayu utuh dan besar.

Aspek Lainnya

Kawasan strategis ini diperlukan dalam rangka sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi (ke-terpaduan) antara struktur dan pola ruang antarwilayah kabupaten/kota di dalam provinsi dan antarlintas batas wilayah luar provinsi dengan provinsi lainnya. Dalam hal ini Provinsi Lampung berbatasan dengan ketiga wilayah provinsi lainnya yaitu Provinsi Bengkulu, Banten, dan Provinsi Sumatera Selatan. Hal-hal yang perlu disinkronisasikan, diintegrasikan, dan disinergisasikan antarwilayah perbatasan Provinsi Lampung dengan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan Provinsi Banten, bagian selatan Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Banten, yaitu di perairan Selat Sunda. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antarPulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional.
2. Dengan Provinsi Bengkulu, bagian utara Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, yaitu dengan Wilayah Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan struktur dan pola ruang antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu yaitu, adanya kawasan penyelamatan

ekosistem bagian selatan Pulau Sumatera mencakup Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan jaringan Jalan Nasional Lintas Barat Pulau Sumatera.

3. Dengan Provinsi Sumatera Selatan, bagian utara Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dengan Wilayah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Timur dan Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Selatan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu rencana struktur jalur kereta api Bandar Lampung – Kertapati, jaringan jalan lintas tengah dan lintas timur Sumatera, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Ranau.

BAB 3

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS DAN PRIORITAS

3.1 Isu Pembangunan Berkelanjutan

Tahap awal dalam melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung dilakukan berdasarkan pedoman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Metode yang dilakukan dalam upaya identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yaitu dengan cara meninjau dokumen-dokumen legal terkait dengan perencanaan dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung serta dengan melakukan konsultasi publik dan Focus Group Discussion. Adapun sumber dokumen yang digunakan untuk proses identifikasi isu sebagai berikut :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2014-2019

Dokumen tersebut merupakan dokumen legal di Provinsi Lampung, sehingga dapat dikatakan isu pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan, berdasarkan kondisi saat ini yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan kajian pada dokumen legal yaitu RTRW Provinsi Lampung, RPJMD, Konsultasi Publik, dan Focus Group Discussion dihasilkan 35 isu pembangunan berkelanjutan yang diperoleh.

Hasil identifikasi isu dijabarkan dalam tabel isu pembangunan berkelanjutan beserta penjelasan setiap isu pembangunan berkelanjutan untuk dilakukan verifikasi dalam forum bersama masyarakat dan pejabat berwenang untuk proses pengolahan sehingga menghasilkan keluaran isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis di Provinsi Lampung. Berikut isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur berikut:

- a. karakteristik wilayah;
- b. tingkat pentingnya potensi dampak;
- c. keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
- d. keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau

f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Tabel 3.1
Isu Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
1	LINGKUNGAN	Banyaknya kondisi jalan rusak dengan kategori kritis yang berfungsi sebagai lalu-lintas Sumatera dan Jawa serta memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya	Kondisi jalan nasional 10% rusak berat dan 7% kritis, Kondisi jalan provinsi 21,52% rusak berat dan 16,73% kritis	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD	√		Usulan Isu menjadi : Menurunnya kualitas infrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa adanya indikasi pembangunan jalan tol yang memiliki potensi memberikan dampak lingkungan
2	SOSIAL	Perlunya dikembangkan dan dibangun infrastruktur wilayah, agar terjadi konektivitas antarpusat-pusat kegiatan dan antarwilayah, untuk mengurangi disparitas pembangunan antara pusat kota (Bandar Lampung) dengan wilayah-wilayah di sekitarnya		RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD	√		Usulan isu : Dapat digabung dengan isu yang pertama terkait dengan konektivitas
3	LINGKUNGAN	Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan.	Kerusakan jaringan irigasi karena rendahnya pemeliharaan	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD	√		
4	EKONOMI	Masih kurangnya <i>supply</i> tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri Provinsi Lampung.	Rasio elektrifikasi hanya 85% sementara nasional 78%, Lampung mengalami defisit listrik sekitar 100—150 MW	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2014-	√		Terdapat rencana peenyambungan SUTET 150 KV ke Sumatera Selatan, peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
				2019, Konsultasi Publik Dan FGD			dan/atau cadangan energi baru dan terbarukan.
5	LINGKUNGAN	Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi (limbah, sampah, drainase)		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD	√		Sanitasi ini meliputi TPA Regional. Isu yang sedang berkembang itu mengenai TPA Regional. Usulan Isu : Tingginya risiko dampak lingkungan akibat pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir
6	LINGKUNGAN	Adanya risiko dampak dalam pengelolaan DAS terpadu		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019		X	
7	EKONOMI	Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
8	LINGKUNGAN	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
9	LINGKUNGAN	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas septik tank akibat terbatasnya luas lahan	Sebagian masyarakat tidak dapat membuat septik tank karena terbatas lahan, konstruksi septik tank tidak standar tanki menjadi buruk pengolahannya dan sulit diperhitungkan, kebocoran pada septik tank, merembesnya air dari septik tank mencemari air tanah, IPLT terdapat 4 tetapi yang digunakan hanya 1 unt.	Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung 2015, Konsultasi Publik Dan FGD		X	

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
10	LINGKUNGAN	Kinerja IPLT belum optimal akibat kurangnya perawatan	Sumber penampungan jarang dikurang sehingga over kapasitas, IPLT yang rusak tidak diperbaiki	Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung 2015, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
11	LINGKUNGAN	Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan	Penyediaan sarana prasarana persampahan masih terhambat anggaran, kurangnya petugas SOKLI dalam upaya pengelolaan persampahan	Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung 2015, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
12	LINGKUNGAN	Kurang optimalnya kinerja TPS untuk penampungan persampahan	TPS tidak tertutup, kondisi TPA Bakung tidak memenuhi persyaratan kesehatan	Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung 2015, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
13	LINGKUNGAN	Terjadinya genangan di area permukiman disebabkan kapasitas saluran drainase lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.	Gorong-gorong jalan tertutup endapan atau sampah, terjadinya tipe saluran akibat pembangunan ruko-ruko yang tumbuh pesat dimana-mana, kapasitas saluran drainase kecil terdapat di Kampung Baru, Kampung Anyar, Kampung Sukbaru, Jalan Yos Sudarso, Jalan KH.Moch Salim (Way Lunik), Umbul Jengkol LK I, Lingkungan I (Ketapang), Kampung Karawang (Garuntang), Jalan Slamet Riyadi	Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung 2015, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
14	LINGKUNGAN	Tingginya nilai kemiringan lereng menyebabkan hambatan	Sebagian wilayah berombak sampai bergelombang	RTRW Provinsi Lampung 2009-		X	

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
		yang berat untuk digunakan dalam penggunaannya tanaman semusim, pembangunan dan kapasitas simpanan air yang rendah.	dicirikan oleh bukit2 sempit kemiringan antara 8% hingga 15%	2029, Konsultasi Publik Dan FGD			
15	LINGKUNGAN	Tingginya tingkat kerawanan bencana alam (banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami, kebakaran hutan, gunung api) di beberapa wilayah P rovinsi Lampung	Bencana tanah longsor tersebar di Kab. Lampung Utara, Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat, Kab. Pesawaran, dan Kab. Lampung Selatan, Kebakaran hutan tersebar di Kab. Mesuji, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan dan Kab. Lampung Timur, Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung, Bencana banjir tersebar di Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kota Metro, Kab. Lampung Timur, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat, Kab. Lampung Utara dan Kab. Lampung Selatan, Kawasan	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, Konsultasi Publik Dan FGD	√		

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
			rawan bencana Gunung Api Anak Krakatau				
16	LINGKUNGAN	Menurunnya fungsi kawasan lindung ditandai dengan menurun kualitas lingkungannya		RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
17	LINGKUNGAN	Menurunnya daya dukung sumber daya alam dan kelestarian hutan yang berkelanjutan akibat banyaknya hutan dan tanah kritis.	Kondisi kawasan hutan di Provinsi Lampung cukup memprihatinkan, dimana tingkat kerusakan masih 54,15% atau sekitar 544.085 Ha dari luas hutan yang ada, Kondisi kerusakan terparah adalah hutan produksi sekitar 76,48%, hutan konservasi 37,38% dan hutan lindung sekitar 62,73%, Kerusakan hutan di Provinsi Lampung hingga tahun 2012 sudah mencapai 55% dari luas yang ada akibat berbagai tekanan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Konflik antara gajah liar yang memasuki kawasan permukiman dengan manusia terjadi di beberapa pekon (desa) menyebabkan kerusakan perkebunan warga. Hal ini disebabkan karena kawasan lindung dimanfaatkan masyarakat	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, Konsultasi Publik Dan FGD		X	

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
			menjadi kawasan perkebunan.				
18	LINGKUNGAN	Terdapat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya	Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, Konsultasi Publik Dan FGD	√		
19	LINGKUNGAN	Kurang optimalnya pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan yang produktif;		RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
20	LINGKUNGAN	Terancamnya kepunahan plasma nutfah dan menurunnya keanekaragaman hayati Provinsi Lampung akibat kecepatan upaya rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi juga belum sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi.		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
21	SOSIAL	Tidak konsistennya perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan ruang		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
22	SOSIAL	Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
23	LINGKUNGAN	Masih tinggi tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya peruntukkan industri	Penggundulan dan penggalian bukit – bukit	RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019; usulan forum diskusi, Konsultasi Publik	√		

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
24	LINGKUNGAN	Kerusakan kawasan pesisir dengan ditandai kekeringan hutan mangrove		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
25	SOSIAL	Terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya antara Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
26	SOSIAL	Rendahnya pemahaman dan keberadaan masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
27	EKONOMI	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara (Bandar Udara) yang terbuka dengan dunia luar serta meningkatnya jumlah penumpang dan barang dari dan menuju Provinsi Lampung.		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
28	LINGKUNGAN	Rusaknya daya dukung infrastruktur seperti jaringan transportasi darat baik lintas timur maupun lintas barat dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya.		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	
29	LINGKUNGAN	Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, semakin meningkatnya polusi udara di lingkungan perkotaan, dan	Pola penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun dan trawl, terutama di kawasan terumbu karang (Teluk Lampung), penambangan	RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, Konsultasi Publik Dan FGD		X	

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
		semakin punahnya fauna dan flora lokal	batu hitam di pantai akan memicu percepatan laju erosi pantai dan mengancam jalan utama di sepanjang Pantai Barat. Kawasan erosi pantai terjadi di Teluk Lampung dan Teluk Semangka				
30	LINGKUNGAN	Tingginya risiko dampak akibat rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung		Konsultasi Publik Dan FGD	√		Usulan isu pada forum diskusi yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi
31	LINGKUNGAN	Tingginya risiko dampak akibat Pengoptimalan dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan		Konsultasi Publik Dan FGD	√		Usulan isu pada forum diskusi yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi
32	LINGKUNGAN	Krisis simpanan air di Provinsi Lampung		Konsultasi Publik Dan FGD	√		Usulan isu pada forum diskusi yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi
33	EKONOMI	Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional		Konsultasi Publik Dan FGD	√		Usulan isu pada forum diskusi yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi
34	LINGKUNGAN	Pemenuhan kebutuhan lahan dari terus bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kebutuhan akan lahan tinggal		Konsultasi Publik Dan FGD	√		
35	EKONOMI	Menetapkan dan mengembangkan kawasan pariwisata strategis nasional, dan kawasan pariwisata khusus		Konsultasi Publik Dan FGD	√		
36	EKONOMI	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kepariwisataan		Konsultasi Publik Dan FGD	√		

NO	TEMA	ISU PB	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
37	EKONOMI	Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Provinsi Lampung untuk mendukung terwujudnya Trans Asean Railways & Trans Sumatera Railways dilatarbelakangi oleh Jalur rel Kereta Api eksisting yang menuju pelabuhan batubara masih melintasi pusat kota (Bandar Lampung).	Terdapat permasalahan transportasi seperti tingkat pelayanan angkutan jalan raya semakin menurun akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan.	RAD-GRK Provinsi Lampung Tahun 2012, Konsultasi Publik Dan FGD	√		

Sumber :Proses Pelingkupan, 2017

3.2 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Tahapan kedua yang dilakukan yaitu menentukan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis. Untuk mendapatkan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan cara *focusing* atau pengelompokan isu menjadi satu topik isu dan diverifikasi dengan masyarakat bersama pemangku kepentingan melalui pembahasan atau konsultasi. Isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis didapatkan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya, kemudian didiskusikan dalam forum pembahasan. Forum ini dilakukan bertujuan untuk menerima masukan isu-isu atau memverifikasi isu pembangunan berkelanjutan pada tahapan sebelumnya.

Hasil pada saat forum pembahasan yaitu berupa masukan-masukan isu yang dianggap strategis di Provinsi Lampung. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di Provinsi Lampung berdasarkan hasil forum pembahasan sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas infrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa dan adanya indikasi dampak melalui pembangunan jalan tol.
2. Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan.
3. Masih kurangnya *supply* tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri Provinsi Lampung.
4. Tingginya risiko dampak lingkungan akibat pengembangan TPA Regional
5. Tingginya tingkat kerawanan bencana alam (banjir, longsor, gerakan tanah, puting beliung, tsunami, kebakaran hutan, gunung api) di beberapa wilayah Provinsi Lampung.
6. Menurunnya luasan lahan pertanian pangan akibat konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya.
7. Masih tinggi tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya peruntukkan industri
8. Tinggi risiko dampak akibat rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung
9. Tingginya risiko dampak akibat pengoptimalan dukungan “Bumi Agribisnis” untuk mendukung ketahanan pangan.
10. Krisis simpanan air di Provinsi Lampung
11. Peningkatan fasilitas pelabuhan utama internasional
12. Terdapat pengoptimalan investasi dalam dan luar negeri dalam sektor kepariwisataan
13. Belum adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kepariwisataan
14. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan
15. Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Provinsi Lampung untuk mendukung terwujudnya Trans Asean Railways & Trans Sumatera Railways dilatarbelakangi oleh Jalur rel Kereta Api eksisting yang menuju pelabuhan batubara masih melintasi pusat kota (Bandar Lampung).

15 sektor isu pembangunan berkelanjutan strategis di atas merupakan isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis hasil kesepakatan melalui forum pembahasan bersama pemangku kepentingan di Provinsi Lampung.

Berikut tabel isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dihasilkan.

Tabel 3.2
Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

NO	TEMA	ISU STRATEGIS	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
1	LINGKUNGAN	Menurunnya kualitas infrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa dan adanya indikasi dampak melalui pembangunan jalan tol	Kondisi jalan nasional 10% rusak berat dan 7% kritis, Kondisi jalan provinsi 21,52% rusak berat dan 16,73% kritis	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, FGD	√		Usulan Isu menjadi : Menurunnya kualitas infrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa dan adanya indikasi dampak melalui pembangunan jalan tol
2	EKONOMI	Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan.	Kerusakan jaringan irigasi karena rendahnya pemeliharaan	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, FGD	√		
3	LINGKUNGAN	Masih kurangnya <i>supply</i> tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri Provinsi Lampung.	Rasio elektrifikasi hanya 85% sementara nasional 78%, masih terdapat beberapa wilayah yang belum mendapatkan layanan listrik.	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, FGD	√		
4	LINGKUNGAN	Tingginya risiko dampak lingkungan akibat pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019, FGD	√		Sanitasi ini meliputi TPA Regional. Isu yang sedang berkembang itu mengenai TPA Regional. Usulan Isu : Tingginya risiko dampak lingkungan akibat pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir
5	LINGKUNGAN	Tingginya tingkat kerawanan bencana alam (banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami, kebakaran hutan, gunung api) di beberapa wilayah Provinsi Lampung	Bencana tanah longsor tersebar di Kab. Lampung Utara, Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat, Kab. Pesawaran, dan Kab. Lampung Selatan, Kebakaran hutan tersebar di Kab.	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, FGD	√		

NO	TEMA	ISU STRATEGIS	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
			Mesuji, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan dan Kab. Lampung Timur. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung, Bencana banjir tersebar di Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kota Metro, Kab. Lampung Timur, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat, Kab. Lampung Utara dan Kab. Lampung Selatan, Kawasan rawan bencana Gunung Api Anak Krakatau				
6	LINGKUNGAN	Menurunnya luasan lahan pertanian pangan akibat konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya	Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan	RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, FGD	√		
7	LINGKUNGAN	Masih tinggi tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya peruntukkan industri	Penggundulan dan penggalian bukit – bukit	RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019; Usulan forum diskusi	√		
8	LINGKUNGAN	Tingginya risiko dampak akibat rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung		FGD	√		Usulan isu pada forum diskusi yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi
9	LINGKUNGAN	Tingginya risiko dampak akibat Pengoptimalan dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan		FGD	√		Usulan isu pada forum diskusi yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi

NO	TEMA	ISU STRATEGIS	PENJELASAN	SUMBER	STATUS VERIFIKASI		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
10	LINGKUNGAN	Krisis simpanan air di Provinsi Lampung		FGD	√		Usulan isu pada forum diskusi yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi
11	EKONOMI	Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional		FGD	√		Usulan isu pada forum diskusi yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi
12	EKONOMI	Terdapat pengoptimalan investasi dalam dan luar negeri dalam sektor kepariwisataan		FGD	√		
13	EKONOMI	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kepariwisataan		FGD	√		
14	EKONOMI	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara (Bandar Udara) yang terbuka dengan dunia luar serta meningkatnya jumlah penumpang dan barang dari dan menuju Provinsi Lampung.		RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019 Dan FGD	√		
15	EKONOMI	Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Provinsi Lampung untuk mendukung terwujudnya Trans Asean Railways & Trans Sumatera Railways dilatarbelakangi oleh Jalur rel Kereta Api eksisting yang menuju pelabuhan batubara masih melintasi pusat kota (Bandar Lampung).	Terdapat permasalahan transportasi seperti tingkat pelayanan angkutan jalan raya semakin menurun akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan.	RAD-GRK Provinsi Lampung Tahun 2012, Konsultasi Publik Dan FGD	√		

Sumber : Hasil Pengolahan Forum Pemangku Kepentingan, 2017

3.3 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam melakukan pengkajian dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu menentukan isu pembangunan berkelanjutan prioritas melalui kajian identifikasi berdasarkan parameter telaahan karakteristik wilayah, tingkat pentingnya potensi dampak, keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan, keterkaitan dengan materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program dan hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kajian ini ditentukan berdasarkan parameter yang tercantum dalam PP No 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1. Pada tahapan ini digunakan isu pembangunan berkelanjutan hasil identifikasi dan perumusan isu sebelumnya berdasarkan berbagai sumber kajian.

Hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis terdapat 14 isu pembangunan berkelanjutan strategis yang selanjutnya dinilai menggunakan skoring untuk mendapatkan isu prioritas. Penentuan isu prioritas dilakukan dengan cara menentukan nilai skoring pada masing-masing parameter di setiap isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dinilai. Nilai skoring dihitung dengan ordinal yaitu 1 sampai 5 dengan ketentuan bahwa nilai 1 adalah isu yang sangat tidak berpengaruh dan 5 adalah isu yang sangat berpengaruh.

Total skoring yang dihasilkan dihitung menggunakan nilai range dengan cara :

$(\text{Nilai Maximum} - \text{Nilai Minimum}) / 2$

Dihasilkan range yaitu 3.

Dengan demikian diperoleh nilai prioritas berdasarkan range nilai.

Prioritas 1 : 30-26

Prioritas 2 : 15-25

Dihasilkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Masih kurangnya supply tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri Provinsi Lampung.
2. Menurunnya kualitas infrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa dan adanya indikasi pembangunan jalan tol yang memiliki potensi memberikan dampak lingkungan
3. Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional
4. Tingginya risiko dampak lingkungan akibat Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional
5. Krisis simpanan air di Provinsi Lampung
6. Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan.
7. Menurunnya luasan kawasan pertanian pangan akibat konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya

8. Masih tinggi tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya peruntukkan industri
9. Pengoptimalan rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung
10. Pengoptimalan dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan
11. Terdapat pengoptimalan investasi dalam dan luar negeri dalam sektor kepariwisataan
12. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara (Bandar Udara) yang terbuka dengan dunia luar serta meningkatnya jumlah penumpang dan barang dari dan menuju Provinsi Lampung.
13. Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Provinsi Lampung untuk mendukung terwujudnya Trans Asean Railways & Trans Sumatera Railways dilatarbelakangi oleh Jalur rel Kereta Api eksisting yang menuju pelabuhan batubara masih melintasi pusat kota (Bandar Lampung).

Berikut tabel kerja daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Provinsi Lampung sebagai hasil kajian untuk mendapatkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas.

Tabel 3.3
Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

NO	ISU STRATEGIS	Telaahan karakteristik wilayah			Tingkat pentingnya potensi dampak				Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan	Keterkaitan Dengan Materi Kebijakan Rencana Dan/Atau Program							TOTAL	KET
		Peta RBI	Peta RTRW	Peta Tutupan Lahan	S K O R	Indikasi cakupan wilayah	Frekuensi dan/atau intensitas	S K O R		S K O R	S K O R	S K O R	S K O R	S K O R	S K O R			
1	Masih kurangnya <i>supply</i> tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri Provinsi Lampung.	Elevasi Sedang	Permukiman	Lahan Terbuka, Permukiman	5	Besar	Tidak	3	Akibat dari pengoptimalan rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	26	Isu Prioritas
2	Menurunnya kualitas infrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa dan adanya indikasi pembangunan jalan tol yang memiliki potensi memberikan dampak lingkungan	Elevasi Sedang	Peruntukkan permukiman dan perkebunan	Pertanian, Lahan Terbuka, Permukiman dan Savana	5	Besar	Sering	5	Sebab Rencana Pengembangan kawasan Budidaya Permukiman; Akibat dari perwujudan sistem perkotaan Provinsi	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	28	Isu Prioritas
3	Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional	Elevasi Sedang	Peruntukkan permukiman dan pertanian	Permukiman, pertanian	5	Besar	Sering	5	Akibat dari Pembangunan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	28	Isu Prioritas

NO	ISU STRATEGIS	Telaahan karakteristik wilayah			Tingkat pentingnya potensi dampak			Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan	Keterkaitan Dengan Materi Muatan Kebijakan Rencana Dan/Atau Program					TOTAL	KET			
		Peta RBI	Peta RTRW	Peta Tutupan Lahan	SKOR	Indikasi cakupan wilayah Indikasi luas (Besar-Sedang-Kecil)	Frekuensi dan/atau intensitas		SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR					
4	Tingginya risiko dampak lingkungan akibat Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional	Elevasi Sedang & Tinggi	Pertanian, Permukiman, Hutan Lindung, Hutan Suaka	Hutan Rawa, Permukiman	5	Besar	Sering	5	Sebab dalam Menurunnya daya dukung sumber daya alam dan kelestarian hutan yang berkelanjutan akibat banyaknya hutan dan tanah kritis. Akibat dari Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi (limbah, sampah, drainase)	5	Ada	5	Ada	5	Ada	5	30	Isu Prioritas
5	Krisis simpanan air di Provinsi Lampung	Elevasi Sedang, Tinggi	Permukiman, Hutan, Lindung Perkebunan, Pertanian	Lahan Terbuka, Pertanian, Permukiman, Hutan	5	Besar	Sering	5	Sebab dalam rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan & penyediaan air minum; Akibat dari Menurunnya daya dukung sumber daya alam dan kelestarian hutan yang berkelanjutan	5	Ada	5	Ada	5	Ada	5	30	Isu Prioritas

NO	ISU STRATEGIS	Telaahan karakteristik wilayah			Tingkat pentingnya potensi dampak				Keterkaitan Dengan							TOTAL	KET	
		Peta RBI	Peta RTRW	Peta Tutupan Lahan	SKOR	Indikasi cakupan wilayah	Frekuensi dan/atau intensitas	SKOR	Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan	SKOR	Muatan Kebijakan Rencana Dan/Atau Program	SKOR	Muatan RPPLH	SKOR	Hasil RTRWN			SKOR
									akibat banyaknya hutan dan tanah kritis.									
6	Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan.	Elevasi Tinggi	Pertanian, Permukiman	Pertanian	5	Besar	Sering	5	Akibat dari Rendahnya penyediaan sumberdaya air baku untuk air minum dan irigasi. Sebab dalam Menurunnya luasan lahan pertanian pangan akibat konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya	5	Ada	5	Ada	5	Ada	5	30	Isu Prioritas
7	Tingginya tingkat kerawanan bencana alam (banjir, longsor, kebakaran hutan) di beberapa wilayah Provinsi Lampung	Elevasi Sedang, Tinggi	Permukiman, Hutan, Lindung Perkebunan, Pertanian	Lahan Terbuka, Pertanian, Permukiman, Hutan	5	Besar	Sering	5	Sebab dalam Terancamnya kepunahan plasma nutfah dan menurunnya keanekaragaman hayati Provinsi Lampung; Akibat dari Menurunnya daya dukung sumber daya alam	5	Ada	5	Ada	5	Ada	5	30	Isu Prioritas

NO	ISU STRATEGIS	Telaahan karakteristik wilayah			Tingkat pentingnya potensi dampak			Keterkaitan Dengan Materi Muatan Kebijakan Rencana Dan/Atau Program									TOT AL	KET
		Peta RBI	Peta RTRW	Peta Tutupan Lahan	S K O R	Indikasi cakupan wilayah Indikasi luas (Besaran-Sedang-Kecil)	Frekuensi dan/atau intensitas	S K O R	Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan	S K O R	Muatan RPPLH	S K O R	Hasil RTRWN	S K O R				
									dan kelestarian hutan yang berkelanjutan akibat banyaknya hutan dan tanah kritis & Menurunnya fungsi kawasan lindung ditandai dengan menurun kualitas lingkungannya									
8	Menurunnya luasan kawasan pertanian pangan akibat konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya	Elevasi Tinggi	Pertanian, Permukiman	Pertanian	5	Sedang	Tidak	3	Akibat dari Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan.	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	26	Isu Prioritas
9	Masih tinggi tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya peruntukkan industri	Elevasi Sedang & Tinggi	Permukiman, pertanian, Hutan Lindung	Lahan terbuka, hutan rawa, hutan kering, pertanian	5	Besar	Sering	5	Sebab dalam Tingginya tingkat kerawanan bencana alam (banjir, longsor, kebakaran hutan) di beberapa wilayah Provinsi Lampung, Menurunnya daya dukung sumber	5	Ada	5	Ada	5	Ada	5	30	Isu Prioritas

NO	ISU STRATEGIS	Telaahan karakteristik wilayah			Tingkat pentingnya potensi dampak			Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan	Keterkaitan Dengan Materi Muatan Kebijakan Rencana Dan/Atau Program							KET									
		Peta RBI	Peta RTRW	Peta Tutupan Lahan	Indikasi cakupan wilayah	Frekuensi dan/atau intensitas	Indikasi luas (Besaran-Sedang-Kecil)		S	K	O	R	S	K	O		R	S	K	O	R	TOTAL			
10	Pengoptimalan rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung	Elevasi Sedang	Permukiman, Perkebunan, Pertanian	Lahan Terbuka, Pertanian, Permukiman	5	Besar	Tidak	5	Sebab dalam Menurunnya kualitas infrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	28	Isu Prioritas							
11	Pengoptimalan dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan	Elevasi Tinggi	Pertanian, Permukiman	Pertanian	3	Besar	Tidak	5	Akibat dari Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan.	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	26	Isu Prioritas							
12	Terdapat pengoptimalan investasi dalam dan luar negeri	Elevasi Tinggi, sedang	Pariwisata, Hutan Lindung,	Permukiman, Hutan,	5	Besar	Tidak	5	Akibat pengoptimalan investasi dalam sektor pariwisata	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	28	Isu Prioritas							

NO	ISU STRATEGIS	Telaahan karakteristik wilayah			Tingkat pentingnya potensi dampak			Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan	Keterkaitan Dengan Materi Muatan Kebijakan Rencana Dan/Atau Program							TOT AL	KET	
		Peta RBI	Peta RTRW	Peta Tutupan Lahan	S K O R	Indikasi cakupan wilayah Indikasi luas (Besar-Sedang-Kecil)	Frekuensi dan/atau intensitas sering/tidak		S K O R	S K O R	S K O R	Muatan RPPLH	S K O R	Hasil RTRWN	S K O R			
	dalam sektor kepariwisataan		Taman Nasional	Cagar Alam				akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.										
13	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kepariwisataan	Elevasi Tinggi, sedang	Pariwisata, Hutan Lindung, Taman Nasional	Permukiman, Hutan, Cagar Alam	3	Besar	Tidak	3	Akibat ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata akan berdampak pada tingkat aksesibilitas kunjungan wisata.	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	24	
14	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara (Bandar Udara) yang terbuka dengan dunia luar serta meningkatnya jumlah penumpang dan barang dari dan menuju Provinsi Lampung.	Elevasi rendah, sedang	Pertanian, Permukiman	Lahan terbuka, Pertanian, Permukiman	5	Besar	Tidak	5	Akibat dari meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan adalah alih guna lahan terbuka dan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun.	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	28	Isu Prioritas
15	Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Provinsi Lampung untuk mendukung terwujudnya Trans Asean Railways &	Elevasi rendah, sedang	Pertanian, Permukiman	Lahan terbuka, Pertanian, Permukiman	5	Besar	Tidak	5	Akibat dari meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan adalah alih guna	3	Ada	5	Ada	5	Ada	5	28	Isu Prioritas

NO	ISU STRATEGIS	Telaahan karakteristik wilayah			Tingkat pentingnya potensi dampak			Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan	Keterkaitan Dengan Materi Muatan Kebijakan Rencana Dan/Atau Program										
		Peta RBI	Peta RTRW	Peta Tutupan Lahan	SKOR	Indikasi cakupan wilayah Indikasi luas (Besaran-Sedang-Kecil)	Frekuensi dan/atau intensitas sering/tidak		SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	TOTAL	KET	
	Trans Sumatera Railways dilatarbelakangi oleh Jalur rel Kereta Api eksisting yang menuju pelabuhan batubara masih melintasi pusat kota (Bandar Lampung).																		

Sumber : Hasil Pengolahan Analisis, 2017

BAB 4

KAJIAN PENGARUH KRP TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Analisis Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan keseimbangan diantaranya. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan perkotaan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan perkotaan.

Metode yang digunakan adalah overlay dengan teknik *boolean*. Data yang digunakan untuk membuat peta daya dukung lahan adalah sebagai berikut:

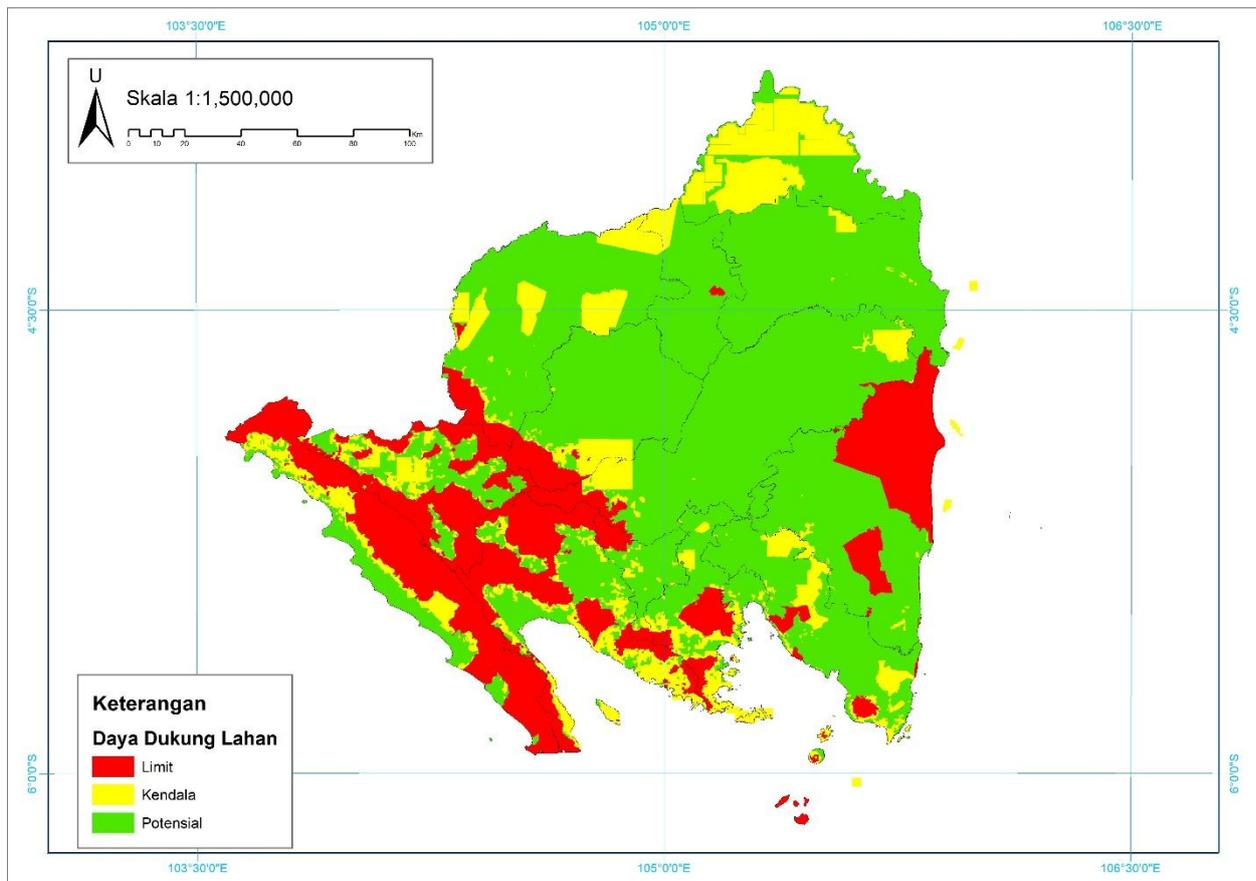
- a. Peta Kemiringan Lereng
- b. Peta Topografi
- c. Peta Kehutanan
- d. Peta Kawasan Pertambangan

Lahan Limit adalah lahan yang dibatasi untuk tidak dilakukan kegiatan pembangunan. Klasifikasi Lahan Limit adalah lahan dengan ketinggian >2000 mdpl serta memiliki kelerengan $>40\%$. Lahan kendala adalah lahan yang dapat dikembangkan namun lebih baik dipertahankan fungsi utamanya. Klasifikasi Lahan Kendala adalah kelerengan $15-40\%$. Lahan potensial adalah lahan yang dapat dilakukan pembangunan. Klasifikasi Lahan Potensial adalah lahan yang tidak termasuk lahan limit dan Kendala.

Integrasi hasil analisis daya dukung lahan dengan Rencana Pola Ruang dalam RTRW adalah sebagai berikut:

- a. Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung
- b. Lahan kendala hutan produksi dan pertambangan dijadikan sebagai kawasan budidaya. Lahan kendala kelerengan $15-40\%$ dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya.
- c. Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya.

Peta daya dukung lahan provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.

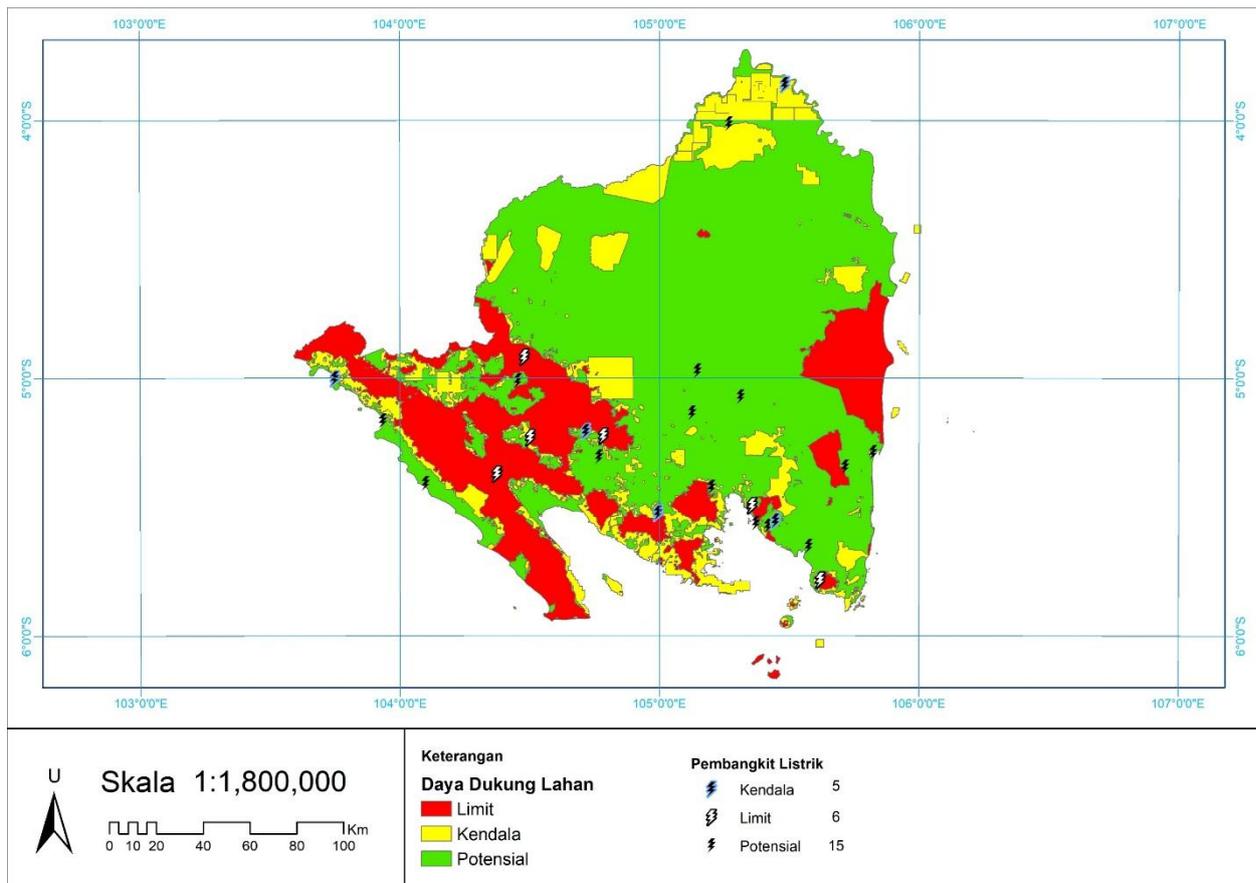


Gambar 4.1 Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

4.1.1 Analisis Pengembangan Pembangkit Listrik terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Hasil overlay pengembangan pembangkit listrik terhadap daya dukung lahan adalah terdapat 5 pembangkit listrik yang berada di dalam kawasan kendala, 6 pembangkit listrik yang berada di dalam kawasan limit, dan 15 pembangkit listrik yang berada di dalam kawasan potensial. Secara pemanfaatan terdapat dua rencana pembangkit listrik yang terdapat di kawasan limit, yaitu PLTU Rajabasa 4x55 MW dan PLTA Way Semangka 50 MW dan terdapat 1 pembangkit listrik eksisting yang terdapat di kawasan limit yaitu PLTA Way Besai. Peta pengembangan pembangkit listrik terhadap daya dukung lahan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2 Peta Pengembangan Pembangkit Listrik terhadap Daya Dukung Lahan

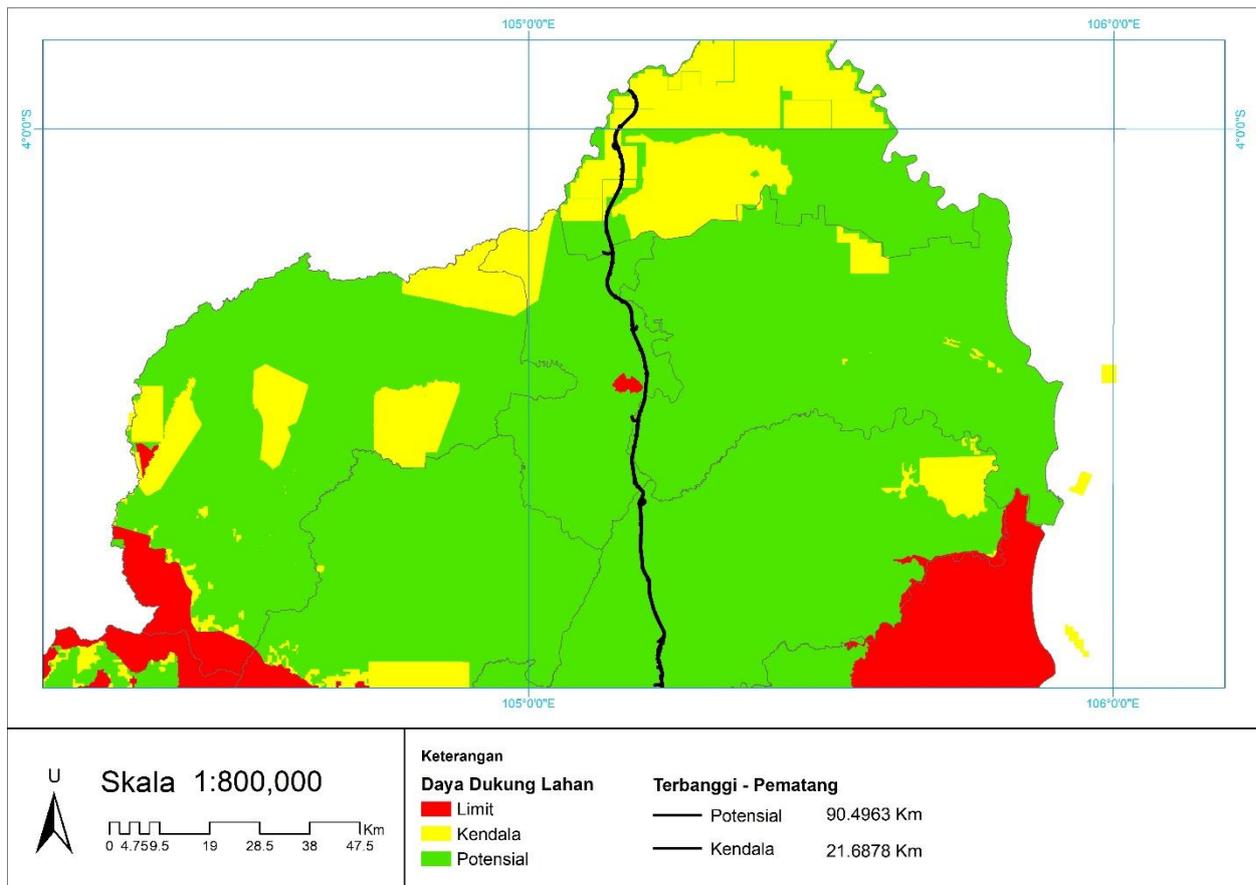
4.1.2 Analisis Pembangunan Jalan Tol terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Jaringan Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang menghubungkan antar satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jaringan jalan Tol di Provinsi Lampung (PP No. 26 TAHUN 2008):

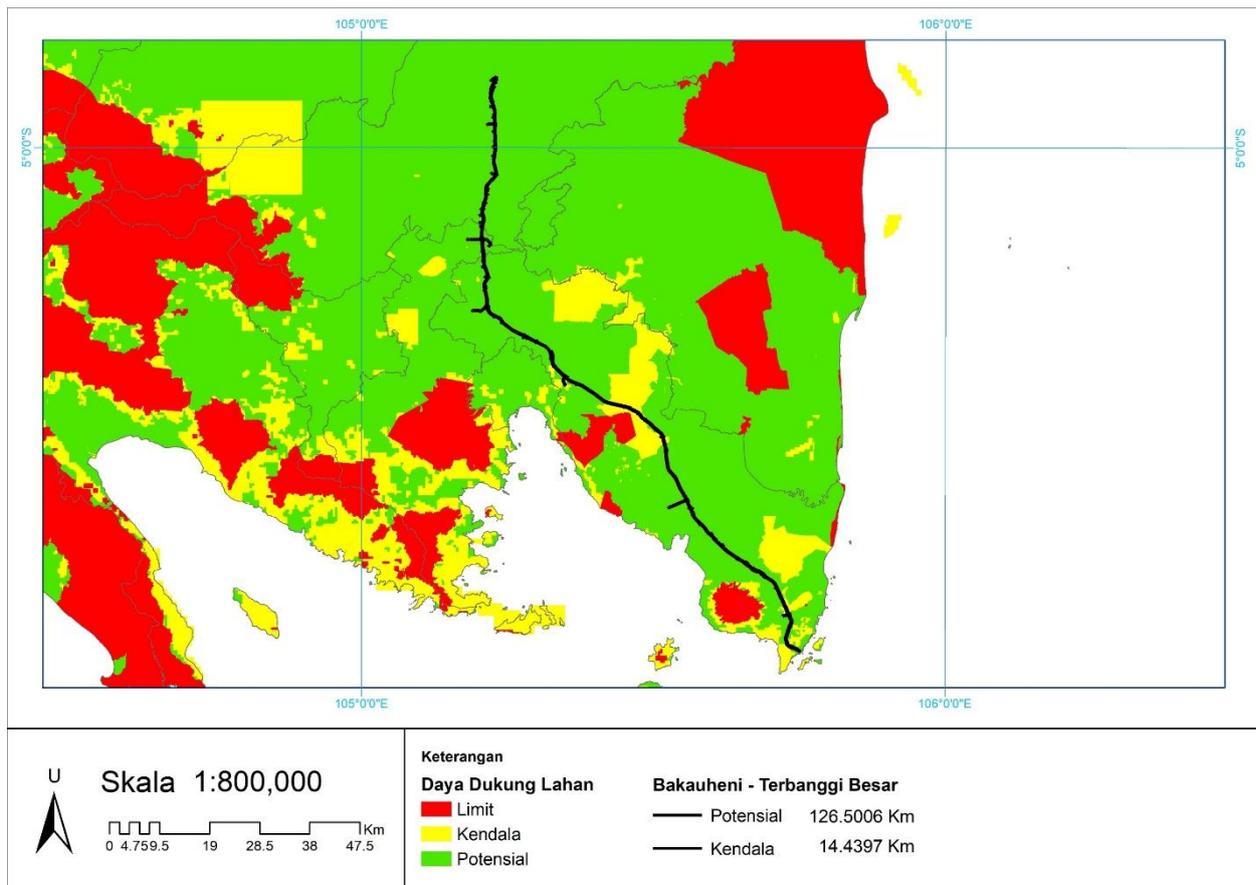
1. Pemeliharaan jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar (sudah ada);
2. Pengembangan Terbanggi Besar – Pematang Panggang (Batas Sumatera Selatan).

Hasil overlay pembangunan jalan tol terhadap daya dukung lahan adalah terdapat pembangunan Jalan Tol pada ruas jalan Terbanggi Besar – Pematang yang melewati kawasan kendala sepanjang 21,6 Km dan yang melewati kawasan Potensial sepanjang 90,5 Km. Peta hasil overlay pembangunan jalan tol pada ruas Terbanggi Besar – Pematang terhadap daya dukung lahan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.3 Peta Pembangunan Jalan Tol (Ruas Terbanggi Besar – Pematang) terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

Hasil overlay pembangunan jalan tol terhadap daya dukung lahan adalah terdapat pembangunan Jalan Tol pada ruas jalan Bakauhei – Terbanggi Besar yang melewati kawasan kendala sepanjang 14,4 Km dan yang melewati kawasan Potensial sepanjang 126,5 Km. Peta hasil overlay pembangunan jalan tol pada ruas Bakauheni – Terbanggi Besar terhadap daya dukung lahan dapat dilihat pada gambar berikut.

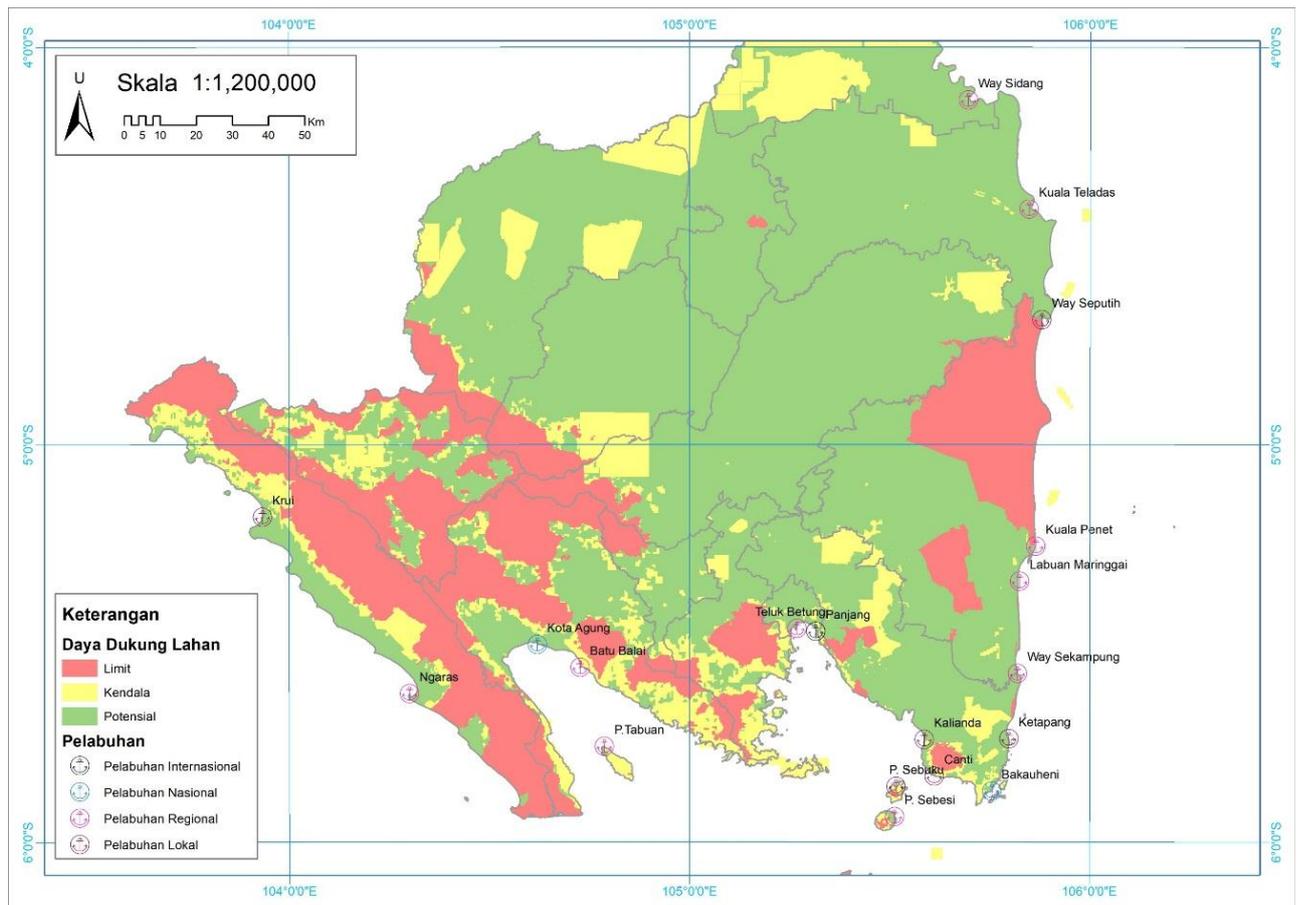


Gambar 4.4 Peta Pembangunan Jalan Tol (Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar) terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

4.1.3 Analisis Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Pengembangan pelabuhan penyeberangan lainnya yang berfungsi menunjang perkembangan aktivitas ekonomi wilayah regional dengan pelayanan sebagai mobilitas orang dan barang, kebutuhan perikanan dan pariwisata. Hasil overlay fasilitas pelabuhan yang terdapat di Provinsi Lampung terhadap daya dukung lahan adalah seluruh pelabuhan berada di kawasan potensial. Hal tersebut tidak berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan. Peta hasil overlay pelabuhan utama terhadap daya dukung lahan dapat dilihat pada gambar berikut.

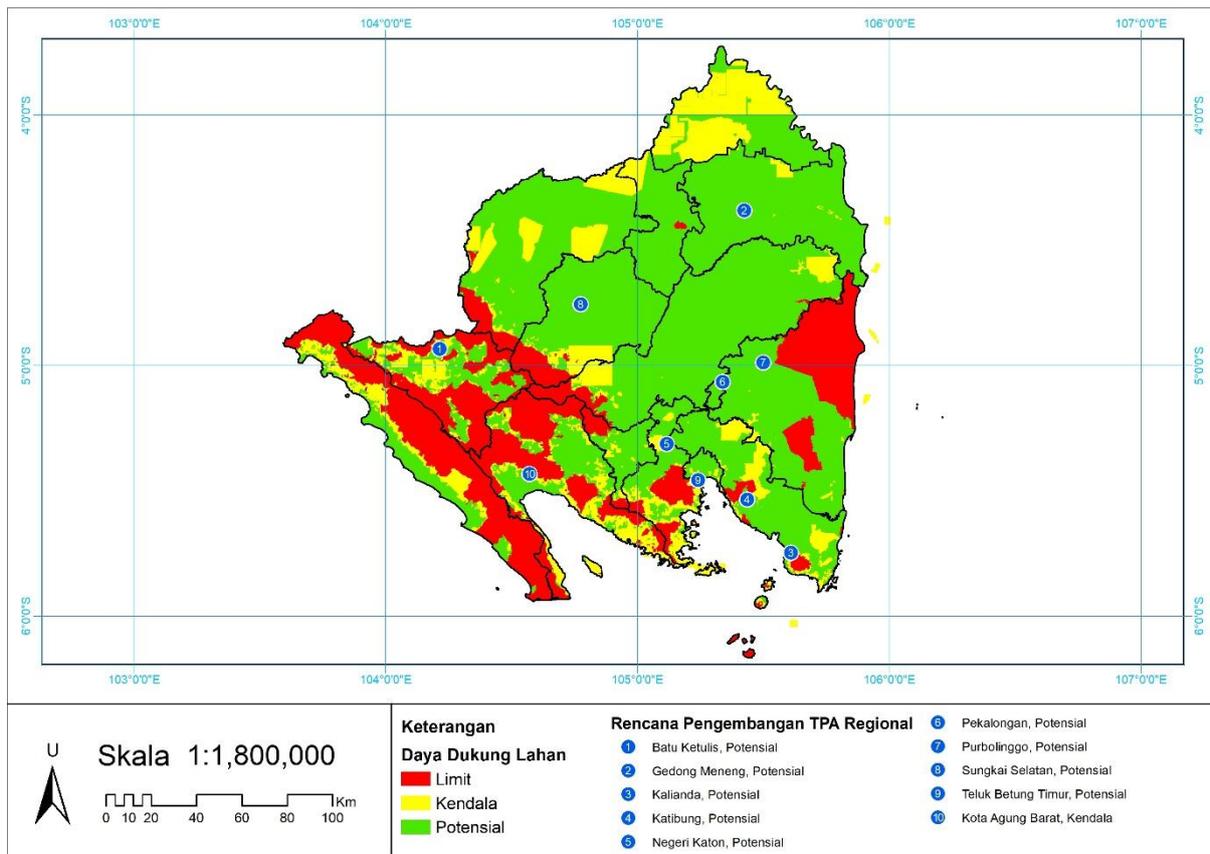


Gambar 4.5 Peta Pelabuhan Utama terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

4.1.4 Analisis Rencana Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Hasil overlay rencana pengembangan TPA terhadap daya dukung lahan adalah terdapat 2 rencana pengembangan TPA yang berada pada lahan kendala dan 6 rencana pengembangan TPA yang berada pada lahan potensial. Peta hasil overlay Rencana Pengembangan TPA terhadap daya dukung lahan dapat dilihat pada gambar berikut.



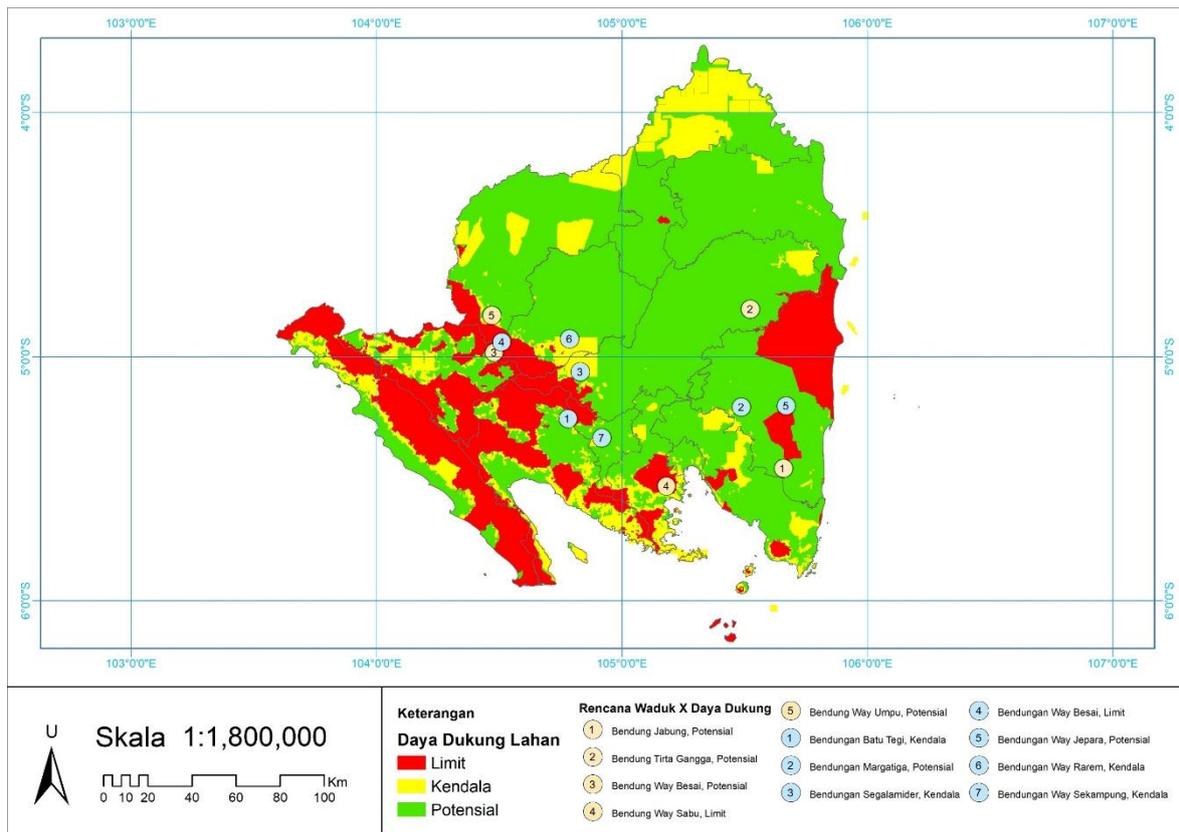
Gambar 4.6 Peta Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

4.1.5 Analisis Pengembangan Waduk terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung. Hasil overlay rencana pengembangan waduk dengan daya dukung lahan adalah terdapat beberapa waduk yang berada pada wilayah limit, kendala, serta potensial. Hasil identifikasi lokasi waduk pada daya dukungnya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Hasil Overlay Waduk terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

No.	Potensial	Kendala	Limit
1	Bendung Jabung	Bendungan Batu Tegi	Bendung Way Sabu
2	Bendung Tirta Gangga	Bendungan Segala Mider	Bendungan Way Besai
3	Bendung Way Besai	Bendungan Way Rarem	
4	Bendung Way Umpu		
5	Bendungan Margatiga		
6	Bendungan Way Jepara		



Gambar 4.7 Peta Pengembangan Waduk terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

Rencana pembangunan Bendungan Sukoharjo di Kabupaten Pringsewu dan Bendungan Margatiga diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan air irigasi dan produksi pangan gabah kering giling.

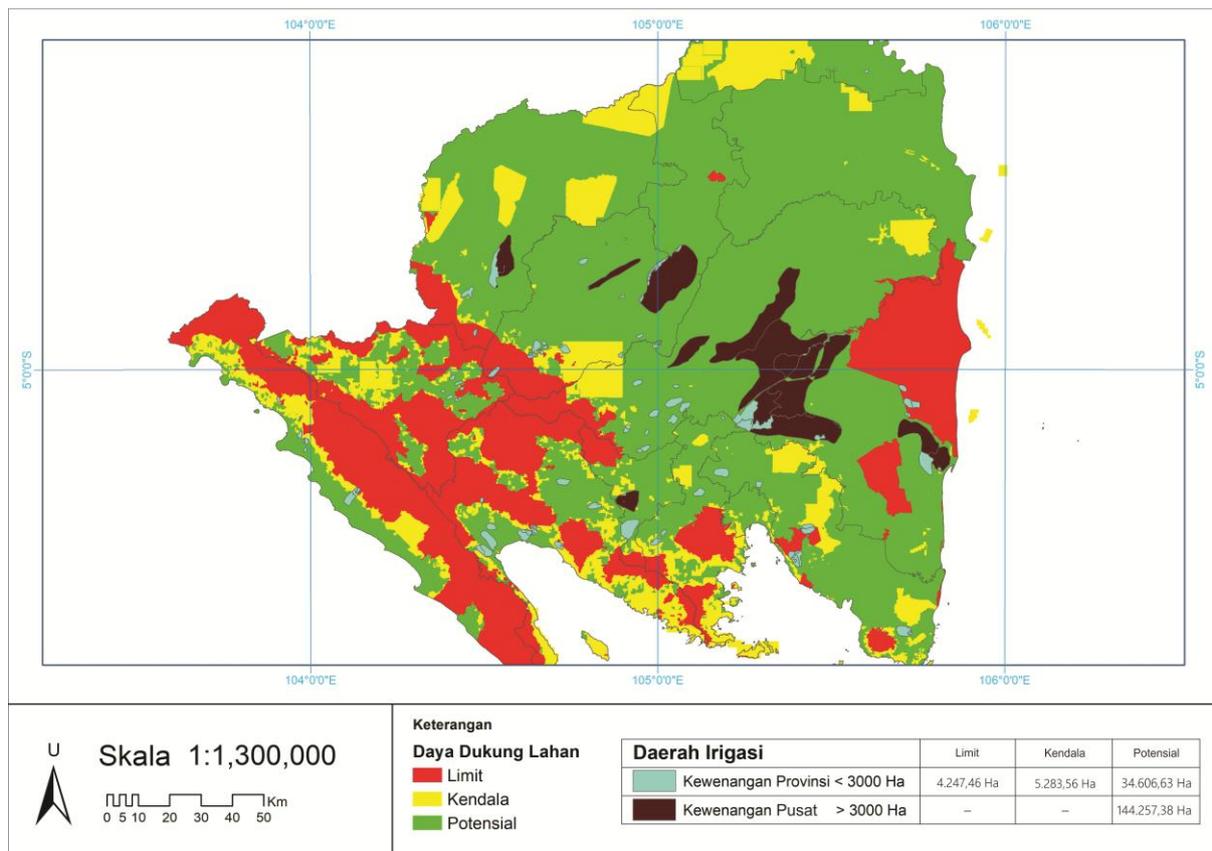
4.1.6 Analisis Daerah Irigasi terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Klasifikasi daerah irigasi menurut kewenangannya terbagi menjadi dua, yaitu kewenangan provinsi dan kewenangan nasional. Hasil overlay daerah irigasi yang terdapat di Provinsi Lampung terhadap daya dukung lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Overlay Daerah Irigasi Terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

Daerah Irigasi	Limit	Kendala	Potensial
 Kewenangan Provinsi < 3000 Ha	4.247,46 Ha	5.283,56 Ha	34.606,63 Ha
 Kewenangan Pusat > 3000 Ha	–	–	144.257,38 Ha



Gambar 4.8 Peta Daerah Irigasi Terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

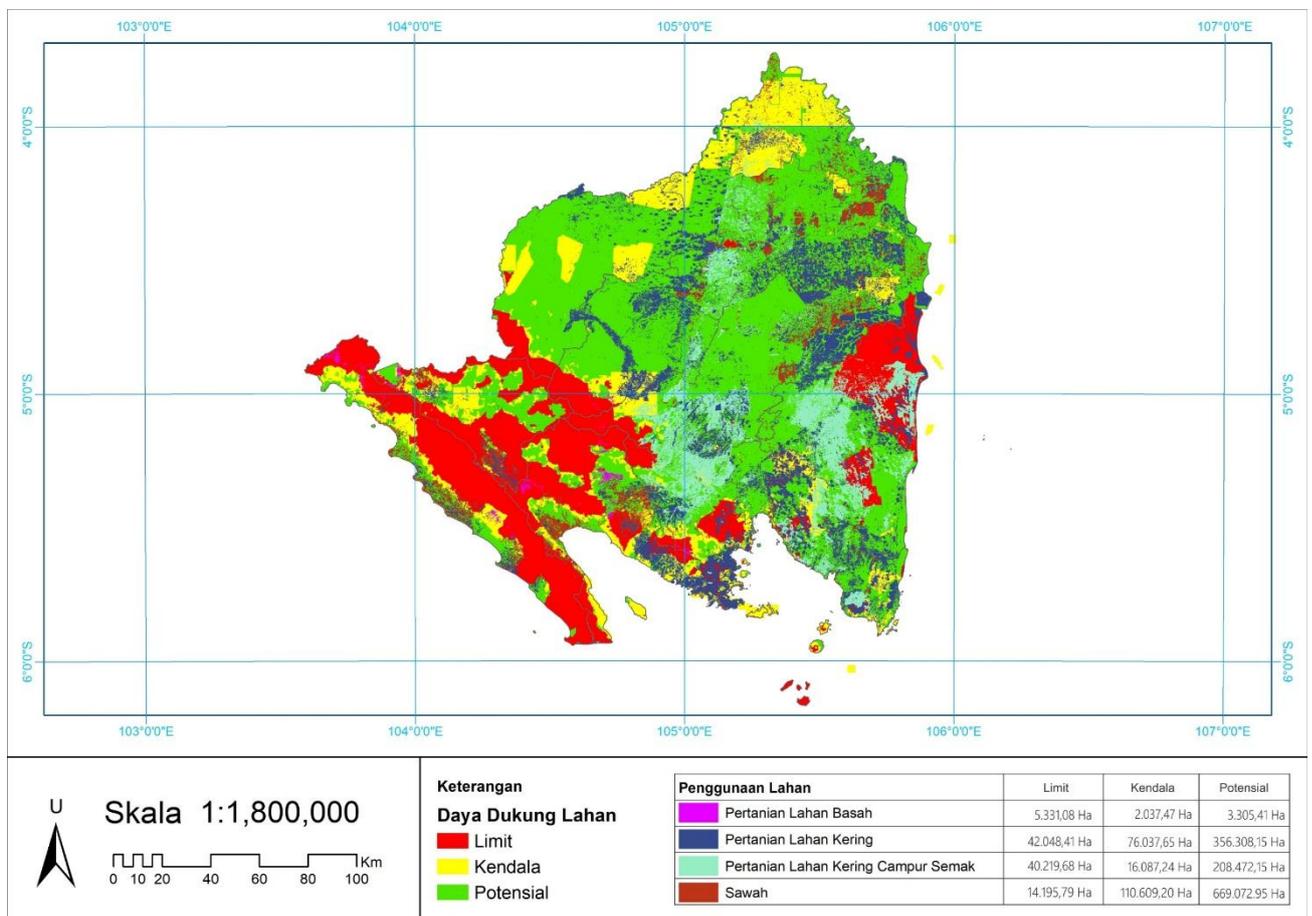
4.1.7 Analisis Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Penggunaan lahan pertanian diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, dan sawah. Hasil overlay daerah irigasi yang terdapat di Provinsi Lampung terhadap daya dukung lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Luas Lahan Pertanian terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung (Ha)

Penggunaan Lahan	Limit	Kendala	Potensial
 Pertanian Lahan Basah	5.331,08 Ha	2.037,47 Ha	3.305,41 Ha
 Pertanian Lahan Kering	42.048,41 Ha	76.037,65 Ha	356.308,15 Ha
 Pertanian Lahan Kering Campur Semak	40.219,68 Ha	16.087,24 Ha	208.472,15 Ha
 Sawah	14.195,79 Ha	110.609,20 Ha	669.072,95 Ha



Gambar 4.9 Peta Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi

4.1.8 Analisis Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pariwisata terhadap Daya Dukung Lahan

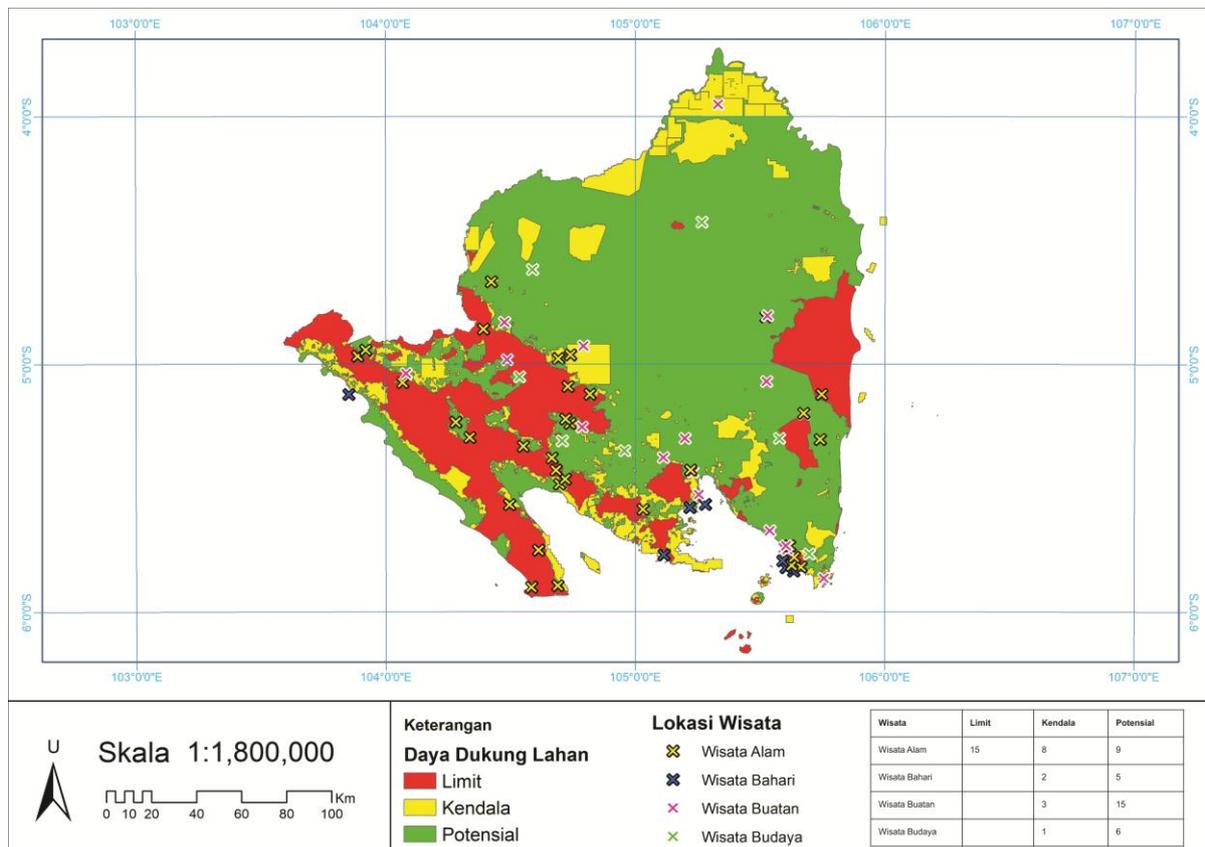
Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang

berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Kawasan peruntukan pariwisata terbagi dalam 4 subzona yaitu Wisata Alam, Wisata Bahari, Wisata Buatan dan Wisata Budaya. Hasil overlay fasilitas pelabuhan yang terdapat di Provinsi Lampung terhadap daya dukung lahan adala sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Overlay Peruntukan Pariwisata Terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

Wisata	Limit	Kendala	Potensial
Wisata Alam	15	8	9
Wisata Bahari		2	5
Wisata Buatan		3	15
Wisata Budaya		1	6

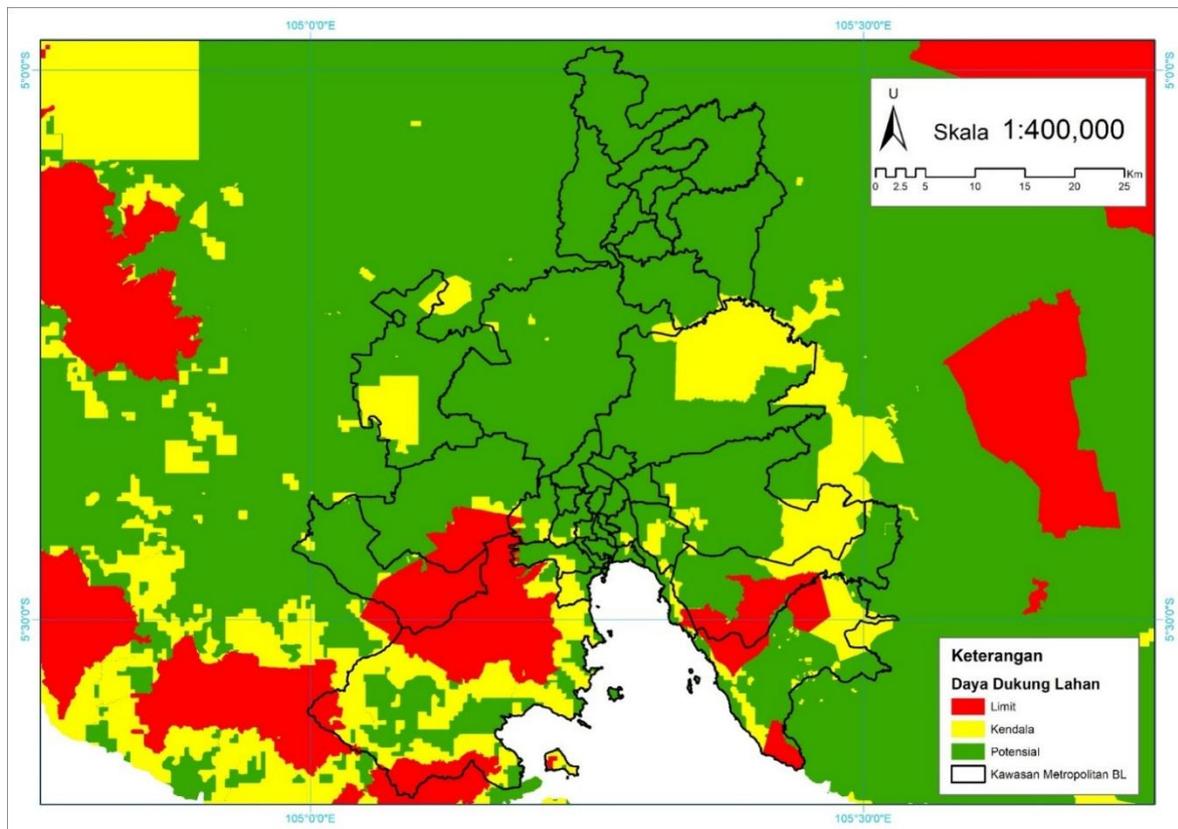


Gambar 4.10 Peta Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata terhadap Daya Dukung Lahan Proovinsi Lampung

4.1.9 Analisis Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Kawasan metropolitan Bandar Lampung terbagi berdasarkan beberapa kecamatan yang berada di sekitaran Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Delineasi kawasan metropolitan mengikuti batas administrasi kecamatan. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung meliputi seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Tri Murjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Natar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Katibung. Peta hasil overlay Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung terhadap daya dukung lahan dapat dilihat pada gambar berikut.

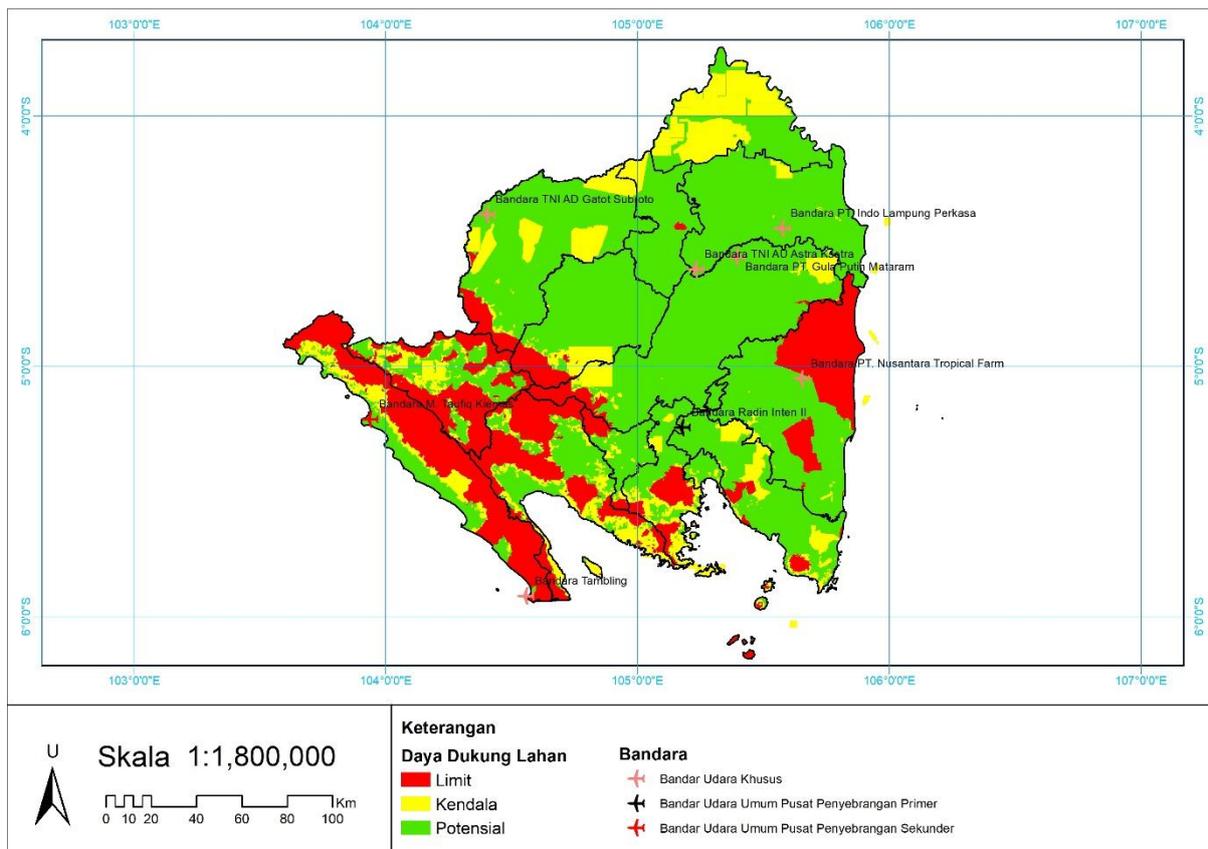


Gambar 4.11 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

4.1.10 Analisis Rencana Pengembangan Bandara terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Pengembangan Bandara yang terdapat di Provinsi Lampung Seluruhnya berada di kawasan potensial. Di provinsi lampung terbagi menjadi tiga jenis bandara yang berjumlah enam tersebar di Provinsi Lampung. Jenis Bandar tersebut adalah Bandar Udara Umum Pusat Penyebrangan Primer yaitu Bandara Raden Inten II yang berada di Lampung Selatan, Bandar Udara Umum Pusat Penyebrangan Sekunder yaitu Bandara M. Taufiq Kiemas yang berada di Pesisir Barat, Bandar Udara Khusus yaitu Bandara TNI AD Gatot Subroto yang berada di Waykanan, Bandara TNI AU Astra Ksetra yang berada di Tulang Bawang Barat, Bandara PT. Gula Putih Mataram yang berada di Lampung Tengah, dan Bandara PT. Nusantara Tropical Fruit yang berada di Lampung Timur.



Gambar 4.12 Peta Rencana Pengembangan Bandar Udara terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

4.1.11 Analisis Pengoptimalan Bumi Agribisnis terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi sebagai "Bumi Agribisnis", guna mendukung perkuatan ketahanan pangan secara nasional, sekaligus merupakan pengembangan keunggulan potensi daerah. Komoditas yang potensial dikembangkan dalam agro industri adalah di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan tangkap, peternakan besar dan kecil.

Analisis daya dukung lahan belum dapat dioverlay terhadap pengoptimalan bumi agribisnis karena merupakan isu strategis untuk pengembangan wilayah Provinsi Lampung ke depan yang belum dapat ditentukan kordinat penetapannya. Untuk pengembangan peruntukkan pertanian telah dioverlay terhadap daya dukung lahan pada sub bab 4.1.7 di atas.

4.1.12 Analisis Pengembangan Kawasan Industri terhadap Daya Dukung Lahan

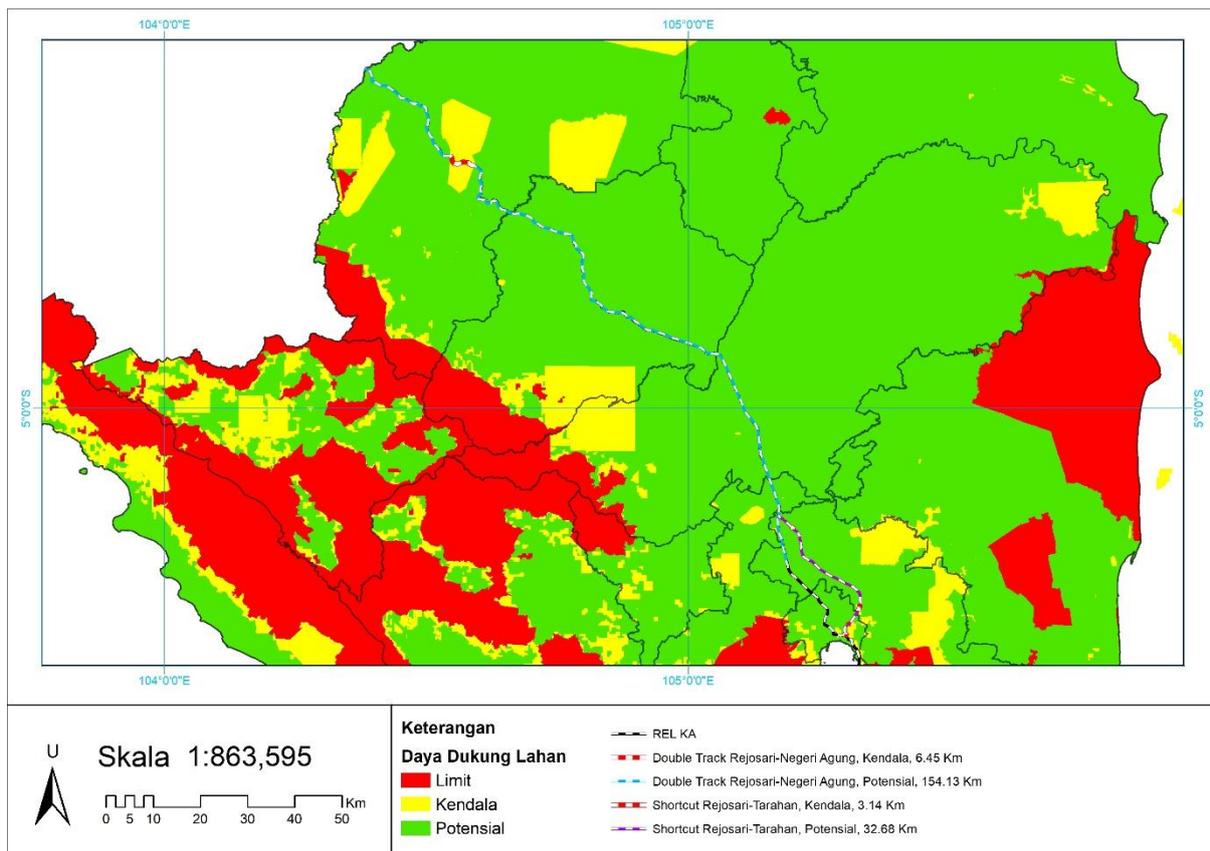
Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Hingga saat ini, kawasan industri yang akan dipertahankan pengembangannya sebagai kawasan industri adalah 194,4 km². Kawasan Industri yang telah beroperasi di Provinsi Lampung terdapat di wilayah Tanjung Bintang Lampung Selatan seluas 350 Ha. Selain itu pola yang akan dikembangkan secara keseluruhan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran sesuai dengankesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem.

4.1.13 Analisis Rencana Pengembangan Double Track Rejosari – Perbatasan Sumatera Selatan dan Shortcut Rejosari – Tarahan terhadap Daya Dukung Lahan

Subbab ini akan membahas hasil overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta daya dukung lahan yang dihasilkan. Hasil overlay akan menggambarkan masing-masing KRP yang berada pada lahan potensial, kendala, dan limit sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Dalam rencana pengembangan jaringan kereta api terdapat pembagian antara jaringan jalur kereta api nasional dan jaringan jalur kereta api regional. Jaringan jalur kereta api nasional adalah jalur perkeretaapian umum yang salah satunya terdiri dari rencana pembangunan double track kereta api Sumatera Railways. Jaringan jalur kereta api angkutan penumpang dan barang yang di antaranya meliputi rencana pengembangan shortcut rel kereta api untuk kereta batu bara Rejosari-Tarahan dan Rencana pembangunan jalur kereta api sejajar jalan tol. Peta hasil overlay rencana pengembangan double track Rejosari – Perbatasan Sumatera Selatan dan Shortcut Rejosari – Tarahan terhadap daya dukung lahan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.13 Peta Rencana Pengembangan Double Track Rejosari – Perbatasan Sumatera Selatan dan Shortcut Rejosari – Tarahan Terhadap Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

Berdasarkan analisis overlay tersebut, rencana pengembangan double track Rejosari – Negeri Agung berada pada wilayah kendala sepanjang 6,45 km dan pada wilayah potensial sepanjang 154,13

km. Untuk pengembangan shortcut Rejosari – Tarahan berada pada wilayah kendala sepanjang 3,14 km dan potensial sepanjang 32,68 km.

4.2 Analisis Jasa Ekosistem Terhadap KRP Provinsi Lampung

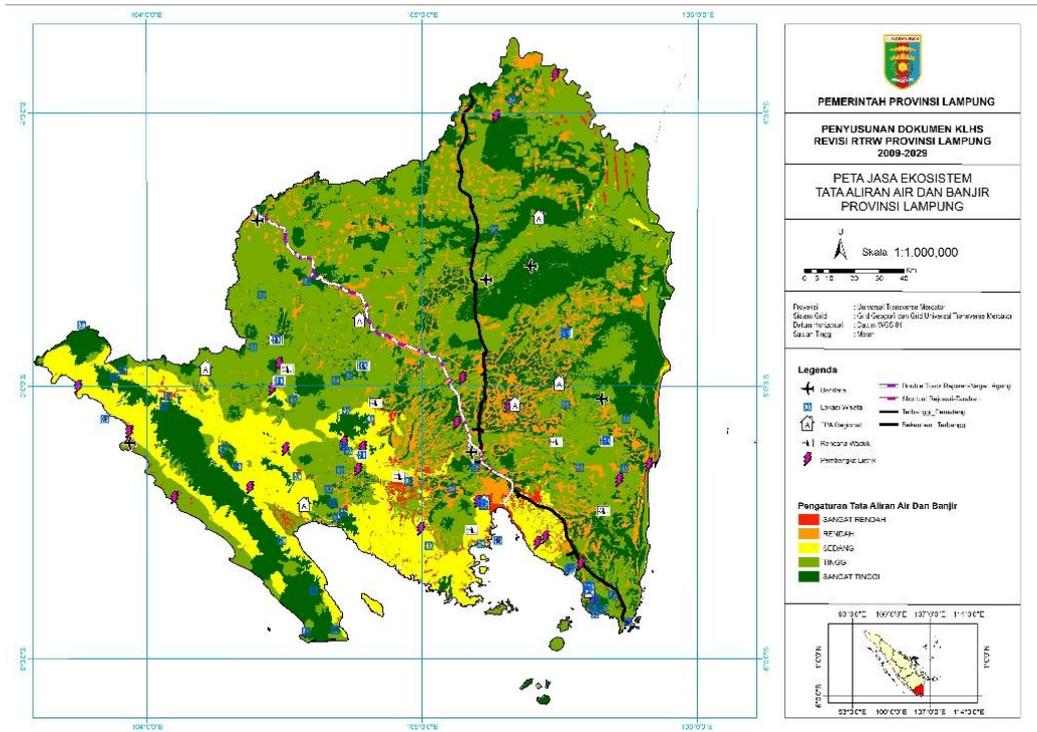
Pada subbab ini akan dibahas terkait dengan hasil nilai jasa ekosistem berdasarkan overlay Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap peta jasa ekosistem yang dihasilkan oleh ekoregion dan tutupan lahan. Hasil overlay akan menggambarkan nilai jasa ekosistem pada masing-masing KRP sebagai dasar kajian dampak yang dihasilkan oleh pengembangan program-program dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Jasa ekosistem yang digunakan pada analisis ini adalah jasa ekosistem pengatur tata aliran air, jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih, jasa ekosistem penyedia biodiversitas, jasa ekosistem pengatur pencegahan dan perlindungan bencana. Penentuan pemilihan analisis kelima jasa ekosistem tersebut dikarenakan nilai skoring pada jasa ekosistem tersebut merupakan skoring yang tertinggi pada karakteristik wilayah Provinsi Lampung. Nilai skoring jasa ekosistem tersebut adalah sebagai berikut:

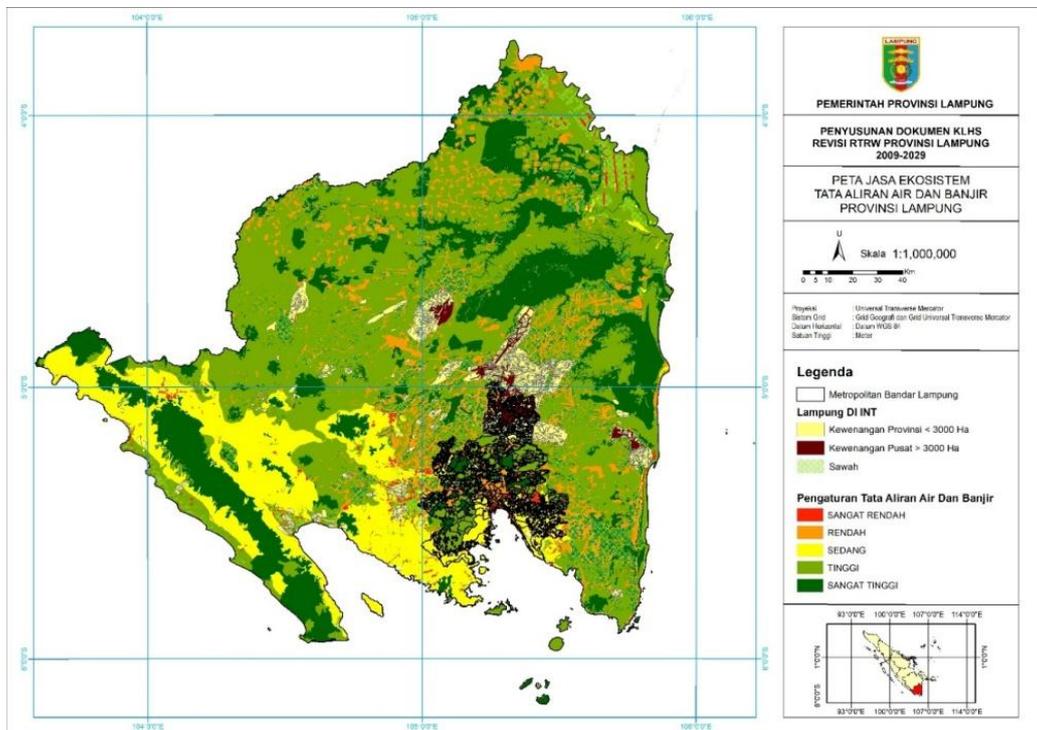
- | | |
|---|--------|
| 1. Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air | : 0.75 |
| 2. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan | : 1.43 |
| 3. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih | : 0.70 |
| 4. Jasa Ekosistem Biodiversitas | : 0.74 |
| 5. Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam | : 0.75 |

4.2.1 Analisis Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Terhadap KRP Provinsi Lampung

Jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir meliputi siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. Hasil overlay jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir terhadap 12 KRP Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.14 Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Terhadap KRP Provinsi Lampung
Bagian 1



Gambar 4.15 Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Terhadap KRP Provinsi Lampung
Bagian 2

Tabel 4.5
Rekapitulasi Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Terhadap KRP Provinsi Lampung

Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bandara		1. Bandara Radin Inten II 2. Bandara TNI AU Astra Ksetra		1. Bandara M. Taufiq Kiemas 2. Bandara TNI AD Gatot Subroto 3. Bandara PT. Indo Lampung Perkasa 4. Bandara Tambling	1. Bandara PT. Nusantara Tropical Fruit 2. Bandara PT. Gula Putih Mataram
Lokasi Wisata	3	7	13	23	15
Rencana TPA Regional	-	1. Purbolinggo	1. Ketibung 2. Teluk Betung Timur 3. Kota Agung Barat 4. Batu Ketulis	1. Kalianda 2. Negeri Katon 3. Sungkai Selatan 4. Gedong Meneng	1. Pekalongan
Rencana Waduk	-	Bendung Tirta Gangga	1. Bendung Way Sabu 2. Bendungan Way Sekampung 3. Bendungan Batu Tegi	1. Bendung Jabung 2. Bendungan Margatiga 3. Bendungan Segalamider 4. Bendung Way Besai 5. Bendungan Way Besai 6. Bendungan Way Rarem 7. Bendung Way Umpu	Bendungan Way Jepara
Pembangkit Listrik	PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016	1. PLTU Kalianda 2. PLTD Metro	1. PLTU Lampung 2. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 3. PLTP Way Ratai 55 MW - 2020 4. PLTD Teluk Betung 5. PLTA Semangka 50 MW-2017 6. PLTP Ulu Belu (rencana 2011) 7. PLTD Pugung Tampak	1. PLTD Bengkuntat 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTD Talang Padang 4. PLTA Batu Tegi 5. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016 6. PLTD Krui 7. PLTD Tegineneng 8. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 9. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 10. PLTD Simpang Pematang 11. PLTD Wiralaga	1. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 2. PLTA Way Besai
Jalan Tol	2,45 Km	21,86 Km	19,28 Km	141,12 Km	68,3 Km
Metropolitan Bandar Lampung	11.428,67 Ha	49.379,19 Ha	53.232,64 Ha	79.057,21 Ha	40.523,29 Ha
DI Kewenangan	3.823,98 Ha	32.591,05 Ha	6.709,84 Ha	60.447,56 Ha	55.796,79 Ha

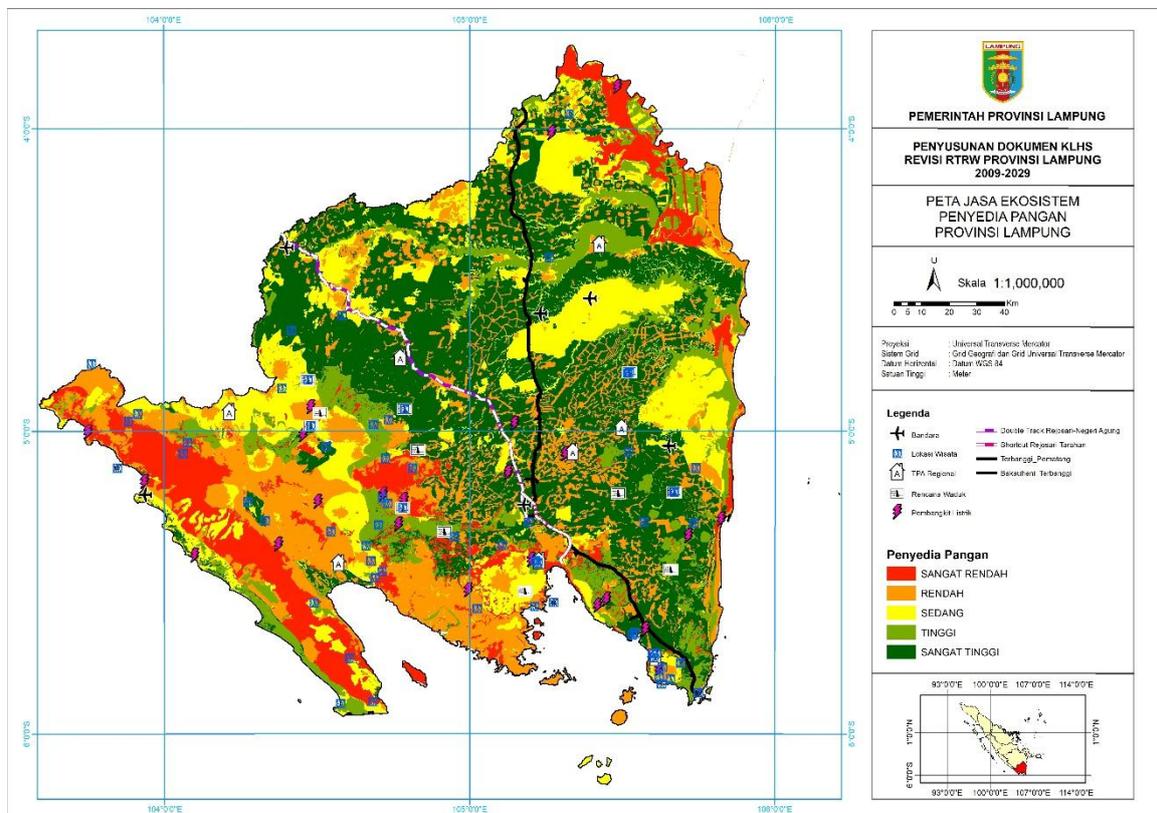
DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

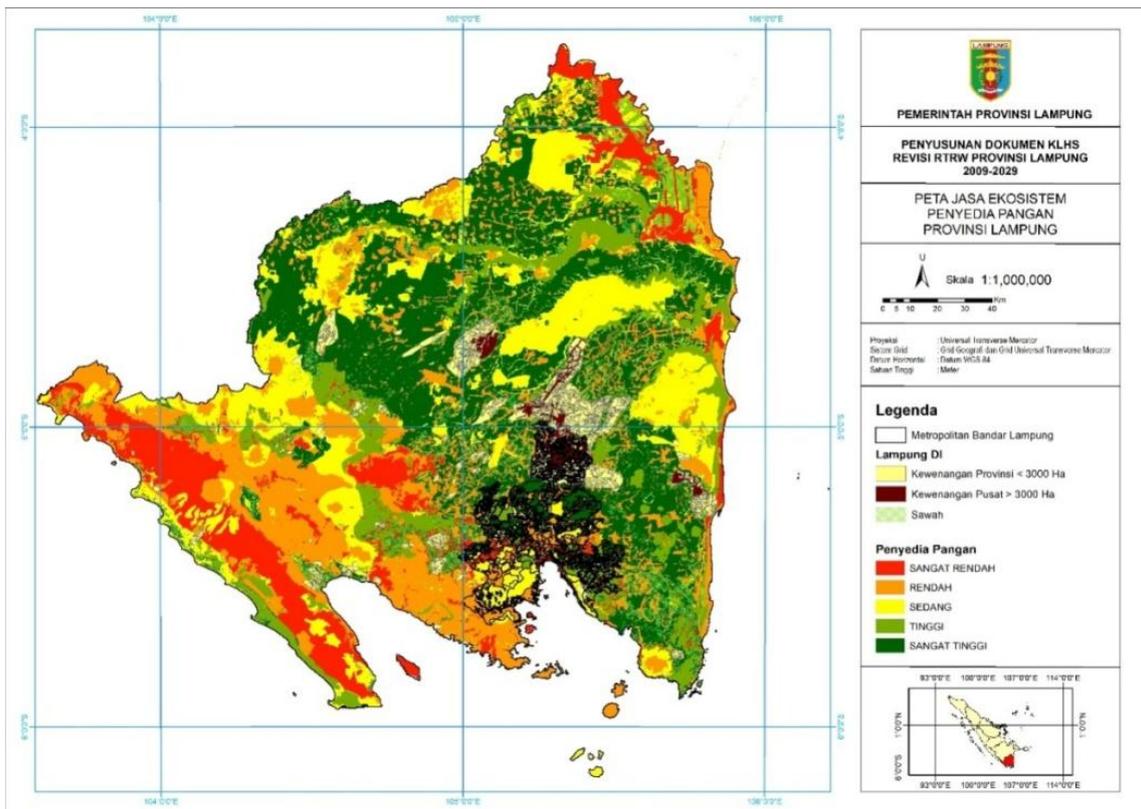
Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Provinsi					
DI Kewenangan Pusat	-	23.939,91 Ha	-	5.023,35 Ha	-
Sawah	6.613,49 Ha	35.641,39 Ha	5.503,86 Ha	70.794,21 Ha	211.905,63 Ha
Double Track KA	-	55,24 Km	-	91,57 Km	13,77 Km
Shortcut KA	3,26 Km	5,68 Km	3,73 Km	12,69 Km	10,45 Km
Pelabuhan	Berdasarkan hasil overlay dengan peta jasa ekosistem, KRP Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Utama tidak masuk kedalam peta jasa ekosistem karena lokasi koordinat titik pelabuhan berada di luar garis pantai.				
Industri	Dari 9 kawasan Industri yang aka dibangun di Provinsi Lampung, masih terdapat 6 kawasan industri yang bersifat indikatif. Sehingga overlay kawasan industri tersebut tidak dilakukan karena dapat terjadinya pergeseran pemanfaatan ruang kedepannya jika lokasi industri sudah ditetapkan.				
Bumi Agribisnis	Berdasarkan hasil penapisan isu, bumi agribisnis merupakan program pembangunan kawasan pertanian dan perkebunan provinsi lampung kedepannya. Dan bumi agribisnis tidak terdapat lokasi kawasannya.				

4.2.2 Analisis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap KRP Provinsi Lampung

Jasa ekosistem penyedia pangan meliputi hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan. Hasil overlay jasa ekosistem penyedia pangan terhadap 12 KRP Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.16 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 1



Gambar 4.17 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 2

Tabel 4.6
Rekapitulasi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap KRP Provinsi Lampung

Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bandara	Bandara TNI AU Astra Ksetra	Bandara Radin Inten II	1. Bandara M. Taufiq Kiemas 2. Bandara PT. Nusantara Tropical Fruit 3. Bandara PT. Gula Putih Mataram	Bandara Tambling	1. Bandara TNI AD Gatot Subroto 2. Bandara PT. Indo Lampung Perkasa
Lokasi Wisata	9	21	8	12	11
Rencana TPA Regional	-	1. Purbolinggo, Lampung Timur 2. Batu Ketulis, Lampung Barat 3. Gedong Meneng, Tulang Bawang	1. Kalianda, Lampung Selatan 2. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung 3. Kota Agung Barat, Tanggamus	Katibung, Lampung Selatan	1. Negeri Katon, Pesawaran 2. Pekalongan, Lampung Selatan 3. Sungkai Selatan, Lampung Utara
Rencana Waduk	-	1. Bendungan Batu Tegi 2. Bendung Tirta Gangga	1. Bendung Way Sabu 2. Bendungan Way Besai 3. Bendung Way Umpu	1. Bendungan Way Sekampung 2. Bendungan Way Jepara	1. Bendung Jabung 2. Bendungan Margatiga 3. Bendungan Segalamider 4. Bendung

DOKUMEN

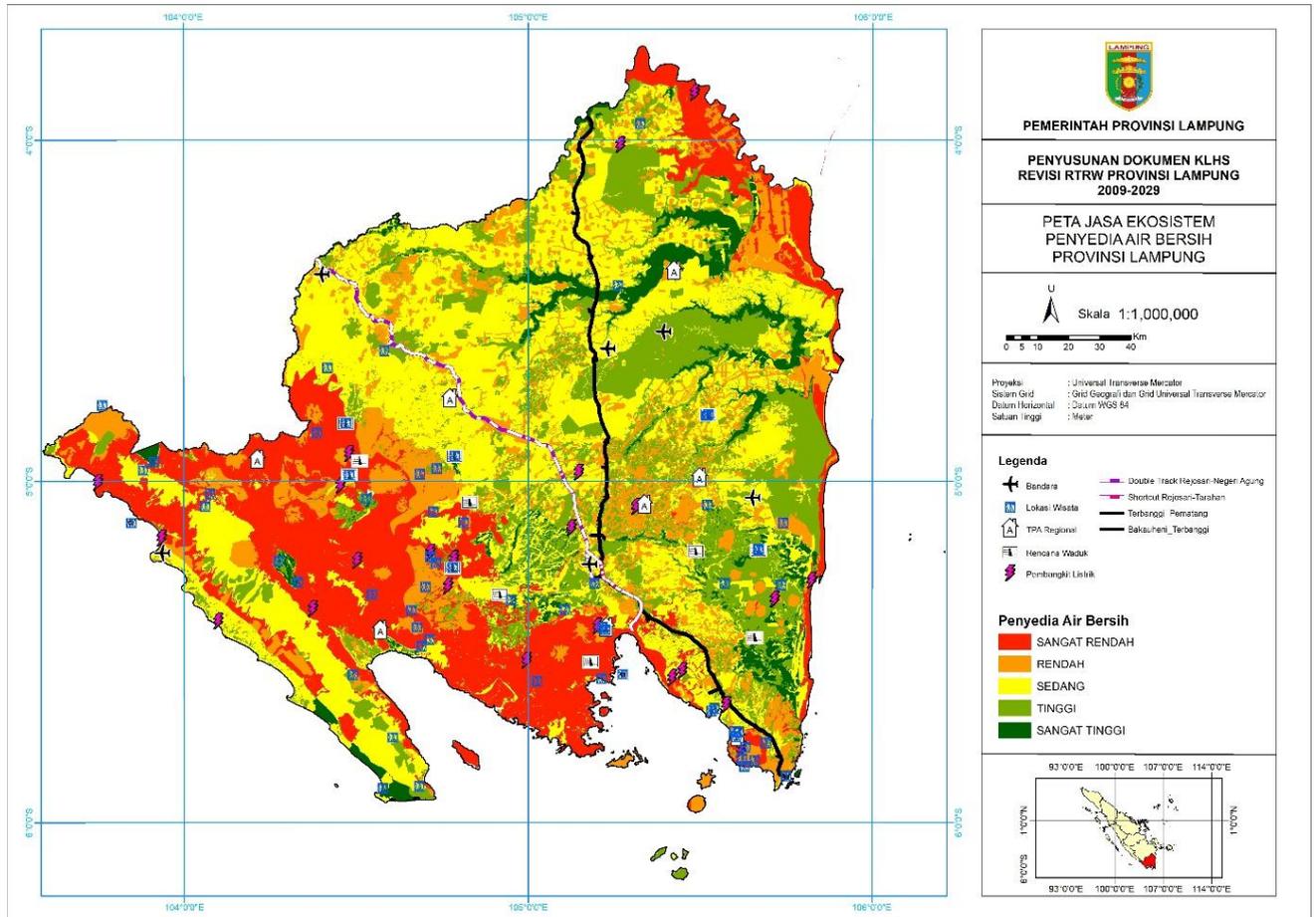
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
					Way Besai 5. Bendungan Way Rarem
Pembangkit Listrik	1. PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016 2. PLTD Pugung Tampak 3. PLTD Wiralaga	1. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 2. PLTU Kalianda 3. PLTP Way Ratai 55 MW - 2020 4. PLTA Semangka 50 MW-2017 5. PLTP Ulu Belu (rencana 2011) 6. PLTA Batu Tegi 7. PLTD Metro 8. PLTA Way Besai	-	1. PLTU Lampung 2. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 3. PLTD Teluk Betung 4. PLTD Talang Padang 5. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016	1. PLTD Bengkunt 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTD Krui 4. PLTD Tegineneng 5. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 6. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 7. PLTD Simpang Pematang
Jalan Tol	2,44 Km	24,86 Km	26,71 Km	35,14 Km	163,93 Km
Metropolitan Bandar Lampung	21.362,52 Ha	65.806,41 Ha	42.091,62 Ha	30.681,20 Ha	73.679,26 Ha
DI Kewenangan Provinsi	4.910,35 Ha	36.708,64 Ha	6.651,41 Ha	8.798,72 Ha	102.300,11 Ha
DI Kewenangan Pusat	-	23.939,91 Ha	-	-	5.023,35 Ha
Sawah	14.450,65 Ha	39.923,96 Ha	11.369,45 Ha	42.495,35 Ha	222.219,16 Ha
Double Track KA	-	60,75 Km	27,07 Km	-	72,76 Km
Shortcut KA	3,32 Km	7,08 Km	1,80 Km	3,14 Km	20,47 Km
Pelabuhan	Berdasarkan hasil overlay dengan peta jasa ekosistem, KRP Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Utama tidak masuk kedalam peta jasa ekosistem karena lokasi koordinat titik pelabuhan berada di luar garis pantai.				
Industri	Dari 9 kawasan Industri yang akan dibangun di Provinsi Lampung, masih terdapat 6 kawasan industri yang bersifat indikatif. Sehingga overlay kawasan industri tersebut tidak dilakukan karena dapat terjadinya pergeseran pemanfaatan ruang kedepannya jika lokasi industri sudah ditetapkan.				
Bumi Agribisnis	Berdasarkan hasil penapisan isu, bumi agribisnis merupakan program pembangunan kawasan pertanian dan perkebunan provinsi lampung kedepannya. Dan bumi agribisnis tidak terdapat lokasi kawasannya.				

4.2.3 Analisis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Terhadap KRP Provinsi Lampung

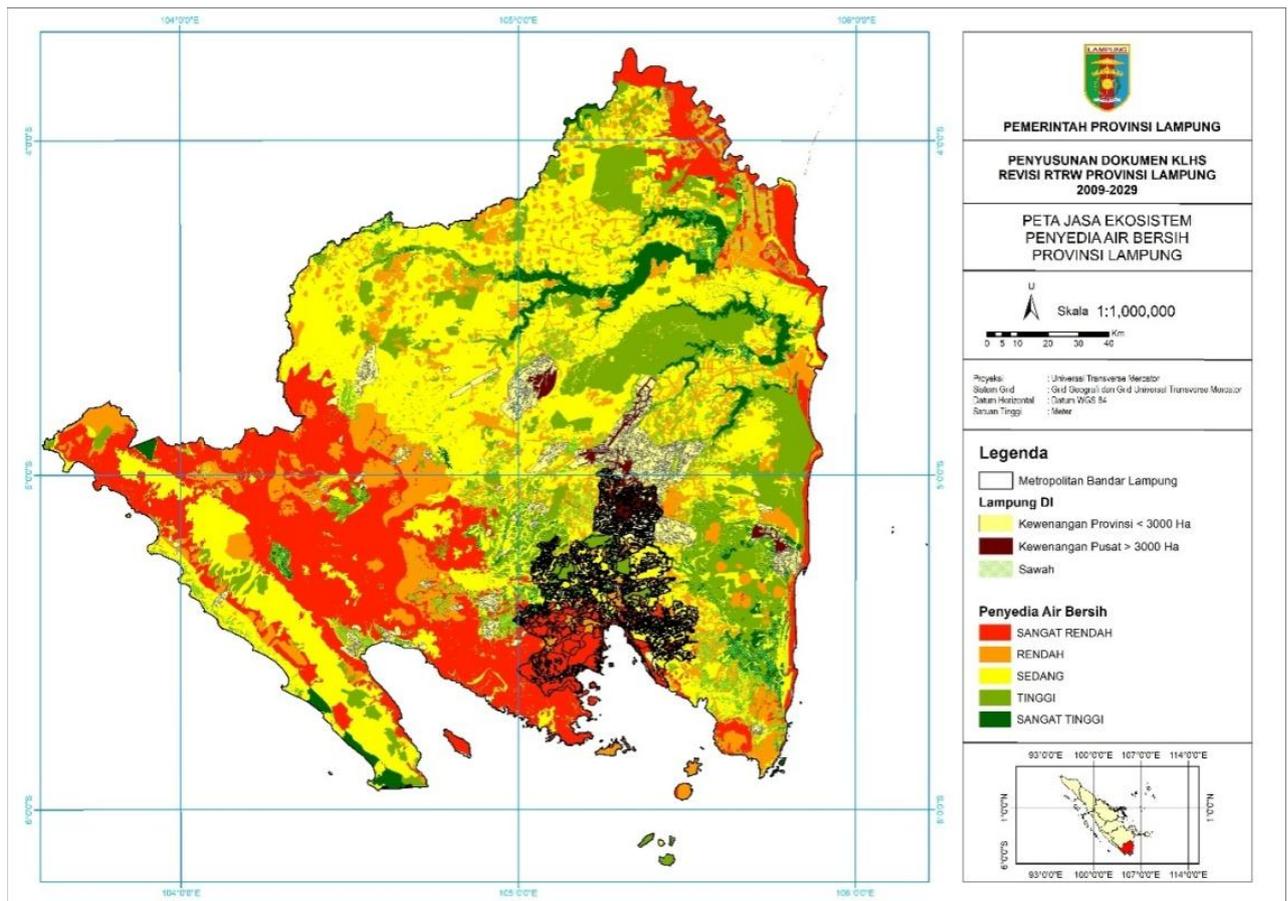
Jasa ekosistem penyedia air bersih meliputi Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan. Hasil overlay jasa ekosistem penyedia air bersih terhadap 12 KRP Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 4.18 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 1

DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 4.19 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 2

Tabel 4.7
Rekapitulasi Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Terhadap KRP Provinsi Lampung

Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bandara		1. Bandara Radin Inten II 2. Bandara TNI AU Astra Ksetra	1. Bandara M. Taufiq Kiemas 2. Bandara TNI AD Gatot Subroto 3. Bandara PT. Indo Lampung Perkasa 4. Bandara Tambling	1. Bandara PT. Nusantara Tropical Fruit 2. Bandara PT. Gula Putih Mataram	
Lokasi Wisata	16	18	19	2	6
Rencana TPA Regional	1. Kalianda, Lampung Selatan 2. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung 3. Batu Ketulis, Lampung Barat	1. Kota Agung Barat, Tanggamus 2. Purbolinggo, Lampung Timur 3. Gedong Meneng, Tulang Bawang	1. Katibung, Lampung Selatan 2. Sungkai Selatan, Lampung Utara	1. Negeri Katon, Pesawaran 2. Pekalongan, Lampung Timur	-

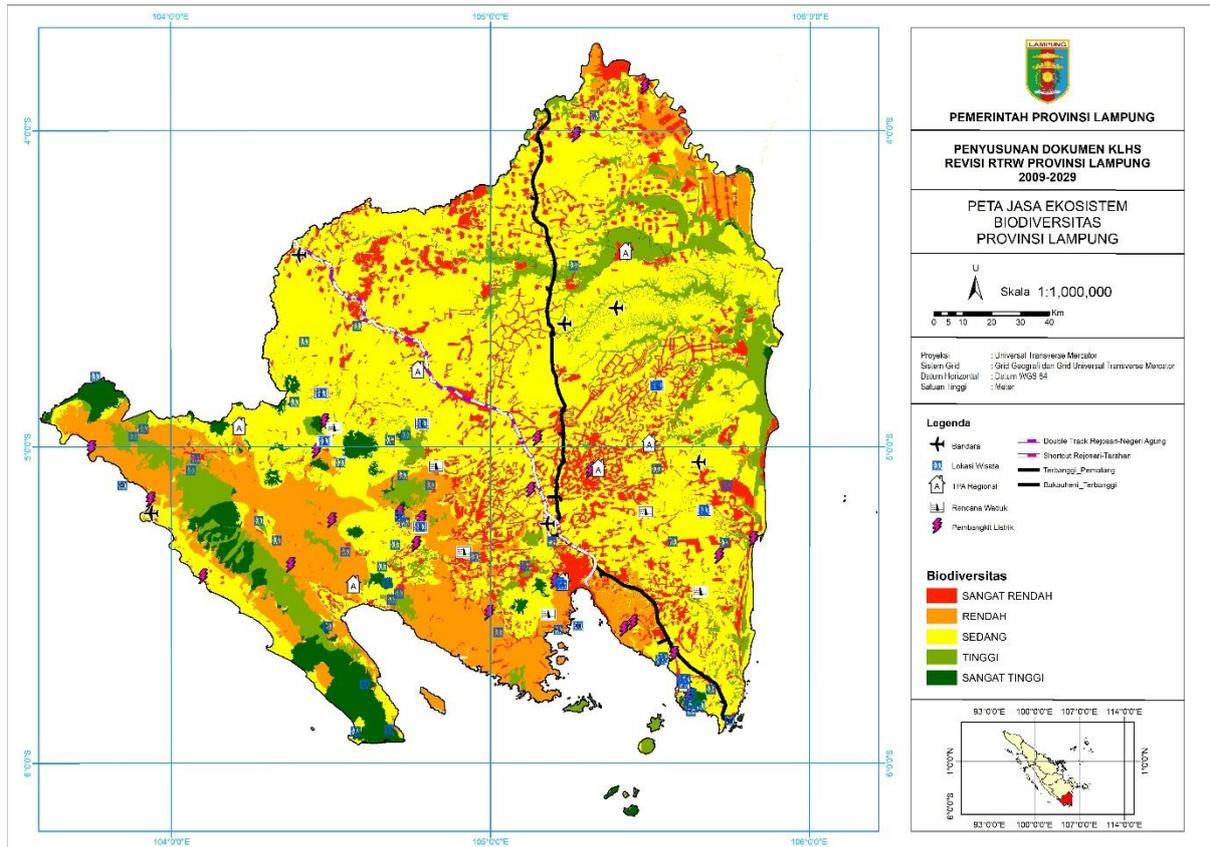
DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

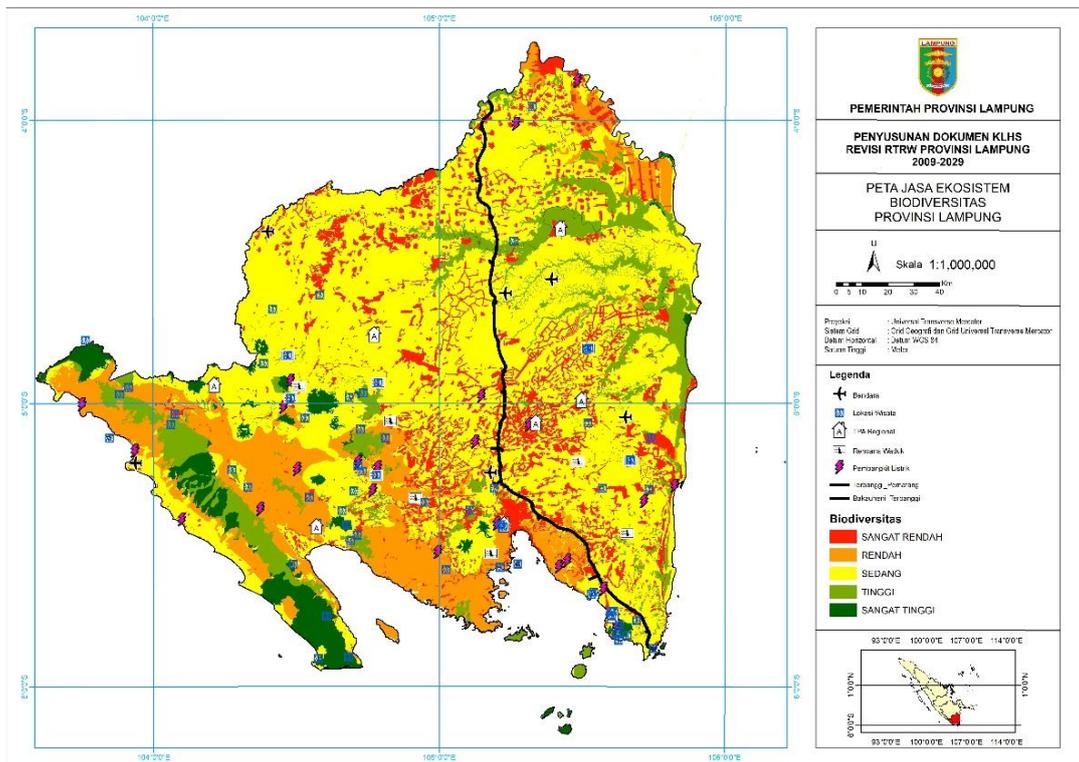
Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Rencana Waduk	1. Bendung Way Sabu 2. Bendungan Way Besai 3. Bendung Way Umpu	Bendung Tirta Gangga	1. Bendungan Way Sekampung 2. Bendungan Batu Tegi 3. Bendungan Margatiga 4. Bendungan Segalamider 5. Bendung Way Besai 6. Bendungan Way Rarem	Bendung Jabung	Bendungan Way Jepara
Pembangkit Listrik	1. PLTP Way Ratai 55 MW - 2020 2. PLTA Semangka 50 MW-2017 3. PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016 4. PLTP Ulu Belu (rencana 2011) 5. PLTD Pugung Tampak 6. PLTD Wiralaga	1. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 2. PLTU Kalianda 3. PLTD Teluk Betung 4. PLTD Talang Padang 5. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016 6. PLTD Metro 7. PLTA Way Besai	1. PLTU Lampung 2. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 3. PLTD Tegineneng 4. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 5. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 6. PLTD Simpang Pematang	1. PLTD Bengkunt 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTA Batu Tegi 4. PLTD Krui	
Jalan Tol	2,44 Km	31,05 Km	140,48 Km	73,58 Km	5,53 Km
Metropolitan Bandar Lampung	70.664,41 Ha	42.646,49 Ha	68.024,01 Ha	48.040,08 Ha	4.246,01 Ha
DI Kewenangan Provinsi	9.540,65 Ha	33.258,75 Ha	48.067,2 Ha	60.797,48 Ha	7.705,15 Ha
DI Kewenangan Pusat	-	20.519,78 Ha	8.443,49 Ha	-	-
Sawah	21.331,3 Ha	58.322,97 Ha	17.712,47 Ha	174.234,56 Ha	58.857,28 Ha
Double Track KA	-	60,62 Km	86,19 Km	13,77 Km	-
Shortcut KA	3,36 Km	7,05 Km	14,85 Km	10,55 Km	-
Pelabuhan	Berdasarkan hasil overlay dengan peta jasa ekosistem, KRP Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Utama tidak masuk kedalam peta jasa ekosistem karena lokasi koordinat titik pelabuhan berada di luar garis pantai.				
Industri	Dari 9 kawasan Industri yang aka dibangun di Provinsi Lampung, masih terdapat 6 kawasan industri yang bersifat indikatif. Sehingga overlay kawasan industri tersebut tidak dilakukan karena dapat terjadinya pergeseran pemanfaatan ruang kedepannya jika lokasi industri sudah ditetapkan.				
Bumi Agribisnis	Berdasarkan hasil penapisan isu, bumi agribisnis merupakan program pembangunan kawasan pertanian dan perkebunan provinsi lampung kedepannya. Dan bumi agribisnis tidak terdapat lokasi kawasannya.				

4.2.4 Analisis Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversitas Terhadap KRP Provinsi Lampung

Jasa ekosistem penyedia biodiversitas merupakan jasa ekosistem terhadap perlindungan plasma nutfah. Hasil overlay jasa ekosistem penyedia biodiversitas terhadap 12 KRP Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.20 Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversitas Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 1



Gambar 4.21 Jasa Ekosistem Penyedia Biodiveritas Terhadap KRP Provinsi Lampung Bagian 2

Tabel 4.8 Rekapitulasi Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversitas Terhadap KRP Provinsi Lampung

Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bandara	1. Bandara Radin Inten II 2. Bandara TNI AU Astra Ksetra		1. Bandara M. Taufiq Kiemas 2. Bandara TNI AD Gatot Subroto 3. Bandara PT. Nusantara Tropical Fruit 4. Bandara PT. Gula Putih Mataram		
Lokasi Wisata	11	11	24	7	8
Rencana TPA Regional	2	3	3	-	-
Rencana Waduk	Bendung Tirta Gangga	1. Bendung Way Sabu 2. Bendungan Way Sekampung	1. Bendungan Way Besai 2. Bendung Way Umpu 3. Bendungan Batu Tegi 4. Bendungan Margatiga 5. Bendungan Segalamider 6. Bendung Way Besai 7. Bendungan Way Rarem	-	Bendungan Way Jepara

DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
			8. Bendung Jabung		
	1. PLTU Kalianda 2. PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016 3. PLTD Metro	1. PLTU Lampung 2. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 3. PLTP Way Ratai 55 MW - 2020 4. PLTD Teluk Betung 5. PLTA Semangka 50 MW-2017 6. PLTP Ulu Belu (rencana 2011) 7. PLTD Pugung Tampak	1. PLTD Bengkuntat 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTD Talang Padang 4. PLTA Batu Tegi 5. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016 6. PLTD Krui 7. PLTD Tegineneng 8. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 9. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 10. PLTD Simpang Pematang 11. PLTD Wiralaga		1. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 2. PLTA Way Besai
Pembangkit Listrik					
Jalan Tol	24,65 Km	19,28 Km	201,04 Km	8,01 Km	0,12 Km
Metropolitan Bandar Lampung	61.106,55 Ha	54.292,78 Ha	107.487,02 Ha	7.517,32 Ha	3.217,33 Ha
DI Kewenangan Provinsi	36.744,68 Ha	6.363,68 Ha	112.434,34 Ha	3.612,57 Ha	214,25 Ha
DI Kewenangan Pusat	23.939,92 Ha	-	5.023,35 Ha	-	-
Sawah	42.477,82 Ha	28.274,04 Ha	229.967,3 Ha	29.660,32 Ha	79,09 Ha
Pelabuhan	Berdasarkan hasil overlay dengan peta jasa ekosistem, KRP Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Utama tidak masuk kedalam peta jasa ekosistem karena lokasi koordinat titik pelabuhan berada di luar garis pantai.				
Industri	Dari 9 kawasan Industri yang aka dibangun di Provinsi Lampung, masih terdapat 6 kawasan industri yang bersifat indikatif. Sehingga overlay kawasan industri tersebut tidak dilakukan karena dapat terjadinya pergeseran pemanfaatan ruang kedepannya jika lokasi industri sudah ditetapkan.				
Bumi Agribisnis	Berdasarkan hasil penapisan isu, bumi agribisnis merupakan program pembangunan kawasan pertanian dan perkebunan provinsi lampung kedepannya. Dan bumi agribisnis tidak terdapat lokasi kawasannya.				

4.2.5 Analisis Jasa Ekosistem Pengatur, Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam Terhadap KRP Provinsi Lampung

Jasa ekosistem pengatur, pencegahan dan perlindungan bencana alam merupakan Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami. Hasil overlay jasa ekosistem pengatur, pencegahan dan perlindungan bencana alam terhadap 12 KRP Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana Ala Terhadap KRP
Provinsi Lampung

Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bandara		1. Bandara Radin Inten II 2. Bandara TNI AU Astra Ksetra	1. Bandara M. Taufiq Kiemas 2. Bandara TNI AD Gatot Subroto	1. Bandara PT. Nusantara Tropical Fruit 2. Bandara PT. Gula Putih Mataram	
Lokasi Wisata	10	12	26	10	3
Rencana TPA Regional	3	2	3	-	-
Rencana Waduk	Bendung Way Sabu	1. Bendungan Way Sekampung 2. Bendung Tirta Gangga	1. Bendung Jabung 2. Bendungan Batu Tegi 3. Bendungan Margatiga 4. Bendungan Segalamider 5. Bendung Way Besai 6. Bendungan Way Besai 7. Bendungan Way Rarem 8. Bendung Way Umpu	Bendungan Way Jeparu	-
Pembangkit Listrik	1. PLTP Way Ratai 55 MW - 2020 2. PLTA Semangka 50 MW-2017 3. PLTP Ulu Belu (rencana 2011)	1. PLTU Kalianda 2. PLTU Lampung 3. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 4. PLTD Teluk Betung 5. PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016 6. PLTD Metro 7. PLTD Pugung Tampak	1. PLTD Bengkunt 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTD Talang Padang 4. PLTA Batu Tegi 5. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016 6. PLTD Kruai 7. PLTD Tegineneng 8. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 9. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 10. PLTD Simpang Pematang 11. PLTD Wiralaga	-	1. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 2. PLTA Way Besai
Jalan Tol	-	43,93 Km	179,36 Km	209,17 Km	-
Metropolitan Bandar Lampung	33.780,31 Ha	78.771,94 Ha	100.607,84 Ha	17.243,59 Ha	3.217,33 Ha
DI Kewenangan Provinsi	3.108,17 Ha	39.950,01 Ha	112.976,3 Ha	3.245,27 Ha	89,48 Ha
DI Kewenangan Pusat	23.939,92 Ha	-	5.023,35 Ha	-	-
Sawah	8.860,02 Ha	43.101,06 Ha	261.263,19 Ha	17.210,86 Ha	23,45 Ha

Isu Prioritas	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pelabuhan	Berdasarkan hasil overlay dengan peta jasa ekosistem, KRP Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Utama tidak masuk kedalam peta jasa ekosistem karena lokasi koordinat titik pelabuhan berada di luar garis pantai.				
Industri	Dari 9 kawasan Industri yang akan dibangun di Provinsi Lampung, masih terdapat 6 kawasan industri yang bersifat indikatif. Sehingga overlay kawasan industri tersebut tidak dilakukan karena dapat terjadinya pergeseran pemanfaatan ruang kedepannya jika lokasi industri sudah ditetapkan.				
Bumi Agribisnis	Berdasarkan hasil penapisan isu, bumi agribisnis merupakan program pembangunan kawasan pertanian dan perkebunan provinsi lampung kedepannya. Dan bumi agribisnis tidak terdapat lokasi kawasannya.				

4.3 Analisis Resiko Bencana pada KRP Provinsi Lampung

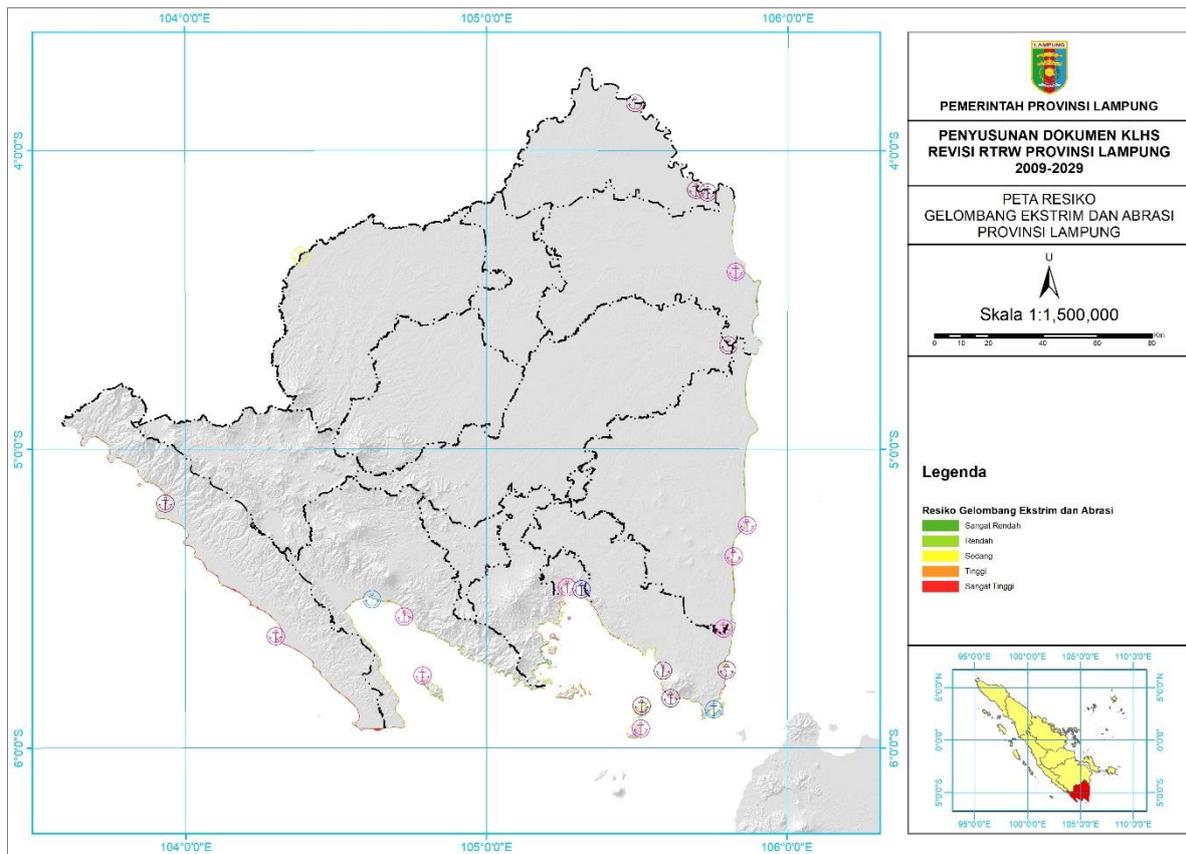
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko Lingkungan Hidup yang salah satunya meliputi peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Berikut hasil analisis resiko bencana pada setiap KRP Provinsi Lampung. Resiko bencana yang dianalisis meliputi resiko gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrik, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gempa bumi, banjir bandang, serta rentan banjir.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi pada KRP Provinsi Lampung

KRP	Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi					Tidak Masuk Ke Dalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Rencana Pengembangan Fasilitas Pelabuhan	1. Kuala Stabas, Pesisir Barat 2. Rawa Seragi Pasir Sakti, Lampung Timur 3. Cabang Way Seputih, Lampung Tengah 4. Kuala Teladas, Tulang Bawang 5. KTM, Mesuji 6. Way Sidang, Mesuji 7. Wiralaga, Mesuji 8. Dry Port, Way Kanan		1. P. Sebuku Rajabasa, Lampung Selatan 2. P. Sebesi Rajabasa, Lampung Selatan 3. Bakauheni, Lampung Selatan 4. Kuala Penet, Lampung Timur	1. P. Tabuan, Tanggamus 2. Kota Agung, Tanggamus 3. Teluk Betung, Bandar Lampung 4. Panjang, Bandar Lampung	1. Ngaras, Pesisir Barat 2. Batu Balai, Tanggamus 3. Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan 4. Dermaga Canti Rajabasa, Lampung Selatan 5. Ketapang, Lampung Selatan 6. Labuhan Maringgai, Lampung Timur	

DOKUMEN

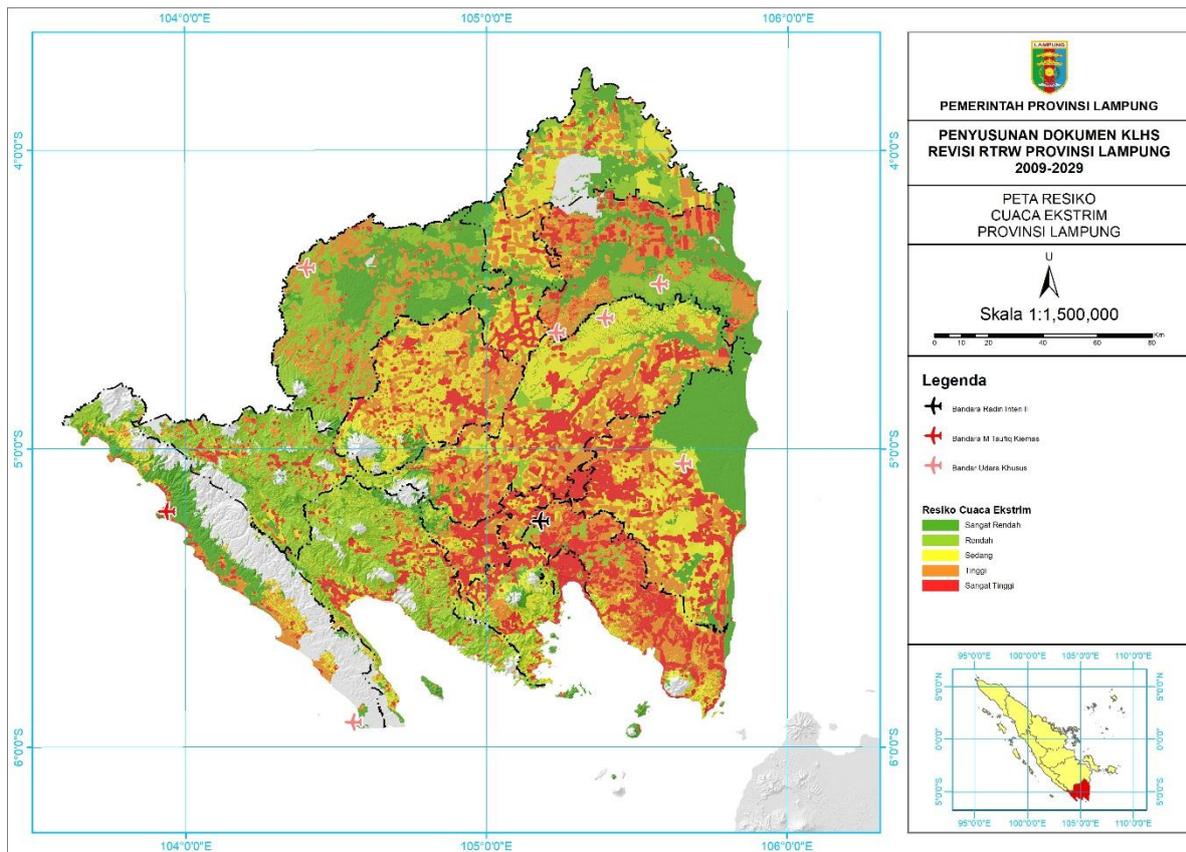
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 4.24 Peta Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Lampung

Tabel 4.11
Rekapitulasi Resiko Cuaca Ekstrim pada KRP Provinsi Lampung

KRP	Resiko Cuaca Ekstrim					Tidak Masuk Ke Dalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bandara	Bandara TNI AD Gatot Subroto	Bandara PT. Indo Lampung Perkasa	1. Bandara PT. Nusantara Tropical Farm 2. Bandara PT. Gula Putih Mataram	Bandara Tambling	1. Bandar M. Taufiq Kiemas, Pesisir Barat 2. Bandara Radin Inten II 3. Bandara TNI AU Astra Ksetra	



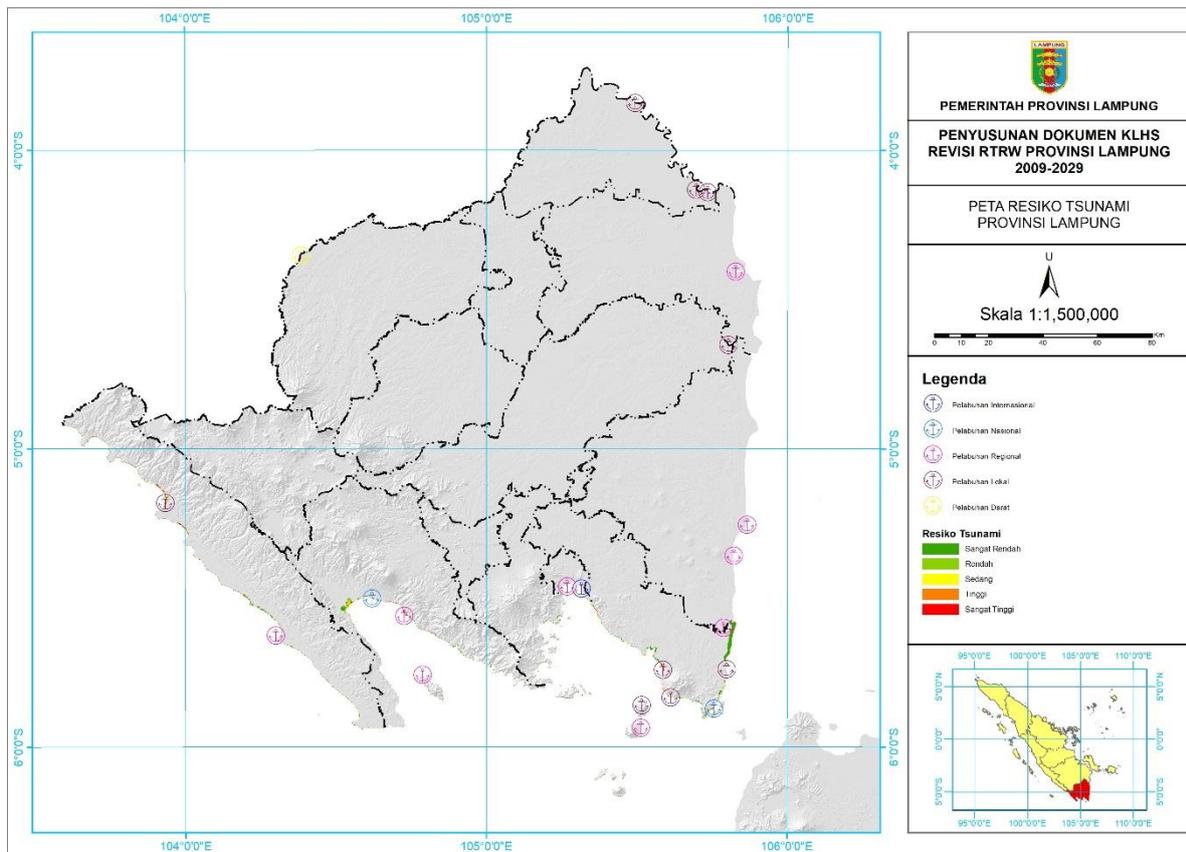
Gambar 4.25 Peta Resiko Cuaca Ekstrem Provinsi Lampung

Tabel 4.12
 Rekapitulasi Resiko Tsunami pada KRP Provinsi Lampung

KRP	Resiko Tsunami					Tidak Masuk Ke Dalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Rencana Pengembangan Fasilitas Pelabuhan	1. P. Sebuku Rajabasa, Lampung Selatan 2. Rawa Seragi Pasir Sakti, Lampung Timur	Teluk Betung, Bandar Lampung	1. Panjang, Bandar Lampung 2. P. Sebesi Rajabasa, Lampung Selatan	Ketapang, Lampung Selatan	1. Kuala Stabas, Pesisir Barat 2. Ngaras, Pesisir Barat 3. P. Tabuan, Tanggamus 4. Kota Agung, Tanggamus 5. Batu Balai, Tanggamus 6. Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan 7. Dermaga Canti Rajabasa, Lampung Selatan 8. Bakauheni, Lampung Selatan	1. Labuhan Maringgai, Lampung Timur 2. Kuala Penet, Lampung Timur 3. Cabang Way Seputih, Lampung Tengah 4. Kuala Teladas, Tulang Bawang 5. KTM, Mesuji 6. Way Sidang, Mesuji 7. Wiralaga, Mesuji 8. Dry Port, Way Kanan

DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 4.26 Peta Resiko Tsunami Provinsi Lampung

Tabel 4.13
Rekapitulasi Resiko Tanah Longsor pada KRP Provinsi Lampung

KRP	Resiko Tanah Longsor					Tidak Masuk Ke Dalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Pembangkit Listrik	1. PLTA Batu Tegi 2. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20	1. PLTP Way Ratai 55 MW - 2020 2. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016	PLTA Semangka 50 MW-2017	PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19	1. PLTP Ulu Belu (rencana 2011) 2. PLTA Way Besai	1. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 2. PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016 3. PLTU Sewa Tarahan 2x120 MW 2016 4. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 5. PLTD Wiralaga 6. PLTD Simpang Pematang 7. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 8. PLTD Pugung Tampak 9. PLTD Krui 10. PLTD Bengkuntan

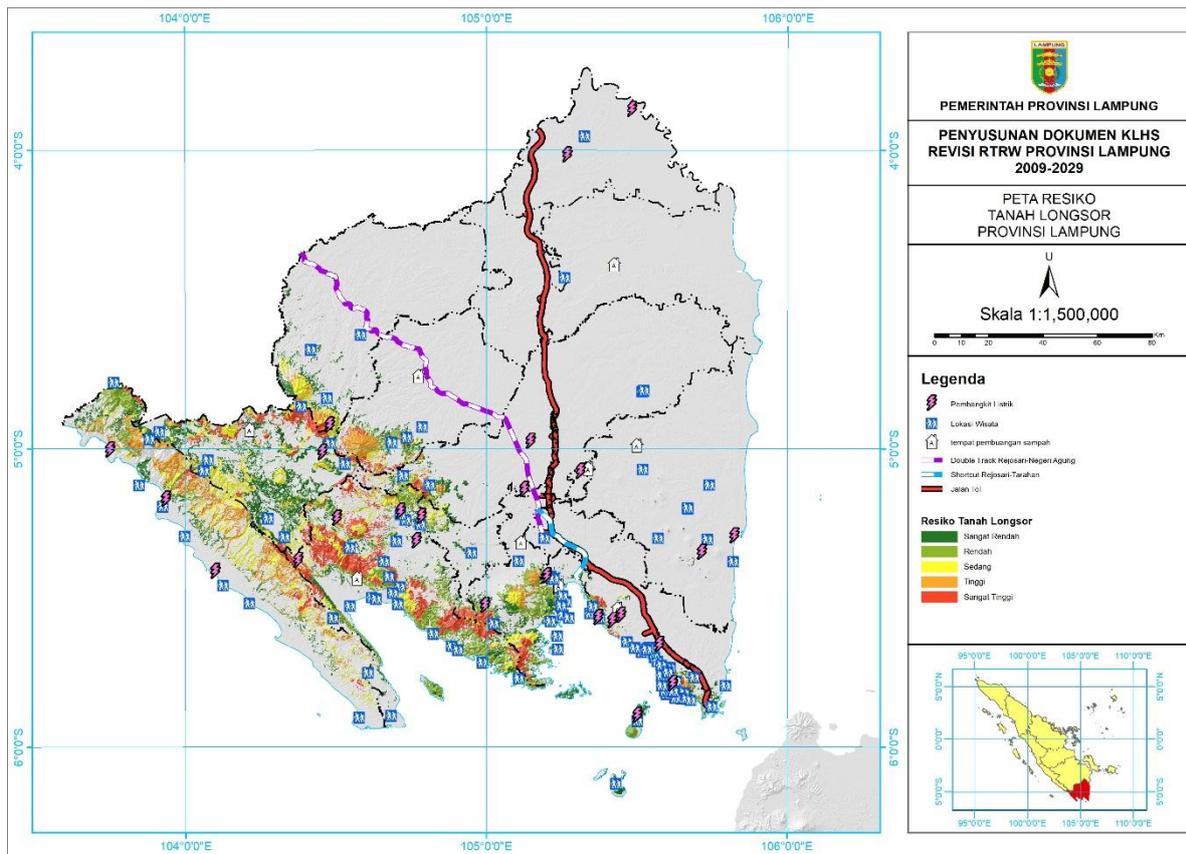
DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

KRP	Resiko Tanah Longsor					Tidak Masuk Ke Dalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
						11. PLTD Talang Padang 12. PLTD Tegineneng 13. PLTD Metro 14. PLTD Teluk Betung 15. PLTU Lampung 16. PLTU Kalianda 17. PLTD Pulau Sebesi
Jalan Tol	0,77 Km	0,56 Km	-	-	-	
Rencana Pengembangan TPA Regional	Teluk Betung Timur, Bandar Lampung	-	-	-	-	1. Batu Ketulis, Lampung Barat 2. Sungkai Selatan, Lampung Utara 3. Kota Agung Barat, Tanggamus 4. Kalianda, Lampung Selatan 5. Purbolinggo, Lampung Timur 6. Gedong Meneng, Tulang Bawang 7. Pekalongan, Lampung Timur 8. Negeri Katon, Pesawaran 9. Katibung, Lampung Selatan
Lokasi Wisata	1. Air Terjun Sarmun, Rajabasa Lampung Selatan 2. Air Terjun Ciupang, Way Ratai Lampung Selatan 3. Air Terjun Lembah Pelangi, Ulubelu Tanggamus 4. Air Terjun Curup Tujuh, Selagai Lingga Lampung Tengah 5. Air Terjun Sukaemi, Tanjung Raja Lampung Utara 6. Bendung Way Besai	1. Wisata Alam Gunung Tanggamus 2. Air Terjun Keramat Sari, Air Nanningan Tanggamus 3. Bendungan Batu Tegi, Tanggamus	1. Air Terjun Way Tayas, Rajabasa Lampung Selatan 2. Air Terjun Klawas, Abung Tengah Lampung Utara 3. Air Terjun Putri Malu, Banjir Way Kanan 4. Bukit Batu Keramat, Kota Agung Timur, Tanggamus 5. Wisata Pegunungan Pelampangan Liwa, Lampung Barat	1. Wisata Alam Gunung Rajabasa, Lampung Selatan 2. Wisata Alam Pegunungan Penyambungan Hill	Air Terjun Talang Ogan, Pulau Panggung Tanggamus	87 Lokasi Wisata
Double Track KA	-	-	-	-	-	
Shortcut KA	4,67 Km	-	-	-	-	

DOKUMEN

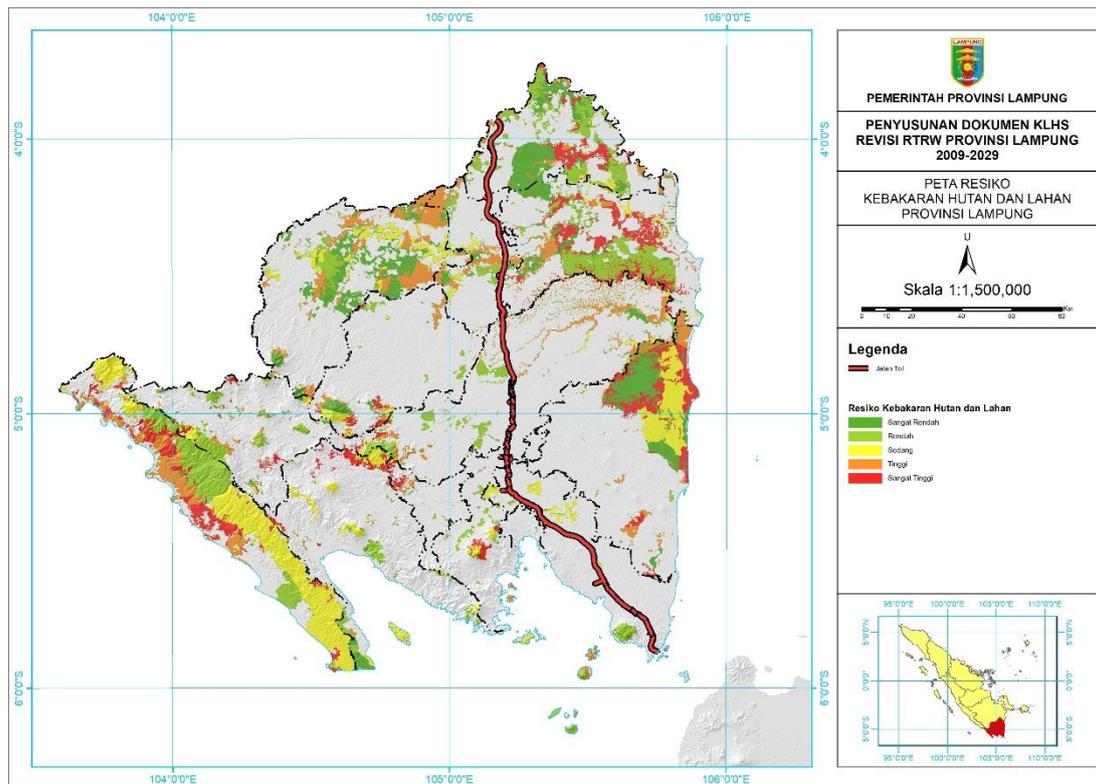
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029



Gambar 4.27 Peta Resiko Tanah Longsor Provinsi Lampung

Tabel 4.14
Rekapitulasi Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan pada KRP Provinsi Lampung

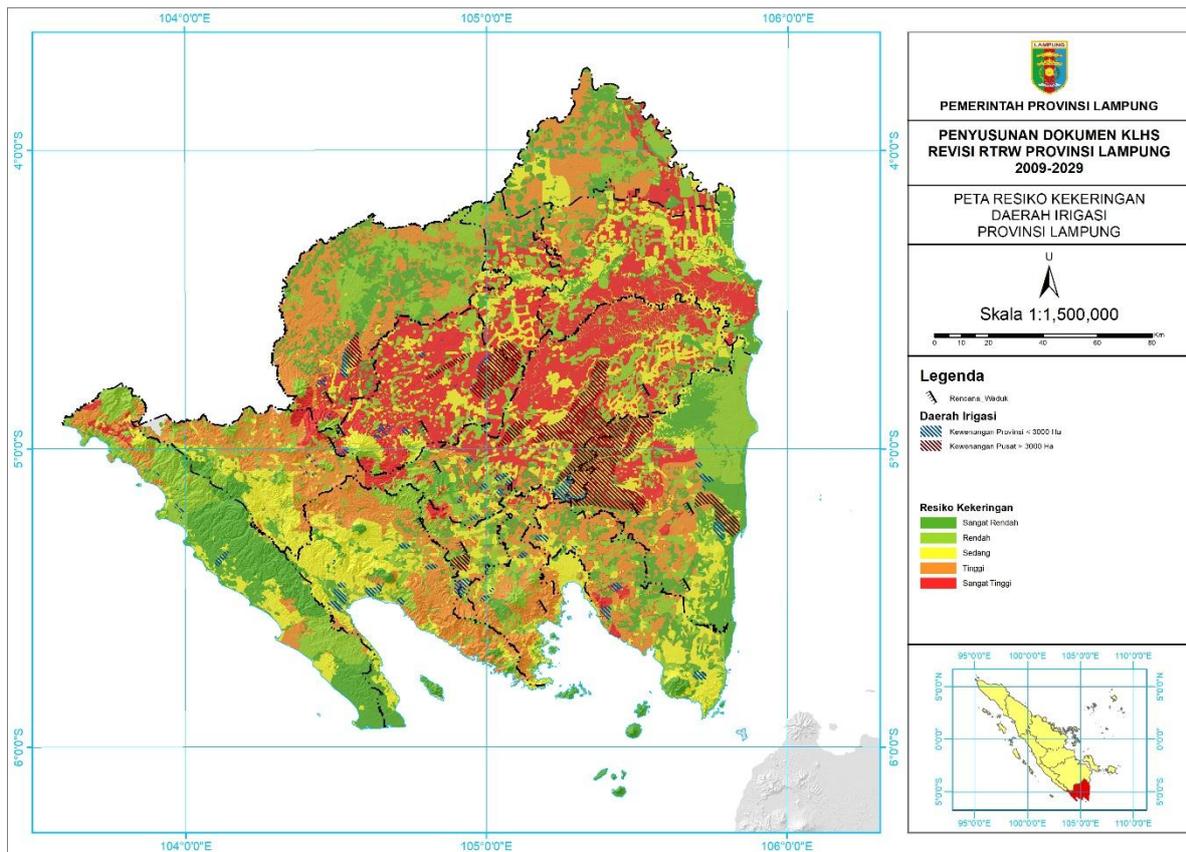
KRP	Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan					Tidak Masuk Ke Dalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar	0,93 Km	0,31 Km	3,42 Km	0,12 Km	-	
Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang	2,93 Km	11,85 Km	0,06 Km	5,03 Km	0,13 Km	



Gambar 4.28 Peta Resiko Kebakara Hutan dan Lahan Provinsi Lampung

Tabel 4.15
Rekapitulasi Resiko Kekeringan pada KRP Provinsi Lampung

KRP	Resiko Kekeringan					Tidak Masuk Kedalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Rencana Waduk	1. Bendung Jabung 2. Bendungan Segalamider	1. Bendung Tirta Gangga 2. Bendungan Batu Tegi		1. Bendung Way Sabu 2. Bendung Way Besai 3. Bendungan Way Sekampung 4. Bendungan Way Jepara 5. Bendungan Margatiga	1. Bendung Way Umpu 2. Bendungan Way Besai 3. Bendungan Way Rarem	
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi ≤3000 Ha	18.464,35 Ha	38.575,05 Ha	51.000,21 Ha	11.387,92 Ha	40.310,69 Ha	
Daerah Irigasi Kewenangan Pusat >3000 Ha	-	8.916,23 Ha	13.042,42 Ha	3.204,08 Ha	3.487,54 Ha	
Sawah Lampung	55.886,28 Ha	68.922,62 Ha	92.245,43 Ha	40.538,76 Ha	72.901,61 Ha	
Pertanian Lahan Basah	273,70 Ha	671,15 Ha	1.299,31 Ha	1.409,89 Ha	609,84 Ha	
Pertanian Lahan Kering	66.373,74 Ha	90.988,09 Ha	98.396 Ha	87.248,13 Ha	129.897,27 Ha	
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	46.574,28 Ha	61.372,99 Ha	50.007,75 Ha	48.271,88 Ha	58.551,18 Ha	



Gambar 4.29 Peta Resiko Kekeringan Provinsi Lampung

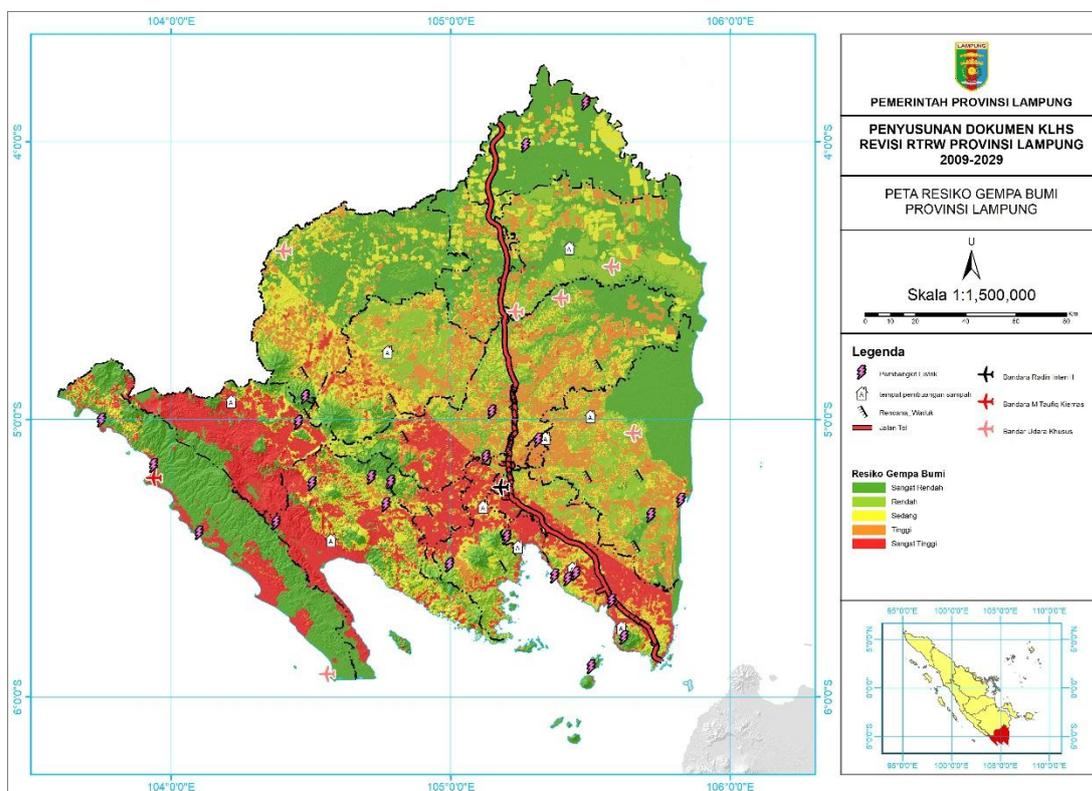
Tabel 4.16
Rekapitulasi Resiko Gempa Bumi pada KRP Provinsi Lampung

KRP	Resiko Gempa Bumi					Tidak Masuk Kedalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Pembangkit Listrik	1. PLTA Batu Tegi 2. PLTA Way Besai 3. PLTD Bengkunt 4. PLTD Pugung Tampak 5. PLTD Tegineneng 6. PLTD Wiralaga 7. PLTP Ulu Belu (rencana 2011) 8. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 9. PLTU Sewa Tarahan 2x120 MW 2016	1. PLTMG Srihawono 50 MW-2014 2. PLTP Way Ratai 55 MW - 2020 3. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009)	1. PLTD Simpang Pematang 2. PLTD Talang Padang 3. PLTD Teluk Betung 4. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 5. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016	1. PLTD Krui 2. PLTD Metro 3. PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016	1. PLTA Semangka 50 MW-2017 2. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 3. PLTU Kalianda 4. PLTU Lampung	
Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar	2,13 Km	13,60 Km	24,88 Km	46,25 Km	54,06 Km	
Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang	43,05 Km	30,31 Km	25,73 Km	12,64 Km	0,43 Km	
Rencana Pengembangan	Gedong Meneng, Tulang Bawang	1. Teluk Betung Timur, Bandar	1. Kalianda, Lampung	Purbolinggo, Lampung Timur	1. Katibung, Lampung	

DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

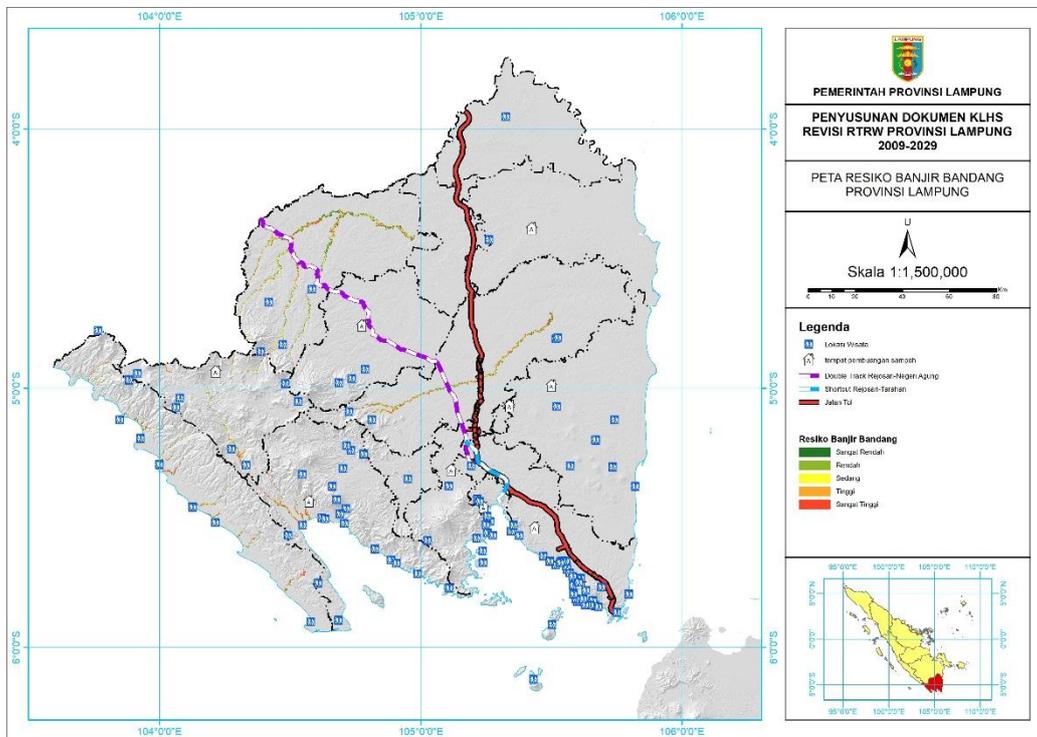
KRP	Resiko Gempa Bumi					Tidak Masuk Kedalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
TPA Regional		Lampung 2. Sungkai Selatan, Lampung Utara	Selatan 2. Negeri Katon, Pesawaran 3. Pekalongan Lampung Timur		Selatan 2. Kota Agung Barat, Tanggamus 3. Batu Ketulis, Lampung Barat	
Rencana Waduk	Bendungan Batu Tegi	1. Bendung Way Sabu 2. Bendung Way Besai 3. Bendungan Way Sekampung 4. Bendungan Margatiga 5. Bendungan Way Jepara 6. Bendungan Way Besai	1. Bendungan Way Rarem 2. Bendung Way Umpu	1. Bendung Jabung 2. Bendung Tirta Gangga	Bendungan Segalamider	
Bandara	Bandara TNI AD Gatot Subroto	1. Bandara PT. Indo Lampung Perkasa 2. Bandara PT. Gula Putih Mataram 3. Bandara PT. Nusantara Tropical Farm		Bandara TNI AU Astra Ksetra	1. Bandara M. Taufiq Kiemas 2. Bandara Tambling 3. Bandara Radin Inten II	



Gambar 4.30 Peta Resiko Gempa Bumi Provinsi Lampung

Tabel 4.17
Rekapitulasi Resiko Banjir Bandang pada KRP Provinsi Lampung

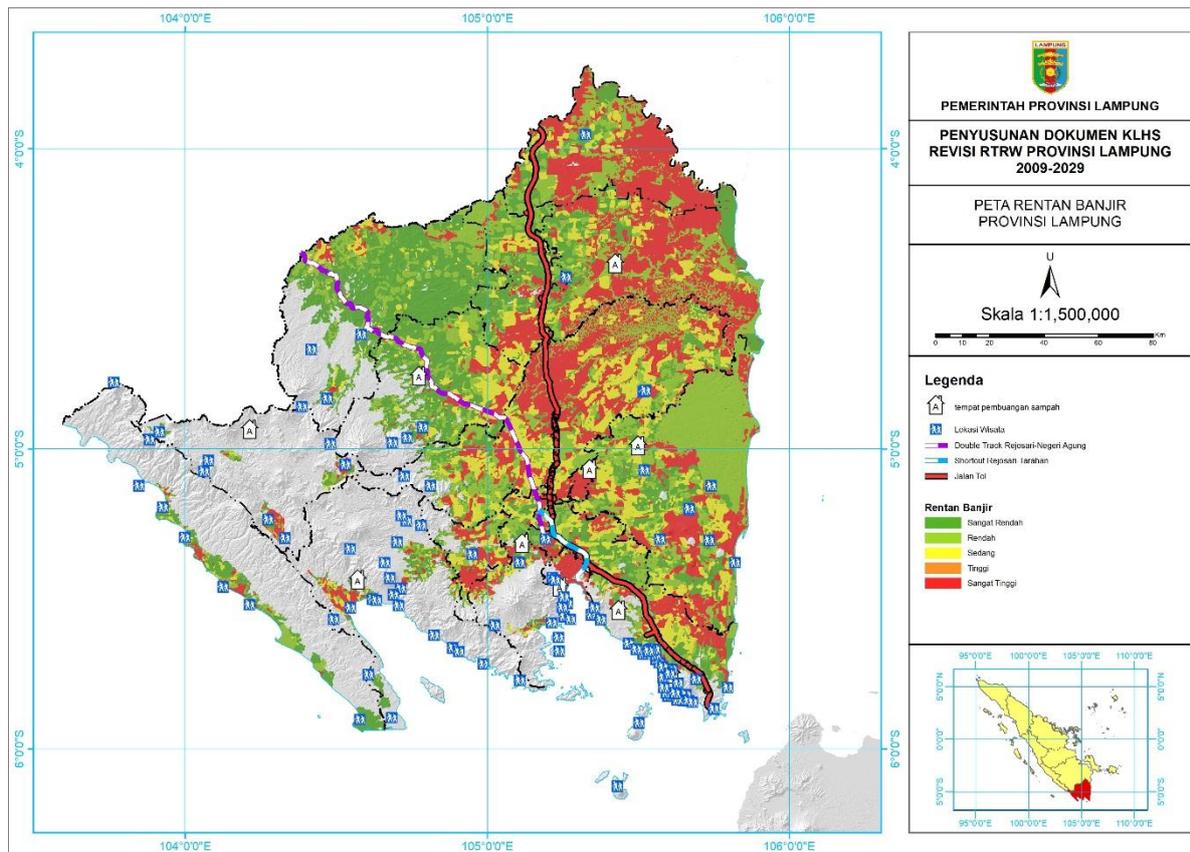
KRP	Resiko Banjir Bandang					Tidak Masuk Kedalam Kawasan Resiko
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar	0,12 Km	0,1 Km	0,13 Km	0,12 Km	0,5 Km	
Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang	-	-	-	-	-	
Rencana Pengembangan TPA Regional	-	-	-	-	-	Seluruh TPA tidak berada di dalam kawasan resiko banjir
Lokasi Wisata	Pantai Muara Tembulih, Ngambur Pesisir Barat		1. Bendung Way Besai, Sumber Jaya Lampung Barat 2. Bendung Way Umpu, Banjit Way Kanan 3. Kampung Wisata Gedung Batin, Blambangan Umpu Way Kanan	Air Terjun Curup Tujuh, Selagalingga Lampung Tengah	Air Terjun Putri Malu, Banjit Way Kanan	98 Lokasi Wisata
Double Track KA	1,68 Km	1,06 Km	0,53 Km	0,76 Km	1,26 Km	
Shortcut KA	-	-	-	-	-	



Gambar 4.31 Peta Resiko Banjir Bandang Provinsi Lampung

Tabel 4.18
Rekapitulasi Rentan Banjir pada KRP Provinsi Lampung

KRP	Rentan Banjir					Tidak Masuk Kedalam Kawasan Rentan
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar	46,60 Km	33,78 Km	25,05 Km	-	23,58 Km	
Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang	21,43 Km	34,39 Km	13,39 Km	-	41,96 Km	
Rencana Pengembangan TPA Regional	1. Negeri Katon, Pesawaran 2. Sungkai Selatan, Lampung Utara	1. Pekalongan, Lampung Timur 2. Gedong Meneng, Tulang Bawang	Purbolinggo, Lampung Timur	-		1. Batu Ketulis, Lampung Barat 2. Kota Agung Barat, Tanggamus 3. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung 4. Kalianda, Lampung Selatan 5. Katibung, Lampung Selatan
Lokasi Wisata	1. Tambling Wildlife Nature Conservation, Bengkunt Pesisir Barat 2. Pantai Ketang, Kalianda Lampung Selatan 3. Alau-alau Resort, Kalianda Lampung Selatan 4. Pantai Bagus, Kalianda Lampung Selatan 5. Pantai Merak Belantung,, Kalianda Lampung Selatan 6. Taman Wisata Danau Kemuning, Bandar Sri Bhawono Lampung Timur 7. Taman Purbakala, Sekampung Udik Lampung Timur 8. Danau Suoh, Lampung Barat 9. Bendungan Way Jepara, Lampung Timur 10. Danau Jepara, Way Jepara Lampung Timur 11. Taman Wisata Beringin Indah, Sukadana Lampung Timur 12. Bendungan Way Rarem, Lampung Utara	1. Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur 2. Bendung Tirta Gangga, Lampung Tengah 3. Kampung Wisata Gedung Batin, Blambangan Umpu Way Kanan 4. Taman Keanekaragaman Hayati, Tanjung Raya Mesuji	1. Grand Elty Krakatoa, Kalianda Lampung Selatan 2. Pantai Sapenan, Kalianda Lampung Selatan 3. Situs Batu Brak, Kebuntebu Lampung Barat 4. Danau Tirta Gangga, Seputih Banyak Lampung Tengah	-	1. Makam Raden Intan II, Penengahan Lampung Selatan 2. Air Terjun Way Peros, Kalianda Lampung Selatan 3. Makam Al Habib Ali Bin Alwi Al Idrus, Kalianda Lampung Selatan 4. Museum Nasional Ketransmigrasian, Gedong Tataan Pesawaran 5. Gou Maria Padang Bulan, Pringsewu 6. Air Panas Natar, Lampung Selatan 7. Wisata Pegunungan Helling, Lampung Barat 8. Candi Cakat Raya, Menggala Tulang Bawang	76 Lokasi Wisata
Double Track KA	55,36 Km	30,08 Km	47,51 Km	-	27,34 Km	
Shortcut KA	8,53 Km	8,70 Km	2,17 Km	-	14,62 Km	



Gambar 4.32 Peta Kerentanan Banjir Provinsi Lampung

4.4 Pengaruh KRP Terhadap Perubahan Iklim

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 juta ton CO₂e atau sebesar 38,59% dari total Business As Usual Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 juta ton CO₂e dan ini menandakan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung sudah on the track dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan gas rumah kaca secara nasional.

4.4.1 Struktur Ruang

a) Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan Jalan Tol akan mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah. Rendahnya kualitas iklim disebabkan oleh alih fungsi lahan akibat pembangunan jalan tol yang berdampak terhadap kurangnya lahan penyerapan air, produksi oksigen dan menyerap CO₂.

b) Pengembangan Waduk

Pembangunan Waduk akan mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah. Pengembangan

waduk menyebabkan potensi pembukaan lahan, sehingga menyebabkan rendahnya produksi oksigen ke udara dan rendahnya untuk menyerap CO₂ serta daya serap air yang rendah. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat serta adanya pencemaran menyebabkan iklim menjadi terganggu dan menimbulkan perubahan iklim

c) Pengembangan Pembangkit Listrik

Pengembangan pembangkit listrik akan mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah. Pengembangan pembangkit listrik menyebabkan potensi pembukaan lahan, sehingga menyebabkan rendahnya produksi oksigen ke udara dan rendahnya untuk menyerap CO₂ serta daya serap air yang rendah. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat serta adanya pencemaran menyebabkan iklim menjadi terganggu dan menimbulkan perubahan iklim.

d) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Internasional

Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional selalu diiringi dengan peningkatan aktifitas bongkar muat pelabuhan baik barang maupun orang, sehingga menyebabkan tinggi lalu lintas pergerakan keluar masuk kendaraan kedalam pelabuhan yang menyebabkan polusi. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat serta adanya pencemaran menyebabkan iklim menjadi terganggu dan menimbulkan perubahan iklim.

e) Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional

Rencana pembangunan TPA Regional perlu diperhatikan jasa ekosistem pengaturan iklim. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan pengguna lahan yang tersedia harus memperhatikan penggunaan lahan kondisi saat ini. Tidak diperbolehkan pembangunan TPA Regional ini dilakukan dengan pembukaan lahan, karena hal ini akan mempengaruhi jasa pengaturan iklim. Selain itu kualitas udara harus selalu terjaga dalam kawasan TPA regional tersebut. Dikarenakan ketika tidak menggunakan sistem TPA yang baik udara akan semakin tercemar dan mempengaruhi jasa ekosistem pengaturan iklim.

f) Pengembangan Bandar Udara

Jenis ekoregion atau bentang lahan di Provinsi Lampung terdiri dari dataran fluvial vulkanik, pegunungan struktural patahan, dataran aluvial, dan dataran pantai. Karakteristik ekoregion tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >16% artinya memiliki hambatan yang cukup tinggi untuk dilakukan pembangunan. Selain itu kesuburan lahan pada jenis ekoregion ini sangat rendah. Dengan demikian terbatasnya jenis tanaman yang dapat ditanami untuk lahan penyerapan air, produksi oksigen dan menyerap CO₂.

g) Program pengelolaan daerah irigasi nasional dan daerah irigasi provinsi dapat menimbulkan peningkatan aktivitas di sekitar irigasi, penggunaan air semakin meningkat. Jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang tanpa ada daur ulang melalui serapan air, maka akan mungkin mengalami kekeringan. Serapan air dapat berkurang akibat dari jasa ekosistem pendukung biodiversitas rendah dan pengaturan iklim rendah. Jasa pengaturan iklim dan biodiversitas dapat berasal dari hutan dan perkebunan. Rendahnya jasa pengaturan iklim

dan biodiversitas menyebabkan rendahnya kemampuan alam untuk memproduksi oksigen ke udara dan menyerap karbondioksida. Hal ini merupakan salah satu penyebab perubahan iklim.

4.4.2 Pola Ruang

a) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian

Mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah di lokasi pertanian Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah . Rentan terhadap perubahan iklim dikarenakan kondisi biodiversitas yang rendah, pembukaan lahan sehingga menyebabkan rendahnya produksi oksigen ke udara dan rendahnya untuk menyerap CO₂ serta daya serap air yang rendah. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat serta adanya pencemaran menyebabkan iklim menjadi terganggu dan menimbulkan perubahan iklim

b) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Aktivitas kawasan industri umumnya menyumbang asap yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Industri merupakan penyumbang emisi terbesar dan menyebabkan perubahan iklim. Kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim yang rendah menimbulkan gangguan perubahan iklim semakin meningkat. Hal ini dikarenakan emisi yang dihasilkan oleh industri tidak mampu diserap oleh alam, sehingga emisi akan kembali ke atmosfer dan membentuk lapisan yang dapat menghalangi pantulan cahaya matahari kembali ke bumi yang disebut efek rumah kaca. Hal ini menyebabkan suhu di dalam bumi semakin meningkat dan menyebabkan perubahan iklim. Pencemaran udara akibat aktivitas industri merupakan penyumbang terbesar kedua selain emis kendaraan penyebab perubahan iklim.

c) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah di lokasi pariwisata Way Kanan, Lampung Barat dan Lampung Selatan. Rentan terhadap perubahan iklim akibat meningkatnya suhu di udara akibat aktivitas di kawasan Pariwisata terutama restoran dan hotel selain itu kondisi biodiversitas yang rendah menyebabkan CO₂ semakin meningkat di udara dan menimbulkan perubahan iklim.

4.4.3 Kawasan Strategis

a) Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung

Mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah. Aktivitas kawasan metropolitan akan meningkatkan pergerakan, kendaraan semakin meningkat, polusi meningkat. Alih fungsi lahan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan perubahan iklim

b) Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan

Rentan terhadap perubahan iklim dikarenakan kondisi biodiversitas yang rendah, pembukaan lahan sehingga menyebabkan rendahnya produksi oksigen ke udara dan rendahnya untuk menyerap CO₂ serta daya serap air yang rendah. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat serta adanya pencemaran menyebabkan iklim menjadi terganggu dan menimbulkan perubahan iklim

4.5 Pengaruh KRP Terhadap Keanekaragaman Hayati

4.5.1 Struktur Ruang

a) Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan Jalan Tol dapat menyebabkan terjadinya pembukaan lahan. Jenis ekoregion atau bentang lahan di Provinsi Lampung terdiri dari datran fluvial vulkanik, pegunungan struktural patahan, dataran aluvial, dan dataran pantai. Karakteristik ekoregion tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >16% artinya memiliki hambatan yang cukup tinggi untuk dilakukan pembangunan. Selain itu kesuburan lahan pada jenis ekoregion ini sangat rendah tidak memungkinkan tumbuhnya tumbuhan secara cepat, jasa ekosistem biodiversitas rendah artinya kemampuan lahan untuk ditanami keberagaman hayati rendah.

b) Pengembangan Waduk

Pembangunan Waduk dapat menyebabkan terjadinya pembukaan lahan. Jenis ekoregion atau bentang lahan di Provinsi Lampung terdiri dari datran fluvial vulkanik, pegunungan struktural patahan, dataran aluvial, dan dataran pantai. Karakteristik ekoregion tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >16% artinya memiliki hambatan yang cukup tinggi untuk dilakukan pembangunan. Selain itu kesuburan lahan pada jenis ekoregion ini sangat rendah tidak memungkinkan tumbuhnya tumbuhan secara cepat, jasa ekosistem biodiversitas rendah artinya kemampuan lahan untuk ditanami keberagaman hayati rendah.

c) Pengembangan Pembangkit Listrik

Pengembangan Pembangkit Listrik dapat menyebabkan terjadinya pembukaan lahan. Jenis ekoregion atau bentang lahan di Provinsi Lampung terdiri dari datran fluvial vulkanik, pegunungan struktural patahan, dataran aluvial, dan dataran pantai. Kesuburan lahan pada jenis ekoregion ini sangat rendah tidak memungkinkan tumbuhnya tumbuhan secara cepat, jasa ekosistem biodiversitas rendah artinya kemampuan lahan untuk ditanami keberagaman hayati rendah.

d) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Internasional

Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional dapat menyebabkan terjadinya pembukaan lahan. Jenis ekoregion atau bentang lahan di Provinsi Lampung terdiri dari dataran fluvial vulkanik, pegunungan struktural patahan, dataran aluvial, dan dataran pantai. Kesuburan lahan pada jenis ekoregion ini sangat rendah tidak memungkinkan tumbuhnya tumbuhan secara cepat, jasa ekosistem biodiversitas rendah artinya kemampuan lahan untuk ditanami keberagaman hayati rendah.

e) Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional

Rencana pengembangan TPA Regional berada pada lokasi dengan tingkat kepentingan sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu perhatian khusus dalam pengembangan TPA Regional tersebut. Hal ini dikarenakan secara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup bahwa pada lokasi tersebut sudah tidak memenuhi kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Pengembangan Bandar Udara

- f) Pengelolaan daerah irigasi nasional dan daerah irigasi provinsi
- Pengelolaan daerah irigasi dalam jangka panjang menimbulkan sedimentasi, pembukaan lahan hutan, peningkatan aktivitas di sekitar badan sungai. Dengan karakteristik ekoregion yaitu kesuburan tanah yang rendah tidak memungkinkan tumbuhnya tumbuhan secara cepat, jasa ekosistem biodiversitas rendah artinya kemampuan lahan untuk ditanami keberagaman hayati rendah. Hal ini berdampak terhadap penurunan muka air tanah, run-off water semakin meningkat dan risiko bencana akibat luapan sungai semakin meningkat, dan flora yang tumbuh semakin terbatas.

4.5.2 Pola Ruang

- a) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian
- Kondisi bentang lahan dengan tingkat kesuburan rendah, dan adanya kemungkinan aktivitas pembukaan lahan untuk kawasan pertanian menyebabkan terbatasnya biodiversitas di Provinsi Lampung. Kesuburan lahan yang rendah membatasi jumlah flora yang dapat tumbuh, dan pembukaan lahan untuk kawasan pertanian akan sangat sulit jika dikembalikan untuk fungsi lahan serapan air. Hal ini sangat berpengaruh terhadap biodiversitas di Provinsi Lampung
- b) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
- Rencana pengembangan kawasan industri akan menimbulkan pembukaan lahan pada kawasan-kawasan produktif. Hal ini dapat mengganggu berkurangnya ketersediaan lahan yang cukup di Provinsi Lampung sementara itu kesuburan lahan yang rendah menyebabkan terganggunya biodiversitas di Provinsi Lampung
- c) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Akibat adanya pembukaan lahan untuk kebutuhan sarana penunjang pariwisata akan membatasi lahan-lahan untuk ditanami tumbuhan yang beragam. Terbatasnya lahan akan membatasi juga biodiversitas di Provinsi Lampung

4.5.3 Kawasan Strategis

- a) Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung
- Kesuburan lahan yang rendah dan hambatan lahan yang tinggi menyebabkan terbatasnya biodiversitas yang dapat tumbuh di Provinsi Lampung.
- b) Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan
- Kondisi bentang lahan dengan tingkat kesuburan rendah, dan adanya kemungkinan aktivitas pembukaan lahan untuk kawasan pertanian menyebabkan terbatasnya biodiversitas di

Provinsi Lampung. Kesuburan lahan yang rendah membatasi jumlah flora yang dapat tumbuh, dan pembukaan lahan untuk kawasan dukungan bumi agribisnis akan sangat sulit jika dikembalikan untuk fungsi lahan serapan air. Hal ini sangat berpengaruh terhadap biodiversitas di Provinsi Lampung

4.6 Pengaruh KRP Terhadap Rawan Bencana

4.6.1 Struktur Ruang

a) Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan Jalan Tol tidak berpengaruh, dikarenakan masih dapat mengandalkan Jasa Ekosistem Pengendalian bencana yang masih tinggi.

b) Pengembangan Waduk

Pengembangan Waduk berpengaruh terhadap dampak bencana. Hal ini dikarenakan ketersediaan Jasa Ekosistem tersebut termasuk kategori sangat rendah. Namun tidak mempengaruhi pengaturan tata aliran air dikarenakan jasa ekosistem yang tersedia masih mencukupi.

c) Pengembangan Pembangkit Listrik

Pengembangan Pembangkit Listrik tidak berpengaruh, dikarenakan masih dapat mengandalkan Jasa Ekosistem Pengendalian bencana yang masih tinggi.

d) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Intenasional

Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Intenasional tidak berpengaruh, dikarenakan masih dapat mengandalkan Jasa Ekosistem Pengendalian bencana yang masih tinggi.

e) Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional

Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional rawan terhadap dampak bencana dan tidak terlalu signifikan mempengaruhi pengaturan tata aliran air. Hal ini dikarenakan ketersediaan Jasa Ekosistem tersebut termasuk kategori rendah. Kawasan tersebut terhindar dari paparan dampak bencana seperti misalnya tsunami dan longsor dikarenakan jauh dari kawasan kelerengan tinggi dan bagian pesisir. Namun tetap perlu diperhatikan penggunaan sistem TPA regional.

f) Pengelolaan daerah irigasi nasional dan daerah irigasi provinsi

Hal ini berdampak terhadap peningkatan risiko bencana yaitu banjir dan pencemaran. Akibat rendahnya jasa ekosistem penyerap air, pencemaran dan unsur hara serta rendahnya biodiversitas yaitu sedimentasi, penurunan muka air tanah, run-off water yang tinggi dan pencemaran serta kesuburan lahan yang rendah sehingga terbatasnya flora yang dapat tumbuh tidak mampu menyerap air dan run off water meningkat.

4.6.2 Pola Ruang

a) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian

Risiko bencana yang mungkin ditimbulkan yaitu akibat kegiatan rencana pengembangan kawasan pertanian adalah kekeringan, pencemaran tanah, banjir. Banjir akan merugikan untuk kawasan pertanian dan mengganggu panen serta produksi pangan

- b) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Tidak terlalu signifikan berpengaruh, Jasa Ekosistem Pendukung penanggulangan bencana masih dalam kategori cukup
- c) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
Risiko bencana yang dapat ditimbulkan yaitu pariwisata pantai yaitu intrusi air laut, abrasi, tsunami, gempa. Pariwisata non pantai dengan kondisi kelerengan yang miring yaitu banjir

4.6.3 Kawasan Strategis

- a) Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung
Rawan terhadap dampak bencana dan mempengaruhi penagturan tata aliran air. Hal ini dikarenakan ketersediaan Jasa Ekosistem tersebut termasuk kategori rendah. Risiko banjir, erosi tanah, longsor akibat alih fungsi lahan
- b) Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan
Risiko bencana yang mungkin ditimbulkan yaitu akibat kegiatan rencana pengembangan kawasan dukungan bumi agribisnis adalah kekeringan, pencemaran tanah, banjir. Banjir akan merugikan untuk kawasan pertanian dan mengganggu panen serta produksi pangan.

4.7 Pengaruh KRP Terhadap Kualitas Sumberdaya Alam

4.7.1 Struktur Ruang

- a) Pembangunan Jalan Tol
Pembangunan jalan tol tidak mengganggu kualitas sumber daya alam dikarenakan jasa ekosistem penyedia air bersih, pangan dan pemurnian masih tersedia tinggi untuk mendukung pembangunan
- b) Pengembangan Waduk
Pembangunan waduk menyebabkan terjadinya pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang ditandai dengan terjadinya alih fungsi lahan. Kondisi ekoregion yaitu perbukitan struktural patahan dengan karakteristik kesuburan yang rendah, sehingga berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya alam terutama pada penyediaan air bersih dan pangan.
- c) Pengembangan Pembangkit Listrik
Pembangkit listrik menyebabkan terjadinya pembukaan lahan yang ditandai dengan terjadinya alih fungsi lahan. Karakteristik kesuburan yang rendah, berpengaruh terhadap penyediaan air bersih.
- d) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Internasional
Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional berpengaruh terhadap penyediaan air bersih karena jasa ekosistem penyediaan air bersih sangat rendah dan rendah. Jenis ekoregion atau bentang lahan di Provinsi Lampung terdiri dari datran fluvial vulkanik, pegunungan struktural patahan, dataran aluvial, dan dataran pantai. Kesuburan lahan pada jenis ekoregion ini sangat rendah tidak memungkinkan tumbuhnya tumbuhan secara cepat sehingga menghambat penyediaan air bersih.
- e) Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional

Lokasi rencana pengembangan TPA regional jika melihat peta pola penggunaan lahan berada pada kawasan lahan pertanian basah. Perlu diperhatikan sistem yang dipakai pada TPA Regional ini karena berada pada lingkungan pertanian. Dikhawatirkan air lindi akan mengganggu dan mencemari pertanian.

f) Pengelolaan Daerah Irigasi Nasional dan Daerah Irigasi Provinsi

Jasa ekosistem pemurnian air merupakan ekosistem hutan yang berada di badan sungai yang berfungsi untuk menyerap zat-zat pencemaran. Rendahnya jasa ekosistem pemurnian air rendah menandakan kemampuan lahan hutan untuk memurnikan air rendah. Kondisi ekoregion yaitu perbukitan struktural patahan dengan karakteristik kesuburan yang rendah. Pengelolaan daerah irigasi dapat meningkatkan aktivitas di badan sungai, pembukaan lahan hutan, dan sedimentasi. Hal ini dapat berdampak terhadap kualitas sumber daya alam untuk melakukan penyerapan unsur hara, zat organik, zat-zat pencemaran dan menyerap air untuk mencegah run-off water yang berlebihan. Fungsi alam terganggu dan menyebabkan pencemaran air sebagai sumber air baku.

4.7.2 Pola Ruang

a) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian

Untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Lampung, produksi pertanian haruslah dalam keadaan baik. Namun berdasarkan ekoregion/ kondisi bentang lahan kondisi kesuburan tanah di Provinsi Lampung sangat rendah dengan kemampuan lahan yang rendah hal ini dikarenakan dikarenakan kondisi kelerengan yang cukup miring yaitu $>16\%$. Hal ini menghasilkan nilai jasa ekosistem penyedia pangan rendah dan penyedia air bersih rendah. Dengan demikian karena kondisi yang tidak mendukung pertanian, sementara kebutuhan pangan meningkat, rencana pengembangan kawasan pertanian dilakukan melalui berbagai rekayasa genetik, dari mulai pemupukan lahan, penggunaan bahan kimia, pembukaan lahan-lahan produktif. Kondisi seperti ini akan menimbulkan risiko kualitas sumber daya alam akibat pencemaran, kerusakan unsur hara, dan berkurangnya lahan-lahan produktif yang dapat digunakan untuk lahan serapan air. Dengan demikian kualitas sumberdaya alam untuk menyerap unsur hara, air dan menghasilkan oksigen menjadi terganggu

b) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Tidak terlalu signifikan mempengaruhi kualitas sumber daya alam berupa penyediaan air bersih dikarenakan jasa ekosistem penyedia air bersih masih mampu mendukung kegiatan. Berdasarkan pangan dan pemurnian air juga pengembangan kawasan industri tidak berpengaruh. Beberapa wilayah dalam kondisi sangat rendah namun masih dapat mendapatkan supply dari wilayah lainnya.

c) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata akan meningkatkan banyak kegiatan seperti hotel, resort, cottage, restoran dan lainnya. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan kebutuhan air yang meningkat, pangan meningkat. Selain itu rencana pengembangan

kawasan pariwisata membutuhkan lahan-lahan untuk pembangunan. Hal ini akan mengurangi ketersediaan lahan produktif sebagai penyedia jasa pemurnian air dan juga memungkinkan alih fungsi lahan pertanian sebagai jasa penyedia pangan. Hal ini berisiko terhadap kualitas sumberdaya alam yang tidak akan mampu untuk melakukan penyerapan air, selain itu kondisi lereng yang cukup miring akan menimbulkan *run off water* yang tidak tertampung. Air akan turun secara langsung tanpa diserap terlebih dahulu.

4.7.3 Kawasan Strategis

a) Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung

Dapat mengganggu kualitas sumber daya alam. Dikarenakan jasa ekosistem penyediaan air bersih, pangan, dan pemurnian air sudah tidak mampu lagi mendukung pembangunan. Sudah dalam kategori sangat rendah. Dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Metropolitan di Bandar Lampung akan meningkatkan kebutuhan lahan, air, pangan untuk mendukung pembangunan kawasan metropolitan. Untuk jangka waktu panjang dengan kondisi saat ini sudah dalam keadaan rendah, akan menimbulkan risiko lingkungan hidup. Kualitas sumber daya alam di Provinsi Lampung akan terganggu tergantikan menjadi lahan-lahan terbangun dengan ketersediaan air bersih yang sudah sangat berkurang bahkan hampir tidak ada.

b) Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan

Untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Lampung, produksi pertanian haruslah dalam keadaan baik. Namun berdasarkan ekoregion/ kondisi bentang lahan kondisi kesuburan tanah di Provinsi Lampung sangat rendah dengan kemampuan lahan yang rendah hal ini dikarenakan dikarenakan kondisi kelerengan yang cukup miring yaitu $>16\%$. Hal ini menghasilkan nilai jasa ekosistem penyedia pangan rendah dan penyedia air bersih rendah. Dengan demikian karena kondisi yang tidak mendukung pertanian, sementara kebutuhan pangan meningkat, rencana pengembangan kawasan pertanian dilakukan melalui berbagai rekayasa genetik, dari mulai pemupukan lahan, penggunaan bahan kimia, pembukaan lahan-lahan produktif. Kondisi seperti ini akan menimbulkan risiko kualitas sumber daya alam akibat pencemaran, kerusakan unsur hara, dan berkurangnya lahan-lahan produktif yang dapat digunakan untuk lahan serapan air. Dengan demikian kualitas sumberdaya alam untuk menyerap unsur hara, air dan menghasilkan oksigen menjadi terganggu

4.8 Pengaruh KRP Terhadap Alih Fungsi Lahan

4.8.1 Struktur Ruang

a) Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan jalan tol menyebabkan alih fungsi lahan dikarenakan kebutuhan lahan yang semakin tinggi dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas.

b) Pengembangan Waduk

Pengembangan waduk menyebabkan alih fungsi lahan dikarenakan kebutuhan lahan yang besar. Sementara itu ketersediaan lahan di Provinsi Lampung menurut jasa ekosistem

dukungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup dalam kategori rendah. Dengan demikian hal tersebut akan mendorong pembukaan lahan. Aih fungsi lahan akan sangat berisiko terjadi untuk mendukung pengembangan waduk.

c) Pengembangan Pembangkit Listrik

Pengembangan pembangkit listrik menyebabkan alih fungsi lahan dikarenakan kebutuhan lahan yang besar. Sementara itu ketersediaan lahan di Provinsi Lampung menurut jasa ekosistem dukungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup dalam kategori rendah. Dengan demikian hal tersebut akan mendorong pembukaan lahan. Aih fungsi lahan akan sangat berisiko terjadi untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik.

d) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Internasional

Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional akan menyebabkan tingginya aktivitas bongkar muat barang maupun orang, tingginya kebutuhan bongkar muat orang dan barang menyebabkan tingginya kebutuhan terminal penumpang sehingga diperlukan penambahan luas dan peningkatan fasilitas. Tingginya kebutuhan lahan menyebabkan alih fungsi lahan, lokasi pelabuhan utama panjang berada di lahan dengan prioritas 2 sehingga diperlukan pengawasan dalam pemanfaatannya.

e) Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional

Lokasi TPA Regional berada pada kawasan lahan pertanian. Hal ini perlu dimitigasi terkait dengan lahan atau lokasi yang digunakan. Dikhawatirkan dengan adanya rencana lokasi pengembangan TPA Regional menggunakan lahan-lahan irigasi teknis. Selain melakukan alih fungsi lahan juga akan mencemari lahan pertanian serta mencemari sungai irigasi. Pengembangan Bandar Udara

f) Pengelolaan daerah irigasi nasional dan daerah irigasi provinsi

Peningkatan aktivitas akibat adanya pembangunan irigasi dapat memicu terjadi pembukaan lahan. Pengelolaan irigasi untuk peningkatan produksi pangan dan mendukung ketahanan pangan diikuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan gudang gerabah, saung-saung, dan pelebaran irigasi untuk supply air yang lebih besar. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pengelolaan daerah irigasi nasional dan irigasi provinsi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap alih fungsi lahan. Namun ada indikasi terjadinya alih fungsi lahan.

4.8.2 Pola Ruang

a) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian

Risiko dampak alih fungsi lahan akibat dari rencana kawasan peruntukkan pertanian dapat terjadi. Dikarenakan kesuburan lahan yang rendah, dan kelerengan yang cukup tinggi, dan terbatasnya jika ditanami pohon besar dengan jangka waktu lama, hal ini akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan menjadi pertanian atau perkebunan. Selain itu adapun dorongan untuk memenuhi kebutuhan lahan dalam menunjang ketahanan pangan, penggunaan lahan yang tersedia untuk kawasan pertanian berisiko untuk dilakukan. Pembukaan lahan untuk kawasan pertanian akan sangat sulit jika dikembalikan untuk fungsi lahan serapan air.

- b) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
- Berisiko terhadap alih fungsi lahan, dikarenakan pengembangan kawasan peruntukkan industri membutuhkan lahan yang sangat besar. Kebutuhan lahan terus meningkat sementara itu jasa pendukung budaya tempat tinggal dan ruang hidup sudah dalam kategori rendah. Artinya ketersediaan lahan di Provinsi Lampung sudah sangat terbatas. Untuk dapat mencukupi kebutuhan kawasan industri mendorong terjadinya pembukaan lahan-lahan yang kosong di Provinsi Lampung. Alih fungsi lahan pertanian, hutan dan bahkan perkebunan dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan rencana kawasan peruntukkan industri.
- c) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Rencana kawasan peruntukkan pariwisata juga meningkatkan risiko dampak alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan kawasan pariwisata akan didukung oleh sarana prasarana akomodasi pariwisata dan juga jalan. Semua hal tersebut membutuhkan lahan-lahan yang digunakan untuk melakukan pengembangan kawasan pariwisata. Sementara itu ketersediaan lahan di Provinsi Lampung menurut jasa ekosistem dukungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup dalam kategori rendah. Dengan demikian hal tersebut akan mendorong pembukaan lahan. Alih fungsi lahan akan sangat berisiko terjadi untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata.

4.8.3 Kawasan Strategis

- a) Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung
- Dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Metropolitan di Bandar Lampung akan meningkatkan kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana prasarana, komersial, bangunan permukiman, jalan, ruang terbuka hijau dan aspek aspek pendukung untuk pengembangan kawasan Metropolitan. Pertumbuhan kawasan metropolitan akan mendorong terus terjadinya pembangunan dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu jasa ekosistem penting yang menunjukkan daya dukung lahan sudah rendah. Artinya hal ini akan berisiko terhadap alih fungsi lahan dan pembukaan lahan secara besar-besaran.
- b) Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan
- Untuk program dukungan "Bumi Agribisnis" dalam mendukung ketahanan pangan akan terdapat adanya kebutuhan lahan yang meningkat yaitu gudang penyimpanan pangan, pabrik produksi pangan, bangunan pengolahan gerabah, jalan untuk pergerakan pemasaran pertanian dan sarana prasarana lainnya. Kebutuhan lahan yang meningkat sementara jasa ekosistem ruang hidup sudah rendah mendorong terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan.

4.9 Pengaruh KRP Terhadap Kemungkinan Terjadi Kemiskinan Penduduk

4.9.1 Struktur Ruang

- a) Pembangunan Jalan Tol
- Pembangunan jalan tol tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadi kemiskinan penduduk dikarenakan pembangunan jalan tol membuka akses bagi penduduk Lampung

dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, pembangunan jalan tol juga menyebabkan tumbuhnya pembangunan rest area di sepanjang jalan tol yang juga menambah pendapatan masyarakat dan daerah.

b) Pengembangan Waduk

Pengembangan Waduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan penduduk. Dikarenakan jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup masih tinggi.

c) Pengembangan Pembangkit Listrik

Pengembangan Pembangkit Listrik tidak berpengaruh terhadap kemiskinan penduduk. Dikarenakan jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup masih tinggi.

d) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Internasional

Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional tidak berpengaruh terhadap kemiskinan penduduk. Dikarenakan jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup masih tinggi. Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional menyebabkan pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan, seperti munculnya rumah makan disekitar pelabuhan yang juga berdampak secara langsung kepada pendapatan masyarakat.

e) Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional

Pengembangan TPA tidak berpengaruh terhadap kemiskinan penduduk. Dikarenakan jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup masih tinggi.

f) Pengelolaan Daerah Irigasi Nasional dan Daerah Irigasi Provinsi

Tidak terlalu signifikan berdampak terhadap kemiskinan. Namun berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat rendahnya jasa ekosistem penyerap air, pencemaran dan unsur hara serta rendahnya biodiversitas yaitu sedimentasi, penurunan muka air tanah, run-off water yang tinggi dan pencemaran serta kesuburan lahan yang rendah sehingga terbatasnya flora yang dapat tumbuh tidak mampu menyerap air dan run off water meningkat. Hal ini berdampak terhadap peningkatan risiko bencana yaitu banjir dan pencemaran. Risiko bencana ini berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar badan sungai.

4.9.2 Pola Ruang

a) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian

Tidak terlalu signifikan berdampak terhadap kemiskinan. Namun berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Rencana kawasan peruntukkan pertanian, akan meningkatkan aktivitas pendukung produksi pertanian yaitu mesin-mesin pengolah gerabah, mesin traktor dan mesin pemilah gerabah dan padi. Aktivitas-aktivitas ini menimbulkan asap pada mesin yang akan berkontribusi terhadap menurunnya kualitas udara. Selain itu penggunaan bahan kimia untuk memproduksi pangan dan meningkatkan kualitas tanah menyebabkan peningkatan pencemaran tanah dan unsur hara. Banyaknya kandungan bahan kimia akan mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat.

- b) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Pencemaran udara yang dihasilkan oleh emisi dari industri dapat mengganggu kesehatan masyarakat terutama masalah pernapasan. Tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan. Tetapi akan berdampak positif yaitu adanya peluang pekerjaan untuk masyarakat di sekitar kawasan industri.
- c) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
Tidak terlalu signifikan berdampak terhadap kemiskinan. Namun berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan berdasarkan kualitas udara dan budaya estetika. Jasa budaya estetika dan pemeliharaan kualitas udara sudah termasuk kategori sangat rendah sehingga tidak mampu lagi mendukung pembangunan. Rentan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama akibat risiko bencana yang tinggi.

4.9.3 Kawasan Strategis

- a) Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung
Berpengaruh terhadap kemiskinan penduduk akibat jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sudah dalam kategori sangat rendah. Jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup dalam kategori rendah artinya lahan-lahan yang tersedia untuk tempat tinggal sudah berkurang. Alih fungsi lahan akan terjadi baik hutan ataupun pertanian. Hilangnya lahan pertanian menyebabkan hilangnya salah satu mata pencaharian di Provinsi Lampung. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait dengan kesejahteraan penduduk..
- b) Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan
Rencana kawasan peruntukkan untuk mendukung bumi agribisnis, akan meningkatkan aktivitas pendukung produksi pertanian yaitu mesin-mesin pengolah gerabah, mesin traktor dan mesin pemilah gerabah dan padi. Aktivitas-aktivitas ini menimbulkan asap pada mesin yang akan berkontribusi terhadap menurunnya kualitas udara. Selain itu penggunaan bahan kimia untuk memproduksi pangan dan meningkatkan kualitas tanah menyebabkan peningkatan pencemaran tanah dan unsur hara. Banyaknya kandungan bahan kimia akan mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat.

4.10 Pengaruh KRP terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

4.10.1 Struktur Ruang

- a) Pembangunan Jalan Tol
Pembangunan jalan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat karena berdasarkan kualitas udara dan budaya estetika. Jasa budaya estetika dan pemeliharaan kualitas udara sudah termasuk kategori sangat rendah sehingga tidak mampu lagi mendukung pembangunan.
- b) Pengembangan Waduk

Berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan berdasarkan budaya estetika. Jasa budaya estetika sudah termasuk kategori sangat rendah sehingga tidak mampu lagi mendukung pembangunan.

c) Pengembangan Pembangkit Listrik

Pembangunan pembangkit listrik tidak berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat karena berdasarkan jasa pengendalian hama dan penyakit, budaya estetika dan pemeliharaan kualitas udara masih berada dalam klasifikasi tinggi.

d) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Internasional

Pembangunan fasilitas pelabuhan utama dan internasional tidak berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat karena berdasarkan jasa pengendalian hama dan penyakit, budaya estetika dan pemeliharaan kualitas udara masih berada dalam klasifikasi tinggi.

e) Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional

Pengaruh rencana pengembangan TPA Regional juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan kawasan permukiman tentunya dengan udara yang tercemar, air lindi, lalat dan lingkungan yang tidak sehat di TPA akan sangat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Perlu diperhatikan radius penempatan lokasi TPA.

f) Pengelolaan Daerah Irigasi Nasional dan Daerah Irigasi Provinsi

Berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat rendahnya jasa ekosistem penyerap air, pencemaran dan unsur hara serta rendahnya biodiversitas yaitu sedimentasi, penurunan muka air tanah, run-off water yang tinggi dan pencemaran serta kesuburan lahan yang rendah sehingga terbatasnya flora yang dapat tumbuh tidak mampu menyerap air dan run off water meningkat. Hal ini berdampak terhadap peningkatan risiko bencana yaitu banjir dan pencemaran. Risiko bencana ini berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar badan sungai.

4.10.2 Pola Ruang

a) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian

Berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Rencana kawasan peruntukkan pertanian, akan meningkatkan aktivitas pendukung produksi pertanian yaitu mesin-mesin pengolah gerabah, mesin traktor dan mesin pemilah gerabah dan padi. Aktivitas-aktivitas ini menimbulkan asap pada mesin yang akan berkontribusi terhadap menurunnya kualitas udara. Selain itu penggunaan bahan kimia untuk memproduksi pangan dan meningkatkan kualitas tanah menyebabkan peningkatan pencemaran tanah dan unsur hara. Banyaknya kandungan bahan kimia akan mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat.

b) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pencemaran udara yang dihasilkan oleh emisi dari industri dapat mengganggu kesehatan masyarakat terutama masalah pernapasan. Tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan. Tetapi akan berdampak positif yaitu adanya peluang pekerjaan untuk masyarakat di sekitar kawasan industri.

c) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan berdasarkan kualitas udara dan budaya estetika. Jasa budaya estetika dan pemeliharaan kualitas udara sudah termasuk kategori sangat rendah sehingga tidak mampu lagi mendukung pembangunan. Rentan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama akibat risiko bencana yang tinggi.

4.10.3 Kawasan Strategis

a) Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung

Berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan berdasarkan kualitas udara, pengendalian hama dan penyakit dan budaya estetika. Jasa budaya estetika, pengendalian hama dan penyakit dan pemeliharaan kualitas udara sudah termasuk kategori sangat rendah sehingga tidak mampu lagi mendukung pembangunan. Alih fungsi lahan menyebabkan lahan-lahan serapan air semakin berkurang. Run off water meningkat. Menimbulkan risiko-risiko bencana sebagai akibat dari pembukaan lahan dan karakteristik ekoregion yang dapat menimbulkan erosi tanah dan longsor. Risiko-risiko tersebut dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia

b) Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan

Rencana kawasan peruntukkan untuk mendukung bumi agribisnis, akan meningkatkan aktivitas pendukung produksi pertanian yaitu mesin-mesin pengolah gerabah, mesin traktor dan mesin pemilah gerabah dan padi. Aktivitas-aktivitas ini menimbulkan asap pada mesin yang akan berkontribusi terhadap menurunnya kualitas udara. Selain itu penggunaan bahan kimia untuk memproduksi pangan dan meningkatkan kualitas tanah menyebabkan peningkatan pencemaran tanah dan unsur hara. Banyaknya kandungan bahan kimia akan mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat.

4.11 Rekapitulasi Analisis Pengaruh KRP

Pada sub bab ini akan membahas hasil analisis yang dilakukan yang merupakan kuantifikasi pengaruh KRP terhadap muatan parameter yang dicantumkan dalam PP No 46 Tahun 2016. Berdasarkan hasil kajian analisis pada sub bab sebelumnya dengan menggunakan kualitatif dan pendekatan jasa ekosistem, pada sub bab ini akan dikaji terkait dengan analisis secara kuantifikasi. Berdasarkan hal tersebut diperoleh daya dukung dan daya tampung yang ditetapkan untuk dapat mempertahankan kualitas lingkungan sejalan dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan-pembangunan.

Analisis kuantifikasi pengaruh KRP ini berdasarkan pada hasil kualitatif sebelumnya, yaitu:

1. Penentuan prioritas Jasa Ekosistem yang ditetapkan
2. Analisis parameter yang ditetapkan pada PP No 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 2.
3. Penetapan daya dukung dan daya tampung yang perlu dipertahankan.

Tabel 4.19
Analisis Pengaruh Pengembangan Pembangkit Listrik

Indikasi Program		1. Pengembangan Pembangkit Listrik		
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Tinggi	1. PLTD Bengkuntat 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTD Talang Padang 4. PLTA Batu Tegi 5. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016 6. PLTD Krui 7. PLTD Tegineneng 8. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 9. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 10. PLTD Simpang Pematang 11. PLTD Wiralaga	
		Sangat Tinggi	1. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 2. PLTA Way Besai	
	JE Penyedia Pangan	Tinggi	1. PLTU Lampung 2. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 3. PLTD Teluk Betung 4. PLTD Talang Padang 5. PLTU Ulubelu 3-4 2x55MW-2016	
		Sangat Tinggi	1. PLTD Bengkuntat 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTD Krui 4. PLTD Tegineneng 5. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 6. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 7. PLTD Simpang Pematang	
	JE Penyedia Air Bersih	Tinggi	1. PLTD Bengkuntat 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTA Batu Tegi 4. PLTD Krui	
	JE Biodiversitas	Sangat Tinggi	1. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 2. PLTA Way Besai	
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	1. PLTP Way Ratai 55 MW - 2020 2. PLTA Semangka 50 MW-2017 3. PLTP Ulu Belu (rencana 2011)	
		Rendah	1. PLTU Kalianda 2. PLTU Lampung 3. PLTU Sibalang 2x100 MW 2013 4. PLTD Teluk Betung 5. PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016 6. PLTD Metro 7. PLTD Pugung Tampak	
	Daya Dukung LH		Secara pemanfaatan terdapat 2 Rencana pembangkit listrik yang terdapat di kawasan limit, yaitu PLTU Rajabasa 4x55 MW dan PLTA Semangka 50 MW. Dan terdapat 1 pembangkit listrik eksisting yang terdapat di kawasan limit yaitu PLTA Way Besai.	
	Resiko Tanah Longsor	Tinggi	PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19	
Sangat Tinggi		1. PLTP Ulu Belu (rencana 2011) 2. PLTA Way Besai		

Indikasi Program		1. Pengembangan Pembangkit Listrik
Resiko Gempa Bumi	Tinggi	1. PLTD Krui 2. PLTD Metro 3. PLTMG Lampung Peaker (LNG) 200 MW-2016
	Sangat Tinggi	1. PLTA Semangka 50 MW-2017 2. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 3. PLTU Kalianda 4. PLTU Lampung
Adaptasi terhadap perubahan iklim		Pengembangan pembangkit listrik memiliki adaptasi perubahan iklim yang rendah. Pengembangan pembangkit listrik menyebabkan potensi pembukaan lahan, sehingga menyebabkan berkurangnya produksi oksigen ke udara dan berkurangnya penyerapan CO2 serta daya serap air yang rendah. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat serta adanya pencemaran yang dihasilkan pembangkit listrik dapat berkontribusi mengganggu iklim dan berpotensi menyebabkan perubahan iklim.
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Terdapat beberapa pembangkit listrik seperti: 1. PLTD Bengkuntan 2. PLTMG Sribawono 50 MW-2014 3. PLTD Krui 4. PLTD Tegineneng 5. PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20 6. PLTU Gunung Sugih (rencana 2009) 7. PLTD Simpang Pematang yang berada pada wilayah yang mempunyai jasa ekosistem penyedia pangan yang sangat tinggi, dan 1. PLTU Rajabasa 4x55 MW - 2018/19 2. PLTA Way Besai berada pada wilayah yang mempunyai jasa ekosistem biodiversitas dan jasa ekosistem tata aliran air yang sangat tinggi, hal tersebut dapat mengurangi efisiensi penggunaan lahan, karena lahan tersebut memiliki potensi sebagai peruntukan lahan budidaya yang memiliki kepentingan pangan dan air.
KEHATI		Pengembangan Pembangkit Listrik dapat menyebabkan terjadinya pembukaan lahan. Jenis ekoregion atau bentang lahan di Provinsi Lampung terdiri dari datran fluvial vulkanik, pegunungan struktural patahan, dataran aluvial, dan dataran pantai. Kesuburan lahan pada jenis ekoregion ini sangat rendah tidak memungkinkan tumbuhnya tumbuhan secara cepat, jasa ekosistem biodiversitas rendah artinya kemampuan lahan untuk ditanami keberagaman hayati rendah.
Keterangan		Memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi sebagai bentuk preventif.

Tabel 4.20
Analisis Pengaruh Pembangunan Jalan Tol

Indikasi Program		2. Pembangunan Jalan Tol (Bakauheni - Terbanggi Besar)	(Terbanggi Besar - Pematang)	
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Tinggi	141,12 Km	
		Sangat Tinggi	68,3 Km	
	JE Penyedia Pangan	Tinggi	35,14 Km	
		Sangat Tinggi	163,93 Km	
	JE Penyedia Air Bersih	Tinggi	73,58 Km	
		Sangat Tinggi	5,53 Km	
	JE Biodiversitas	Tinggi	8,01 Km	
		Sangat Tinggi	0,12 Km	
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	-	
		Rendah	43,93 Km	
	Daya Dukung LH		Pembangunan Jalan Tol ruas Terbanggi Besar - Pematang melewati kawasan kendala sepanjang 21,6 Km, 14,4 km pada ruas	

	Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	0,12 Km	5,03 Km	
		Sangat Tinggi	-	0,13 Km	
	Resiko Gempa Bumi	Tinggi	46,25 Km	12,64 Km	
		Sangat Tinggi	54,06 Km	0,43 Km	
	Resiko Banjir Bandang	Tinggi	0,12 Km	-	
		Sangat Tinggi	0,5 Km	-	
	Rentan Banjir	Tinggi	-	-	
		Sangat Tinggi	23,58 Km	41,96 Km	
	Adaptasi terhadap perubahan iklim		Pembangunan Jalan Tol akan mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah. Rendahnya kualitas iklim disebabkan oleh alih fungsi lahan akibat pembangunan jalan tol yang berdampak terhadap kurangnya lahan penyerapan air, produksi oksigen dan menyerap CO2.		
	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kualitas sumber daya alam dikarenakan jasa ekosistem penyedia air bersih, pangan, dan tata aliran air tersedia tinggi untuk mendukung pembangunan.		
KEHATI		Jasa Ekosistem biodiversitas sepanjang 8,01 km tinggi dan 0.12 tinggi lebih cocok untuk menjaga keragaman hayati di wilayah tersebut sehingga tidak disarankan untuk dilakukan pembangunan.			
Keterangan		<ul style="list-style-type: none"> • Pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar telah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 173,26 Ha. • Progress eksisting KRP jalan tol (Agustus, 2017) sudah membebaskan tanah > 84,93% dan pembangunan fisik jalan > 26.63% pada ruas Bakauheni – Terbanggi Besar • Tidak berada pada lahan limit namun tetap memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi untuk menghadapi resiko gempa bumi pada jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 54,06 Km. 			

Tabel 4.21

Analisis Pengaruh Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Utama dan Internasional

Indikasi Program		3. Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional		
Muatan Pengaruh	Jasa Ekosistem	Berdasarkan hasil overlay dengan peta jasa ekosistem, KRP Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Utama tidak masuk ke dalam peta jasa ekosistem karena lokasi koordinat titik pelabuhan berada di luar garis pantai.		
	Daya Dukung LH	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan yang terdapat di Provinsi Lampung seluruhnya berada di kawasan potensial.		
	Resiko Gelombang Eksitrim dan Abrasi	Tinggi	1. P. Tabuan, Tanggamus 2. Kota Agung, Tanggamus 3. Teluk Betung, Bandar Lampung 4. Panjang, Bandar Lampung	
		Sangat Tinggi	1. Ngaras, Pesisir Barat 2. Batu Balai, Tanggamus 3. Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan 4. Dermaga Canti Rajabasa, Lampung Selatan 5. Ketapang, Lampung Selatan 6. Labuhan Maringgai, Lampung Timur	
	Resiko Tsunami	Tinggi	Ketapang, Lampung Selatan	
Sangat Tinggi		1. Kuala Stabas, Pesisir Barat 2. Ngaras, Pesisir Barat 3. P. Tabuan, Tanggamus		

Indikasi Program		3. Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional
		4. Kota Agung, Tanggamus 5. Batu Balai, Tanggamus 6. Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan 7. Dermaga Canti Rajabasa, Lampung Selatan 8. Bakauheni, Lampung Selatan
	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional diiringi dengan peningkatan aktifitas bongkar muat pelabuhan baik barang maupun orang, sehingga menyebabkan tinggi lalu lintas pergerakan keluar masuk kendaraan kedalam pelabuhan yang menyebabkan polusi. Jika dilakukan secara masif, dhal ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan suhu udara serta dikhawatirkan adanya pencemaran udara.
	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Tidak signifikan berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya alam karena keberadaan pelabuhan utama dan internasional berada pada wilayah dengan penyedia jasa pangan yang rendah.
	KEHATI	Tidak signifikan berpengaruh terhadap keberadaan keanekaragaman hayati karena keberadaan pelabuhan utama dan internasional berada pada wilayah dengan penyedia jasa pangan yang rendah.
Keterangan		Seluruh rencana pelabuhan di Provinsi Lampung berada pada lahan potensial namun tetap memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi untuk menghadapi tingginya gelombang ekstrim dan tsunami.

Tabel 4.22

Analisis Pengaruh Rencana Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)

Indikasi Program		4. Rencana Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)	
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Tinggi	3
		Sangat Tinggi	1
	JE Penyedia Pangan	Tinggi	-
		Sangat Tinggi	2
	JE Penyedia Air Bersih	Tinggi	1
		Sangat Tinggi	-
	JE Biodiversitas	Tinggi	-
		Sangat Tinggi	-
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	3
		Rendah	2
	Daya Dukung LH		2 rencana pembangunan TPA berada pada wilayah kendala, yaitu pada Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus
	Resiko Gempa Bumi	Tinggi	Purbolinggo, Lampung Timur
Sangat Tinggi		1. Katibung, Lampung Selatan 2. Kota Agung Barat, Tanggamus 3. Batu Ketulis, Lampung Barat	
Adaptasi terhadap perubahan iklim		Kualitas udara harus selalu terjaga karena ketika tidak menggunakan sistem TPA yang baik udara akan semakin tercemar dan mempengaruhi jasa ekosistem pengaturan iklim.	
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Lokasi rencana pengembangan TPA regional jika melihat peta pola penggunaan lahan berada pada kawasan lahan pertanian basah. Perlu diperhatikan sistem yang dipakai pada TPA Regional ini karena berada pada lingkungan pertanian. Dikhawatirkan air lindi akan mengganggu dan mencemari pertanian.	
KEHATI		Tidak mengganggu keanekaragaman hayati, karena rencana pengembangan TPA regional dialokasikan pada wilayah yang memiliki jasa ekosistem biodiversitas sangat rendah - sedang.	
Keterangan		Beberapa TPA seperti pada Katibung, Lampung Selatan, Kota Agung Barat, Tanggamus dan Batu Ketulis, Lampung Barat memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko bencana gempa bumi yang sangat tinggi.	

Tabel 4.23
Analisis Pengaruh Pembangunan Waduk

Indikasi Program		5. Pembangunan Waduk	
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Rendah Bendung Tirta Gangga	
	JE Penyedia Pangan	Rendah 1. Bendungan Batu Tegi 2. Bendung Tirta Gangga	
	JE Penyedia Air Bersih	Sangat Rendah 1. Bendung Way Sabu 2. Bendungan Way Besai 3. Bendung Way Umpu	
		Rendah Bendung Tirta Gangga	
	JE Biodiversitas	Sangat Rendah Bendung Tirta Gangga	
		Rendah 1. Bendung Way Sabu 2. Bendungan Way Sekampung	
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah Bendung Way Sabu	
		Rendah 1. Bendungan Way Sekampung 2. Bendung Tirta Gangga	
	Daya Dukung LH		Pengembangan Waduk terdapat 2 lokasi yang masuk ke dalam kawasan limit, yaitu Bendung Way Sabu dan Bendungan Way Besai.
	Resiko Kekeringan	Tinggi 1. Bendung Way Sabu 2. Bendung Way Besai 3. Bendungan Way Sekampung 4. Bendungan Way Jepara 5. Bendungan Margatiga	
		Sangat Tinggi 1. Bendung Way Umpu 2. Bendungan Way Besai 3. Bendungan Way Rarem	
	Resiko Gempa Bumi	Tinggi 1. Bendung Jabung 2. Bendung Tirta Gangga	
		Sangat Tinggi Bendungan Segalamider	
	Adaptasi terhadap perubahan iklim		Pembangunan Waduk akan mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah. Pengembangan waduk menyebabkan potensi pembukaan lahan, sehingga menyebabkan rendahnya produksi oksigen ke udara dan rendahnya untuk menyerap CO2 serta daya serap air yang rendah.
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Kondisi ekoregion yaitu perbukitan struktural patahan dengan karakteristik kesuburan yang rendah, sehingga berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya alam terutama pada penyediaan air bersih dan pangan pada Bendung Way Sabu, Bendungan Way Besai, Bendung Way Umpu, Bendung Betu Tegi dan Bendung Tirta Gangga	
KEHATI		Bendung Way Sabu, Bendungan Way Sekampung, Bendung Tirta Gangga rendah memiliki profil jasa ekosistem biodiversitas yang rendah dan sangat rendah, maka bendung dan bendungan tersebut masih kurang ramah terhadap keberadaan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup dan diperlukan penanganan khusus dalam pengembangannya.	
Keterangan		Pengembangan Waduk terdapat 2 lokasi yang masuk ke dalam kawasan limit, yaitu Bendung Way Sabu dan Bendungan Way Besai, maka memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi	

Tabel 4.24
Analisis Pengaruh Pengelolaan Daerah Irigasi

Indikasi Program		6. Pengelolaan daerah irigasi Provinsi	Pengelolaan daerah irigasi pusat	
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Sangat Rendah	3.823,98 Ha	-
		Rendah	32.591,05 Ha	23.939,91 Ha
	JE Penyedia Pangan	Sangat Rendah	4.910,35 Ha	-
		Rendah	36.708,64 Ha	23.939,91 Ha
	JE Penyedia Air Bersih	Sangat Rendah	9.540,65 Ha	-
		Rendah	33.258,75 Ha	20.519,78 Ha
	JE Biodiversitas	Sangat Rendah	36.744,68 Ha	23.939,92 Ha
		Rendah	6.363,68 Ha	-
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	3.108,17 Ha	23.939,92 Ha
		Rendah	39.950,01 Ha	-
	Daya Dukung LH		Di Kewenangan Provinsi seluas 4247,46 Ha berada di wilayah limit.	Seluruh Di Pusat berada pada wilayah potensial.
	Resiko Kekeringan	Tinggi	11.387,92 Ha	3.204,08 Ha
		Sangat Tinggi	40.310,69 Ha	3.487,54 Ha
	Adaptasi terhadap perubahan iklim		Program pengelolaan daerah irigasi nasional dan daerah irigasi provinsi dapat menimbulkan peningkatan aktivitas di sekitar irigasi, penggunaan air semakin meningkat. Jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang tanpa ada daur ulang melalui serapan air, maka akan mungkin mengalami kekeringan. Serapan air dapat berkurang akibat dari jasa ekosistem pendukung biodiversitas rendah dan pengaturan iklim rendah. Jasa pengaturan iklim dan biodiversitas dapat berasal dari hutan dan perkebunan. Rendahnya jasa pengaturan iklim dan biodiversitas menyebabkan rendahnya kemampuan alam untuk memproduksi oksigen ke udara dan menyerap karbondioksida. Hal ini merupakan salah satu penyebab perubahan iklim.	
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Kondisi ekoregion yaitu perbukitan struktural patahan dengan karakteristik kesuburan yang rendah. Pengelolaan daerah irigasi dapat meningkatkan aktivitas di badan sungai, pembukaan lahan hutan, dan sedimentasi. Hal ini dapat berdampak terhadap kualitas sumber daya alam untuk melakukan penyerapan unsur hara, zat organik, zat-zat pencemaran dan menyerap air untuk mencegah run-off water yang berlebihan. Fungsi alam terganggu dan menyebabkan pencemaran air sebagai sumber air baku. Kondisi yang perlu dihindari tersebut terletak pada 42.779,4 Ha Di kewenangan provinsi dan 20.519,78 Ha Di Kewenangan Pusat yang memiliki jasa ekosistem penyedia air bersih yang rendah dan sangat rendah.		
KEHATI		Dengan karakteristik ekoregion yaitu kesuburan tanah yang rendah tidak memungkinkan tumbuhnya tumbuhan secara cepat, jasa ekosistem biodiversitas rendah artinya kemampuan lahan untuk ditanami keberagaman hayati rendah. Hal ini berdampak terhadap penurunan muka air tanah, run-off water semakin meningkat dan risiko bencana akibat luapan sungai semakin meningkat, dan flora yang tumbuh semakin terbatas terutama pada Di Kewenangan Provinsi seluas 36.744,68 Ha dan Di kewenangan Pusat seluas 23.939,92 Ha yang memiliki jasa ekosistem pendukung biodiversitas sangat rendah.		
Keterangan		Memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko tersebut.		

Tabel 4.25

Analisis Pengaruh Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian

Indikasi Program			7. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian			
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Sangat Rendah	6.613,49 Ha			
		Rendah	35.641,39 Ha			
	JE Penyedia Pangan	Sangat Rendah	14.450,65 Ha			
		Rendah	39.923,96 Ha			
	JE Penyedia Air Bersih	Sangat Rendah	21.331,3 Ha			
		Rendah	58.322,97 Ha			
	JE Biodiversitas	Sangat Rendah	42.477,82 Ha			
		Rendah	28.274,04 Ha			
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	8.860,02 Ha			
		Rendah	43.101,06 Ha			
	Daya Dukung LH		Terdapat penggunaan lahan pertanian yang berada pada wilayah limit, yaitu pertanian lahan basah seluas 5331,08 Ha, Pertanian lahan kering 42048,41 Ha, Pertanian lahan kering campur semak seluas 40219,68 Ha, dan sawah seluas 14195,79 Ha			
			Sawah Lampung	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
	Resiko Kekeringan	Tinggi	40.538,76 Ha	1.409,89 Ha	87.248,13 Ha	48.271,88 Ha
		Sangat Tinggi	72.901,61 Ha	609,84 Ha	129.897,27 Ha	58.551.18 Ha
Adaptasi terhadap perubahan iklim		Mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah di lokasi pertanian Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah . Rentan terhadap perubahan iklim dikarenakan kondisi biodiversitas yang rendah, pembukaan lahan sehingga menyebabkan rendahnya produksi oksigen ke udara dan rendahnya untuk menyerap CO ₂ serta daya serap air yang rendah. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat serta adanya pencemaran menyebabkan iklim menjadi terganggu dan menimbulkan perubahan iklim				
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Nilai jasa ekosistem penyedia pangan rendah seluas 14.450,65 Ha dan penyedia air bersih sangat rendah seluas 21.331,3 Ha. Pada lahan tersebut kurang mendukung kegiatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.				
KEHATI		Kondisi bentang lahan dengan tingkat kesuburan rendah, dan adanya kemungkinan aktivitas pembukaan lahan untuk kawasan pertanian menyebabkan sangat rendahnya jasa ekosistem pendukung biodiversitas pada lahan pertanian seluas 42.477,82 Ha.				
Keterangan		Memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko tersebut.				

Tabel 4.26

Analisis Pengaruh Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri

Indikasi Program		8. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri
Muatan Pengaruh	Jasa Ekosistem	Dari 9 kawasan Industri yang akan dibangun di Provinsi Lampung, masih terdapat 6 kawasan industri yang bersifat indikatif. Sehingga overlay kawasan industri tersebut tidak dilakukan karena dapat terjadinya pergeseran pemanfaatan ruang kedepannya jika lokasi industri sudah ditetapkan.
	Daya Dukung LH	
	Resiko Bencana Alam	
	Adaptasi terhadap	

	perubahan iklim	menyebabkan pencemaran udara. Industri merupakan penyumbang emisi yang cukup besar dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim yang rendah menimbulkan gangguan perubahan iklim semakin meningkat.
	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Tidak terlalu signifikan mempengaruhi kualitas sumber daya alam berupa penyediaan air bersih dikarenakan jasa ekosistem penyedia air bersih masih mampu mendukung kegiatan.. Beberapa wilayah dalam kondisi sangat rendah namun masih dapat mendapatkan supply dari wilayah lainnya.
	KEHATI	Rencana pengembangan kawasan industri akan menimbulkan pembukaan lahan pada kawasan-kawasan produktif. Hal ini dapat mengganggu berkurangnya ketersediaan lahan yang cukup di Provinsi Lampung sementara itu kesuburan lahan yang rendah menyebabkan terganggunya keanekaragaman hayati.

Tabel 4.27

Analisis Pengaruh Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung

Indikasi Program		9. Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung		
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Tinggi	79.057,21 Ha	
		Sangat Tinggi	40.523,29 Ha	
	JE Penyedia Pangan	Tinggi	30.681,20 Ha	
		Sangat Tinggi	73.679,26 Ha	
	JE Penyedia Air Bersih	Tinggi	48.040,08 Ha	
		Sangat Tinggi	4.246,01 Ha	
	JE Biodiversitas	Tinggi	7.517,32 Ha	
		Sangat Tinggi	3.217,33 Ha	
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	33.780,31 Ha	
		Rendah	78.771,94 Ha	
	Daya Dukung LH		Terdapat wilayah limit pada Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.	
	Adaptasi terhadap perubahan iklim		Mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah. Aktivitas kawasan metropolitan akan meningkatkan pergerakan, kendaraan semakin meningkat, polusi meningkat serta alih fungsi lahan semakin tinggi.	
	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Pada wilayah yang memiliki nilai jasa ekosistem penyediaan air bersih, pangan, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dapat terganggu oleh adanya pembangunan perkotaan.	
	KEHATI		Pada lahan seluas 7.517,32 yang memiliki jasa ekosistem pendukung biodiversitas sangat tinggi, akan terganggu keberadaan kekayaan keanekaragamahayatinya oleh pembangunan perkotaan.	
Keterangan		Memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi karena merupakan kawasan perkotaan yang akan diprediksikan memiliki pembangunan yang intensif, terutama pada kota inti (Kota Bandar Lampung) yang lahan permukimannya akan melampaui daya tampungnya.		

Tabel 4.28

Analisis Pengaruh Dukungan Bumi Agribisnis

Indikasi Program		10. Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan
Muatan Pengaruh	Jasa Ekosistem	Berdasarkan hasil penapisan isu, bumi agribisnis merupakan program pembangunan kawasan pertanian dan perkebunan provinsi lampung kedepannya. Dan bumi agribisnis tidak terdapat lokasi kewasannya.
	Daya Dukung LH	
	Resiko Bencana Alam	

	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah dan rendah di lokasi pertanian Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah . Rentan terhadap perubahan iklim dikarenakan kondisi biodiversitas yang rendah, pembukaan lahan sehingga menyebabkan rendahnya produksi oksigen ke udara dan rendahnya untuk menyerap CO2 serta daya serap air yang rendah. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat serta adanya pencemaran menyebabkan iklim menjadi terganggu dan menimbulkan perubahan iklim
	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Nilai jasa ekosistem penyedia pangan rendah seluas 14.450,65 Ha dan penyedia air bersih sangat rendah seluas 21.331,3 Ha. Pada lahan tersebut kurang mendukung kegiatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
	KEHATI	Kondisi bentang lahan dengan tingkat kesuburan rendah, dan adanya kemungkinan aktivitas pembukaan lahan untuk kawasan pertanian menyebabkan sangat rendahnya jasa ekosistem pendukung biodiversitas pada lahan pertanian seluas 42.477,82 Ha.
Keterangan		Tidak memerlukan alternatif dan rekomendasi.

Tabel 4.29

Analisis Pengaruh Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Indikasi Program		11. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Tinggi	23	
		Sangat Tinggi	15	
	JE Penyedia Pangan	Tinggi	12	
		Sangat Tinggi	11	
	JE Penyedia Air Bersih	Tinggi	2	
		Sangat Tinggi	6	
	JE Biodiversitas	Tinggi	7	
		Sangat Tinggi	8	
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	10	
		Rendah	12	
	Daya Dukung LH		Terdapat 15 wisata alam yang berada pada wilayah limit, di antaranya pada Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat dan Lampung Timur	
	Resiko Tanah Longsor	Tinggi	1. Wisata Alam Gunung Rajabasa, Lampung Selatan 2. Wisata Alam Pegunungan Penyambungan Hill	
Sangat Tinggi		Air Terjun Talang Ogan, Pulau Panggung Tanggamus		
Resiko Banjir Bandang	Tinggi	Air Terjun Curup Tujuh, Selagalingga Lampung Tengah		
	Sangat Tinggi	Air Terjun Putri Malu, Banjir Way Kanan		
Rentan Banjir	Tinggi	-		
	Sangat Tinggi	1. Makam Raden Intan II, Penengahan Lampung Selatan 2. Air Terjun Way Peros, Kalianda Lampung Selatan 3. Makam Al Habib Ali Bin Alwi Al Idrus, Kalianda Lampung Selatan 4. Museum Nasional Ketransmigrasian, Gedong Tataan Pesawaran 5. Gou Maria Padang Bulan, Pringsewu 6. Air Panas Natar, Lampung Selatan 7. Wisata Pegunungan Helling, Lampung Barat 8. Candi Cakat Raya, Menggala Tulang Bawang		
Adaptasi terhadap perubahan iklim		Mempengaruhi perubahan iklim dikarenakan jasa ekosistem pendukung kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah		

Indikasi Program		11. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		dan rendah di lokasi pariwisata Way Kanan, Lampung Barat dan Lampung Selatan. Rentan terhadap perubahan iklim akibat meningkatnya suhu di udara akibat aktivitas di kawasan Pariwisata terutama restoran dan hotel selain itu kondisi biodiversitas yang rendah menyebabkan CO2 semakin meningkat di udara dan menimbulkan perubahan iklim.
		Rencana pengembangan kawasan pariwisata akan meningkatkan banyak kegiatan seperti hotel, resort, cottage, restoran dan lainnya. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan kebutuhan air yang meningkat, pangan meningkat. Selain itu rencana pengembangan kawasan pariwisata membutuhkan lahan-lahan untuk pembangunan. Hal ini akan mengurangi ketersediaan lahan produktif sebagai penyedia jasa pemurnian air dan juga memungkinkan alih fungsi lahan pertanian sebagai jasa penyedia pangan.
	KEHATI	Terdapat 15 wisata alam yang mempunyai jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang tinggi dan sangat tinggi.
Keterangan		Memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko bencana longsor yang tinggi

Tabel 4.30

Analisis Pengaruh Pengembangan Bandar Udara

Indikasi Program		12. Pengembangan Bandar Udara		
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Tinggi	1. Bandara M. Taufiq Kiemas 2. Bandara TNI AD Gatot Subroto	
		Sangat Tinggi	1. Bandara PT. Nusantara Tropical Fruit 2. Bandara PT. Gula Putih Mataram	
		Sangat Tinggi	Bandara TNI AD Gatot Subroto	
	JE Penyedia Air Bersih	Tinggi	1. Bandara PT. Nusantara Tropical Fruit 2. Bandara PT. Gula Putih Mataram	
		Rendah	1. Bandara Radin Inten II 2. Bandara TNI AU Astra Ksetra	
	Daya Dukung LH		7 pengembangan Bandara yang terdapat di Provinsi Lampung berada di wilayah potensial, sedangkan Bandara Tambling berada pada wilayah limit.	
	Resiko Cuaca Ekstrem	Tinggi	Bandara Tambling	
		Sangat Tinggi	1. Bandar M. Taufiq Kiemas, Pesisir Barat 2. Bandara Radin Inten II 3. Bandara TNI AU Astra Ksetra	
	Resiko Gempa Bumi	Tinggi	Bandara TNI AU Astra Ksetra	
		Sangat Tinggi	1. Bandara M. Taufiq Kiemas 2. Bandara Tambling 3. Bandara Radin Inten II	
	Adaptasi terhadap perubahan iklim		Tidak signifikan berpengaruh terhadap perubahan iklim.	
	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Tidak signifikan berpengaruh terhadap sumber daya alam.	
KEHATI		Tidak signifikan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati.		
Keterangan		Memerlukan rekomendasi sebagai upaya preventif terhadap resiko cuaca ekstrem yang tinggi, guna mendukung kelancaran kegiatan operasional bandara.		

Tabel 4.31

Analisis Pengaruh Rencana Pengembangan *Double Track* dan *Shortcut*

Indikasi Program		13. Rencana pengembangan <i>double track</i> Rejosari - Perbatasan Sumatera Selatan	shortcut Rejosari - Tarahan	
Muatan Pengaruh	JE Tata Aliran Air Dan Banjir	Tinggi	91,57 Km	12,69 Km
		Sangat Tinggi	13,77 Km	10,45 Km
	JE Penyedia Pangan	Tinggi	-	3,14 Km
		Sangat Tinggi	72,76 Km	20,47 Km
	JE Penyedia Air Bersih	Tinggi	13,77 Km	10,55 Km
		Sangat Tinggi	-	-
	JE Biodiversitas	Tinggi	-	-
		Sangat Tinggi	-	-
	JE Pencegahan & Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	-	1,95 Km
		Rendah	60,75 Km	10,60 Km
	Daya Dukung LH		Berlokasi pada wilayah kendala sepanjang 6,45 km	Berlokasi pada wilayah kendala sepanjang 3,14 km
	Resiko Banjir Bandang	Tinggi	0,76 Km	-
		Sangat Tinggi	1,26 Km	-
	Rentan Banjir	Tinggi	-	-
		Sangat Tinggi	27,34 Km	14,62 Km
	Adaptasi terhadap perubahan iklim		Emisi gas CO2 tidak terlalu besar sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca.	
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		Pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kualitas sumber daya alam dikarenakan jasa ekosistem penyedia air bersih, pangan, dan tata aliran air tersedia tinggi untuk mendukung pembangunan.		
KEHATI		Tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, karena tidak terletak pada wilayah yang memiliki jasa ekosistem biodiversitas tinggi dan sangat tinggi.		
Keterangan		Perlu rekomendasi untuk menghadapi kondisi jasa ekosistem penyedia air bersih, pangan, dan tata aliran air yang tinggi.		

4.12 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Lampung

Air baku air minum yang dimaksud di sini adalah air baku untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari yang memenuhi syarat baku sehat untuk diminum, sementara air baku industri adalah air baku untuk mendukung kawasan industri yang ada dalam wilayah provinsi. Proyeksi kebutuhan air baku air minum berdasarkan jumlah penduduk yang mengkonsumsi air minum dari PDAM sampai tahun 2037. Konsumsi air minum berbeda ditinjau dari jenis pelayanan. Secara garis besar pelayanan dapat dibagi atas pelayanan Domestik dan Non Domestik. Jenis pelayanan domestik adalah pelayanan untuk rumah tangga baik berupa sambungan langsung maupun kran umum, sedangkan yang non domestik adalah pelayanan untuk instansi pemerintah, kantor dan niaga.

Perhitungan kebutuhan air baku industri didasarkan pada luas kawasan industri yang akan dikembangkan hingga tahun 2037. Dengan asumsi kebutuhan air baku industri untuk tiap jenis industri adalah sama, maka dapat diidentifikasi kebutuhan air baku industri.

Adapun asumsi perhitungan kebutuhan air bersih di Provinsi Lampung berdasarkan Standar Kebutuhan Air Menurut Ditjen Cipta Karya (2000), untuk kebutuhan penduduk (kebutuhan domestik), diasumsikan sebesar 170 liter/orang/hari. Untuk kebutuhan non-domestik, yaitu kebutuhan untuk fasilitas umum sebesar 15% dari kebutuhan domestik, untuk perkantoran sebesar 5% dari kebutuhan domestik dan kebutuhan untuk komersial sebesar 20% dari kebutuhan domestik dan untuk industri yaitu 10% dari kebutuhan domestik. Asumsi untuk kebutuhan Hidran adalah sebesar 10% dari kebutuhan air total (kebutuhan air domestik ditambah dengan kebutuhan air non-domestik). Untuk kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH), asumsi adalah 5% dari kebutuhan air total. Sedangkan untuk kemungkinan adanya kebocoran, diasumsikan sebesar 10% dari kebutuhan air total. Berikut di bawah ini tabel kebutuhan air bersih Provinsi Lampung.

Tabel 4.32
Kebutuhan Air Bersih Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2037

Tahun	Jumlah Penduduk	Domestik	Kebutuhan air (Liter/ Jiwa/ Hari)				Total Kebutuhan (Domestik+ Non Domestik)	Hidran Umum	RTH	Total Kebutuhan Air Bersih (Liter/Hari)
			Non Domestik							
			Fasilitas Umum	Perkantoran	Komersial	Industri				
2017	8.165.414	1.388.120.308	208.218.046	694.060.154	277.624.062	138.812.031	2.706.834.601	270.683.460	1.353.417.301	2.977.518.062
2022	8.643.480	1.469.391.543	220.408.732	734.695.772	293.878.309	146.939.154	2.865.313.510	286.531.351	1.432.656.755	3.151.844.861
2027	9.152.412	1.555.909.998	233.386.500	777.954.999	311.182.000	155.591.000	3.034.024.496	303.402.450	1.517.012.248	3.337.426.946
2032	9.694.412	1.648.049.981	247.207.497	824.024.990	329.609.996	164.804.998	3.213.697.463	321.369.746	1.606.848.731	3.535.067.209
2037	10.271.854	1.746.215.130	261.932.269	873.107.565	349.243.026	174.621.513	3.405.119.503	340.511.950	1.702.559.752	3.745.631.454

Dengan total kebutuhan air sebesar pada Tabel di atas, terdapat rencana pemenuhan kebutuhan jaringan air (supply) untuk memenuhinya. Rencana pemenuhan kebutuhan jaringan air baku, berupa pengembangan waduk, bendungan, dan embung dalam rangka penyediaan air baku. Pengembangan sistem jaringan air baku, meliputi:

- 1) Embung Selagai Lingga, Lembu Kibanga, Suban, Gayau Sakti, Ulu Tuling, Krupuk, Datar Lebuai, Jati Agung, Banjarejo, Penyamdingan, Haduyung Ratu, Gunung Kramat, Negeri Galihrejo, Tanjungsari, Way Tuba, Sinar Gading, Tanjung tiga, Giri Harjo, Sumber Agung, Bina Buana Karya, Gunung Batin Baru, Purwodadi Dalam, Sukamaju, Tanjung rejo, Padang Cahaya, Batu Kebayan, Balai Kencana, Bangun Mulyo, Bandar Surabaya, Dusun Tanjung Mas, Pakuan Aji, Way Hui, Tejomatini, Branti Karya, Baru Ranji, dan Sumur Puteri.
- 2) Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Besai, Bendungan Way Tatayan, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.

- 3) Pengembangan Waduk Sukoharjo (Way Sekampung) di Kabupaten Pringsewu, Waduk Segalamider di Kabupaten Lampung Tengah dan Waduk Sukaraja III (Marga III) di Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.754 Ha.
- 4) Pembangunan SPAM Regional dengan cakupan pelayanan Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

4.13 Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil berbagai produk pertanian serta memiliki keunggulan di antaranya adalah sebagai sentra padi peringkat 7 Nasional serta memiliki surplus padi sebesar 841 ribu ton. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan peruntukan pertanian hingga tahun 2037 adalah 6.351,90 km². Beberapa komoditas yang memiliki produktivitas yang dapat dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Lampung adalah tanaman padi, ubi kayu, dan jagung. Lahan pertanian tanaman pangan yang ada diupayakan dipertahankan keberadaannya dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah dicapai sebelumnya. Lokasi pertanian lahan basah di Provinsi Lampung saat ini cukup tersebar diseluruh wilayah. Akan tetapi secara spesifik arahan untuk pertanian lahan basah dengan produksi komoditasnya tanaman padi diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung, kecuali Kota Bandar Lampung. Pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditas unggulan ubi kayu dan jagung, diupayakan untuk dipertahankan, terutama untuk mengembangkan pertanian kerakyatan. Pengembangan pertanian lahan kering selanjutnya diarahkan diseluruh kabupaten pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan yang cukup sesuai, kecuali pada Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus. Rekapitulasi program/kegiatan pengembangan cetak sawah (APBN) pada tahun 2014-2016 di Provinsi Lampung dapat dilihat secara lebih jelas pada berikut.

Tabel 4.33
Rekapitulasi Program/Kegiatan Pengembangan Cetak Sawah (APBN) di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016

Kabupaten	2014	2015	2016	Total
Mesuji	0	2000	5800	7800
Tulang Bawang	150	0	4750	4900
Tulang Bawang Barat	0	0	1000	1000
Lampung Tengah	0	0	445	445
Total	150	2000	11995	14145

Selain terdapat pengembangan cetak sawah, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Lampung, pemerintah juga memiliki rencana penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Luasan LP2B Provinsi Lampung dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 4.34

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kabupaten Lampung Selatan	36.052
2	Kabupaten Pesawaran	8.452
3	Kabupaten Tanggamus	20.643
4	Kabupaten Pringsewu	8.145
5	Kabupaten Lampung Tengah	71.791
6	Kota Metro	1.215
7	Kabupaten Lampung Timur	50.553
8	Kabupaten Mesuji	27.700
9	Kabupaten Tulang Bawang	31.800
10	Kabupaten Tulang Bawang Barat	9.935
11	Kabupaten Lampung Utara	18.870
12	Kabupaten Way Kanan	18.784
13	Kabupaten Lampung Barat	23.895

Sumber: Perda No 17 Tahun 2013

Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung padi nasional telah mengalami surplus/swasembada sejak beberapa tahun terakhir. Rata-rata surplus tersebut adalah 772.519 ton gabah kering giling/tahun. Produksi padi Provinsi Lampung tahun 2013 sebesar 3.218.232 ton gabah kering giling. Target nasional tahun 2019 untuk Provinsi Lampung sebesar 3,9 juta ton gabah kering giling sehingga membutuhkan dukungan perbaikan infrastruktur pertanian, perbaikan irigasi, serta sarana prasarana pertanian lainnya.

4.14 Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Provinsi Lampung

Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan permukiman juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun mendatang sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan permukiman per kabupaten dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk. Menurut Dirjen Cipta Karya, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (5 jiwa) yaitu sebesar 36m². Hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio SL / DL.

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Jika $SL/DL > 1$

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

- Jika $SL/DL = 1$

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.

- Jika $SL/DL < 1$

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

Tabel 4.35
Jumlah Penduduk Per Kabupaten Tahun 2015-2037 (Jiwa) dan Luas Peruntukkan Permukiman (Ha)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Proyeksi						Luas Permukiman (Ha)
	2015	2017	2022	2027	2032	2037	
Lampung Barat	293105	298641	312944	327931	343637	360094	3041.062619
Tanggamus	573904	587644	623451	661440	701743	744503	5906.987978
Lampung Selatan	972579	994290	1050712	1110335	1173342	1239925	15847.92117
Lampung Timur	1008797	1029278	1082317	1138089	1196735	1258404	28369.60893
Lampung Tengah	1239096	1263251	1325719	1391276	1460074	1532275	31134.83017
Lampung Utara	606092	612899	630254	6481	666451	685322	12586.92048
Way Kanan	432914	442753	46834	495407	524037	554322	7557.751555
Tulang Bawang	429515	441364	472438	505699	541301	57941	10585.23983
Pesawaran	426389	436339	46224	489679	518747	549541	5376.909686
Piringsweu	386891	394589	414512	435441	457426	480521	5360.470845
Mesuji	195682	19851	20576	213275	221064	229138	7389.701777
Tulang Bawang Barat	264712	269552	282042	29511	308784	323092	5717.690766
Pesisir Barat	14989	15287	16059	16870	17722	18616	1582.887209
Kota							
Bandar Lampung	979287	1017652	1120269	1233234	1357590	1494486	7562.183306
Metro	158415	163364	176423	190527	205757	222205	2828.03246
Lampung	8117268	8165414	864348	9152412	9694412	10271854	150848.1988

Tabel 4.36
Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2015-2037 (Ha)

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Ruang					
	2015	2017	2022	2027	2032	2037

DOKUMEN

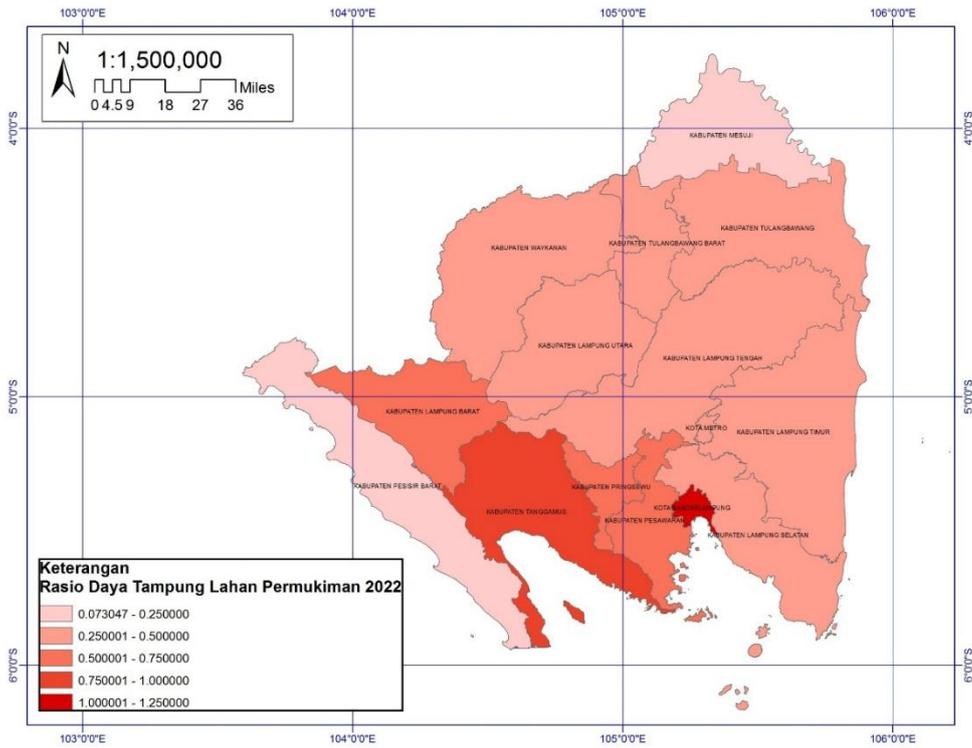
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009-2029

Lampung Barat	2110.356	2150.2152	2253.1968	2361.103	2474.186	2592.677
Tanggamus	4132.109	4231.0368	4488.8472	4762.368	5052.55	5360.422
Lampung Selatan	7002.569	7158.888	7565.1264	7994.412	8448.062	8927.46
Lampung Timur	7263.338	7410.8016	7792.6824	8194.241	8616.492	9060.509
Lampung Tengah	8921.491	9095.4072	9545.1768	10017.19	10512.53	11032.38
Lampung Utara	4363.862	4412.8728	4537.8288	46.6632	4798.447	4934.318
Way Kanan	3116.981	3187.8216	337.2048	3566.93	3773.066	3991.118
Tulang Bawang	3092.508	3177.8208	3401.5536	3641.033	3897.367	417.1752
Pesawaran	3070.001	3141.6408	332.8128	3525.689	3734.978	3956.695
Piringsweu	2785.615	2841.0408	2984.4864	3135.175	3293.467	3459.751
Mesuji	1408.91	142.9272	148.1472	1535.58	1591.661	1649.794
Tulang Bawang Barat	1905.926	1940.7744	2030.7024	212.4792	2223.245	2326.262
Pesisir Barat	107.9208	110.0664	115.6248	121.464	127.5984	134.0352
Kota						
Bandar Lampung	7050.866	7327.0944	8065.9368	8879.285	9774.648	10760.3
Metro	1140.588	1176.2208	1270.2456	1371.794	1481.45	1599.876
Lampung	1598488.4	1599367.8	1526176.8	1651066	1940914	1952114

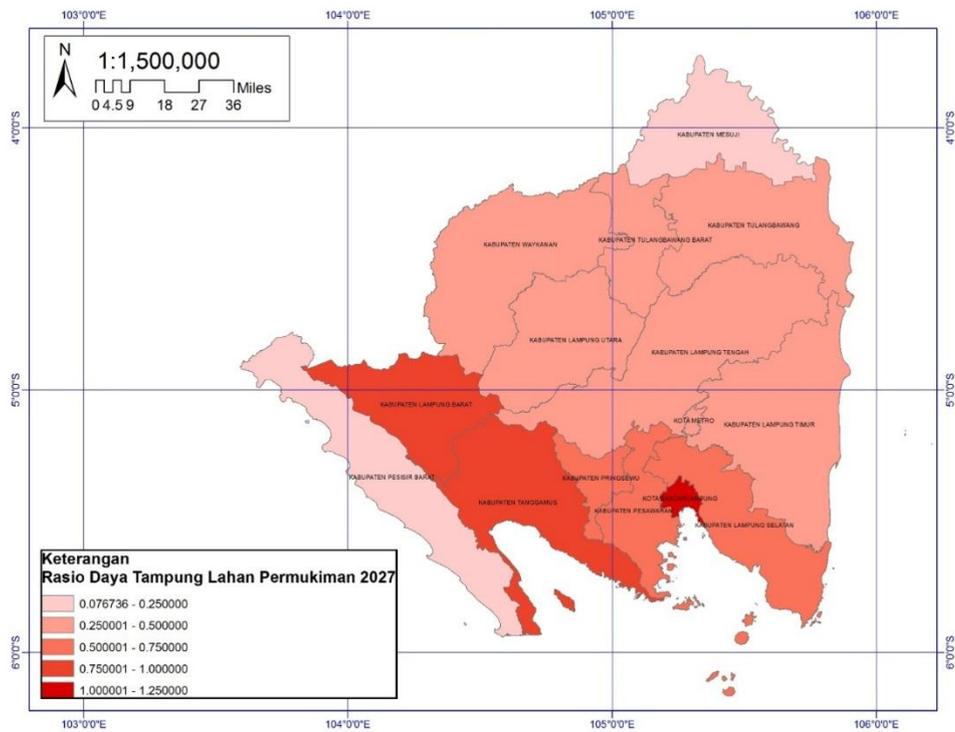
Tabel 4.37
Rasio Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2017-2037

Kabupaten/Kota	2015	2017	2022	2027	2032	2037
Lampung Barat	0.693953	0.70706	0.740924	0.776407	0.813593	0.8525562
Lampung Selatan	0.44186	0.451724	0.477358	0.504445	0.533071	0.5633206
Lampung Timur	0.256025	0.261223	0.274684	0.288839	0.303723	0.3193738
Lampung Timur	0.256025	0.261223	0.274684	0.288839	0.303723	0.3543421
Lampung Utara	0.346698	0.350592	0.360519	0.003707	0.381225	0.3920195
Mesuji	0.190659	0.019341	0.020048	0.2078	0.215389	0.2232558
Pesawaran	0.57096	0.584284	0.061897	0.655709	0.694633	0.7358679
Pesisir Barat	0.06818	0.069535	0.073047	0.076736	0.080611	0.0846777
Piringsweu	0.519659	0.529998	0.556758	0.584869	0.614399	0.6454193
Tanggamus	0.699529	0.716277	0.759922	0.080623	0.855351	0.9074712
Tulang Bawang	0.292153	0.300212	0.321349	0.343973	0.368189	0.039411
Tulang Bawang Barat	0.333338	0.339433	0.355161	0.037162	0.388836	0.4068535
Way Kanan	0.412422	0.421795	0.044617	0.471957	0.499231	0.5280828
Bandar Lampung	0.932385	0.968913	1.066615	1.174169	1.29257	1.4229091
Metro	0.403315	0.415915	0.449162	0.48507	0.523845	0.5657205

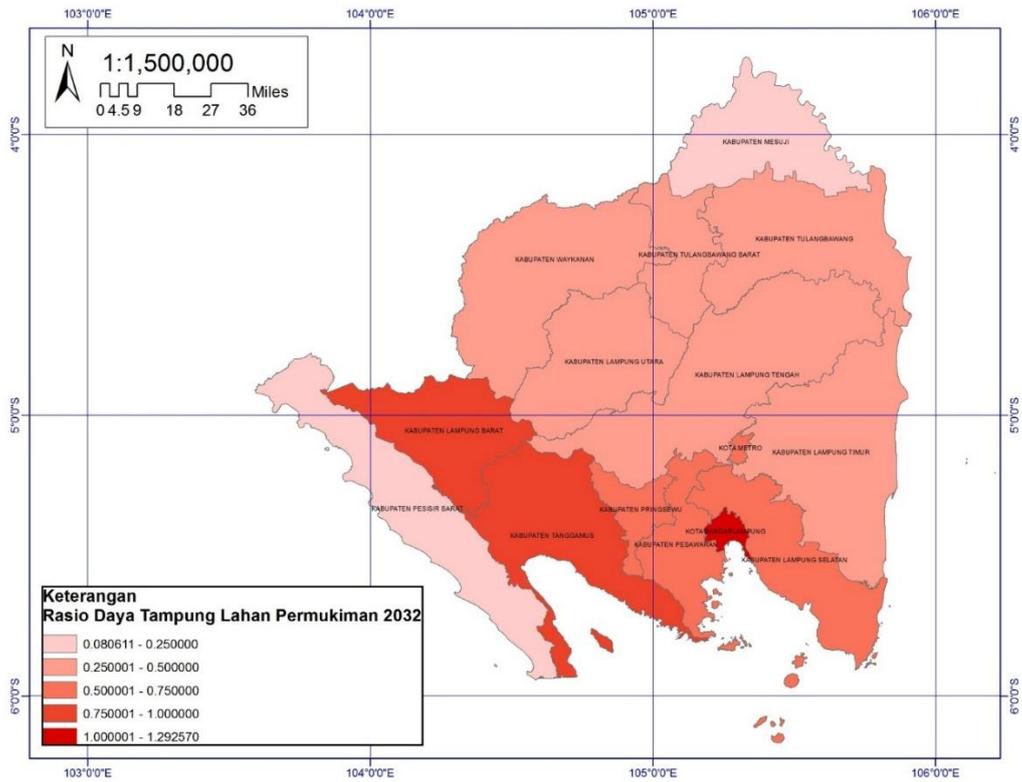
Hasil analisis daya tampung lahan permukiman Provinsi Lampung sesuai dengan tabel 4.12 di atas. Rasio daya tampung lahan permukiman pada Kota Bandar Lampung melebihi kapasitasnya (perbandingannya lebih dari satu). Maka dibutuhkan rekomendasi untuk menangani kelebihan kapasitas daya tampung tersebut. Peta persebaran rasio daya tampung lahan permukiman Provinsi Lampung tahun 2017 – 2037 adalah sebagai berikut.



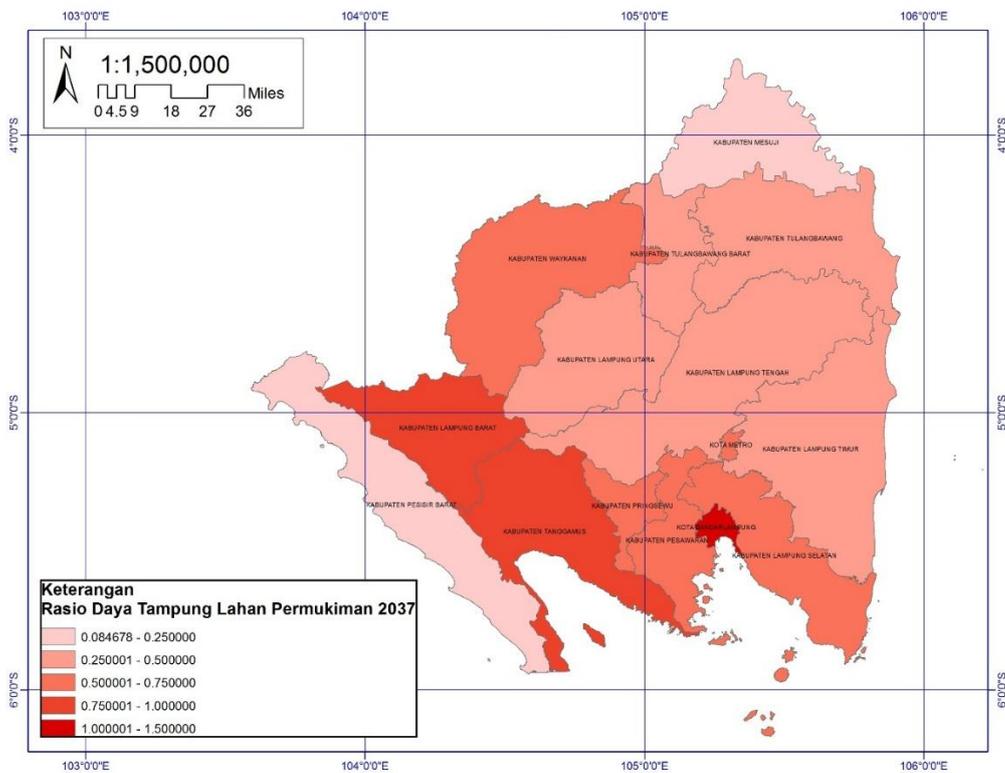
Gambar 4.35 Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022



Gambar 4.36 Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2027



Gambar 4.37 Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2032



Gambar 4.38 Daya Tampung Lahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2037

BAB 5

REKOMENDASI

5.1 Alternatif Tindakan Penanganan

Tahap ini dilakukan perumusan mitigasi berupa usulan-usulan tambahan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian dan/atau alternatif baru untuk Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029. Perumusan alternatif dan rekomendasi dilakukan berdasarkan kepada hasil tahap pengkajian dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Tahap perumusan mitigasi dan alternatif dilakukan sejalan dengan tahap penilaian dampak. Setiap program yang dinilai memiliki dampak negatif terhadap isu strategis kemudian secara langsung diberikan alternatif.

Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan/rencana/program untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029. Berdasarkan beberapa hasil dampak yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya dilakukan beberapa alternatif penyempurnaan yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan proram yang dihasilkan.

Berdasarkan hal tersebut dilakukan beberapa alternatif penyempurnaan yang dilakukan untuk menyempurnakan program – program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung. Hasil alternatif dan rekomendasi secara menyeluruh ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel 5.1
Rumusan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program Provinsi Lampung

No.	Indikasi Program	Keterangan	Rumusan Alternatif	Rekomendasi
1	Pengembangan Pembangkit Listrik	Memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi sebagai bentuk preventif.	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan penerapan teknologi pembangkit listrik yang ramah lingkungan. • Wilayah pada PLTA Semangka 50 MW-2017, PLTP Suoh Sekincau 4x55 MW - 2019/20, PLTU Kalianda, PLTU Lampung, PLTP Ulu Belu, dan PLTA Way Besai berada pada kawasan rawan bencana pada rencana pola ruang RTRWP. 	Sumber energi yang berasal dari mulut tambang, air (sungai), maupun panas bumi tidak memungkinkan untuk direlokasi, mengingat bergantung pada karakteristik alam di wilayah tersebut, misalnya PLTA yang memanfaatkan gravitasi pada wilayah yang memiliki kelerengan >15%. Maka rekomendasi yang dapat diusulkan adalah penerapan teknologi <i>super critical pressure</i> di pembangkit listrik tersebut serta pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan (EBT). Infrastruktur pembangkit listrik yang berada pada wilayah resiko bencana gempa bumi yang sangat tinggi, diperlukan perancangan konstruksi yang tahan gempa.
2	Pembangunan Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> • Pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar telah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 173,26 Ha. • Progress eksisting KRP jalan tol (Agustus, 2017) sudah membebaskan tanah > 84,93% dan pembangunan fisik jalan > 26.63% pada ruas Bakauheni – Terbanggi Besar • Tidak berada pada lahan limit namun tetap memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi untuk menghadapi resiko gempa bumi pada jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 54,06 Km. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perancangan konstruksi/struktur jalan tol yang sesuai dengan SNI dan memperhatikan dampak gempa bumi selama 1000 tahun. • Usulan pembangunan jalan mulai dari pra sampai pasca proyek melalui <i>green road construction</i>. • Penyediaan buffer zone • Perlu mitigation plan sebagai bentuk mitigasi terjadinya genangan maupun banjir pada badan jalan tol yang rentan banjir sangat tinggi. (*) 	Ruas jalan tol yang terdapat pada kawasan lindung diharuskan untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan dengan rasio 1:2, dan untuk mengurangi resiko longsor pada lahan <i>cut and fill</i> kemiringan yang dibuat untuk batu masif memiliki rasio 1:1 dan tanah biasa memiliki rasio 1:2. Selain itu pada ruas jalan utama jalan tol disediakan sempadan jalan selebar 60 meter di masing-masing tepi kanan dan kiri jalan, kemudian dilakukan penanaman pohon (penerapan <i>green roads</i>) untuk mengurangi pencemaran iklim akibat polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan serta menjaga keselamatan masyarakat. Sebagai bentuk mitigasi kerentanan banjir disediakan drainase pada tepi kanan dan kiri jalan, serta perancangan jalan tol di atas 1 m dari ketinggian muka air banjir, serta membatasi alih fungsi lahan di sekitar jalan tol. Jalan tol pada tutupan lahan rawa harus menggunakan teknologi penimbunan dan menyediakan drainase vertikal. (*)

No.	Indikasi Program	Keterangan	Rumusan Alternatif	Rekomendasi
			*mengingat kondisi eksisting trase jalan tol sudah ditetapkan, maka alternatif dan rekomendasi telah disampaikan ke divisi Pengembangan Jalan Tol PT. Utama Karya, dan telah diterapkan pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar serta Terbanggi Besar – Pematang.	
3	Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional	Seluruh rencana pelabuhan di Provinsi Lampung berada pada lahan potensial namun tetap memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi untuk menghadapi tingginya gelombang ekstrim dan tsunami.	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional mulai dari pra sampai pasca proyek melalui <i>green construction</i>. • Penambahan <i>buffer zone</i> dan larangan memperluas mengambil kawasan lindung 	Perlu ditentukan proporsi <i>green space</i> untuk setiap bangunan yang dibangun, hal ini bertujuan agar tetap tersedianya tanaman hijau untuk mempertahankan kualitas sumber daya alam.
4	Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional	Tidak mengganggu keanekaragaman hayati, karena rencana pengembangan TPA regional dialokasikan pada wilayah yang memiliki jasa ekosistem biodiversitas sangat rendah - sedang, namun pada beberapa TPA seperti di Katibung, Lampung Selatan, Kota Agung Barat, Tanggamus dan Batu Ketulis, Lampung Barat memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko bencana gempa bumi yang sangat tinggi.	Sedang dilakukan <i>Feasibility Study</i> (FS) oleh Badan Litbang Provinsi Lampung terkait pola, distribusi, serta kelembagaan pengelolaan sampah TPA Regional untuk Metropolitan Bandar Lampung.	Usulan penerapan metode <i>sanitary landfill</i> .
5	Pembangunan Waduk	Pengembangan Waduk terdapat 2 lokasi yang masuk ke dalam kawasan limit, yaitu Bendung Way Sabu dan Bendungan Way Besai, maka memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan waduk dengan menerapkan <i>green infrastructure</i> serta kegiatan operasional yang memperhatikan aspek lingkungan • Bendung Way Sabu berada di blok pemanfaatan Tahura, namun dalam operasionalnya diharapkan tetap memperhatikan aspek Konservasi. • Bendungan Way Besai diperuntukkan untuk kawasan rawan bencana para rencana pola ruang RTRWP. 	Sumber air (sungai) tidak memungkinkan untuk direlokasi, mengingat bergantung pada karakteristik alam di wilayah tersebut, misalnya bendung maupun bendungan yang memanfaatkan gravitasi pada wilayah yang memiliki kelerengan >15%. Maka rekomendasi yang dapat diusulka adalah penerapan teknologi beton pracetak untuk bendung, pengendali dasar sungai, saluran irigasi dan pintu-pintu air untuk mengoptimalkan pemanfaatan air dan sistem irigasi hemat air.

No.	Indikasi Program	Keterangan	Rumusan Alternatif	Rekomendasi
6	Pengelolaan daerah irigasi nasional dan daerah irigasi provinsi	Profil jasa ekosistem tata aliran air dan banjir sangat rendah 3.823,98 Ha dan resiko kekeringan tinggi 40.310,69 Ha, maka memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur pengendali banjir • Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan hendaknya tidak mengganggu lahan pertanian produktif/beririgasi, untuk menjaga ketahanan pangan nasional 	Diprioritaskan untuk penyediaan air baku bagi pertanian, perikanan dan peternakan, serta pengendalian banjir.
7	Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian	Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir sangat rendah dan resiko kekeringan tinggi maka memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko tersebut.	Kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian perlu diutamakan dengan memperhatikan potensi daya dukung lahan pertanian, di samping itu perlu adanya pengendalian pertanian sawah atau hortikultura pada daerah yang memiliki kondisi lahan kritis karena akan menimbulkan dampak negatif berupa erosi lahan dan longsor.	Diperlukan koordinat LP2B Provinsi Lampung untuk memastikan tidak terjadinya alih fungsi lahan. Lahan tersebut dikembangkan melalui optimasi lahan pangan.
8	Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Dari 9 rencana pengembangan kawasan peruntukan industri, hanya terdapat 3 kawasan yang memiliki koordinat meskipun sifatnya indikatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap industri tidak boleh membuang air limbah ke saluran irigasi. • Pengembangan insentif dan disinsentif terhadap upaya pengelolaan industri ramah lingkungan. 	Perlu penentuan koordinat kawasan industri secara pasti melalui masterplan yang di dalamnya telah memuat rencana pengelolaan kawasan industri.
9	Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko bencana longsor yang tinggi	Pengembangan serta pengelolaan pariwisata harus mementingkan aspek keselamatan serta pelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat.	Perlu ditetapkan rencana pengelolaan terpadu yang dihubungkan dengan pelestarian lingkungan khususnya pada wisata Tahura.
10	Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung	Memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi karena merupakan kawasan perkotaan yang akan diprediksikan memiliki pembangunan yang intensif, terutama pada kota inti (Kota Bandar Lampung) yang lahan permukiman akan melampaui daya tampungnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Masterplan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung; Pembangunan Sarana - Prasarana Berbasis Lingkungan untuk Kawasan Metropolitan Bandar Lampung 	Kawasan permukiman akan diarahkan pada Metropolitan Bandar Lampung meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan, untuk mengurangi <i>overcapacity</i> daya tampung lahan permukiman di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 serta penerapan <i>vertical housing</i> pada pusat kota.

No.	Indikasi Program	Keterangan	Rumusan Alternatif	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan kawasan lindung sebesar 13.8%, Penyiapan RTH Perkotaan, Mempertahankan kawasan konservasi dalam deliniasi Metropolitan 	
11	Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan	Tidak memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi.	Tidak Perlu	Tidak Perlu
12	Pengembangan Bandara	Memerlukan rekomendasi sebagai upaya preventif terhadap resiko cuaca ekstrim dan gempa bumi yang tinggi, guna mendukung kelancaran kegiatan operasional bandara.	Perancangan konstruksi bandara yang tahan terhadap gempa bumi.	Penerapan <i>zoning regulation</i> untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan bandara.
13	Rencana Pengembangan <i>Double Track</i> Rejosari-Perbatasan Sumatera Selatan dan <i>Shortcut</i> Rejosari-Tarahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati namun perlu rekomendasi untuk menghadapi kondisi jasa ekosistem penyedia air bersih, pangan, dan tata aliran air yang tinggi. Trase shortcut Rejosari – Tarahan masih bersifat indikatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan DED konstruksi untuk <i>Shortcut</i> Rejosari – Tarahan. Sinkronisasi rencana reaktifasi antara jalur kereta api Pelabuhan Panjang dengan Rencana <i>Shortcut</i> Rejosari – Tarahan. 	Perlu perancangan shortcut yang menghindari perlintasan sebidang shortcut Rejosari – Tarahan dengan jalan tol serta penyediaan saluran drainase di tepi kanan dan kiri <i>Double Track</i> dan pembangunan terowongan/ <i>tunnel</i> pada trase rel kereta yang berada pada lahan kendala.
14	Integrasi KLHS RTRW Provinsi Lampung ke dalam dokumen perencanaan/kajian untuk Kabupaten/ Kota	Untuk KRP Pengembangan Pembangkit Listrik, Pembangunan Jalan Tol, Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional, Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional, Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian, Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri, Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pariwisata, Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung harus diakomodir pada Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai dengan wilayah administrasi yang dilalui dan terkena dampak adanya KRP tersebut, serta membuat dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.		

BAB 6

INTEGRASI KLHS KE DALAM DOKUMEN RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 - 2029

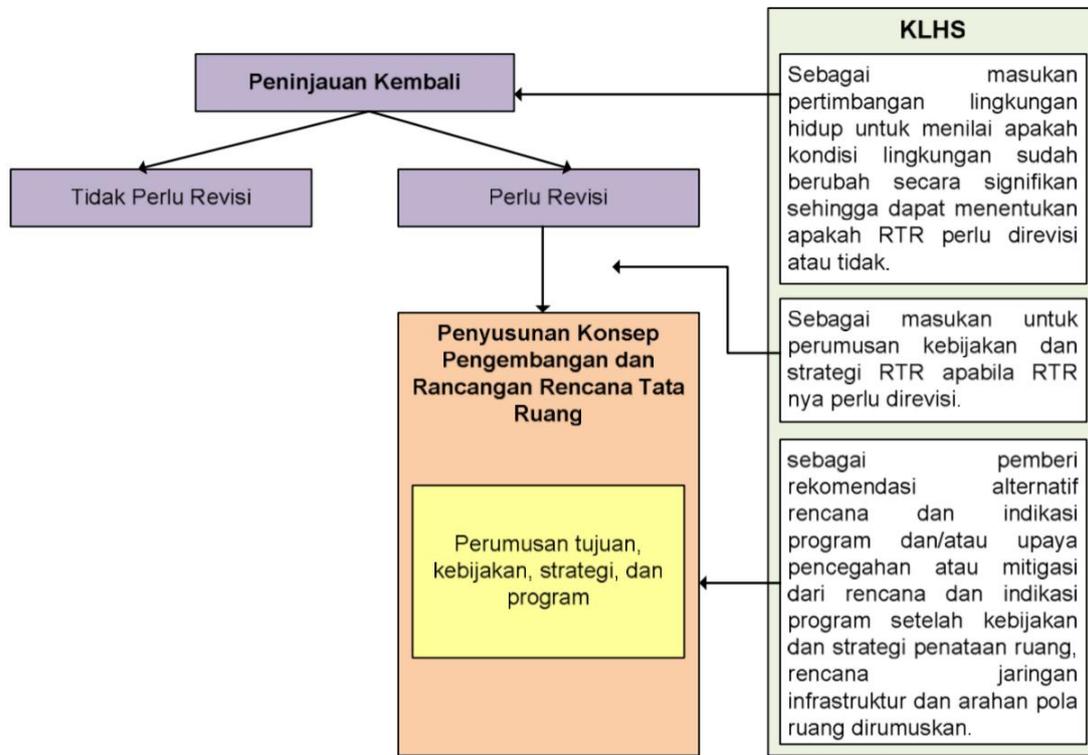
Maksud dan tujuan pengintegrasian pelaksanaan KLHS ke dalam revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, serta meningkatkan kualitas penyusunan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS sendiri adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Kemudian pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah suatu upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, dengan cara: (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan KLHS merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia, yang meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.

RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 telah merevisi rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis yang telah disesuaikan dengan dinamika-dinamika perubahan internal maupun eksternal Provinsi Lampung. Dinamika-dinamika perubahan struktur dan pola ruang yang terjadi selama beberapa tahun di wilayah Provinsi Lampung menyebabkan harus dilakukannya revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029. Adapun tujuan penataan ruang Provinsi Lampung 2009-2029 adalah:

"Terwujudnya Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing".

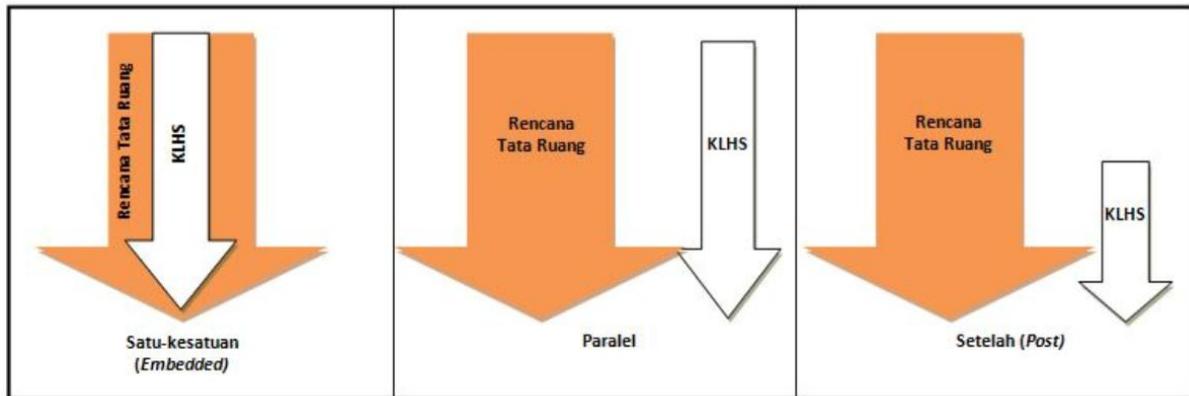
Tujuan penataan ruang Provinsi Lampung mengamanatkan pembangunan berkelanjutan, maka dari itu KLHS merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Provinsi Lampung yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dinamika perubahan eksternal maupun internal yang terjadi di Wilayah Provinsi Lampung menyebabkan Provinsi Lampung melakukan revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 untuk menyesuaikan dengan beberapa perubahan yang terjadi.



Gambar 6.1 Peran KLHS dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rancangan RTRW berisi program-program pembangunan memuat tujuan, kebijakan dan strategis, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan, indikasi program dan arahan pengendalian. Terdapat 3 jenis pendekatan integrasi KLHS kedalam RTRW yang pertama secara paralel yang berarti penyusunan KLHS dan dokumen RTRW dilaksanakan secara bersamaan, yang kedua penyusunan KLHS dilaksanakan sebelum penyusunan dokumen RTRW dan yang ketiga adalah penyusunan KLHS dilaksanakan setelah penyusunan dokumen RTRW. Jenis pendekatan ketiga ini adalah yang dilakukan di Provinsi Lampung.



Gambar 6.2 Pendekatan Pelaksanaan KLHS

Pelaksanaan KLHS dimulai dengan membentuk tim penyusunan dokumen KLHS untuk Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029. Hasil penyelarasan digunakan oleh tim penyusun RTRW untuk menyempurnakan dokumen RTRW.

Integrasi substansi muatan KLHS ke dalam muatan kebijakan, rencana dan/atau program adalah hasil langsung dari integrasi proses penyusunannya. Bentuk dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan KRP adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi kebijakan, rencana, dan/atau program. Oleh sebab itu, teknis pelaksanaannya ditentukan oleh ketentuan cara dan sistematika penulisan serta cara penjaminan kualitas.

Tabel 6.1

Integrasi Hasil KLHS ke Dalam Kebijakan/Rencana dan/atau Program RTRW Provinsi Lampung 2009 -2029

No.	KRP	Keterangan KLHS	Rekomendasi	Integrasi KLHS ke KRP	Penjaminan Kualitas
1	Pengembangan Pembangkit Listrik	Memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi sebagai bentuk preventif.	Sumber energi yang berasal dari mulut tambang, air (sungai), maupun panas bumi tidak memungkinkan untuk direlokasi, mengingat bergantung pada karakteristik alam di wilayah tersebut, misalnya PLTA yang memanfaatkan gravitasi pada wilayah yang memiliki kelerengan >15%. Maka rekomendasi yang dapat diusulkan adalah penerapan teknologi <i>super critical pressure</i> di pembangkit listrik tersebut serta pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan (EBT). Infrastruktur pembangkit listrik yang berada pada wilayah resiko bencana gempa bumi yang sangat tinggi, diperlukan perancangan konstruksi yang tahan gempa.	Untuk pembangkit listrik eksisting sudah diintegrasikan, namun untuk pembangkit listrik yang masih bersifat indikatif akan diintegrasikan ke KRP.	Sudah layak
2	Pembangunan Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> Pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar telah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 173,26 Ha. Progress eksisting KRP jalan tol (Agustus, 2017) sudah membebaskan tanah > 84,93% dan pembangunan fisik jalan > 26.63% pada ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Tidak berada pada lahan limit namun tetap memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi untuk menghadapi resiko gempa bumi pada jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 54,06 Km. 	Ruas jalan tol yang terdapat pada kawasan lindung diharuskan untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan dengan rasio 1:2, dan untuk mengurangi resiko longsor pada lahan <i>cut and fill</i> kemiringan yang dibuat untuk batu masif memiliki rasio 1:1 dan tanah biasa memiliki rasio 1:2. Selain itu pada ruas jalan utama jalan tol disediakan sempadan jalan selebar 60 meter di masing-masing tepi kanan dan kiri jalan, kemudian dilakukan penanaman pohon (penerapan <i>green roads</i>) untuk mengurangi pencemaran iklim akibat polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan serta menjaga keselamatan masyarakat. Sebagai bentuk mitigasi kerentanan banjir disediakan drainase pada tepi kanan dan kiri jalan, serta perancangan jalan tol di atas 1 m dari ketinggian muka air banjir, serta membatasi alih fungsi lahan di sekitar jalan tol. Jalan tol pada tutupan lahan rawa harus menggunakan teknologi penimbunan dan menyediakan drainase vertikal.	Sudah diintegrasikan pada DED jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar serta Terbanggi Besar – Pematang.	Sudah layak

No.	KRP	Keterangan KLHS	Rekomendasi	Integrasi KLHS ke KRP	Penjaminan Kualitas
3	Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional	Seluruh rencana pelabuhan di Provinsi Lampung berada pada lahan potensial namun tetap memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi untuk menghadapi tingginya gelombang ekstrim dan tsunami.	Perlu ditentukan proporsi <i>green space</i> untuk setiap bangunan yang dibangun, hal ini bertujuan agar tetap tersedianya tanaman hijau untuk mempertahankan kualitas sumber daya alam.	Sudah diintegrasikan	Sudah layak
4	Pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional	Tidak mengganggu keanekaragaman hayati, karena rencana pengembangan TPA regional dialokasikan pada wilayah yang memiliki jasa ekosistem biodiversitas sangat rendah - sedang, namun pada beberapa TPA seperti di Katibung, Lampung Selatan, Kota Agung Barat, Tanggamus dan Batu Ketulis, Lampung Barat memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko bencana gempa bumi yang sangat tinggi.	Usulan penerapan metode <i>sanitary landfill</i> .	Akan diintegrasikan ke KRP	Sudah layak
5	Pembangunan Waduk	Pengembangan Waduk terdapat 2 lokasi yang masuk ke dalam kawasan limit, yaitu Bendung Way Sabu dan Bendungan Way Besai, maka memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi	Sumber air (sungai) tidak memungkinkan untuk direlokasi, mengingat bergantung pada karakteristik alam di wilayah tersebut, misalnya bendung maupun bendungan yang memanfaatkan gravitasi pada wilayah yang memiliki kelerengan >15%. Maka rekomendasi yang dapat diusulkan adalah penerapan teknologi beton pracetak untuk bendung, pengendali dasar sungai, saluran irigasi dan pintu-pintu air untuk mengoptimalkan pemanfaatan air dan sistem irigasi hemat air.	Sudah diintegrasikan	Sudah layak
6	Pengelolaan daerah irigasi nasional dan daerah irigasi provinsi	Profil jasa ekosistem tata aliran air dan banjir sangat rendah 3.823,98 Ha dan resiko kekeringan tinggi 40.310,69 Ha, maka memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko tersebut.	Diprioritaskan untuk penyediaan air baku bagi pertanian, perikanan dan peternakan, serta pengendalian banjir.	Sudah diintegrasikan	

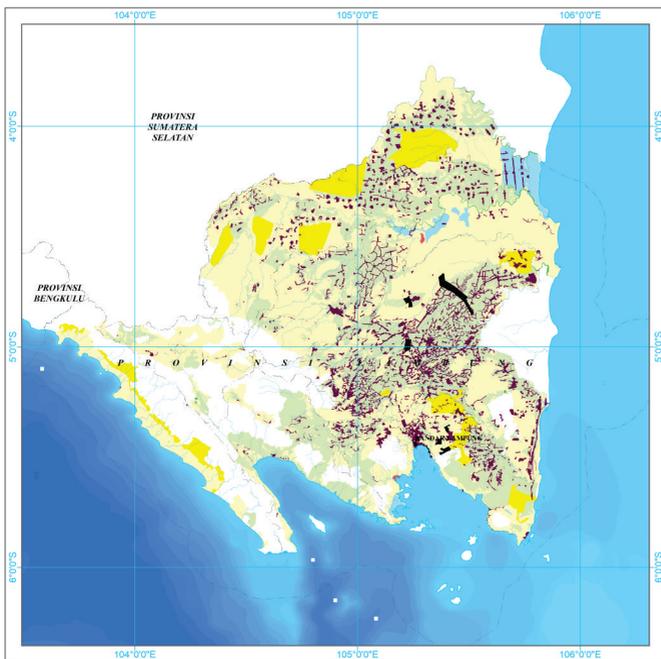
No.	KRP	Keterangan KLHS	Rekomendasi	Integrasi KLHS ke KRP	Penjaminan Kualitas
7	Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukkan Pertanian	Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir sangat rendah dan resiko kekeringan tinggi maka memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko tersebut.	Diperlukan koordinat LP2B Provinsi Lampung untuk memastikan tidak terjadinya alih fungsi lahan. Lahan tersebut dikembangkan melalui optimasi lahan pangan.	Akan diintegrasikan ke KRP	Sudah layak
8	Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Dari 9 rencana pengembangan kawasan peruntukan industri, hanya terdapat 3 kawasan yang memiliki koordinat meskipun sifatnya indikatif.	Perlu penentuan koordinat kawasan industri secara pasti melalui masterplan yang di dalamnya telah memuat rencana pengelolaan kawasan industri.	Akan diintegrasikan ke KRP	Sudah layak
9	Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Memerlukan rekomendasi sebagai bentuk preventif terhadap resiko bencana longsor yang tinggi	Perlu ditetapkan rencana pengelolaan terpadu yang dihubungkan dengan pelestarian lingkungan khususnya pada wisata Tahura.	Akan diintegrasikan ke KRP	Sudah layak
10	Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung	Memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi karena merupakan kawasan perkotaan yang akan diprediksikan memiliki pembangunan yang intensif, terutama pada kota inti (Kota Bandar Lampung) yang lahan permukiman akan melampaui daya tampungnya.	Kawasan permukiman akan diarahkan pada Metropolitan Bandar Lampung meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan, untuk mengurangi <i>overcapacity</i> daya tampung lahan permukiman di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 serta penerapan <i>vertical housing</i> pada pusat kota.	Sudah diintegrasikan	Sudah layak
11	Dukungan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan	Tidak memerlukan rumusan alternatif dan rekomendasi.	Tidak Perlu	Sudah diintegrasikan	Sudah layak
12	Pengembangan Bandara	Memerlukan rekomendasi sebagai upaya preventif terhadap resiko cuaca ekstrim dan gempa bumi yang tinggi, guna mendukung kelancaran kegiatan operasional bandara.	Penerapan <i>zoning regulation</i> untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan bandara.	Akan diintegrasikan ke KRP	Sudah layak
13	Rencana Pengembangan <i>Double Track</i> Rejosari-Perbatasan Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati namun perlu rekomendasi untuk menghadapi kondisi jasa ekosistem 	Perlu perancangan <i>shortcut</i> yang menghindari perlintasan sebidang <i>shortcut</i> Rejosari – Tarahan dengan jalan tol serta penyediaan saluran drainase di tepi kanan dan kiri <i>Double Track</i> dan pembangunan terowongan/ <i>tunnel</i> pada trase rel kereta yang berada pada lahan kendala.	Akan diintegrasikan ke KRP	Sudah layak

No.	KRP	Keterangan KLHS	Rekomendasi	Integrasi KLHS ke KRP	Penjaminan Kualitas
	dan <i>Shortcut</i> Rejosari-Tarahan	penyedia air bersih, pangan, dan tata aliran air yang tinggi. • Trase shortcut Rejosari – Tarahan masih bersifat indikatif.			

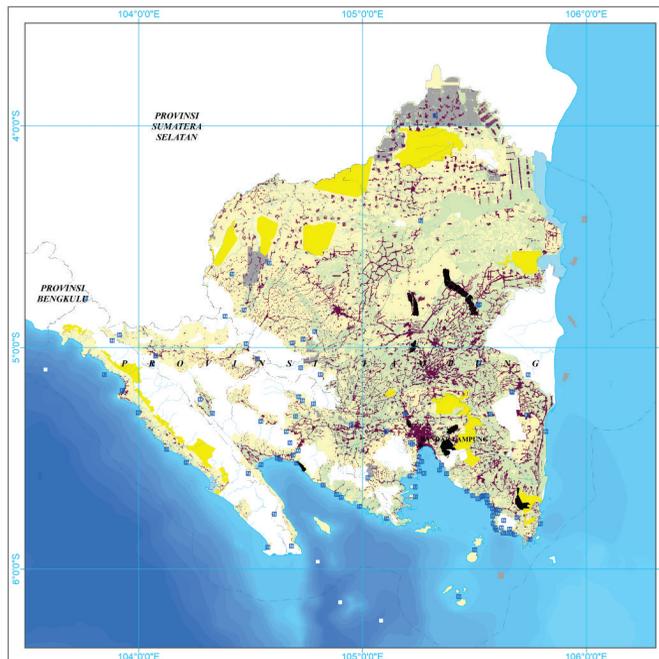
Hasil akhir rumusan alternatif perbaikan serta rekomendasi penyempurnaan mitigasi, dan tindak lanjut di atas diintegrasikan dalam rumusan kebijakan, rencana, dan/atau program pada RTRW Provinsi Lampung. Rencana pola ruang pada RTRW Provinsi Lampung yang disandingkan dengan rencana pola ruang dari hasil KLHS yang diintegrasikan ke dalam KRP RTRW Provinsi Lampung ditampilkan pada gambar berikut.

Perbandingan Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

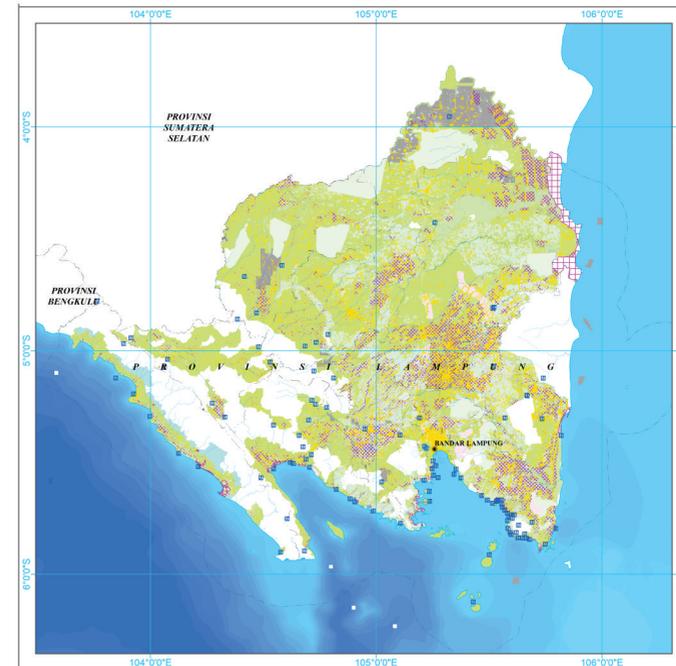
Peta Rencana Pola Ruang
RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
(Sebelum KLHS)



Peta Konsep Rencana Pola Ruang
Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
(Setelah KLHS)



Peta Konsep Rencana Pola Ruang
Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
(Setelah KLHS)
Telah Disesuaikan Dengan PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta



Kawasan Budidaya

-  Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
-  Kawasan Peruntukan Pemukiman
-  Kawasan Peruntukan Industri
-  Kawasan Peruntukan Perikanan
-  Kawasan Peruntukan Pertanian
-  Kawasan Peruntukan Perkebunan
-  Kawasan Peruntukan Pertambangan
-  Kawasan Peruntukan Pariwisata

Keterangan

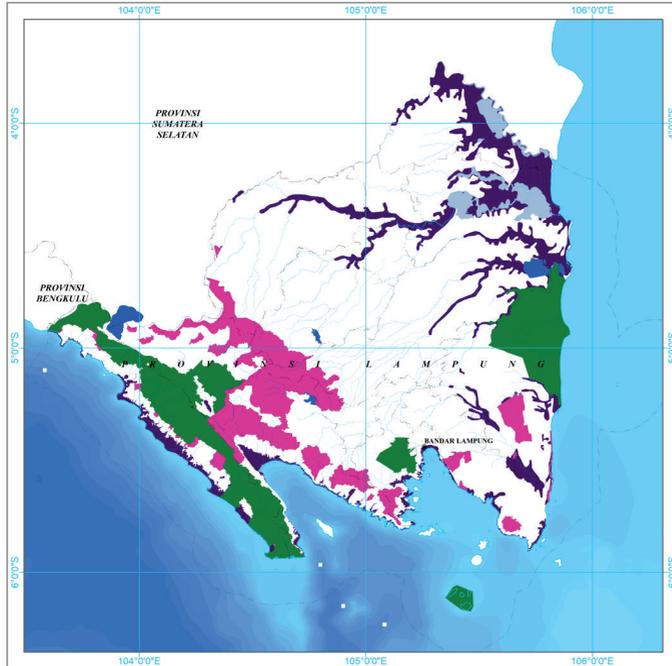
-  Ibukota Provinsi
 -  Sungai
 -  Batas Kabupaten
 -  Garis Pantai
 -  Batas 12 Mil
- Kawasan Budidaya**
-  Lokasi Wisata
 -  Hutan Produksi
 -  Hutan Produksi Terbatas
 -  Permukiman
 -  Kawasan Industri
 -  Perikanan
 -  Sawah
 -  Pertanian Lahan Basah
 -  Pertanian Lahan Kering 2
 -  Pertanian Lahan Kering
 -  Kawasan Pertambangan
 -  Perkebunan

Keterangan

-  Ibukota Provinsi
 -  Sungai
 -  Batas Kabupaten
 -  Garis Pantai
 -  Batas 12 Mil
- Kawasan Budidaya**
-  Hutan Produksi
 -  Hutan Produksi Terbatas
 -  Permukiman
 -  Kawasan Industri
 -  Perikanan
 -  Sawah
 -  Pertanian Lahan Basah
 -  Pertanian Lahan Kering 2
 -  Pertanian Lahan Kering
 -  Kawasan Pertambangan
 -  Perkebunan

Perbandingan Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Sebelum KLHS)



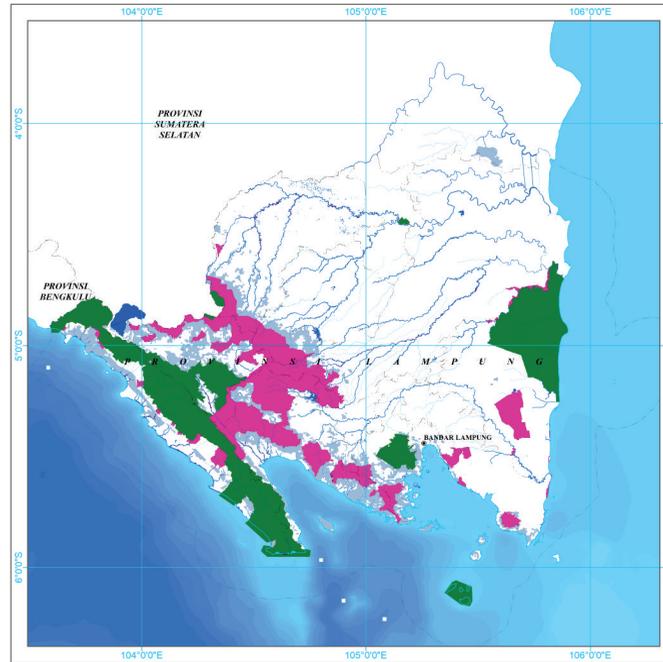
Keterangan

- Ibukota Provinsi
- Sungai
- - - Batas Kabupaten
- Garis Pantai
- - - Batas 12 Mil

Kawasan Lindung

- Hutan Suaka Alam
- Hutan Lindung
- Lindung Bagi Daerah Bawahnya
- Perlindungan Bagi Daerah Setempat
- Rawan Bencana

Peta Konsep Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Setelah KLHS)



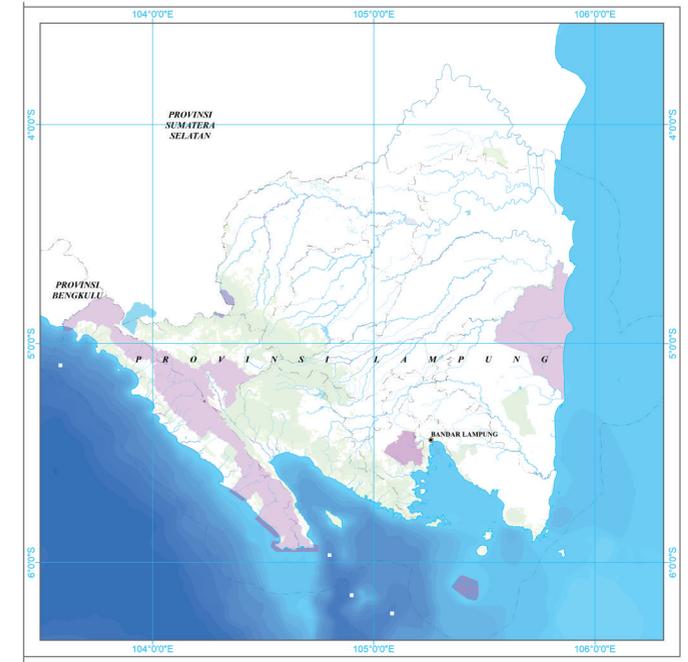
Keterangan

- Ibukota Provinsi
- Sungai
- - - Batas Kabupaten
- Garis Pantai
- - - Batas 12 Mil

Kawasan Lindung

- Cagar Alam
- Cagar Alam Laut
- Suaka Alam/Pelestarian Alam
- Suaka Margasatwa
- Taman Hutan Raya
- Taman Nasional
- Hutan Lindung
- Kawasan Perlindungan Bawahnya
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Resiko Bencana Longsor
- Resiko Bencana Gelombang Ekstrem
- Resiko Bencana Banjir

Peta Konsep Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Setelah KLHS)
Telah Disesuaikan Dengan PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta



Keterangan

- Ibukota Provinsi
- Sungai
- - - Batas Kabupaten
- Garis Pantai
- - - Batas 12 Mil

Kawasan Lindung

- Cagar Alam
- Cagar Alam Laut
- Suaka Alam/Pelestarian Alam
- Suaka Margasatwa
- Taman Hutan Raya
- Taman Nasional
- Hutan Lindung
- Kawasan Perlindungan Bawahnya
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Resiko Bencana Longsor
- Resiko Bencana Gelombang Ekstrem
- Resiko Bencana Banjir